



Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur

Tahun Anggaran 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kita dapat menyelesaikan pekerjaan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur ini dengan baik dan tepat waktu.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu berbagai proses dalam penyusunan naskah laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap semoga naskah laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, berguna sebagai panduan yang komprehensif bagi pembangunan daerah serta sebagai acuan yang baik untuk tahap selanjutnya.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam dokumen ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Samarinda,

2021



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	3
1.2.1	Maksud	3
1.2.2	Tujuan	3
1.3	Sasaran	4
1.4	Ruang Lingkup Kegiatan	4
1.5	Dasar Hukum	6
1.6	Sistematika Penulisan Laporan.....	7

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1	Administrasi Provinsi Kalimantan Timur	9
2.2	Kondisi Fisik Provinsi Kalimantan Timur.....	12
2.2.1	Topografi dan Kelerengn Provinsi Kalimantan Timur.....	12
2.2.2	Litologi Provinsi Kalimantan Timur.....	15
2.2.3	Hidrologi Provinsi Kalimantan Timur.....	17
2.2.4	Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur	17
2.2.5	Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur.....	21
2.3	Kondisi Non Fisik Provinsi Kalimantan Timur	23
2.3.1	Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur	23
2.3.2	Ketersediaan Sarana Provinsi Kalimantan Timur	27
2.3.3	Ketersediaan Prasarana Provinsi Kalimantan Timur	30
2.3.5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur	38
2.3.6	Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur	41

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN

3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur	49
3.1.1	Visi Daerah.....	50
3.1.2	Misi Daerah	50
3.2	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun	58
3.2.1	Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur	58
3.2.2	Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur.....	82
3.3	Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur	88
3.3.1	Visi Penanaman Modal.....	88
3.3.2	Misi Penanaman Modal.....	88

BAB IV ANALISA POTENSI USAHA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1	Kajian Dasar Hukum Pelaksanaan Penanaman Modal.....	109
4.1.1	Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	109
4.1.2	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.....	114
4.2	Analisis Kebijakan	118
4.2.1	RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	118
4.2.2	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	122
4.2.3	Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur	131
4.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Timur	140
4.3.1	SKL Morfologi	141
4.3.2	SKL Kemudahan Dikerjakan.....	144
4.3.3	SKL Kestabilan Lereng.....	147
4.3.4	SKL Kestabilan Pondasi	149
4.3.5	SKL Ketersediaan Air.....	151
4.3.6	SKL Drainase	153
4.3.7	SKL Erosi.....	155
4.3.8	SKL Pembuangan Limbah	157

4.3.9	SKL Potensi Bencana Alam	160
4.3.10	Kemampuan Lahan.....	162
4.4	Analisis Potensi Unggulan	164
4.4.1	PDB Nasional	164
4.4.2	PDRB Kalimantan Timur	165
4.4.3	Analisis Location Quotient (LQ).....	171
4.4.4	Analisis Shift Share	174
4.4.5	Analisis Sektor Ekonomi Unggulan (Analisis LQ dan Analisis Shift Share) ..	179
4.5	Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala Pengembangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur	181

BAB V ORGANISASI DAN JADWAL KEGIATAN

5.1	Kabupaten Paser.....	184
5.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Paser.....	184
5.1.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Paser	196
5.2.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Paser	199
5.2	Kabupaten Kutai Barat	202
5.2.1	Gambaran Umum Kabupaten Kutai Barat.....	202
5.2.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Barat	211
5.2.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Barat ..	216
5.3	Kabupaten Kutai Kartanegara	219
5.3.1	Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	219
5.3.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara	231
5.3.3	Kelayakan Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara	238
5.4	Kabupaten Kutai Timur.....	242
5.4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur.....	242
5.4.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Timur	254
5.4.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Timur..	259
5.5	Kabupaten Berau.....	262
5.5.1	Gambaran Umum Kabupaten Berau	262

5.5.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Berau.....	271
5.5.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Berau.....	275
5.6	Kabupaten Penajam Paser Utara	278
5.6.1	Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara	278
5.6.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara	286
5.6.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	293
5.7	Kabupaten Mahakam Ulu.....	297
5.7.1	Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Ulu.....	297
5.7.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu	305
5.7.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu	307
5.8	Kota Balikpapan.....	311
5.8.1	Gambaran Umum Kota Balikpapan.....	311
5.8.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan	322
5.8.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Balikpapan.....	327
5.9	Kota Samarinda	330
5.9.1	Gambaran Umum Kota Samarinda	330
5.9.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Samarinda	340
5.9.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Samarinda	344
5.10	Kota Bontang.....	347
5.10.1	Gambaran Umum Kota Bontang.....	347
5.10.2	Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Bontang.....	356
5.10.3	Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Bontang.....	359

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	362
6.2	Rekomendasi	366

DAFTAR TABEL



Tabel II. 1 Luas Wilayah Per-Kabupaten/Kota	10
Tabel II. 2 Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	12
Tabel II. 3 Kondisi Topografi Provinsi Kalimantan Timur	13
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021	23
Tabel II. 5 Klasifikasi Tingkat Kepadatan Penduduk	24
Tabel II. 6 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur	25
Tabel II. 7 Sarana Kesehatan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	27
Tabel II. 8 Sarana Pendidikan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	28
Tabel II. 9 Sarana Peribadatan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	29
Tabel II. 10 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	30
Tabel II. 11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	31
Tabel II. 12 Jumlah dan Panjang Jembatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	31
Tabel II. 13 Persentase Rumah Tangga Dalam Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	32
Tabel II. 14 Persentase Rumah Tangga Dalam Penggunaan Fasilitas Air Bersih di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	33
Tabel II. 15 Persentase Sumber Listrik di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ...	34
Tabel II. 16 Banyaknya Desa Penerima Sinyal Internet Telepon Saluler di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	35
Tabel II. 17 Banyaknya Desa Penerima Sinyal Internet Telepon Saluler di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	35
Tabel II. 18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi	36
Tabel II. 19 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019	38

Tabel II. 20 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020	41
Tabel II. 21 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020.....	43
Tabel II. 22 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020	45
Tabel II. 23 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.....	47
Tabel II. 24 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	47
Tabel III. 1 Rincian Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Timur	58
Tabel III. 2 Rincian Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kalimantan Timur	59
Tabel III. 3 Rincian Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Kalimantan Timur	60
Tabel III. 4 Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Kalimantan Timur.....	60
Tabel III. 5 Rincian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Provinsi Kalimantan Timur	62
Tabel III. 6 Rincian Jaringan Jalan Arteri Primer di Provinsi Kalimantan Timur.....	64
Tabel III. 7 Jalan Kolektor Primer 1 (K-1) di Provinsi Kalimantan Timur.....	65
Tabel III. 8 Jalan Kolektor Primer 2 (K-2) di Provinsi Kalimantan Timur.....	66
Tabel III. 9 Jalan Kolektor Primer 3 (K-3) di Provinsi Kalimantan Timur.....	67
Tabel III. 10 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Provinsi Kalimantan Timur ..	67
Tabel III. 11 Terminal Penumpang Nasional (Tipe A) di Provinsi Kalimantan Timur .	68
Tabel III. 12 Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B) di Provinsi Kalimantan Timur ..	68
Tabel III. 13 Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Sungai dan Danau di Provinsi Kalimantan Timur	69
Tabel III. 14 Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Lintas Penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	70
Tabel III. 15 Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur.....	70
Tabel III. 16 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi Kalimantan Timur	73

Tabel III. 17 Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Timur	75
Tabel III. 18 Pembangunan PLTA Potensial di Provinsi Kalimantan Timur	76
Tabel III. 19 Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur	76
Tabel III. 20 Rincian Gardu Induk (GI) di Provinsi Kalimantan Timur	76
Tabel III. 21 Wilayah Sungai di Provinsi Kalimantan Timur	78
Tabel III. 22 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur	79
Tabel III. 23 Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.....	84
Tabel IV. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan misi 2 dan misi 3 Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023	118
Tabel IV. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036	123
Tabel IV. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur	131
Tabel IV. 4 Matriks Keterikatan Kebijakan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur	135
Tabel IV. 5 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi Provinsi Kalimantan Timur	142
Tabel IV. 6 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan Provinsi Kalimantan Timur	144
Tabel IV. 7 SKL Kestabilan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	147
Tabel IV. 8 SKL Kestabilan Pondasi Provinsi Kalimantan Timur	149
Tabel IV. 9 SKL Ketersediaan Air Provinsi Kalimantan Timur	151
Tabel IV. 10 SKL Drainase Provinsi Kalimantan Timur	153
Tabel IV. 11 SKL Erosi Provinsi Kalimantan Timur	155
Tabel IV. 12 SKL Pembuangan Limbah Provinsi Kalimantan Timur	158
Tabel IV. 13 SKL Potensi Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur	160
Tabel IV. 14 Kemampuan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	162
Tabel IV. 15 PDB Nasional Tahun 2016-2020	164
Tabel IV. 16 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Miliar Rupiah)	166

Tabel IV. 17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020	168
Tabel IV. 18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	170
Tabel IV. 19 Analisis Location Qoutient (LQ)	171
Tabel IV. 20 Sektor Basis dan Non Basis Provinsi Kalimantan Timur	173
Tabel IV. 21 PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDB Indonesia Tahun 2016 dan 2020	174
Tabel IV. 22 Perhitungan Data Dasar untuk Analisis Kinerja Sektor Ekonomi / Analisis Shift Share Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan 2020	175
Tabel IV. 23 Hasil Perhitungan Masing-Masing Komponen KPN, KPP dan KPPW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	177
Tabel IV. 24 Hasil Interpretasi Nilai KPP per Sektor Provinsi Kalimantan Timur	178
Tabel IV. 25 Hasil Interpretasi Nilai KPPW Per Sektor	179
Tabel IV. 26 Gabungan Hasil Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Provinsi Kalimantan Timur	180
Tabel V. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser	185
Tabel V. 2 Kondisi Fisik Kabupaten Paser	186
Tabel V. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Paser	187
Tabel V. 4 Demografi di Kabupaten Paser	189
Tabel V. 5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2018-2020	190
Tabel V. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2020	191
Tabel V. 7 Arah Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Paser	192
Tabel V. 8 Arah Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Paser ...	193
Tabel V. 9 Arah Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Paser	193

Tabel V. 10 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi, Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Paser.....	194
Tabel V. 11 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Paser	195
Tabel V. 12 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Paser	196
Tabel V. 13 Profil Kawasan Perkotaan Tanah Grogot.....	197
Tabel V. 14 Profil Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot.....	197
Tabel V. 15 Profil Kawasan Industri Pertanian	198
Tabel V. 16 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi.....	200
Tabel V. 17 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Paser	200
Tabel V. 18 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat.....	202
Tabel V. 19 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Kutai Barat	204
Tabel V. 20 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Barat	204
Tabel V. 21 Demografi di Kabupaten Kutai Barat	206
Tabel V. 22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2018-2020.....	207
Tabel V. 23 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020.....	207
Tabel V. 24 Arah Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Barat	209
Tabel V. 25 Arah Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Barat	209
Tabel V. 26 Arah Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Barat	210
Tabel V. 27 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Barat ..	210
Tabel V. 28 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Barat	210
Tabel V. 29 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Barat	211
Tabel V. 30 Profil Kawasan Perkotaan Sendawar	212
Tabel V. 31 Profil Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan.....	213

Tabel V. 32 Kawasan Industri Pertanian	213
Tabel V. 33 KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya.....	214
Tabel V. 34 KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya	215
Tabel V. 35 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi.....	216
Tabel V. 36 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Barat	217
Tabel V. 37 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	219
Tabel V. 38 Kondisi Fisik Kabupaten Kutai Kartanegara	220
Tabel V. 39 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	221
Tabel V. 40 Demografi di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	223
Tabel V. 41 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020 ..	224
Tabel V. 42 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020.....	225
Tabel V. 43 Arah Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Kartanegara	227
Tabel V. 44 Arah Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Kartanegara	228
Tabel V. 45 Arah Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara	229
Tabel V. 46 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Kartanegara	230
Tabel V. 47 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Kartanegara	230
Tabel V. 48 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara	232
Tabel V. 49 Profil Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan. Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang	233
Tabel V. 50 Profil Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang	233
Tabel V. 51 Profil Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat	235

Tabel V. 52 Profil Kawasan Industri Pertanian	235
Tabel V. 53 Profil KPPN & KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya	236
Tabel V. 54 Profil KPPN Tenggarong dan sekitarnya	237
Tabel V. 55 Profil KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya	238
Tabel V. 56 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi.....	239
Tabel V. 57 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	239
Tabel V. 58 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur	242
Tabel V. 59 Kondisi Fisik Kabupaten Kutai Timur	244
Tabel V. 60 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Timur	245
Tabel V. 61 Demografi di Kabupaten Kutai Timur	248
Tabel V. 62 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020.....	248
Tabel V. 63 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018- 2020.....	249
Tabel V. 64 Arah Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Timur	250
Tabel V. 65 Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Timur	251
Tabel V. 66 Arah Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Timur.....	251
Tabel V. 67 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Timur .	252
Tabel V. 68 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Timur	253
Tabel V. 69 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Timur	254
Tabel V. 70 Profil Kawasan Ekonomi Berbasis Industry	255
Tabel V. 71 Profil Kawasan Food Estate	256
Tabel V. 72 Profil Kawasan Industri Oleochemical Maloy	256
Tabel V. 73 Profil Kawasan Agropolitan Regional	257
Tabel V. 74 KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya	258
Tabel V. 75 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi.....	259

Tabel V. 76 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur	260
Tabel V. 77 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau	262
Tabel V. 78 Penggunaan Lahan di Kabupaten Berau.....	263
Tabel V. 79 Demografi di Kabupaten Berau	266
Tabel V. 80 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020.....	267
Tabel V. 81 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020	267
Tabel V. 82 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Berau	268
Tabel V. 83 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten	269
Tabel V. 84 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Berau.....	269
Tabel V. 85 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Berau	270
Tabel V. 86 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten	271
Tabel V. 87 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Berau	272
Tabel V. 88 Profil Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan dan Kawasan Pusat Industri Perkebunan	272
Tabel V. 89 Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara	273
Tabel V. 90 Profil Kawasan Industri Mangkajang	273
Tabel V. 91 KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya.....	274
Tabel V. 92 KPPN dan KSPN Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya	274
Tabel V. 93 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi.....	275
Tabel V. 94 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Berau	276
Tabel V. 95 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara	278
Tabel V. 96 Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara	279
Tabel V. 97 Demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara	281

Tabel V. 98 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020.....	282
Tabel V. 99 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020	282
Tabel V. 100 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Penajam Paser Utara	284
Tabel V. 101 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten	284
Tabel V. 102 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	285
Tabel V. 103 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir,Bangunan KonservasiDan PLTA/PLTMH di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	285
Tabel V. 104 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Penajam Paser Utara	285
Tabel V. 105 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara	287
Tabel V. 106 Kawasan Perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam	287
Tabel V. 107 Kawasan Peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru	288
Tabel V. 108 Kawasan Pariwisata Bahari berada di Kecamatan Penajam.....	288
Tabel V. 109 Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu	289
Tabel V. 110 Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru.....	290
Tabel V. 111 Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan.....	290
Tabel V. 112 Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe. Kecamatan Penajam. Central Terminal)	291
Tabel V. 113 Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung.....	291
Tabel V. 114 Kawasan Industri Pertanian	292
Tabel V. 115 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi	293

Tabel V. 116 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara	294
Tabel V. 117 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu	297
Tabel V. 118 Kondisi Fisik Kabupaten Mahakam Ulu	298
Tabel V. 119 Penggunaan Lahan di Kabupaten Mahakam Ulu	298
Tabel V. 120 Demografi di Kabupaten Mahakam Ulu	301
Tabel V. 121 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020 ..	302
Tabel V. 122 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020	303
Tabel V. 123 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Mahakam Ulu	304
Tabel V. 124 Prasarana Listrik di Kabupaten	304
Tabel V. 125 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Mahakam Ulu	304
Tabel V. 126 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Paser ...	305
Tabel V. 127 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu	306
Tabel V. 128 Kawasan Industri Pertanian	306
Tabel V. 129 KPPN Long Apari dan sekitarnya	307
Tabel V. 130 KPPN Long Bagun dan sekitarnya	307
Tabel V. 131 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi	308
Tabel V. 132 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu	308
Tabel V. 133 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan	311
Tabel V. 134 Kondisi Fisik Kota Balikpapan	312
Tabel V. 135 Penggunaan Lahan di Kota Balikpapan	312
Tabel V. 136 Demografi di Kota Balikpapan	316
Tabel V. 137 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020	317

Tabel V. 138 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020	317
Tabel V. 139 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Balikpapan	318
Tabel V. 140 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Balikpapan	319
Tabel V. 141 Prasarana Listrik di Kota Balikpapan	319
Tabel V. 142 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Balikpapan	320
Tabel V. 143 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Balikpapan	321
Tabel V. 144 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan	322
Tabel V. 145 Kawasan Kota Baru Karang Joang	323
Tabel V. 146 Kawasan Industri Kariangau (KSK) dan Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung	323
Tabel V. 147 Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru	324
Tabel V. 148 Kawasan Reklamasi Pantai	325
Tabel V. 149 Kawasan Kota Baru Teritip	326
Tabel V. 150 KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya	326
Tabel V. 151 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi	327
Tabel V. 152 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Balikpapan	328
Tabel V. 153 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda	330
Tabel V. 154 Penggunaan Lahan di Kota Samarinda	331
Tabel V. 155 Demografi di Kota Samarinda	334
Tabel V. 156 Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020	335
Tabel V. 157 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020	335
Tabel V. 158 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Samarinda	336
Tabel V. 159 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Samarinda	337
Tabel V. 160 Prasarana Listrik di Kota Samarinda	338

Tabel V. 161 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Samarinda	339
Tabel V. 162 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Samarinda	340
Tabel V. 163 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Samarinda	341
Tabel V. 164 Kawasan Industri di Kecamatan Palaran	342
Tabel V. 165 Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota	342
Tabel V. 166 Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan ..	342
Tabel V. 167 Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa	343
Tabel V. 168 KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya	343
Tabel V. 169 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi	344
Tabel V. 170 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Samarinda	345
Tabel V. 171 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bontang	347
Tabel V. 172 Penggunaan Lahan di Kota Bontang	348
Tabel V. 173 Demografi di Kota Samarinda	351
Tabel V. 174 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020	352
Tabel V. 175 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020	353
Tabel V. 176 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Bontang	354
Tabel V. 177 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Bontang	354
Tabel V. 178 Prasarana Listrik di Kota Bontang	355
Tabel V. 179 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Bontang	355
Tabel V. 180 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Bontang	356
Tabel V. 181 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Bontang	357
Tabel V. 182 Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari	357
Tabel V. 183 Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat	358
Tabel V. 184 KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya	358

Tabel V. 185 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi	359
Tabel V. 186 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Bontang	360

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur	11
Gambar 2. 2	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	14
Gambar 2. 3	Peta Jenis Tanah Provinsi Kalimantan Timur	16
Gambar 2. 4	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Timur	19
Gambar 2. 5	Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur	20
Gambar 2. 6	Diagram Perbandingan Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur.....	21
Gambar 2. 7	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	22
Gambar 2. 8	Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021	24
Gambar 2. 9	Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur	26
Gambar 3. 1	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	86
Gambar 3. 2	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	87
Gambar 4. 1	Proses Penyusunan Peta Kemampuan Lahan.....	141
Gambar 4. 2	Peta SKL Morfologi Provinsi Kalimantan Timur	143
Gambar 4. 3	Peta SKL Kemudahan Dikerjakan Provinsi Kalimantan Timur	146
Gambar 4. 4	Peta SKL Kestabilan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	148
Gambar 4. 5	Peta SKL Kestabilan Pondasi Provinsi Kalimantan Timur.....	150
Gambar 4. 6	Peta SKL Kestabilan Pondasi Provinsi Kalimantan Timur.....	152
Gambar 4. 7	Peta SKL Ketersediaan Air Provinsi Kalimantan Timur	154
Gambar 4. 8	Peta SKL Terhadap Erosi Provinsi Kalimantan Timur	156
Gambar 4. 9	Peta SKL Pembuangan Limbah Provinsi Kalimantan Timur	159
Gambar 4. 10	Peta SKL Terhadap Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur.....	161
Gambar 4. 11	Peta Kemampuan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	163
Gambar 4. 12	Matriks SWOT Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur	183
Gambar 4. 13	Sasaran Strategis dan Tujuan Akhir Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur	184

Gambar 5. 1 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Paser	188
Gambar 5. 2 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Barat	205
Gambar 5. 3 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Barat.....	218
Gambar 5. 4 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	222
Gambar 5. 5 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	226
Gambar 5. 6 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	241
Gambar 5. 7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Timur	246
Gambar 5. 8 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Timur	261
Gambar 5. 9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Berau	265
Gambar 5. 10 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Berau	277
Gambar 5. 11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara	280
Gambar 5. 12 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara	296
Gambar 5. 13 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Mahakam Ulu	299
Gambar 5. 14 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan	310
Gambar 5. 15 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan	314
Gambar 5. 16 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan	329
Gambar 5. 17 Peta Penggunaan Lahan di Kota Samarinda	333
Gambar 5. 18 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kota Samarinda.....	346
Gambar 5. 19 Peta Penggunaan Lahan Kota Bontang.....	349
Gambar 5. 20 Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kota Bontang	361



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang terpadu. Perencanaan sangat diperlukan terkait dalam proses pembangunan daerah dengan melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga harus terjalin kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Keunggulan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur, sejauh ini telah mampu menggerakkan roda pemerintah dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar wilayah kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan yang ada di Kalimantan Timur melalui masuknya investasi (PMA dan PMDN) belum optimal. Kalimantan Timur telah mampu menarik investasi asing (PMA) maupun dalam negeri

(PMDN) pada sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah baik secara nasional dan regional sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Upaya peningkatan peluang tersebut melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi dimana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi dan peluang investasi khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang usaha di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang usaha daerah juga penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ready to invest sesuai ketersediaan sumberdaya alam, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan daerah dan pusat.

Data dan informasi potensi sumber daya daerah untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan peningkatan investasi di Kalimantan Timur sangat terbatas baik dari segi jumlah, skala dan kepentingannya. Selain itu instansi pembuat peta masih tersebar dan belum terkoordinasi dengan baik. Adapun informasi dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan dukungan investasi dan akses terhadap sumber dana adalah data spasial (peta) potensi sumber daya daerah, yang memberikan informasi penting tentang distribusi komoditi, luasan wilayah, dan peluang usaha pada kabupaten/kota.

Tersedianya informasi potensi sumber daya daerah untuk pengembangan komoditi unggulan daerah akan sangat membantu upaya peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dibangun pangkalan data untuk menampung data dan informasi hasil-hasil pemetaan agar duplikasi hasil-hasil pemetaan dapat dipantau. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam mempromosikan potensi dan peluang usaha serta menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi memerlukan sarana promosi yang *up to date* dan lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur yang memberikan gambaran penyebaran komoditi unggulan, peluang usaha, kondisi perekonomian dan kondisi eksisting sarana prasarana di Kalimantan Timur sehingga dengan tersedianya buku kajian pemetaan potensi dan peluang usaha di Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong penting dalam meningkatkan investasi di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur ialah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data potensi unggulan Kalimantan Timur khususnya di kabupaten/kota.
2. Mengidentifikasi peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan di Kalimantan Timur khususnya di kabupaten/kota.
3. Mengidentifikasi kelayakan finansial pada peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan di setiap kabupaten/kota dan layak ditawarkan pada investor atau calon investor.
4. Mengidentifikasi dan menginventarisir ketersediaan, kesesuaian dan status lahan di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur adalah:

1. Menginventarisir kondisi eksisting sarana dan prasarana di Kalimantan Timur.
2. Menginventarisir peluang usaha yang tersedia dan masih dapat dikembangkan.

1.3 Sasaran

Sasaran Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur adalah :

1. Terinformasikannya potensi unggulan dan peluang usaha di Kalimantan Timur.
2. Terinformasikannya ketersediaan, kesesuaian dan status lahan di Kabupaten/Kota.
3. Terpetakannya potensi dan peluang usaha di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
4. Terpetakannya potensi unggulan dan peluang usaha prioritas di Kaltim.
5. Terinformasinya kelayakan finansial terhadap peluang usaha di kabupaten/kota.
6. Teridentifikasinya lahan potensial yang dapat diproses dan ditetapkan sebagai kawasan strategis baru yang akan ditawarkan pada investor.
7. Sebagai acuan/arahan dalam rangka promosi potensi dan peluang investasi agar perencanaan pelaksanaan promosi menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan dari Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur ialah sebagai berikut:

1. Dalam Pekerjaan penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur menggunakan metode survei dan studi literatur, data dan informasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
2. Data dan informasi terkait dengan pemetaan dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografi (GIS) yang merupakan analisis berbasis spasial dengan menampilkan sebaran potensi dan peluang investasi daerah, menampilkan kondisi lahan (ketersediaan lahan, kesesuaian lahan dan status lahan).

3. Aspek yang dianalisis untuk peluang usaha adalah kelayakan usaha berdasarkan aspek finansial yang terdiri atas: NPV (Net Present Value), B/C ratio, IRR (Internal Rate of Return), dan PP (Payback Period).

Tahapan pekerjaan tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a. Kegiatan identifikasi, meliputi:
 - 1) Inventarisir dan identifikasi studi pustaka
 - 2) Pengumpulan data dan pengumpulan peta serta pengumpulan data sekunder.
 - 3) Identifikasi potensi investasi yang potensial dan komoditi unggulan di setiap sektor / bidang usaha serta kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan serta faktor-faktor pendukungnya seperti data infrastruktur, sarana prasarana pendukung di setiap kabupaten/kota dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur.
 - 4) Identifikasi peluang usaha yang potensial dan menguntungkan untuk dikembangkan di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
 - 5) Identifikasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh calon pelaku usaha maupun pelaku usaha yang berinvestasi di Kalimantan Timur.
 - 6) Data mengenai gambaran umum, kondisi dan perkembangan perekonomian, perkembangan investasi di Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan Kabupaten Kota secara khusus.
- b. Kegiatan pengolahan data
 - 1) Pengolahan data untuk mengetahui peluang usaha potensial.
 - 2) Pengolahan data untuk mengetahui kelayakan finansial peluang usaha.
 - 3) Pengolahan data untuk mengetahui potensi investasi yang potensial dan unggulan.

- 4) Pembuatan peta untuk sebaran potensi investasi yang potensial serta sebaran peluang usaha disetiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
- 5) Pembuatan peta untuk ketersediaan, kesesuaian dan status lahan.

1.5 Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur referensi dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pelaksanaan identifikasi dan proses penyusunan studi sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
6. Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negri No 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, dasar hukum dalam kegiatan ini.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini berisikan data-data umum mengenai kondisi Provinsi Kalimantan Timur meliputi letak geografis, batas administrasi wilayah, kondisi fisik dasar, data penggunaan lahan, kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025.

BAB IV ANALISA POTENSI USAHA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bab ini berisikan kajian dasar hukum pelaksanaan penanaman modal, analisis kebijakan meliputi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur. Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Timur dan Analisis Potensi Unggulan.

BAB V PROFIL POTENSI DAN PELUANG USAHA DI KALIMANTAN TIMUR

Bab ini berisikan gambaran umum serta potensi dan peluang usaha untuk sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan profil potensi dan peluang usaha di Provinsi Kalimantan Timur.



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi kedua terluas di Indonesia setelah Papua yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri. Sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya. Secara administratif provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113035'31" Bujur Timur dan 119012'48" Bujur Timur serta diantara 2034'23" Lintang Utara dan 2044'14" Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur meliputi 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga), yaitu Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu; dan Kota Balikpapan, Samarinda, serta Bontang. Kalimantan Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Utara.
- Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur : Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

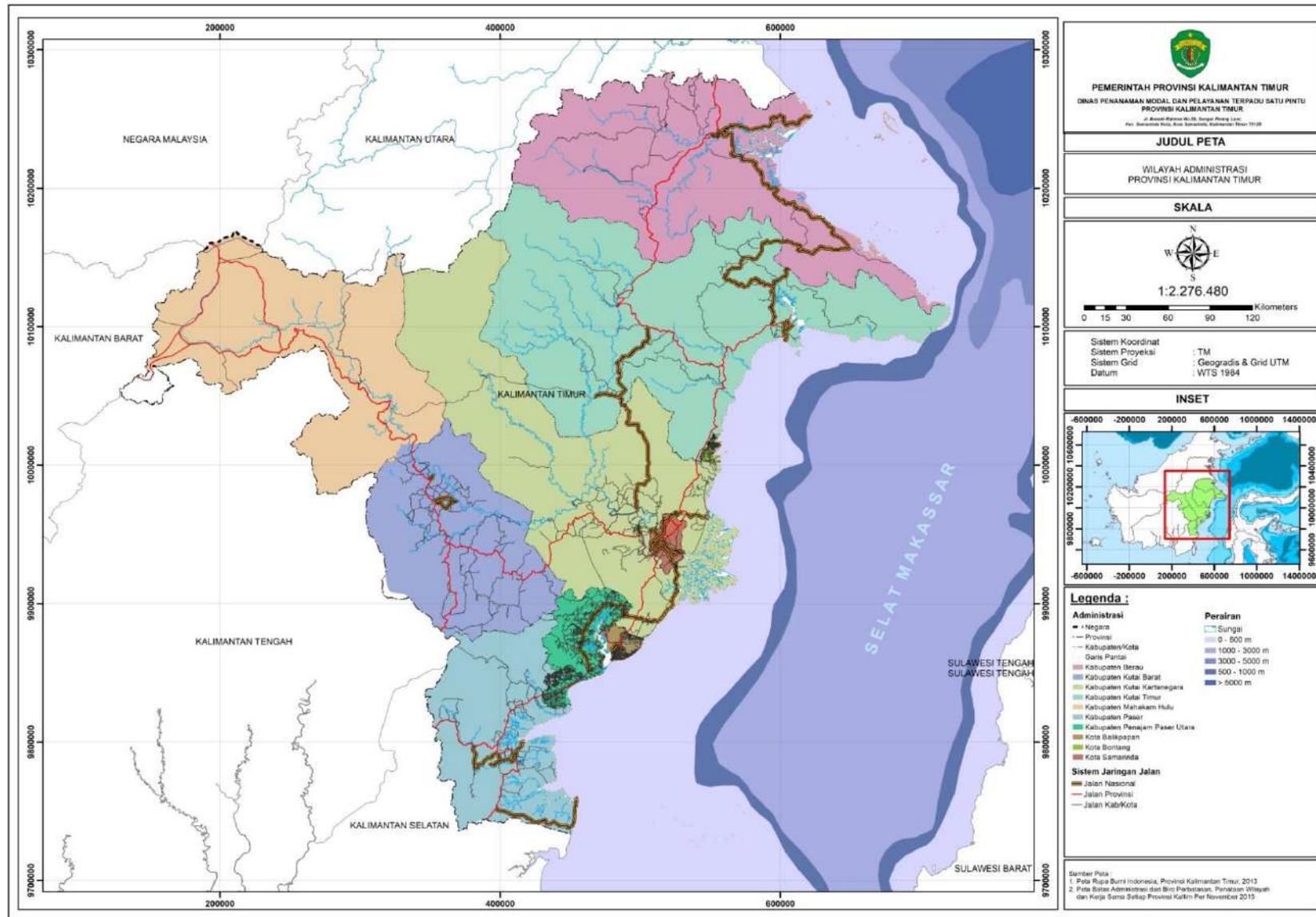
- Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Tabel II. 1 Luas Wilayah Per-Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kab/Kota	Luas Total (km ²)	Luas Terhadap Provinsi (%)
1	Paser	Tanah Grogot	11.096,96	8,71
2	Kutai Barat	Sendawar	13.709,92	10,77
3	Kutai Kartanegara	Tenggarong	25.988,08	20,41
4	Kutai Timur	Sangatta	31.051,71	24,38
5	Berau	Tanjung Redeb	21.735,19	17,07
6	Penajam Paser Utara	Penajam	2.923,73	2,30
7	Mahakam Ulu	Long Bagun	19.449,41	15,27
8	Balikpapan	Balikpapan	512,25	0,40
9	Samarinda	Samarinda	716,53	0,56
10	Bontang	Bontang	163,14	0,13
Total			127.346.92	100,00

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki luas terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas 31.051,71 km² dengan persentase luas terhadap Provinsi Kalimantan Timur sebesar 24,38%. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui kabupaten/kota yang memiliki luas terkecil adalah Kota Bontang dengan luas 163,14 km² dengan persentase luas terhadap Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,13%. Berikut merupakan peta wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Kondisi Fisik Provinsi Kalimantan Timur

Pada kondisi fisik di Provinsi Kalimantan Timur tersusun dari kondisi topografi, kondisi litologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, dan kondisi penggunaan lahan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut.

2.2.1 Topografi dan Kelerengan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 persen dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Kondisi demikian akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Tabel II. 2 Kondisi Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/ Kota	Kemiringan Lereng					Jumlah
		0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 25 %	25-40 %	> 40 %	Total
1.	Paser	17.015	167.245	585.053	76.542	263.650	1.109.505
2.	Kutai Barat	25.339	313.272	932.895	47.544	51.767	1.370.817
3.	Kutai Kartanegara	64.544	321.200	1.615.967	209.547	406.032	2.617.290
4.	Kutai Timur	7.225	531.509	1.653.137	97.997	796.999	3.086.867
5.	Berau	28.299	387.510	1.221.068	7.224	529.418	2.173.519
6.	Penajam Paser Utara	3.823	46.898	183.595	35.049	23.259	292.624
7.	Mahakam Ulu	11.164	28.345	953.610	109.614	842.207	1.944.940
8.	Balikpapan	489	3.180	47.168	387	-	51.224
9.	Samarinda	2.735	13.566	30.091	25.261	-	71.653
10.	Bontang	1.578	4.122	10.614	-	-	16.314
Jumlah		162.211	1.816.847	7.233.198	609.165	2.913.332	12.734.753

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%)

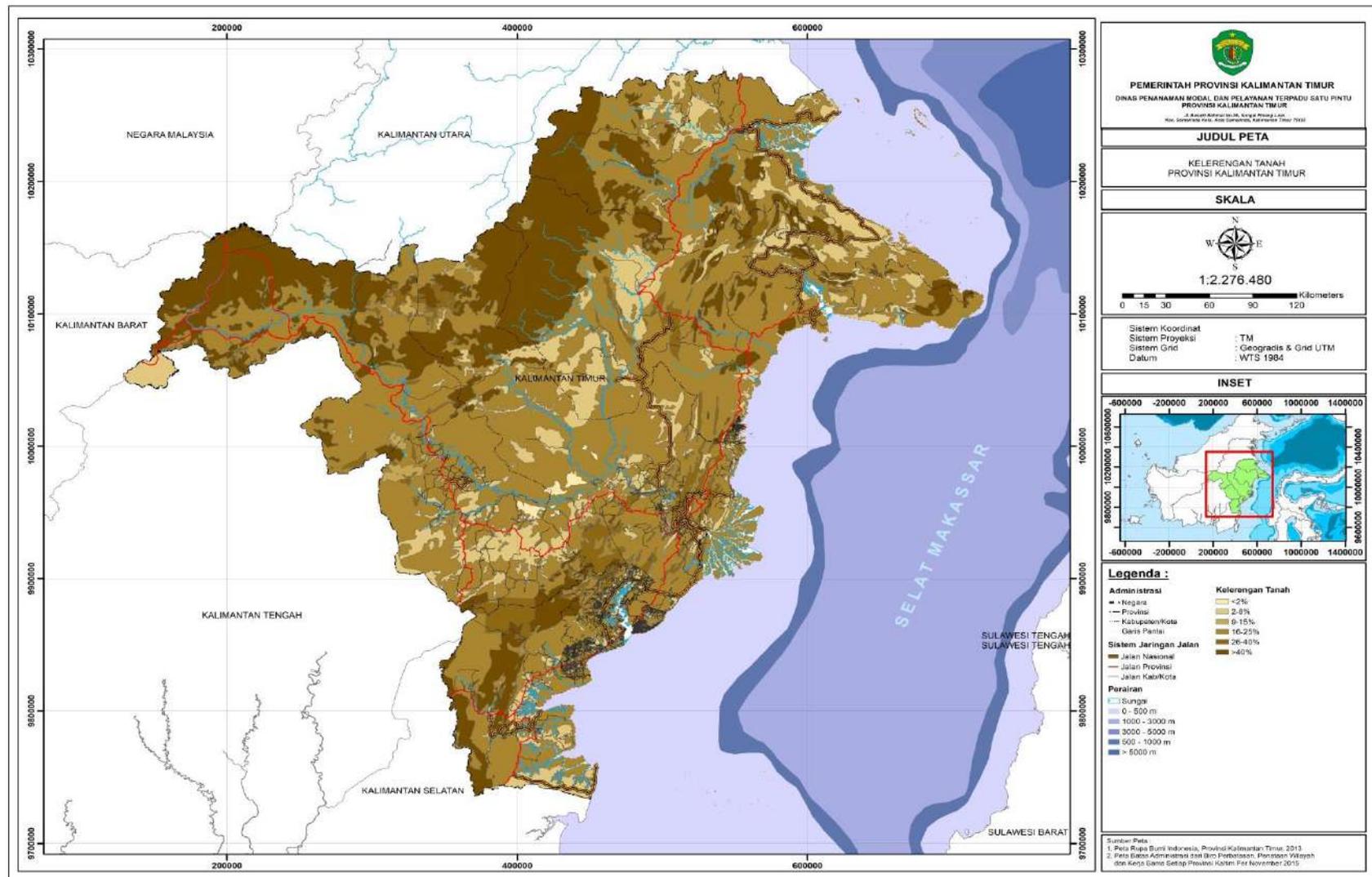
luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat keterengn > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat keterengn yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Tabel II. 3 Kondisi Topografi Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Topografi		
		100 - 500 M	500 - 1000 M	> 1000 M
1.	Paser	474.205	2.110	-
2.	Kutai Barat	372.359	28.641	5.390
3.	Kutai Kartanegara	367.415	320.843	119.428
4.	Kutai Timur	1.100.000	304.403	141.334
5.	Berau	1.100.000	233.106	55.826
6.	Penajam Paser Utara	71.896	2.110	-
7.	Mahakam Ulu	745.857	593.943	213.640
8.	Balikpapan	156	-	-
9.	Samarinda	1.287	-	-
10.	Bontang	2	-	-
Jumlah/Total		4.233.177	1.485.156	535.618

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan. Berikut merupakan peta keterengn tanah Provinsi Kalimantan Timur.

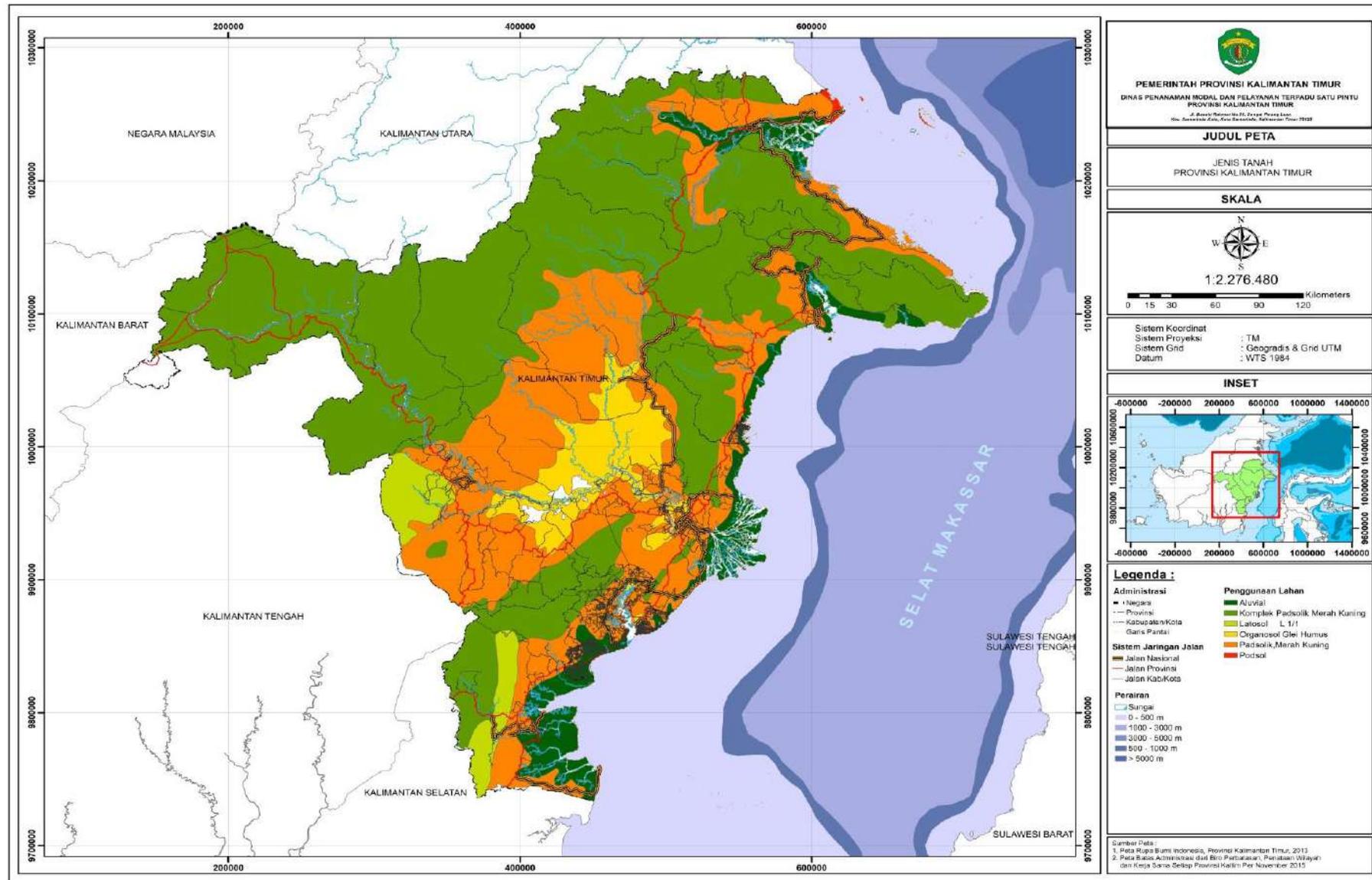


Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur

2.2.2 Litologi Provinsi Kalimantan Timur

Secara eksploratif Provinsi Kalimantan Timur memiliki beragam jenis tanah yang terdiri diantaranya:

1. Jenis tanah Alluvial sebagian besar terdapat pada kawasan pesisir dari Provinsi Kalimantan Timur, dimana memiliki luas wilayah sebesar 782.800,15 Ha yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
2. Jenis tanah Komplek Padsolik Merah Kuning merupakan salah satu jenis tanah yang mendominasi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan memiliki luas 153.863,37 Ha yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kota Bontang.
3. Jenis tanah Organosol Glei Humus merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki pengaruh sedang terhadap kondisi fisik di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sekitar 74.789,48 Ha yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
4. Jenis tanah Latosol merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi fisik di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sebesar 60.496,19 Ha yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat.
5. Jenis tanah Padsolik Merah Kuning merupakan jenis tanah yang mendominasi pada kondisi fisik di Provinsi Kalimantan Timur, dengan memiliki luas sebesar 143.572,95 Ha yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang
6. Jenis tanah Podsol memiliki luas wilayah sebesar 21.727,60 Ha yang menjadikan jenis tanah yang paling sedikit ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, dimana jenis tanah ini hanya dapat ditemukan di Kabupaten Berau.



Gambar 2. 3 Peta Jenis Tanah Provinsi Kalimantan Timur

2.2.3 Hidrologi Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang.

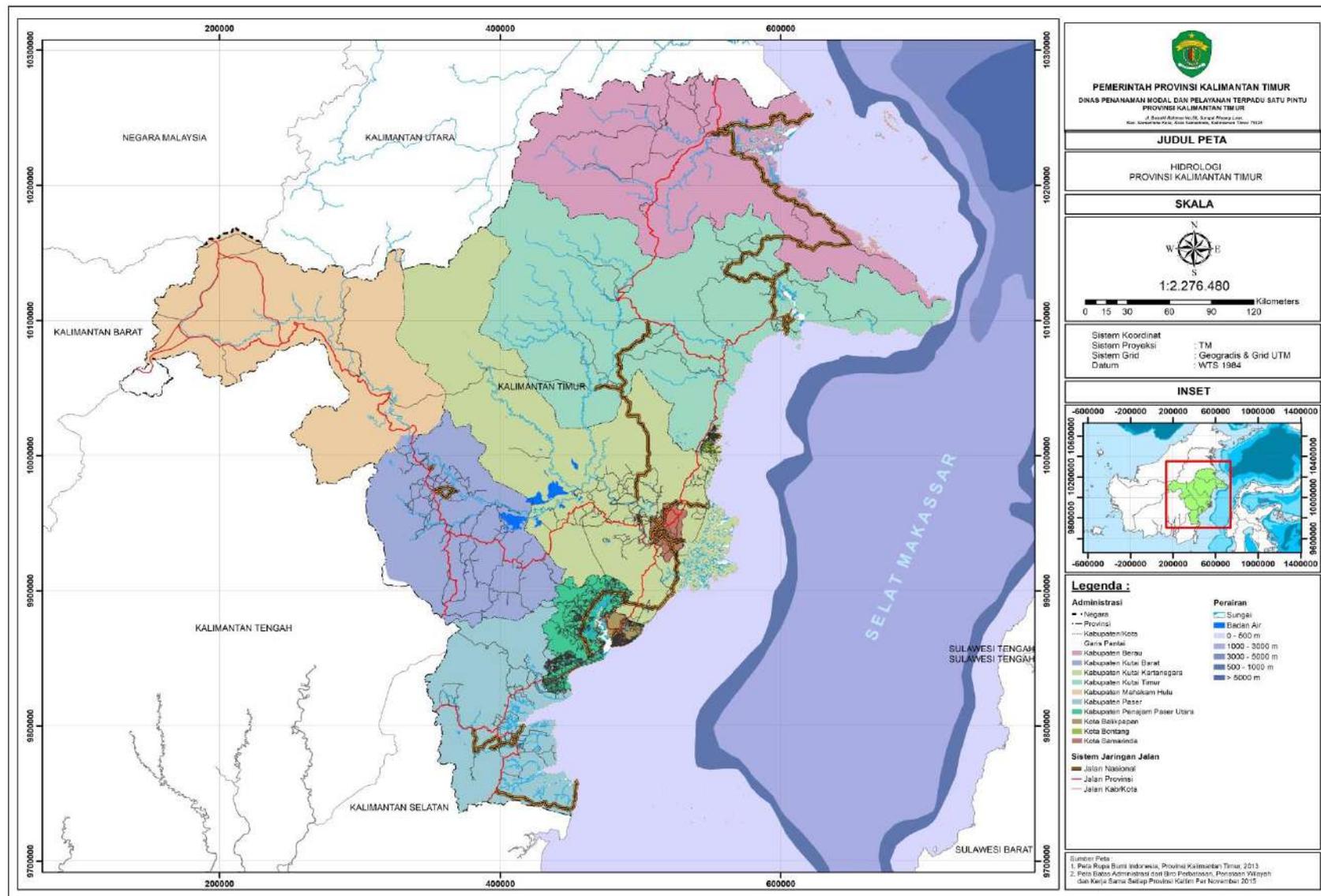
Sesuai dengan Permen PU No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai, sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kaltara) dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Mahakam (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; SWS Berau-Kelay (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; SWS Karangan (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangata, Bengalon, dan Santan.

2.2.4 Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur

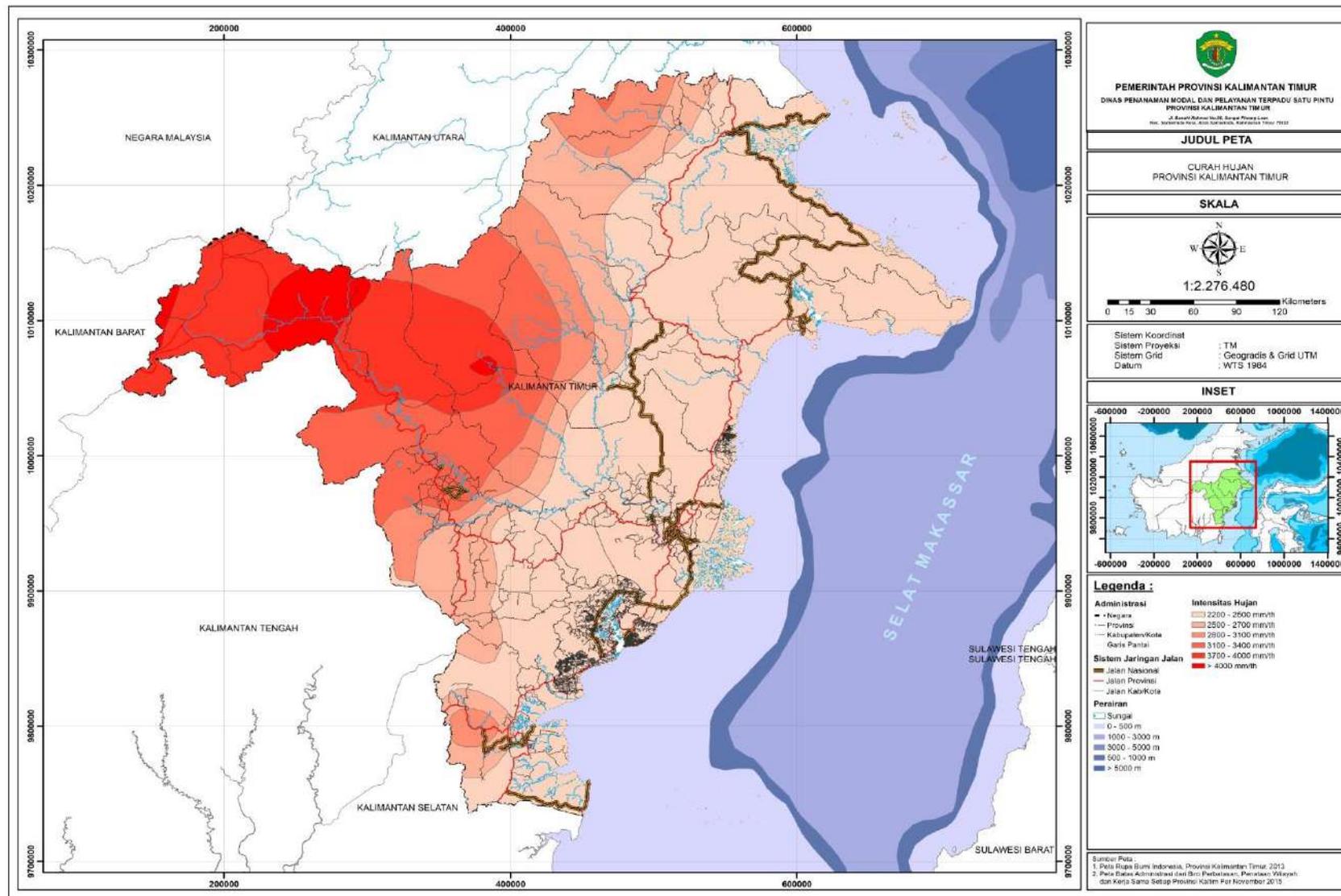
Pada kondisi klimatologi pada Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui curah hujan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada tahun 2020 – 2018. Curah hujan tertinggi memiliki debit air sebesar >4000 mm/th dimana curah hujan ini cenderung terjadi pada wilayah pada Kabupaten Mahakam Ulu. Pada curah hujan dengan nilai debit air sebesar 3700–4000 mm/th terjadi pada sekitaran wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Pada curah hujan dengan nilai debit air sebesar 3100–3400 mm/th terjadi pada sekitaran wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.

Pada curah hujan dengan nilai debit air sebesar 2800 – 3100 mm/th terjadi pada sekitaran wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Berau. Pada curah hujan dengan nilai debit air sebesar 2500 – 2700 mm/th terjadi pada sekitaran wilayah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Pada curah hujan dengan nilai debit air sebesar 2200 – 2500 mm/th sebagai curah hujan terendah di Provinsi Kalimantan Timur terjadi pada sekitaran wilayah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



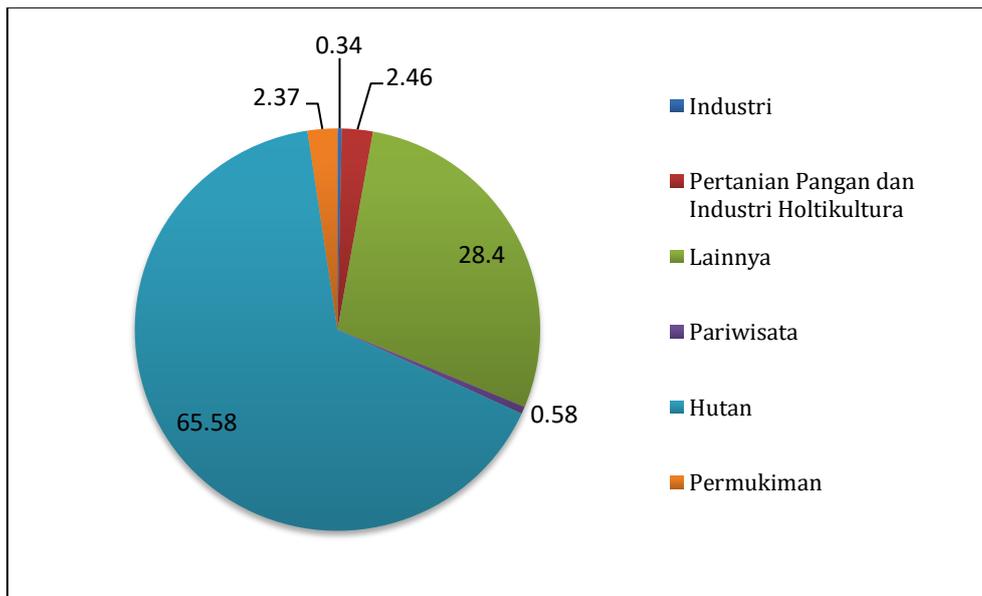
Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.5 Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur

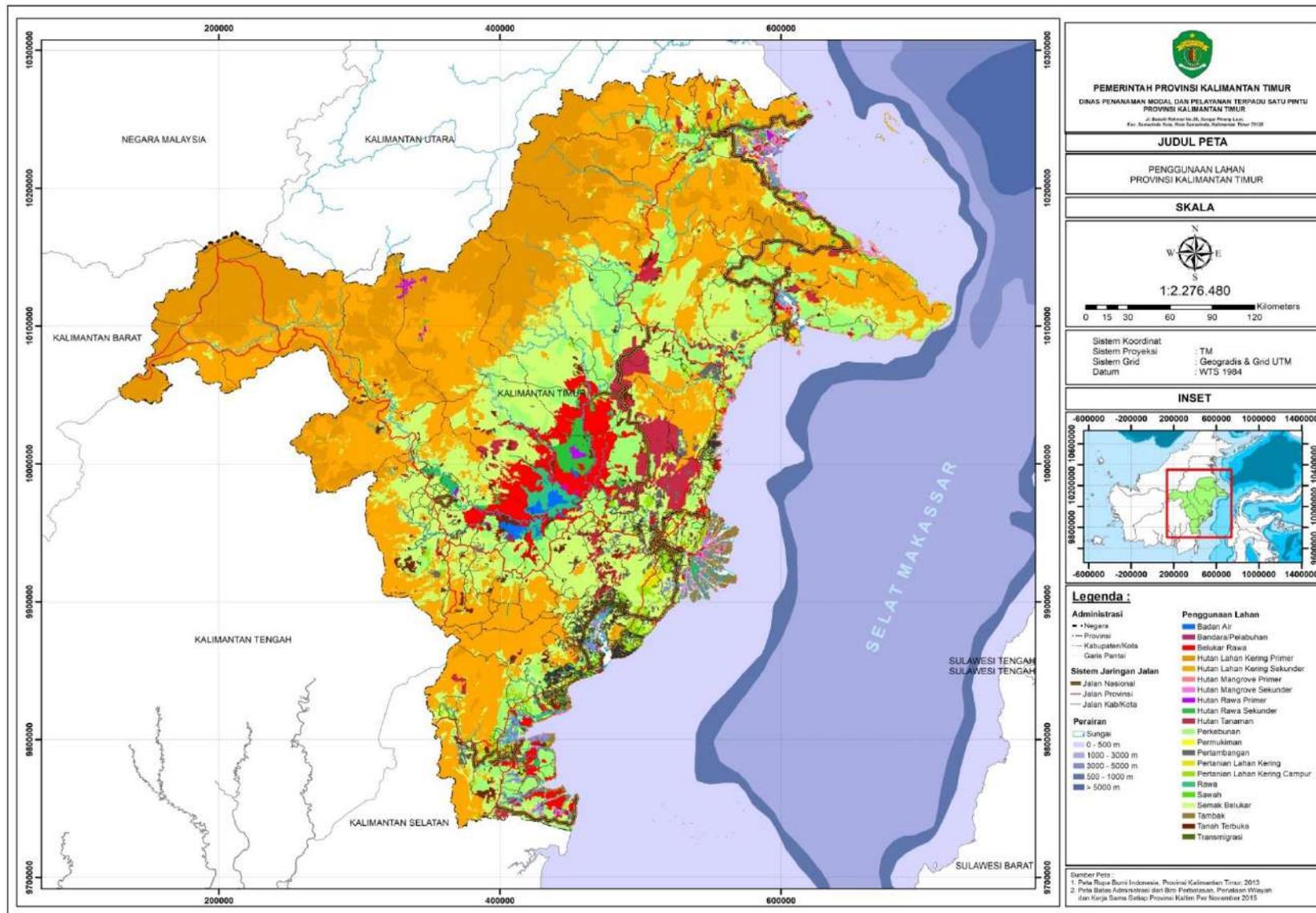
Potensi Sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yakni seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha. Secara garis besar sumber daya lahan Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.266 Ha), industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Timur secara rinci pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur diuraikan pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036

Gambar 2. 6 Diagram Perbandingan Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur

Pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar seperti kondisi fisik dasar lahan dan aktivitas masyarakat disekitarnya. Secara rinci penggunaan lahan dapat dilihat pada peta sebagai berikut.



Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Kondisi Non Fisik Provinsi Kalimantan Timur

Pada kondisi non fisik di Provinsi Kalimantan Timur tersusun dari kondisi kependudukan, ketersediaan sarana dan prasarana, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan anggaran belanja. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut.

2.3.1 Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur

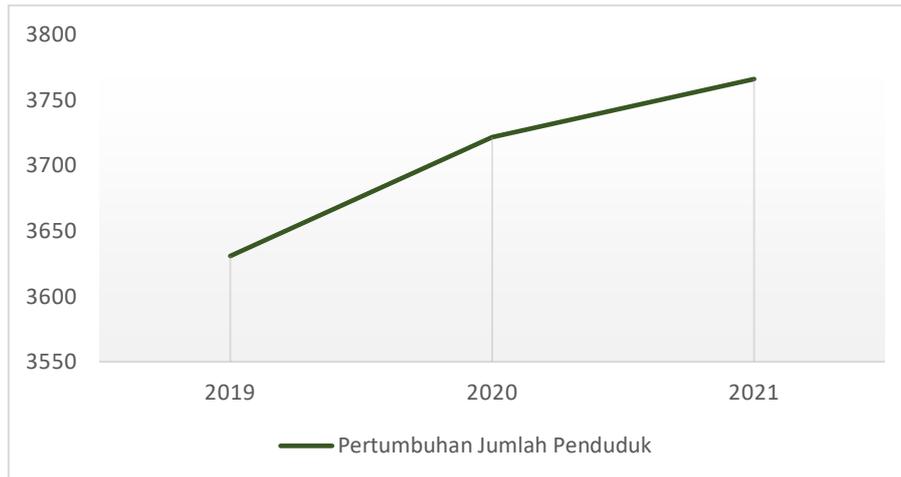
Aspek demografi atau kependudukan suatu wilayah merupakan faktor pertimbangan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan suatu wilayah. Beberapa data kependudukan yang penting sebagai acuan dalam perencanaan dapat dilihat berdasarkan jumlah dan perkembangan penduduk, dan kepadatan penduduk. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk pada Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk per Tahun (jiwa)		
		2019	2020	2021
1.	Paser	265,148	285,9	275,5
2.	Kutai Barat	164,048	148,0	172,3
3.	Kutai Kartanegara	696,784	786,1	729,4
4.	Kutai Timur	422,905	376,1	434,5
5.	Berau	232,189	232,3	248,0
6.	Penajam Paser Utara	173,671	160,9	178,7
7.	Mahakam Ulu	30,321	26,4	32,5
8.	Balikpapan	670,505	655,2	688,3
9.	Samarinda	793,576	872,8	828,0
10.	Bontang	181,618	177,7	178,9
Jumlah/Total		3630,765	3721,4	3766,0

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2019 – 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada setiap kota memiliki kenaikan dan penurunan jumlah penduduk, akan tetapi pada jumlah keseluruhan satu provinsi mengalami kenaikan. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2019 – 2021

Gambar 2. 8 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam jumlah besar. Bukan karena tingginya tingkat kelahiran, tapi banyaknya jumlah penduduk yang masuk dan menetap. Kedatangan warga dari luar pulau. Artinya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah sebaran penduduk di Kalimantan Timur tidak merata.

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah perluas wilayah daerah tersebut, sehingga dapat diketahui kepadatan penduduk dalam satuan jiwa/ha. Adapun ketentuan dalam klasifikasi untuk tingkat kepadatan penduduk di perkotaan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan sebagai berikut.

Tabel II. 5 Klasifikasi Tingkat Kepadatan Penduduk

No.	Kepadatan Penduduk	Klasifikasi
1.	< 150 jiwa / ha	Rendah
2.	151 – 200 jiwa / ha	Sedang
3.	201 – 400 jiwa / ha	Tinggi
4.	> 400 jiwa / ha	Sangat Tinggi

Sumber : SNI 03-1733-2004

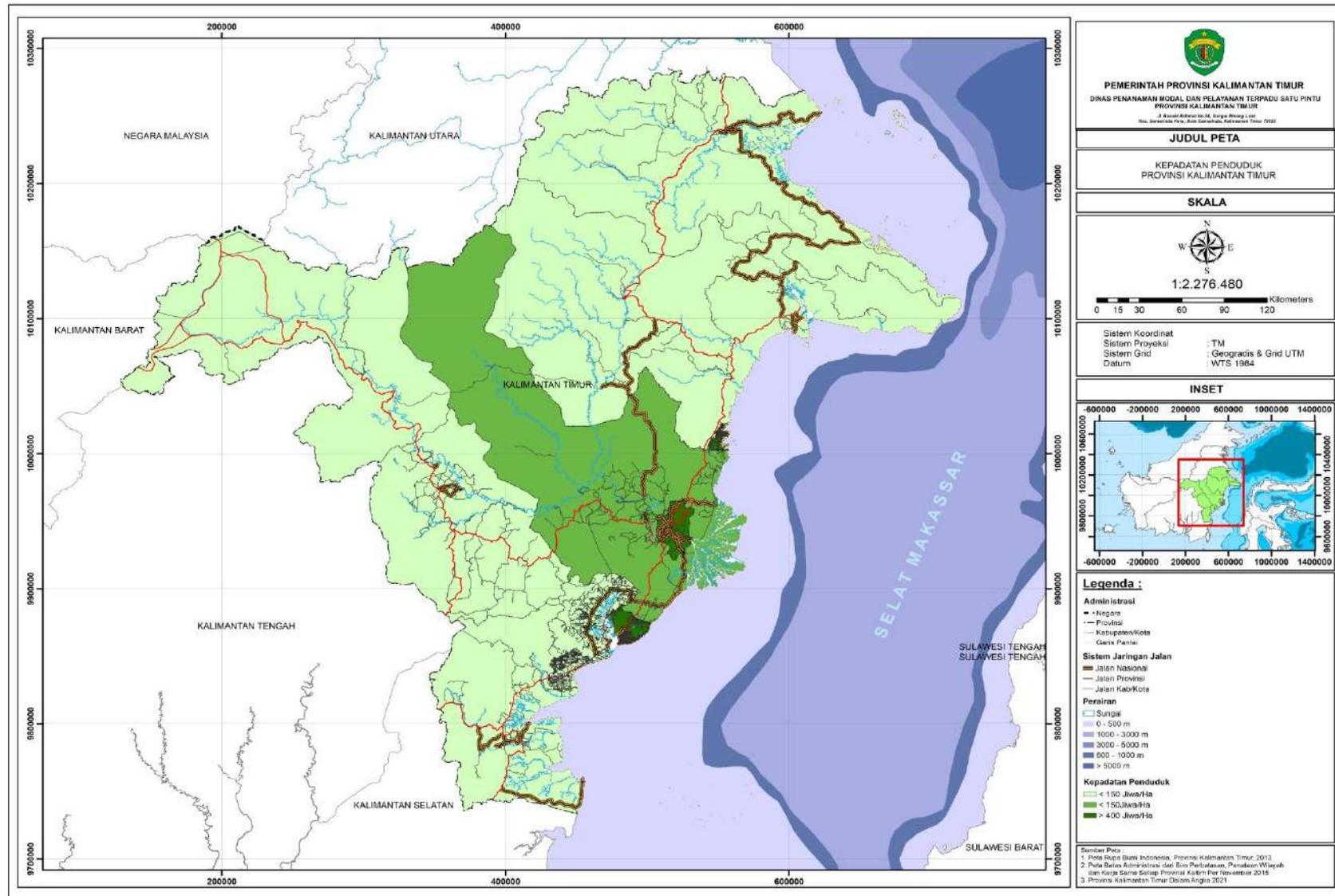
Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat diketahui pada Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk untuk masing – masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel II. 6 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Kepadatan Penduduk	
		Nilai	Klasifikasi
1.	Paser	<150 Jiwa/Ha	Rendah
2.	Kutai Barat	<150 Jiwa/Ha	Rendah
3.	Kutai Kartanegara	<150 Jiwa/Ha	Rendah
4.	Kutai Timur	<150 Jiwa/Ha	Rendah
5.	Berau	<150 Jiwa/Ha	Rendah
6.	Penajam Paser Utara	<150 Jiwa/Ha	Rendah
7.	Mahakam Ulu	<150 Jiwa/Ha	Rendah
8.	Balikpapan	>400 Jiwa/Ha	Sangat Tinggi
9.	Samarinda	>400 Jiwa/Ha	Sangat Tinggi
10.	Bontang	>400 Jiwa/Ha	Sangat Tinggi

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur di atas maka dapat dilihat peta tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:



Gambar 2. 9 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

2.3.2 Ketersediaan Sarana Provinsi Kalimantan Timur

Pada ketersediaan sarana terdiri dari sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan dengan skala wilayah pada Provinsi Kalimantan Timur.

A. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi sebagai pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat bagi kesehatan kepada masyarakat, dimana mampu menangani permasalahan kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa klasifikasi sarana kesehatan yang terdiri dari sarana medik utama, sarana medik dasar, sarana medik spesialis, dan sarana penunjang medik. Berikut merupakan jumlah sarana kesehatan pada Provinsi Kalimantan Timur dalam skala wilayah pada tabulasi dibawah ini.

Tabel II. 7 Sarana Kesehatan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Kesehatan Skala Wilayah	
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus
1.	Paser	3	0
2.	Kutai Barat	1	0
3.	Kutai Kartanegara	3	0
4.	Kutai Timur	4	0
5.	Berau	2	0
6.	Penajam Paser Utara	1	0
7.	Mahakam Ulu	3	0
8.	Balikpapan	10	1
9.	Samarinda	8	2
10.	Bontang	4	0
Total		39	3

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki fasilitas rumah sakit umum, akan tetapi dalam sarana rumah sakit khusus hanya berada pada Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

B. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang membantu dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Fasilitas pendidikan dapat juga diartikan sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Dapat disimpulkan bahwa sarana adalah sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah maupun dimanapun yang meliputi barang bergerak dan tidak bergerak agar tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri ialah mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta sikap secara optimal. Berikut merupakan sarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur dalam skala wilayah.

Tabel II. 8 Sarana Pendidikan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Pendidikan Skala Wilayah			
		SMA	SMK	MA	Perguruan Tinggi
1.	Paser	18	12	12	2
2.	Kutai Barat	22	14	2	1
3.	Kutai Kartanegara	51	43	19	3
4.	Kutai Timur	22	24	3	2
5.	Berau	19	14	3	4
6.	Penajam Paser Utara	8	10	5	0
7.	Mahakam Ulu	7	2	0	0
8.	Balikpapan	23	31	7	13
9.	Samarinda	41	52	13	26
10.	Bontang	11	14	2	3
Total		222	216	66	54

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki fasilitas SMA, SMK, MA, sedangkan dalam fasilitas perguruan tinggi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak memiliki fasilitas tersebut.

C. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius (BSN, 2004). Menurut Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka Tahun 2020 masyarakat dari Kalimantan Timur menganut kepercayaan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan beragamnya kepercayaan yang ada, maka dibutuhkan fasilitas peribadatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan kerohanian. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu. Berikut merupakan jumlah sarana peribadatan pada Provinsi Kalimantan Timur pada tabulasi dibawah ini.

Tabel II. 9 Sarana Peribadatan Skala Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Peribadatan Skala Wilayah				
		Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Paser	356	80	80	1	2
2.	Kutai Barat	135	470	470	6	1
3.	Kutai Kartanegara	802	180	180	13	1
4.	Kutai Timur	462	199	199	17	1
5.	Berau	211	137	137	5	1
6.	Penajam Paser Utara	197	48	48	0	0
7.	Mahakam Ulu	1	11	11	0	0
8.	Balikpapan	457	124	124	2	8
9.	Samarinda	391	167	167	5	11
10.	Bontang	122	77	77	2	1
Total		3.134	1.493	1.493	51	26

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki fasilitas peribadatan, kecuali pada Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak memiliki fasilitas pura dan vihara.

2.3.3 Ketersediaan Prasarana Provinsi Kalimantan Timur

Pada ketersediaan prasarana terdiri dari jalan dan jembatan, sanitasi, sumber air bersih, kelistrikan, dan telekomunikasi pada Provinsi Kalimantan Timur.

A. Jalan dan Jembatan

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel II. 10 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1.	Paser	336,88	752,32	14,77	1103,97
2.	Kutai Barat	1901,11	1486,91	216,26	3604,28
3.	Kutai Kartanegara	703,05	994,63	942,23	2639,91
4.	Kutai Timur	591,05	822,94	210,9	1624,89

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
5.	Berau	758,47	1287,38	99,92	2145,77
6.	Penajam Paser Utara	433,29	967,59	51,29	1452,17
7.	Mahakam Ulu	0	737,59	0	737,59
8.	Balikpapan	499,65	51,15	0,19	550,99
9.	Samarinda	265,98	159,67	498,61	924,26
10.	Bontang	72,96	14,78	118,63	206,37

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Tabel II. 11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1.	Paser	168,61	102,41	309,93	523,02	1103,97
2.	Kutai Barat	2568,27	537,77	209,2	289,04	3604,28
3.	Kutai Kartanegara	1288,13	552,89	438,07	360,82	2639,91
4.	Kutai Timur	231,88	710,45	373,23	309,33	1624,89
5.	Berau	696,41	706,31	528,83	214,22	2145,77
6.	Penajam Paser Utara	507,84	610,69	160,46	173,18	1452,17
7.	Mahakam Ulu	0	50,62	179,18	507,79	737,59
8.	Balikpapan	435,75	198,57	10,74	13,57	658,63
9.	Samarinda	533,99	256,37	60,59	201,71	1052,66
10.	Bontang	187,42	138,03	9,84	4,64	339,93

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Tabel II. 12 Jumlah dan Panjang Jembatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Banyak dan Panjang Jembatan					
		Negara		Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)
1.	Paser	98	2356,8	27	877,11	1120	0
2.	Kutai Barat	45	1354,4	27	838,15	345	9.394
3.	Kutai Kartanegara	40	740,4	29	586,65	252	4.266
4.	Kutai Timur	37	1069,7	54	1.165,80	45	2.950
5.	Berau	37	1288,7	24	887,26	37	0
6.	Penajam Paser Utara	0	0	0	0,00	44	669

No.	Kabupaten/ Kota	Banyak dan Panjang Jembatan					
		Negara		Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)
7.	Mahakam Ulu	0	0	6	126,00	0	0
8.	Balikpapan	8	246,6	23	1.079,70	0	0
9.	Samarinda	10	66,1	12	1.614,80	13	0
10.	Bontang	11	282	0	0,00	57	851

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

B. Sanitasi

Pada prasarana sanitasi ini persentase rumah tangga dalam penggunaan fasilitas terdiri dari penggunaan sendiri, penggunaan bersama, MCK umum, tidak menggunakan, dan tidak memiliki. Berikut merupakan tabel persentase rumah tangga dalam penggunaan fasilitas tempat buang air di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II. 13 Persentase Rumah Tangga Dalam Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Sanitasi (%)			
		Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan
1.	Paser	94,83	1,51	0,84	0
2.	Kutai Barat	90,9	3,58	2,07	0
3.	Kutai Kartanegara	92,26	3,03	2,53	0
4.	Kutai Timur	92,18	2,03	2,22	0
5.	Berau	92,44	5	1,46	0
6.	Penajam Paser Utara	94,51	3,44	0,19	0
7.	Mahakam Ulu	84,03	2,35	6,34	0
8.	Balikpapan	95,12	3,63	0,85	0,08
9.	Samarinda	89,11	7,58	2,42	0
10.	Bontang	97,24	2,39	0	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada prasarana sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur pada seluruh kabupaten/kota memiliki fasilitas sanitasi secara keseluruhan.

C. Sumber Air Bersih

Pada prasarana air bersih ini persentase rumah tangga dalam penggunaan fasilitas terdiri dari leding, pompa, air dalam kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya berikut merupakan tabel penjelasannya.

Tabel II. 14 Persentase Rumah Tangga Dalam Penggunaan Fasilitas Air Bersih di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Minum (%)									
	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya
Paser	20,06	0,46	58,71	6,66	5,9	0,31	0,74	4,26	2,9	0
Kutai Barat	9,23	9,29	43,32	6,94	3,65	15,28	6,62	5,41	0,26	0
Kutai Kartanegara	8,36	2,19	77,92	2,4	3,69	1,55	0,06	3,3	0,54	0
Kutai Timur	9,72	0,14	77,11	3,56	4	2,5	0,11	2,1	0,76	0
Berau	6,82	5,72	74,79	4,21	1,32	3,39	0,15	2,97	0,62	0
Penajam Paser Utara	3,05	10,1	78	2,18	2,84	0,03	1,11	0,19	2,26	0,24
Mahakam Ulu	0	1,43	66,47	3,85	0,89	8,44	2,58	15,79	0,55	0
Balikpapan	26,18	1,87	70,78	0,12	0,2	0,29	0	0	0,55	0
Samarinda	20,06	1,82	76,78	0,94	0	0,36	0	0	0,03	0
Bontang	19,69	0,21	79,78	0,24	0,01	0	0,07	0	0	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur telah dialiri oleh fasilitas air bersih dengan sumber air yang berbeda beda.

D. Kelistrikan

Dari segi prasarana kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur listrik PLN sudah mencapai 93,77% pada tahun 2020. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2020 berjumlah 1.032.475 rumah tangga. Berikut merupakan tabel sumber listrik dan jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II. 15 Persentase Sumber Listrik di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Sumber Listrik (%)		
		Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1.	Paser	93,55	4,96	1,49
2.	Kutai Barat	67,39	28,85	3,76
3.	Kutai Kartanegara	96,58	2,84	0,58
4.	Kutai Timur	82,41	17,27	0,32
5.	Berau	87,21	12,58	0,21
6.	Penajam Paser Utara	97,43	2,57	0
7.	Mahakam Ulu	61,1	35,59	3,31
8.	Balikpapan	98,05	1,95	0
9.	Samarinda	99,58	0,04	0,38
10.	Bontang	95,32	4,68	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

E. Telekomunikasi

Pentingnya penyediaan prasarana telekomunikasi berguna dalam kelancaran komunikasi antar individu atau bahkan kelompok yang memiliki jarak yang tidak berdekatan pada Provinsi Kalimantan Timur disajikan data penerima sinyal internet telepon saluler dan jumlah menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) berikut merupakan tabel penyajian data pada tahun 2020.

Tabel II. 16 Banyaknya Desa Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Banyaknya Desa Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler			
		4G/LTE	3G/H/H+/EVDO	2,5G/E/GPRS	Tidak Ada
1.	Paser	70	39	12	12
2.	Kutai Barat	89	34	30	24
3.	Kutai Kartanegara	177	41	10	8
4.	Kutai Timur	78	35	18	7
5.	Berau	54	17	15	5
6.	Penajam Paser Utara	45	9	0	0
7.	Mahakam Ulu	18	6	5	21
8.	Balikpapan	34	0	0	0
9.	Samarinda	57	2	0	0
10.	Bontang	12	3	0	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

Tabel II. 17 Banyaknya Desa Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Paser	70	70	70	83
2.	Kutai Barat	64	64	64	66
3.	Kutai Kartanegara	206	206	206	243
4.	Kutai Timur	111	111	111	117
5.	Berau	67	67	67	70
6.	Penajam Paser Utara	54	54	54	64
7.	Mahakam Ulu	17	25	31	0
8.	Balikpapan	139	139	124	241
9.	Samarinda	148	148	134	209
10.	Bontang	33	33	148	25

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2021

2.3.4 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Peranan lapangan usaha tersebut yaitu sebesar 41,43 persen (turun dari 43,19 persen di tahun 2016); selanjutnya Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,90 persen (turun dari 20,63 persen di tahun 2016); dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,53 persen (naik dari 8,28 persen di tahun 2016).

Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,77 persen (naik dari 8,22 persen di tahun 2016); dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, dan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,46 persen (naik dari 5,55 persen di tahun 2016). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Lapangan Usaha Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang mengalami peningkatan peranan terhadap struktur ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 dibanding tahun 2016. Sebaliknya, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan, peranannya menurun pada tahun 2020 dibanding tahun 2016. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Tabel II. 18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.22	7.98	7.89	7.91	8.77
B	Pertambangan dan Penggalian	43.19	46.6	46.69	45.6	41.43
C	Industri Pengolahan	20.63	18.93	18.14	17.82	18.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	8.28	7.92	8.42	8.97	9.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.55	5.41	5.54	5.86	6.46
H	Transportasi dan Pergudangan	3.71	3.59	3.62	3.71	3.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.95	0.92	0.96	1.03	1.06
J	Informasi dan Komunikasi	1.3	1.25	1.26	1.34	1.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.72	1.53	1.53	1.57	1.73
L	Real Estat	0.96	0.88	0.88	0.88	0.96
M,N	Jasa Perusahaan	0.22	0.21	0.2	0.21	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.32	1.97	1.94	2	2.1
P	Jasa Pendidikan	1.61	1.53	1.59	1.69	1.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.63	0.59	0.61	0.66	0.88
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.62	0.6	0.63	0.68	0.72

Sumber : PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2015 -2019

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 45,49 persen (angka ini meningkat dari 45,03 persen di tahun 2015), Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,77 persen (menurun dari 20,59 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,08 persen (naik dari 8,29 persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,92 persen (naik dari 7,72 persen di tahun 2015), dan lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, dan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen (naik dari 5,12 persen di tahun 2015). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori-kategori yang mengalami peningkatan peranan pada tahun 2019 dibanding tahun 2015. Sebaliknya, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, peranannya

menurun pada tahun 2019 dibanding tahun 2015. Sementara itu, lapangan usaha lainnya memiliki peranan masing-masing kurang dari 4 persen.

2.3.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi akibat turunnya produksi dan kinerja ekonomi di sebagian besar lapangan usaha karena mewabahnya pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 sebesar 472,86 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 486,71 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan atau kontraksi ekonomi sebesar 2,85 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, sembilan lapangan usaha mengalami kontraksi. Dua lapangan usaha di antaranya mengalami kontraksi mencapai lebih dari lima persen. Sementara itu, delapan lapangan usaha lainnya masih mampu tumbuh secara positif, bahkan dua lapangan usahanya ada yang tumbuh lebih dari sepuluh persen.

Tabel II. 19 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,639.40	30,261.40	32,140.16	33,396.19	33,020.52

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
B	Pertambangan dan Penggalian	212,649.63	216,447.10	218,686.72	233,762.25	223,064.39
C	Industri Pengolahan	93,740.63	96,364.83	96,797.54	96,824.49	94,146.62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	223.40	238.53	261.83	284.53	317.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201.72	218.60	224.57	235.44	247.87
F	Konstruksi	29,510.46	31,211.25	33,754.00	35,683.00	35,228.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,129.06	23,948.48	25,679.00	27,025.57	27,276.57
H	Transportasi dan Pergudangan	12,384.34	13,184.39	13,937.81	14,264.27	13,466.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	3,463.69	3,753.59	4,080.24	4,340.12	4,109.29
J	Informasi dan Komunikasi	6,483.81	6,989.14	7,295.36	7,795.54	8,338.48

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,572.95	6,525.58	6,751.78	6,966.07	7,137.99
L	Real Estat	3,901.89	4,032.55	4,227.27	4,316.69	4,351.11
M,N	Jasa Perusahaan	824.64	853.81	869.17	914.13	889.67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,837.74	7,565.60	7,941.46	8,252.79	7,925.15
P	Jasa Pendidikan	5,929.25	6,328.42	6,780.28	7,036.31	7,250.32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,325.82	2,492.46	2,691.43	2,864.49	3,428.05
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,185.41	2,326.15	2,548.79	2,750.36	2,665.79
	TOTAL	439,003.84	452,741.88	464,667.41	486,712.24	472,864.89

Sumber : PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2015 -2019

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sembilan persen tersebut antara lain Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 8,65 persen yang merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019, disusul oleh Lapangan Usaha Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 8,16 persen, Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,99 persen, Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 6,89 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,86 persen, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 6,12 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 5,62 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 5,56 persen, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,20 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah Lapangan Usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 4,64 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 4,25 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 3,88 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 3,03 persen, lapangan usaha Real Estate tumbuh sebesar 2,12 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 2,11 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 1,43 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,19 persen

2.3.6 Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi. Investasi juga bisa juga dipakai untuk alat pemerataan, baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menurut mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Berikut merupakan data-data realisasi investasi pada Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II. 20 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2010	49	7.881.289,78	6.049	0
2011	56	16.196.330,39	12.227	14
2012	44	7.709.270,00	50.240	114

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2013	103	18.441.377,30	36.552	6
2014	60	12.983.049,70	9.505	41
2015	143	9.611.313,10	24.825	25
2016	243	6.885.124,60	29.023	30
2017	357	10.980.216,40	9.236	58
2018	520	25.941.962,10	12.935	298
2019	2.227	22.674.053,10	20.837	14
2020	3.924	25.934.008,80	19.952	78

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Realisasi investasi tersebut berdasarkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Timur. Penanam modal dalam negeri adalah Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah realisasi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) dari Tahun 2018 hingga 2020 dilihat dari masing-masing sektor.

Tabel II. 21 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020

No	Sektor Usaha	2018			2019			2020		
		Investasi	Tenaga Kerja		Investasi	Tenaga Kerja		Investasi	Tenaga Kerja	
			TKI	TKA		TKI	TKA		TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER									
1	Tan. Pangan & Perkebunan	3.747.269.700.000	4.601	3	4.278.114.900.000	7.621		4.738.083.600.000	3.151	2
2	Peternakan				33.400.000					
3	Kehutanan	602.835.400.000	151		283.625.000.000	650	7	125.549.600.000	1.396	1
4	Perikanan							3.000.000		
5	Pertambangan	12.559.385.400.000	3.568	12	8.712.257.700.000	5.025	10	3.818.587.600.000	5.01	18
II	SEKTOR SEKUNDER									
1	Industri Makanan	1.687.495.700.000	1.454		569.890.600.000	1.288	1	1.397.339.400.000	866	2
2	Industri Tekstil									
3	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki									
4	Industri Kayu	264.104.300.000	21		350.224.000.000	26		97.509.900.000	95	
5	Industri Kertas & Percetakan					4				
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	1.034.700.000	192		444.145.600.000	15		7.965.221.900.000	3.06	49
7	Industri Karet & Plastik				9.000.000.000	10		70.800.000		
8	Industri Mineral Non Logam	17.919.900.000	29		292.133.100.000			95.000.000		
9	Industri Logam Mesin & Elektrik							5.000.000.000		

No	Sektor Usaha	2018			2019			2020		
		Investasi	Tenaga Kerja		Investasi	Tenaga Kerja		Investasi	Tenaga Kerja	
			TKI	TKA		TKI	TKA		TKI	TKA
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam					30				
11	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	7.620.000.000	50		151.706.500.000	98		3.626.300.000	105	
12	Industri Lainnya				509.500.000	2		70.348.600.000	46	
III	SEKTOR TERSIER									
1	Listrik, Gas, dan Air	2.559.556.900.000	725	282	2.021.363.600.000	1.366	119	759.122.700.000	482	
2	Konstruksi	3.204.289.500.000	1.193		1.223.384.700.000	1.153	1	5.777.776.900.000	468	
3	Perdagangan & Reparasi	82.557.400.000	251		341.327.600.000	549		218.379.900.000	1.129	
4	Hotel & Restoran	480.000.000	29		1.086.261.800.000	882		25.157.000.000	233	
5	Transportasi, Gudang, & Komunikasi	165.403.800.000	270		940.606.300.000	1.121		459.299.200.000	2.483	4
6	Perumahan, Kawasan Industri, & Perkantoran	26.874.400.000	86		345.944.100.000	107		53.687.400.000	9	
7	Jasa Lainnya	1.015.135.000.000	315	1	1.623.524.700.000	890	3	419.150.000.000	1.419	2
	TOTAL	25.941.962.100.000	12.935	298	22.674.053.100.000	20.837	141	25.934.008.800.000	19.952	78

Sumber: DPMPSTSP Kaltim, Data Rencana & Realisasi Investasi PMDN 2010-2020, 2021

Tabel II. 22 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020

No.	Sektor Usaha	2018			2019			2020		
		Realisasi			Realisasi			Realisasi		
		Investasi US \$	Tenaga Kerja		Investasi US \$	Tenaga Kerja		Investasi US \$	Tenaga Kerja	
			TKI	TKA		TKI	TKA		TKI	TKA
I.	SEKTOR PRIMER									
1	Tan. Pangan & Perkebunan	63.157.800	1396	4	185.796.300	5.637	24	67.781.500	3.594	5
2	Peternakan	956.300	74							
3	Kehutanan	657.100	3082	1	2.751.700	2.438	9	2.071.400	32	
4	Perikanan	135.500								
5	Pertambangan	188.763.000	4928	25	306.457.800	5.962	34	167.858.400	301	34
II.	SEKTOR SEKUNDER									
1	Industri Makanan	118.386.600	1463	7	14.264.600	251		41.235.500	381	5
2	Industri Tekstil									
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki									
4	Industri Kayu	6.600	176		33.300	53	2			
5	Industri Kertas & Pencetakan									
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	760.700	42	1	60	94	2	32.861.600	137	6
7	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	256.700	18		561.100	156		986.400	4	
8	Industri Mineral Non Logam		7		15.809.600	20		24.840.000	21	32

No.	Sektor Usaha	2018			2019			2020		
		Realisasi			Realisasi			Realisasi		
		Investasi US \$	Tenaga Kerja		Investasi US \$	Tenaga Kerja		Investasi US \$	Tenaga Kerja	
TKI	TKA		TKI	TKA		TKI	TKA			
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin Elektronik	22.600	2	1	1.879.400	16	1	276.400	9	
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	253.200	3		1.533.400			3.550.700	7	
11	Industri Alat Angkut & Transportasi Lain		49	2	43.800	68	2		12	
12	Industri Lainnya	526.100	670		134.600	4	1			
III.	SEKTOR TERSIER									
1	Listrik, Gas dan Air	53.012.000	32	1	280.607.900	62	3	278.800	18	
2	Konstruksi	5.093.100	1							
3	Perdagangan & Reparasi	3.738.700	159	14	4.258.100	75	11	5.618.500	690	4
4	Hotel & Restoran	2.245.800	67	4	1.297.000	63		791	9	
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	86.566.000	7	1	14.847.700	185	11	29.415.000	589	
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	301.200			146.900			221.300	8	
7	Jasa Lainnya	62.662.600	324	7	32.616.200	82		240.700	56	6
TOTAL		587,501,600.00	12500	68	863.099.400	15.166	100	\$ 378.027.200	5.868	92

Sumber: DPMPTSP Kaltim, Data Rencana & Realisasi Investasi PMA 2010-2020, 2021

Tabel II. 23 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
Paser	170	432.992,30	1.016	8
Kutai Barat	156	1.897.214,70	121	0
Kutai Kartanegara	466	2.284.878,70	3.674	9
Kutai Timur	533	1.317.579,20	4.065	0
Berau	249	3.615.380,50	1.811	6
Penajam Paser Utara	114	487.048,20	850	0
Mahakam Ulu	20	508.160,00	11	0
Balikpapan	1.027	13.849.409,80	6.269	53
Samarinda	822	659.902,80	1.409	2
Bontang	367	881.443,00	726	0
Kalimantan Timur	3.924	25.934.008,80	19.952	78
2019	2.227	22.674.053,10	20.837	141
2018	520	25.941.962,10	12.935	298
2017	357	10.980.216,40	9.236	58

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Tabel II. 24 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
Paser	30	16.069,90	15	0
Kutai Barat	67	37.063,60	309	4
Kutai Kartanegara	135	63.190,10	965	20
Kutai Timur	113	117.645,70	2.867	52
Berau	87	16.223,30	59	0
Penajam Paser Utara	22	5.870,00	30	0
Mahakam Ulu	16	11.453,80	38	0
Balikpapan	214	36.093,80	754	3
Samarinda	82	18.803,70	813	13
Bontang	12	55.613,30	18	0
Kalimantan Timur	778	378.027,20	5.868	92
2019	903	863.099,40	15.166	100

Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2018	513	587.501,60	12.500	68
2017	566	1.285.215,20	15.508	153

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021

Investasi, atau penanaman modal, merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di suatu wilayah. Terkait dengan penanaman modal dalam negeri, di Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdapat 3.924 proyek dengan nilai realisasi investasi 25,93 triliun rupiah. Sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi tercatat menjadi sektor dengan realisasi investasi terbesar, yakni 7,97 triliun rupiah.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, wilayah yang paling banyak mendapatkan penanaman modal dalam negeri pada tahun 2020 adalah Kota Balikpapan dengan 13,85 triliun rupiah. Kota Balikpapan juga menjadi kota dengan proyek terbanyak yakni 1.027 proyek. Sementara itu, dari penanaman modal luar negeri, Kalimantan Timur pada tahun 2020 mendapat 778 proyek dengan nilai realisasi investasi 378,03 miliar US\$, turun bila dibandingkan dengan realisasi investasi 2019. Dari jumlah tersebut, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan mendapat proyek terbanyak dengan 181 proyek. Sementara itu, berdasarkan nilainya, sektor Pertambangan masih merajai realisasi investasi modal asing dengan nilai 167,86 miliar US\$. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Kota Balikpapan memperoleh proyek terbanyak dengan 214 proyek, sementara Kabupaten Kutai Timur memperoleh nilai investasi modal asing terbesar dengan nilai 117,64 miliar US\$. Secara total, Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencatatkan penanaman modal sebesar 31,38 triliun rupiah.



3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan” dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

3.1.1 Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023 yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

3.1.2 Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya

alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani (pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang

kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (raw material) dan belum pada barang olahan (processed product). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan

memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta

bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk

mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energy baru terbarukan (EBT).

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna

meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

3.2.1 Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur

1. Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi dan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. PKN, meliputi: Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;

Tabel III. 1 Rincian Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Timur

Nama PKN		Fungsi
Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan Regional • Pusat Industri • Pusat Transportasi Udara Internasional • Pusat Transportasi Laut Internasional • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Jasa Pariwisata • Pusat Pendidikan Tinggi
	Tenggarong	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Pengolahan Batubara • Pusat Pemerintahan Kabupaten • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional • Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit • Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata • Pengembangan Industri Kreatif • Pusat Olahraga Skala Nasional • Perikanan Budidaya • Pusat Pendidikan Tinggi • Pusat Pengendalian Laut

Nama PKN		Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Hasil Hutan • Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan Provinsi • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan dan Jasa Regional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa Regional • Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata • Pusat Transportasi Darat dan Laut Regional • Pusat Pendidikan Tinggi • Pusat Pelayanan Kesehatan • Pusat Siaran dan Telekomunikasi • Pusat Olah Raga Skala Nasional dan Internasional • Pusat Transportasi Laut Regional dan Internasional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional
	Bontang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Industri Strategis Nasional • Pusat Pengolahan Migas • Pusat Pemerintahan Kota • Pusat Perdagangan Regional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional • Pusat Pengolahan Perikanan

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

b. PKW, meliputi: Tana Paser, Sendawar, Kota Sangatta, Tanjung Redeb;

Tabel III. 2 Rincian Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama PKW	Fungsi
1	Tana Paser (Kab. Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan perhubungan udara pengumpan • Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit • Pusat pemerintahan kabupaten
2	Sendawar (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pengolahan hasil tambang batubara • Pengolahan hasil hutan
3	Kota Sangatta (Kab. Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perikanan tangkap • Pusat pelayanan pariwisata • Pusat pengolahan hasil tambang batubara
4	Tanjung Redeb (Kab. Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Industri • Pengolahan hasil hutan • Pusat pengolahan hasil tambang batubara • Pengembangan perikanan tangkap • Pusat pelayanan pariwisata • Pusat pemerintahan kabupaten

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

c. PKWp, meliputi: Penajam dan Ujoh Bilang

Tabel III. 3 Rincian Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama PKWp	Fungsi
1	Penajam (Kab. Penajam Paser Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan
2	Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan hasil hutan • Pusat pengembangan perkebunan • Pusat pemerintahan kabupaten • Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan • Pusat Pariwisata

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

d. PKL, meliputi: Long Ikis, Kuaro, Muara Komam, Batu Kajang, Long Kali (Kabupaten Paser), Long Hubung, Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu), Long Iram Kota, Muara Lawa, Mook Manaar Bulatn (Kabupaten Kutai Barat), Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, Sido Bangen (Kabupaten Berau), Petung, Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara);

Tabel III. 4 Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama PKL	Fungsi
1	Long Ikis (Kabupaten Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
2	Kuaro (Kabupaten Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
3	Muara Komam (Kabupaten Paser)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Gerbang masuk provinsi dari Provinsi Kalimantan Selatan
4	Batu Kajang (Kabupaten Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
5	Long Kali (Kabupaten Paser)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

No.	Nama PKL	Fungsi
6	Long Hubung (Kabupaten Mahakam Ulu)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
7	Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat yang mendukung kegiatan di PKSN Long Pahangai dan PKSN Long Apari
8	Long Iram Kota (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
9	Muara Lawa (Kab. Kutai Barat)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
10	Mook Manaar Bulatn (Kab. Kutai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sendawar
11	Muara Badak (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
12	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Samarinda dan PKN Balikpapan • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
13	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
14	Kembang Janggut (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
15	Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
16	Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
17	Sebulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
18	Loa Kulu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
19	Samboja (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
20	Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
21	Anggana (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
22	Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Pusat yang mendukung kegiatan di PKN Tenggarong
23	Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
24	Muara Wahau (Kabupaten Kutai Timur)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

No.	Nama PKL	Fungsi
25	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Kota Sangatta • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
26	Merancang (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat industri kabupaten
27	Tepian Buah (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
28	Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
29	Talisayan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
30	Mangkajang (Kabupaten Berau)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya • Pusat industri kabupaten
31	Labanan (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
32	Sido Bangun (Kabupaten Berau)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
33	Petung (Kab. Penajam Paser Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat yang mendukung kegiatan di PKW Penajam • Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya
34	Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara)	Pusat kegiatan lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

e. PKSN, yaitu Long Pahangai dan Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu).

Tabel III. 5 Rincian Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama PKSN	Fungsi
1	Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pertahanan dan keamanan perbatasan • Didukung oleh pengembangan Bandar Udara Datar Dawai
2	Long Apari (Kab. Mahak Ulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pertanian dan keamanan perbatasan • Wilayah terdekat dengan perbatasan • Pengembangan pos lintas batas dan pos perbatasan • Didukung oleh pengembangan Bandar Udara Long Apari

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

2. Sistem Jaringan Transportasi Darat

a. Rincian Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan wilayah provinsi. Jaringan jalan ditetapkan dengan tujuan untuk menghubungkan antarsistem pusat perkotaan dalam wilayah provinsi, antara sistem pusat perkotaan wilayah provinsi dengan pelabuhan, antara sistem pusat perkotaan wilayah provinsi dengan kawasan budi daya, dan antara sistem pusat perkotaan wilayah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dasar pertimbangan penentuan rencana jaringan jalan terdiri atas:

- 1) Ketersediaan jaringan jalan di wilayah provinsi saat ini;
- 2) Strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 3) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah provinsi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
- 4) Kebutuhan pengembangan jalan baru atau peningkatan fungsi jaringan jalan yang sudah ada mendukung kegiatan ekonomi unggulan berupa pariwisata, pertanian, dan perikanan
- 5) Pengembangan komoditas unggulan di provinsi Kalimantan Timur yang terdapat sentra produksi seperti kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan industri pengolahan untuk mendukung kemudahan pergerakan komoditas unggulan;
- 6) Mendukung aksesibilitas antar kawasan produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendidikan.

Tabel III. 6 Rincian Jaringan Jalan Arteri Primer di Provinsi Kalimantan Timur

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)
1	Ruas Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalimantan Selatan)-Bts. Kota Tana Paser	66,31
2	Ruas Jalan Bts. Kota Tana Paser (Tanah Grogot) – Lolo	16,94
3	Ruas Jalan Lolo – Kuaro	6,35
4	Ruas Jalan Kuaro – Kademan (Paser)	54,87
5	Ruas Jalan Kademan – Penajam (Paser)	59,06
6	Ruas Jalan Bts. Kota Balikpapan – Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja)	12,69
7	Ruas Jalan Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja) – Loa Janan	63,33
8	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Samarinda	9,42
9	Ruas Jalan Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Sp. 3 Sambera	21,90
10	Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Santan	30,81
11	Ruas Jalan Santan – Bontang	47,92
12	Ruas Jalan Bontang – Sangatta	54,84
13	Ruas Jalan Sangatta – Sp. Perdau	32,02
14	Ruas Jalan Sp. Perdau – Muara Lembak	13,05
15	Ruas Jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	61,43
16	Ruas Jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy (Maloy)	8,70
17	Ruas Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar	94,41
18	Ruas Jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau	35,97
19	Ruas Jalan Sp. 3 Muara Wahau – Kelay (Km. 100 – Muara Wahau/PDC)	103,37
20	Ruas Jalan Kelay – Labanan (Labanan – Km. 50)	67,38
21	Ruas Jalan Labanan –Tanjung Redeb	22,49
22	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Bts. Kab. Bulungan	54,71
23	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Tenggarong	26,47
24	Ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp. 3 Senoni	33,32
25	Ruas Jalan Sp. 3 Senoni – Kota Bangun	45,09
26	Ruas Jalan Kota Bangun – Gusig	86,34
27	Ruas Jalan Gusig – Sp. Blusuh	95,67
28	Ruas Jalan Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalimantan Tengah	89,08
29	Ruas Sp. Blusuh – Sp. 3 Damai	35,29
30	Ruas Sp. 3 Damai – Barong Tongkok	28,55
31	Ruas Jalan Barong Tongkok – Tering (Kutai Barat)	25,04
32	Ruas Jalan Yos Sudarso (Sangatta)	11,88
33	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy	16,67
34	Ruas Jalan Soekarno - Hatta (Balikpapan)	25,09

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)
35	Ruas Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda)	0,60
36	Ruas Jalan Slamet Riyadi (Samarinda)	2,61
37	Ruas Jalan Antasari (Samarinda)	1,73
38	Ruas Jalan Juanda (Samarinda)	2,31
39	Ruas Jalan Syahrani – M. Nur (Samarinda)	6,48
40	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Lempake) (Samarinda)	2,48
41	Ruas Jalan Batu Aji – Kuaro	73,04
42	Ruas Jalan Syarifudin Yoes (Jl. Ke Airport) (Kota Balikpapan)	5,69
43	Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan)	8,07
44	Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan)	4,06
45	Ruas Jalan MT. Haryono / Ring Road (Balikpapan)	2,75

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 7 Jalan Kolektor Primer 1 (K-1) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
1	Ruas Jalan Noto Sunardi (Tana Paser)	2,03
2	Ruas Jalan Sudirman (Tana Paser)	1,50
3	Ruas Jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)	2,64
4	Ruas Jalan S. Parman (Bontang)	2,33
5	Ruas Jalan Bigjen Katamsa (Jl. Bayangkara) (Bontang)	2,29
6	Ruas Jalan MT. Haryono (Bontang)	1,18
7	Ruas Jalan Letjen. Suprpto (Jl. Diponegoro) (Bontang)	0,43
8	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Ahmad Dahlan) (Bontang)	0,93
9	Ruas Jalan Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso) (Bontang)	1,87
10	Ruas Jalan Batang Mian (Tj. Redeb)	1,79
11	Ruas Jalan Bujangga (Tj. Redeb)	0,77
12	Ruas Jalan Sambit (Tj. Redeb)	1,44
13	Ruas Jalan Pemuda (Tj. Redeb)	1,18
14	Ruas Jalan Maulana (Tj. Redeb)	0,58
15	Ruas Barong Tongkok – Mentiwan (Sendawar)	20,20
16	Ruas Jalan Untung Suropati (Samarinda)	1,44
17	Ruas Jalan RE. Martadinata	0,98
18	Ruas Jalan Gajah Mada (Samarinda)	1,41
19	Ruas Jalan Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda)	1,10

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
20	Ruas jalan Gunung Tabur – Usiran (Kabupaten Berau)	56,30
21	Ruas jalan Jalan Usiran – Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	52,68
22	Jl Sudirman (Tenggarong)	0,41
23	Jl Wolter Monginsidi (Tenggarong)	2,22
24	I KH Akhmad Muksin (Tenggarong)	2,16
25	Jl Diponegoro (Tenggarong)	0,74
26	Jl. AM Sangaji (Tenggarong)	9,15
27	Jl. KH. Mas Mansyur (Samarinda)	6,20

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 8 Jalan Kolektor Primer 2 (K-2) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
1	Ruas Jalan Bts. Balikpapan – Sp. Samboja	36,42
2	Ruas Jalan Mulawarman (Balikpapan)	15,75
3	Ruas Jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara)	40,99
4	Ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga (Kab. Kutai Kartanegara)	20,83
5	Ruas Jalan Bung Tomo (Samarinda)	2,20
6	Ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas)	20,29
7	Ruas Jalan Km. 38 – Sp. Semboja	7,30
8	Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu	69,09
9	Ruas Jalan Suryanata (Samarinda)	9,20
10	Ruas Jalan Km. 38 – Semoi Sepaku	41,11
11	Ruas Jalan Semoi Sepaku – Petung/Penajam	76,00
12	Ruas Jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar	44,00
13	Ruas Jalan Sp. Bentuas – Sp. Muara Jawa	51,38
14	Ruas Jalan Harun Nafsi	4,80
15	Ruas Jalan H.M. Rifaddin	7,35
16	Ruas KM 5,5 Balikpapan – Kariangau	18,00
17	Ruas Jalan Moeis Hasan (Samarinda)	2,10
18	Ruas Jalan Teuku Umar (Samarinda)	3,95
19	Ruas Jalan MT. Haryono (Samarinda)	2,50
20	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan	152,60
21	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy – KIPi Maloy 2	6,93
22	Ruas Jalan Labanan – Tepian Buah	35,03
23	Ruas Jalan R. Soeprpto (Samarinda)	1,10

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
24	Ruas Jalan S. Parman (Samarinda)	1,10
25	Ruas Jalan A. Yani (Samarinda)	2,00
26	Ruas Jalan DI. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Ahmad Yani) (Samarinda)	1,00
27	Bentuas – Noni – Sanga-sanga	11,00
28	Ring Road Tanjung Redeb – Teluk Bayur	18,00

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 9 Jalan Kolektor Primer 3 (K-3) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
1	Ruas Jalan Samarinda – Anggana	21,32
2	Ruas Jalan Jakarta (Samarinda)	3,00
3	Ruas Jalan Rapak Indah (Samarinda)	2,00
4	Ruas Jalan APT. Pranoto (Samarinda)	1,95
5	Ruas Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolak Darat- Mentiwan	20,20

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 10 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Ruas Jalan	Panjang (Km)
1	Ruas Jalan Batulicin – Tana Paser (Kuaru)	57,28
2	Ruas Jalan Tana Paser (Kuaru) – Penajam	55,80
3	Ruas Jalan Kota Balikpapan – Kota Samarinda	99,02
4	Ruas Jalan Kota Samarinda – Kota Bontang	94,00
5	Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta	43,30
6	Ruas Jalan Kota Sangatta – Maloy	130,00
7	Ruas Jalan Samarinda – Kota Tenggarong	22,50

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

b. Terminal

Penentuan tipe dan kelas terminal dilakukan berdasarkan fungsi pelayanan, fasilitas pelayanan dan kewennagan. Berdasarkan fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993). Terminal penumpang Tipe A, yaitu

yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

Tabel III. 11 Terminal Penumpang Nasional (Tipe A) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Terminal Penumpang	Kabupaten/ Kota	Hirarki Peran & Fungsi
1	Batu Ampar	Kota Balikpapan	AKAP
2	Samarinda Seberang	Kota Samarinda	AKAP
3	Kuaro	Kabupaten Paser	AKAP
4	Melak	Kabupaten Kutai Barat	AKAP
5	Rinding	Kabupaten Berau	AKAP

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

Tabel III. 12 Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Terminal Penumpang	Kabupaten/ Kota	Hirarki Peran & Fungsi
1	Lempake	Kota Samarinda	AKDP
2	Sei Kunjang	Kota Samarinda	AKDP
3	Bontang	Kota Bontang	AKDP
4	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara	AKDP
5	Timbau	Tenggarong	AKDP
6	Kota Bangun	Kabupaten Kutai Kartanegara	AKDP
7	Sangatta	Kabupaten Kutai Timur	AKDP
8	Ujoh Bilang	Kabupaten Mahakam Ulu	AKDP
9	Terminal Bersama (Simpang Tiga Bontang- Sangatta)	Kutai Timur	AKDP

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

c. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Dasar pertimbangan penentuan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas:

- 1) ketersediaan dan kebutuhan pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah provinsi di masa mendatang. Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sudah ada di Kariangau, Penajam, Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, tapi masih belum berkembang dengan baik;
- 2) strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 3) rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan menurut dokumen perencanaan meliputi:
 - Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional belum menetapkan pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perhubungan Tahun 2020.
 - Terdapat Perbedaan Antara RTRWP 2016 dan Usulan Revisi RTRWP, Usulan 2020 Pelabuhan Penyebrangan bertambah 6 Pelabuhan Penyebrangan (eksisting 2) dan Pelabuhan Sungai dan danau bertambah 44 Pelabuhan Sungai dan Danau (Eksisting 4)

Berikut merupakan tabel rencana sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel III. 13 Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Sungai dan Danau di Provinsi Kalimantan Timur

No	Pelabuhan	Lokasi	Hirarki Peran dan Fungsi
1	Sei Kunjang	Samarinda	Antar Kab/Kota
2	Kota Bangun	Kutai Kartanegara	Antar Kab/Kota
3	Melak	Kutai Barat	Antar Kab/Kota
4	Batu Dinding (Ujoh Bilang)	Mahakam Hulu	Antar Kab/Kota

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 14 Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Lintas Penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur

No	Pelabuhan	Lokasi	Hirarki Peran dan Fungsi
1	Kariangau	Balikpapan	Antar Kab/Kota Lintas Provinsi
2	Penajam	Penajam Paser Utara	Antar Kab/Kota

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

d. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Tabel III. 15 Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Pelabuhan	Lokasi	Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)
1	Semayang	Balikpapan	Utama (PU)
2	Samarinda	Samarinda	Pengumpul (PP)
3	Kampung Baru	Balikpapan	Pengumpul (PP)
4	Tanjung Laut	Bontang	Pengumpul (PP)
5	Tanjung Santan	Kutai Kertanegara	Pengumpul (PP)
6	Kuala Samboja	Kutai Kartanegara	Pengumpul (PP)
7	Sangatta	Kutai Timur	Pengumpul (PP)
8	Pondong	Paser	Pengumpul (PP)
9	Penajam Paser	Penajam Paser Utara	Pengumpul (PP)
10	Teluk Adang	Paser	Pengumpul (PP)
11	Lhok Tuan	Bontang	Pengumpul (PP)
12	Tanjung Redeb	Berau	Pengumpul (PP)
13	Sangkulirang	Kutai Timur	Pengumpan Regional (PR)
14	Talisayan	Berau	Pengumpan Lokal (PL)
15	Maloy	Kutai Timur	
16	Tg. Batu	Berau	Pengumpan

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

e. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana sistem jaringan kereta api menurut dokumen perencanaan meliputi:

a) Jaringan Jalur Kereta Api :direncanakan pembangunan Jaringan kereta api yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Trans Kalimantan Railways. Jaringan rel kereta api akan terdiri dari:

- Jaringan perkeretaapian lintas utama antar kota dengan prioritas tinggi : Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara. Dan Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)
- Jaringan perkeretaapian yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan : Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur), Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan, Tenggarong – Samarinda – Sanga-Sanga– Samboja.
- Jaringan perkeretaapian lintas antar kota yang menghubungkan dengan potensi batubara : Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) –Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara – Balikpapan, Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Kartanegara –Samarinda, Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung – Maloy.
- Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis : Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang.

b) Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api dikelompokkan dalam:

- Kelas besar yang direncanakan di Tanah Paser, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, Tenggarong, Tanjung Redeb, dan Melak.
- Kelas sedang yang direncanakan di Penajam, Bontang, Sangkulirang, Muara Wahau, dan Ujoh Bilang.

f. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sistem jaringan transportasi udara terdiri atas:

- 1) bandar udara dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah provinsi meliputi bandar udara pengumpul dan bandar udara khusus;
- 2) ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara dan/atau di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Dasar pertimbangan penentuan sistem jaringan transportasi udara terdiri atas:

- 1) ketersediaan dan kebutuhan pengembangan sistem jaringan transportasi udara di wilayah provinsi di masa mendatang.
- 2) strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 3) rencana sistem jaringan transportasi udara menurut dokumen perencanaan meliputi:
 - a) Kepmenhub Nomor KM 166 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional, Tahun 2019 dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
 - b) Perbedaan Antara RTRWP 2016 dan Usulan Revisi RTRWP, Bandara Temindung, Kembang Janggut, Loa Kulu dan Long Bangun yang hilang dalam usulan Revisi.
 - c) Perubahan Peningkatan Hirarki dan Rencana di Usulan Revisi RTRWP

- d) Terdapat 9 Bandar udara, (3 Bandar udara Pengumpul, 6 Bandar udara Pengumpan), 4 Rencana Bandar udara Pengumpan dan 3 Rencana Bandar Udara Khusus

Bandar udara ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Ruang udara untuk penerbangan digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Provinsi Kalimantan Timur. Secara jelas, sistem jaringan transportasi udara diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III. 16 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi Kalimantan Timur

NO	BANDAR UDARA	LOKASI	HIERARKI
1	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Pengumpul Skala Pelayanan Primer
2	Samarinda Baru	Samarinda	Pengumpul Skala Sekunder
3	Temindung	Samarinda	Pengumpul Skala Sekunder
4	Kalimarau	Berau	Pengumpul Skala Tersier
5	Bontang	Bontang	Pengumpul Skala Tersier
6	Kota Bangun	Kutai Kartanegara	Pengumpan
7	Datah Dawai	Mahakam Hulu	Pengumpan
8	Paser	Paser	Pengumpan
9	Melak	Kutai Barat	Pengumpan
10	Maratua	Berau	
11	Miau Baru	Kutai Timur	
12	Long Apari	Mahakam Hulu	
13	Kembang Janggut	Kutai Kartanegara	
14	Sangkimah	Kutai Timur	
15	Maloy	Kutai Timur	
16	Loa Kulu	Kutai Kartanegara	
17	Long Bagun	Mahakam Hulu	

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

g. Sistem Jaringan Energi

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sistem jaringan energi terdiri atas:

- 1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- 2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Menurut Lampiran I Permen ATR/KaBPN 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas:

- 1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau
- 2) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

Menurut Lampiran I Permen ATR/KaBPN 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas:

- 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yang ada di wilayah provinsi;
- 2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTUT/ SUTET/ SUTT/ SUTTAS), kabel laut; dan/atau saluran transmisi lainnya.
 - jaringan distribusi tenaga listrik.
 - gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.

Sistem jaringan energi ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan

akan datang di Provinsi Kalimantan Timur. Secara jelas, sistem jaringan energi dan kelistrikan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III. 17 Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Timur

No	Pusat Pembangkit Listrik	Status Prasarana Listrik	Arahan Pengembangan
1	Kota Samarinda	Power House PLTU 1 x 60 MW	Percepatan Pembangunan
2	Kota Bontang	PLTD 4 x 24 MW	Perluasan Daya
3	Kota Balikpapan	PLTD 2 x 25 MW	Pemindahan Daya
4	Janju (Kabupaten Paser)	PLTU 2 x 7 MW	Pengembangan
5	Senipah (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTG 1 x 35 MW	Pengembangan
6	Teluk Bayur (Kabupaten Berau)	PLTU 2 x 7 MW	Pengembangan
7	Lati (Kabupaten Berau)	PLTU 3 x 7 MW dan 1 x 12 MW	Pengembangan
8	Kelay (Kabupaten Berau)	PLTA 2 x 75 MW	Pengembangan
9	Sambaliung (Kabupaten Berau)	PLTD 1 x 7 MW	Pengembangan
10	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTU 2 x 100 MW	Pengembangan
11	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)	PLTD 2 x 1 MW	Pengembangan
12	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTD 2 x 100 MW	Pengembangan
13	Kaltim Peaking (FTP 2)	PLTG 2 x 50 MW	Pengembangan
14	Kaltim1	PLTG 1 x 50 MW	Pengembangan
15	Mulut Tambang (Kabupaten Kutai Timur)	PLTU 1.400 MW	Pembangunan
16		1.100 MW	Pemenuhan Kebutuhan Daya Untuk Rencana Jangka Menengah
17		1.952 MW	Pemenuhan Kebutuhan Daya Untuk Rencana Jangka Panjang
18	Kariangau (Bpp)	PLTU 2 x 2 x 100 MW	
19	PLTMG Kaltimra, Kota Balikpapan	1 x 30 MW	
20	PLTU Kaltim (FTP2) Bontang	2 x 100 MW	
21	PLTU Kaltim 4, Kukar	1 x 100 MW	
22	PLTGU Senipah, Kukar	1 x 100 MW	

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 18 Pembangunan PLTA Potensial di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Lokasi PLTA	Kabupaten / Kota
1	Sungai Sembakung	Berau
2	Baai	Kutai Timur
3	Karangan	Kutai Timur
4	Mahakam	Kutai Kartanegara
5	Riko	Penajam Paser Utara
6	Kelai	Berau
7	Kendilo	Paser
8	PLTA Tabang 353 MW Belayan	Kutai Kartanegara

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 19 Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Jenis Energi	Kabupaten
1	Energi Biomassa	Paser – Penajam Paser Utara
2	Energi Biomassa	Kutai Kartanegara – Kutai Barat
3	Energi Biomassa	Mahakam Ulu
4	Energi Biomassa	Kutai Timur

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 20 Rincian Gardu Induk (GI) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama GI	Kabupaten/Kota
1	GI Bontang	Bontang
2	GI Bontang Ext LB	Bontang
3	GI Sambera (4 LB)	Kutai Kartanegara
4	GI Bukuan / Palaran	Samarinda
5	GI Kuaro / Tana Paser	Paser
6	GI Tengawang	Samarinda
7	GI Karang Joang / Giri Rejo	Balikpapan
8	GI Karang Joang / Giri Rejo Ext LB	Balikpapan
9	GI Sambutan	Samarinda
10	GI Sambutan Ext LB	Samarinda
11	GI Kariangau	Balikpapan
12	GI Industri / Gn. Malang	Balikpapan
13	GI Sei Kleidang / Harapan Baru	Penajam Paser Utara

No	Nama GI	Kabupaten/Kota
14	GI Tenggarong / Bukit Biru	Kutai Kartanegara
15	GI New Industri	Balikpapan
16	GI Kota Bangun	Kutai Kartanegara
17	GI Senipah	Paser
18	GI Batakan / Manggarsari	Balikpapan
19	GI Petung	Penajam Paser Utara
20	GI New Balikpapan	Balikpapan
21	GI New Samarinda	Samarinda
22	GI Melak	Kutai Barat
23	GI Sangatta	Kutai Timur
24	GI TanaPaser	Paser
25	GI Komam / Batu Sopang	Paser
26	GI Long Ikis	Paser
27	GI Berau / Tanjung Redeb	Berau
28	GI Semoi – Sepaku	Penajam Paser Utara
29	GI Maloy	Kutai Timur
30	GI Sanga-Sanga	Kutai Kartanegara
31	GI Sepaso	Kutai Timur
32	GI Muara Wahau	Kutai Timur
33	GI Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
34	GI Muara Bengkal	Kutai Timur
35	GI Talisayan	Berau

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

h. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Dasar pertimbangan penentuan sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

- 1) ketersediaan dan kebutuhan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di wilayah provinsi di masa mendatang. Jaringan sumber daya air sudah ada di Provinsi Kalimantan Timur baik sumber air permukaan, sumber air tanah, prasarana jaringan air, prasarana air baku, pengendali banjir, dan pengaman pantai;

- 2) strategi penataan ruang wilayah provinsi
- 3) penetapan sumber air permukaan berupa Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, dan prasarannya melalui:
 - a) Permen PUPR Permen PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi, Tahun 2015 dan Sumber Daya Air BWS Kalimantan 3
 - b) Terdapat Sumber Air Berupa Bendungan Kewenangan Pusat Eksisting 4 Unit dan Rencana 7 Unit, Kewenangan Provinsi 1 Unit dan Bendung 1 Unit Telake.

Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Provinsi Kalimantan Timur. Secara jelas, sistem jaringan sumber daya air diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III. 21 Wilayah Sungai di Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah Sungai	Nama Wilayah Sungai	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
Lintas Provinsi	Mahakam	DAS Mahakam, DAS Dondang, DAS Samboja, DAS Aji Raden, DAS Manggar, DAS Somber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Meridan, DAS Riko, DAS Tunan, dan DAS Telake.
	Berau-Kelay	DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkadapie, DAS Pidada, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempake, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS MaratuaPayungPayung, DAS MaratuaTelukAlulu, dan DAS Malinau
Lintas Kabupaten/Kota	Karangan	DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayu indah, DAS Talisayan, DAS Dumaring, DAS Lobangkelatuk, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuankelambu, DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Semberang, DAS Manubara, DAS Marukangan, DAS Susuk, DAS Kerajaan,

Wilayah Sungai	Nama Wilayah Sungai	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)
		DAS Karang, DAS Rapak, DAS Kolek, DAS Mangenay, DAS Kaliorang, DAS Selangkau, DAS Sekerat, DAS Sekurau, DAS Bengalon, DAS Bulu, DAS Lipat, DAS Sangatta Baru, DAS Benumuda, DAS Sangkimah, DAS Selimpus, DAS Nakan, DAS Tanjung, DAS Lempake, DAS Bontang, DAS Santan, DAS Nyerakat, DAS Marangkayu, DAS Sambera, DAS Muara Badak, dan DAS Tanjung Buaya
Dalam Kabupaten/Kota	Kandilo	DAS Adang, DAS Kandilo, DAS Kerang, DAS Segendang, DAS Samuntai, DAS Pondong, DAS Apar Besar, DAS Jengeru, DAS Kuaro

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel III. 22 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur

Nama Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Keterangan (Bangunan Pengambil)	Keterangan
Kutai Kartanegara	Loa Janan	Tani Aman Jahuq Purwajaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Tani Aman • Bendung Ahuq • Bendung Purwajaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting • Eksisting
	Loa Kulu	Panoragan Lok Sumber Rempanga Sumber Rejeki Margasari Ukung	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Panoragan • Bendung Lok Sumber • Pompa Rempanga Km.6 • Pompa Rempanga Bukit Biru • Pompa Sumber Rejeki • Pompa Margasari • Pompa Ukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting
	Kembang Janggut	Hambau Kembang Janggut Loa Sakoh Genting Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Hambau • Pompa Kembang Janggut • Pompa Loa Sakoh • Pompa Genting Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting • Eksisting • Eksisting
	Kenohan	Kahala	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Kahala 	Eksisting
	Kota Bangun	Sukabumi Muhuran Sebelimbingan	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Sukabumi • Pompa Muhuran • Pompa Sebelimbingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting • Eksisting
	Marangkayu	Marangkayu Santan	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Marangkayu • Bendung Sebuntal • Bendung Santan 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Rencana • Rencana
	Muara Muntai	Muara Muntai	Pompa Muara Muntai	Eksisting
	Muara Jawa	Handil Baru	Bendung Handil Baru	Eksisting
	Muara Wis	Sebemban Muara Wis	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Sebemban • Pompa Muara Wis 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting
	Muara Kaman	Sidomukti Sabintulung	Bendung Sidomukti	Rencana

Nama Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Keterangan (Bangunan Pengambil)	Keterangan
		Bunga Jadi		
	Muara Kaman & Sebulu	Manunggal Daya	Bendung Manunggal Daya	Rencana
	Sebulu	Sirbaya Beloro Rapak Lambur Selerong Seberang Ngadang	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Sirbaya • Pompa Beloro • Pompa Rapak Lambur • Pompa Selerong Seberang • Pompa Ngadang 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting • Eksisting • Eksisting • Eksisting
	Samboja	Samboja Sei Buluh Limpahung Sei Merdeka Amborawang Ambul Aming	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Samboja • Bendung Sei Buluh • Bendung Amborawang • Pompa Ambul Aming 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Rencana • Eksisting • Eksisting
	Tabang	Ritan Lama Ritan Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Ritan Lama • Pompa Ritan Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Rencana
	Anggana	Sidomulyo Blok A	Pompa Sidomulyo Blok A	Eksisting
	Tenggarong	Mualap	Pompa Mualap	Eksisting
	Tenggarong Seberang	Separi li Tanjung Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Separi li • Pompa Separi • Pompa Tanjung Batu 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting • Eksisting
Kutai Timur	Bengalon	Sepaso Gunung Haji	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Bengalon • Bendung Regulator Tepian Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana • Rencana
	Kaliorang	Kalorang Selangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Kaliorang • Bendung Regulator Kaliorang • Bendung Selangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana • Eksisting • Rencana
	Karangan	Karangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Karangan • Bendung Regulator Baai 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana • Rencana
	Kaubun	Kaubun Cipta Graha Makroman	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Kaubun • Bendung Cipta Graha 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting
	Kongbeng	Miau Baru Pesap	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Miau Baru • Bendung Pesap • Pompa Miau Baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana • Eksisting
	Long Mesangat	Tanah Abang Sumber Sari	Bendung Tanah Abang	Eksisting
	Muara Ancalong	Muara Ancalong		
	Muara Bengkal	Benua Baru Muara Bengkal	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa Benua Baru • Pompa Muara Bengkal 	<ul style="list-style-type: none"> Eksisting Eksisting
	Rantau Pulung	Rantau Pulung	Bendung Rantau Pulung	Rencana
	Sandaran	Sandaran	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Pulai • Bendung Regulator Sandaran 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Rencana
Kutai Barat	Barong Tongkok	Rapak Oros Muara Asa	<ul style="list-style-type: none"> Bendung Rapak Oros Bendung Muara Asa 	<ul style="list-style-type: none"> Eksisting Rencana
	Damai	Jengan Danum	Bendung Jengan Danum	Eksisting
	Melak	Mentiwan	Bendung Mentiwan	Eksisting
	Penyenggahan	Penyenggahan	Pompa Penyenggahan	Eksisting

Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha di Kalimantan Timur

Nama Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Keterangan (Bangunan Pengambil)	Keterangan
	Tering	Tering	Pompa Tering	Eksisting
Mahakam Ulu	Long Hubung	Datah Bilang Bilung	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Datah Bilang • Bendung Bilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisting • Eksisting
Paser	Tanah Grogot	Tana Paser Tana Paser Darat Rantau Panjang Seburung Sungai Tuak	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Kandilo • Bendung Regulator Kandilo • Pompa Seburung • Pompa Sungai Tuak 	Rencana Rencana Eksisting Eksisting
	Paser Belengkong	Sautang Baru Rawa Makmur /Jentik Damit Pabencengan	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Kandilo • Bendung Regulator Kandilo • Pompa Damit • Pompa Pabencengan 	Rencana Rencana Eksisting Eksisting
	Long Ikis	Tajur Long Ikis Selatan	•	
	Batu Engau	Kerang	• Bendungan Kerang	Rencana
	Long Kali	Rantau Belimbing Dekoi Tanjung Kramu Sepering Pepara	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Lambakan • Bendungan Pias • Bendungan Toyu • Bendung Regulator Telake • Pompa Rantau Belimbing • Pompa Dekoi • Pompa Tanjung Kramu • Pompa Sepering • Pompa Pepara 	Rencana Rencana Rencana Rencana Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting
Paser & Penajam Paser Utara	Long Ikis, Long Kali & Babulu	Telake	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Lambakan • Bendungan Toyu • Bendungan Pias • Bendung Regulator Telake 	Rencana Rencana Rencana Rencana
Penajam Paser Utara	Babulu	Babulu Darat Labangka	Bendung Babulu Darat	Eksisting
	Penajam	Petung Tunan	Bendungan Tunan	Rencana
	Sepaku	Sepaku		
	Waru	Waru	<ul style="list-style-type: none"> • Bendung Waru • Bendungan Tunan 	Eksisting Rencana
Berau	Biatan & Talisayan	Biatan	Bendung Biatan	
	Talisayan	Dumaring	Bendung Dumaring	
	Gunung Tabur	Merancang Batu - Batu Sungai Lati Loaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Merancang • Bendung Batubatu • Pompa Loaan 	
	Sambaliung	Beriwit Muara Bangun Tanjung Perengat Bukit Meraang	Embung Beriwit Bendung Muara Bangun Pompa Muara Bangun Pompa Tanjung Perengat Pompa Bukit Meraang	Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

Nama Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Keterangan (Bangunan Pengambil)	Keterangan
	Sambaliung & Tabalar	Semurut & Buyung-Buyung	Bendung Semurut Bendung Buyung-Buyung	Eksisting Eksisting
	Segah	Tepian Buah Harapan Jaya Bukit Makmur	Bendung Tepian Buah Bendung Harapan Jaya	Eksisting Rencana
	Teluk Bayur	Labanan	Embung Labanan Jaya Bendung Labanan Makarti	Eksisting Eksisting
Samarinda	Samarinda Utara	Lempake	Bendungan Lempake	Eksisting
	Sambutan	Sambutan	Bendung Sambutan	Eksisting
	Palaran	Handil Bakti		

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

3.2.2 Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, rencana pola ruang untuk kawasan budidaya seluas 10.451.331 Ha meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 Ha yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- b. Kawasan peruntukan pertanian dengan luas kawasan kurang lebih 3.681.657 Ha, Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan peternakan yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- c. Kawasan peruntukan perikanan dengan luas kawasan kurang lebih 187.304 Ha, Rencana kawasan budidaya perikanan, kawasan perikanan tangkap dan rencana kawasan pengolahan ikan terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,

- Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- d. Kawasan peruntukan industri dengan luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha, Rencana peruntukan kawasan industri antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.
 - e. Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kawasan kurang lebih 97.442 Ha, a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun – Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara.
 - f. Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kawasan kurang lebih 396.266 Ha, Kawasan permukiman perkotaan meliputi kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan, kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya, pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi

bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 meter di atas permukaan laut. Kawasan permukiman perdesaan meliputi didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).

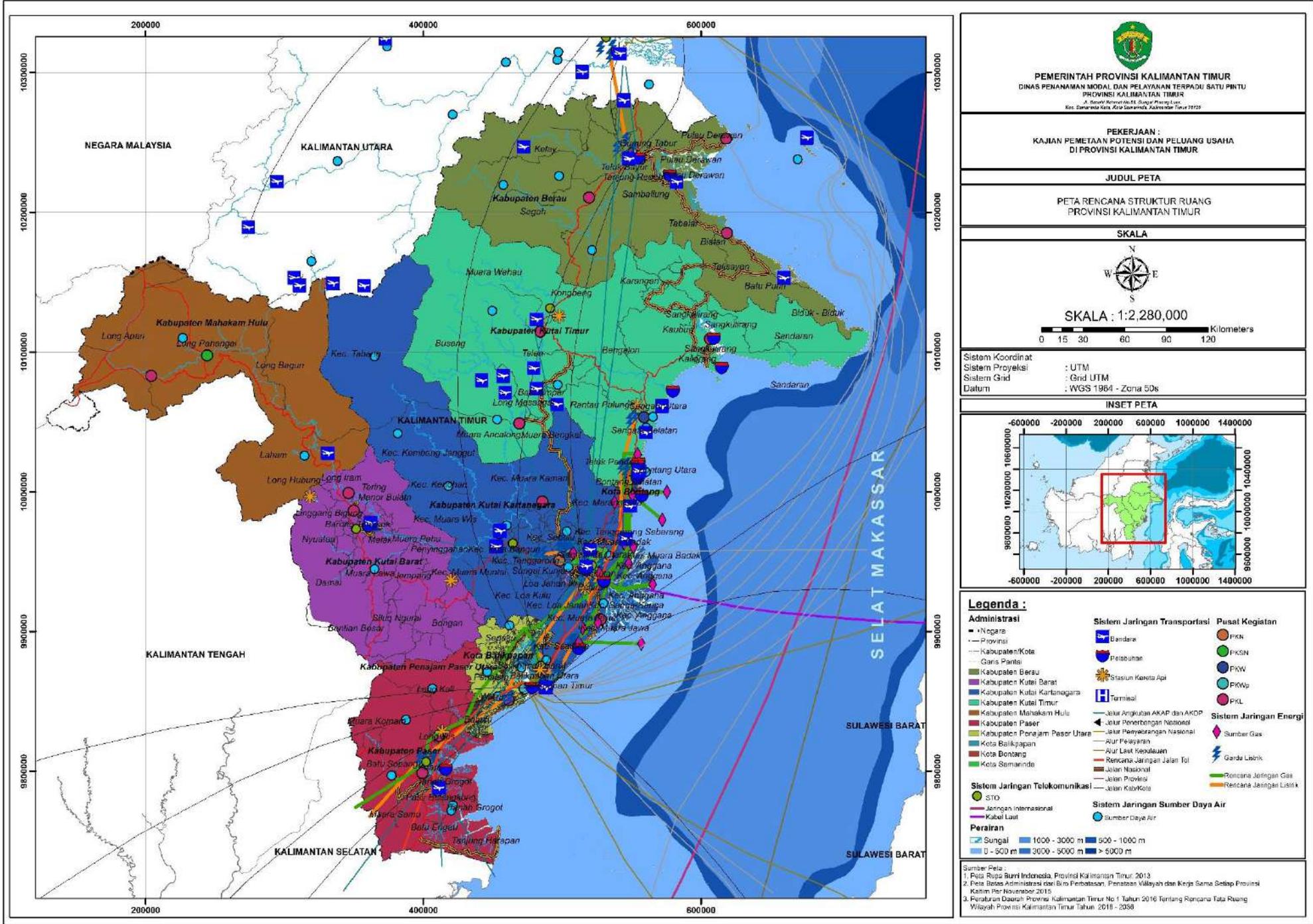
- g. Kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha, Rencana kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- h. Kawasan peruntukan lainnya Rencana kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

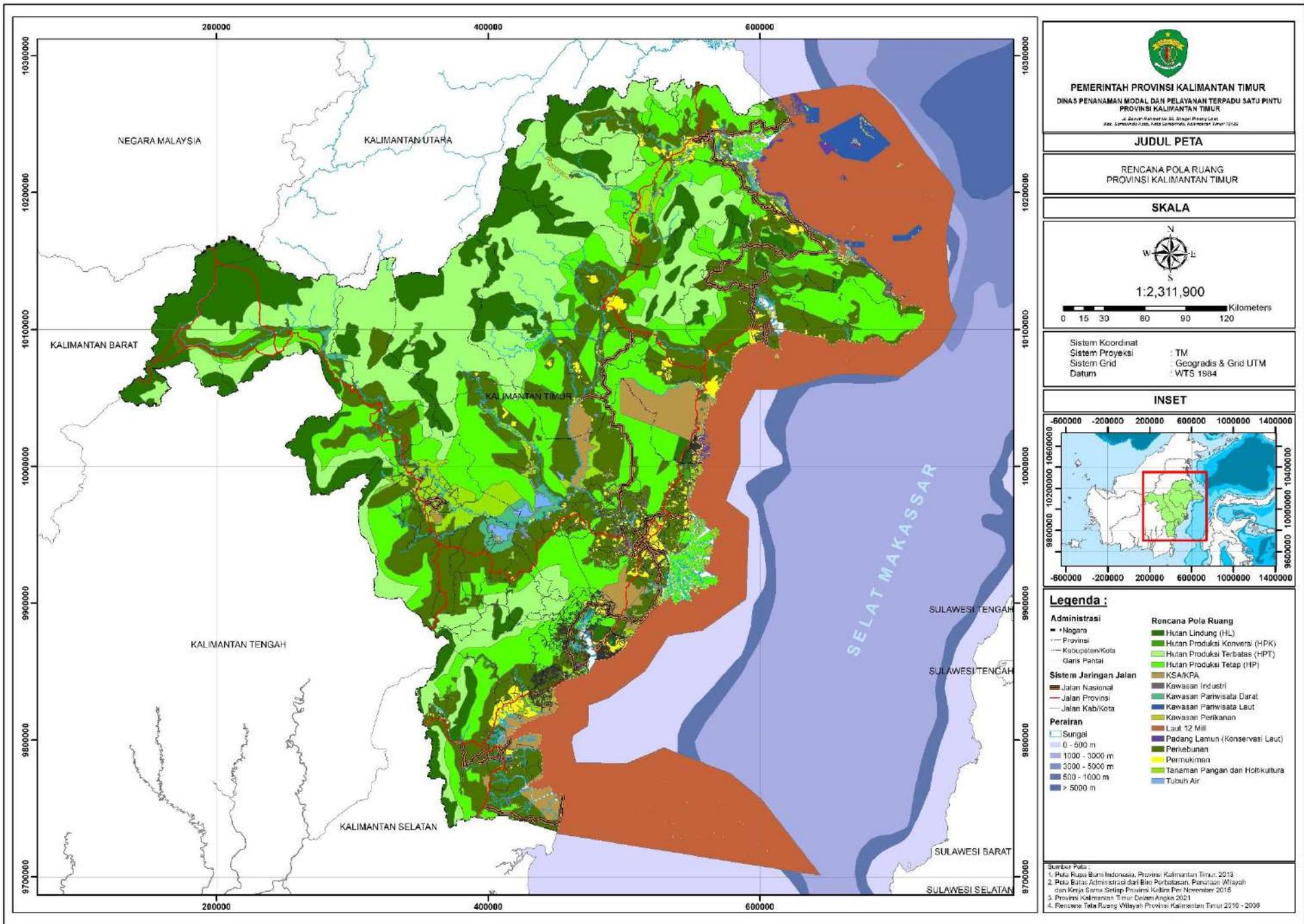
Tabel III. 23 Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

No	Kawasan Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase
1	Kawasan Industri	32.887,50	0,197
2	Kawasan Pariwisata Darat	97.422,93	0,582
3	Kawasan Perikanan	91.548,69	0,547
4	Perkebunan	3.269.561,43	19,541
5	Permukiman	396.266,13	2,368
6	Tanaman Pangan dan Holtikultura	412.095,94	2463
7	Hutan Lindung (HL)	1.844.969,63	11,027
8	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.027.099,77	18,092
9	Laut 12 Mill	3.811.141,98	22,777
10	Tubuh Air	95.755,78	0,572
11	Hutan Produksi Konversi (HPK)	120.438,31	0,720

No	Kawasan Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase
12	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.908.255,33	17,381
13	Kawasan Pariwisata Laut	141.300,00	0,844
14	Padang Lamun (Konservasi Laut)	44.931,44	0,269
15	KSA/KPA	438.390,32	2,620
TOTAL		16.732.065,18	100,00

Sumber: Perda. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036





3.3 Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Visi Penanaman Modal

Visi penanaman modal Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah “Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”.

1. Iklim investasi yang berdaya saing bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
2. Agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

3.3.2 Misi Penanaman Modal

Misi penanaman modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

3.3.3 Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah.

- b. Mendorong investasi pada sektor pengolahan, infrastruktur, energi baru terbarukan dan pariwisata serta jasa.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kalimantan Timur.

- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.

- 2) Pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, dan teknologi aplikasi.

e. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tatacara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi

penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran penanaman modal;

1) Arahan Kebijakan Kawasan Strategis

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah missleading dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (priority region) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena pengklusteran wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Kalimantan Timur. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kawasan strategis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari sudut kepentingan

ekonomi. Kota Samarinda akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang mampu menumbuhkan atau meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur.

Rencana pengembangan kawasan strategis provinsi adalah penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

- 1) Kawasan strategis nasional Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) Kalimantan Timur– Sarawak – Sabah;
- 2) Kawasan strategis nasional Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
- 3) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Samarinda –Sanga-sanga– Muara Jawa– Balikpapan (KAPET SASAMBA); dan
- 4) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTKEZ di Kabupaten Kutai Timur.

Dari kelima sektor basis yang ada, 3 sektor merupakan sektor yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Sektor yang mendukung pengembangan Kota Samarinda sebagai kawasan perdagangan dan jasa adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa serta sektor jasa-jasa lainnya. Adapun subsektor yang merupakan subsektor basis adalah sebagai berikut:

- a) Sektor perdagangan, hotel dan restoran
 - Subsektor perdagangan besar dan eceran
 - Subsektor hotel
 - Subsektor restoran
- b) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
 - Subsektor lembaga keuangan tanpa bank
 - Subsektor sewa bangunan
 - Subsektor jasa perusahaan

c) Sektor jasa-jasa lainnya

- Subsektor jasa pemerintahan umum
- Subsektor jasa swasta (terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga)

3) Pengembangan Kawasan Berbasis Migas dan Kondensat Kota Bontang

Indikasi arahan zonasi kawasan industri Petrokimia di Kota Bontang berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1) arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
- 2) arahan zona kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
- 3) arahan zona koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
- 4) arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.

Kota Bontang akan dikembangkan sebagai KSP Industrial Estate yang berbasis migas dan kondensat. Berdasarkan hasil analisis industrial estate merupakan sektor basis yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Jenis industri yang berpotensi ditempatkan pada kawasan industri Bontang difokuskan pada jenis industri petrokimia (migas dan kondensat) dan maritim. Adapun jenis industri yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- industri pupuk
- industri plastik
- industri serat sintesis
- industri karet sintesis
- industri bahan pelarut
- industri bahan pelembut

- industri bahan pembersih
- industri pestisida
- industri petrokimia lainnya
- industri barang karet dan plastik
- industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut)
- industri alat angkutan laut dan industri kapal dan perbaikannya

4) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 - 2032, Kawasan Industri dan Pelabuhan Maloy, yang selanjutnya akan disebut KIPI Maloy, merupakan kawasan industri yang diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan peningkatan transaksi global. Kawasan tersebut dikembangkan dengan tujuan utama meningkatkan ekspor komoditas dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi di tanah air.

Kawasan ini perlu didukung oleh Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pengembangan Teknologi, dan zona ekonomi lainnya seperti Zona Perdagangan Dan Zona Pelayanan. Zona industri yang terintegrasi dengan kawasan ini diutamakan industri yang bersifat pengembangan industri dasar dan manufaktur, terutama yang berorientasi pada sumber daya lokal. Potensi industri ini dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi unggulan lokal (sektor kunci di masing-masing kabupaten/kota), keterkaitan antar industri dan input/output antar sektor; merupakan industri yang berorientasi menggunakan sumber daya dan material teknis secara lokal dan mengembangkan keterkaitan antar pusat industri dengan dukungan infrastruktur wilayah; terutama yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau serta Kota Bontang.

5) Kawasan Pariwisata kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang menjadi lingkup wilayah

kajian ini mencakup Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau dan meliputi sebagian wilayah pesisir laut Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan. Luas areal kawasan ini mencapai \pm 13.500 Ha. Kawasan tersebut termasuk kawasan segitiga karang dunia (coral triangle) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan tersebut juga merupakan rumah bagi lebih dari 600 spesies karang atau 75% dari seluruh spesies karang yang saat ini sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan.

Destinasi wisata utama kawasan pariwisata ini antara lain adalah Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini meningkat setiap tahunnya seiring dengan gencarnya promosi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Berau maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Derawan ini mencapai 1.278.500 yang terdiri dari wisatawan lokal dan mancanegara. Berdasarkan Dokumen Visi Kaltim 2030, pada tahun 2030, sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan dan pertanian.

6) Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai hinterland Kota Balikpapan, memiliki letak geostrategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan

dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor

industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pertimbangan lain mendaulat dua kabupaten ini adalah letak strategisnya yang merupakan daerah satelit dari Balikpapan. Terletak di ujung selatan provinsi, PPU dan Paser memiliki praktis menjadi perlintasan jalur trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kondisi strategis ini mendukung distribusi, yang nantinya berkaitan dengan suplai ke daerah lain.

7) Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

Persyaratan dan pembatasan pengembangan merupakan analisis untuk mengetahui persyaratan dan pembatasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan, sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. Berdasarkan hasil analisis persyaratan dan pembatasan pengembangan, wilayah perencanaan terbagi menjadi 3 yaitu diizinkan, diizinkan bersyarat dan tidak diizinkan untuk di bangun.

Untuk kriteria Diizinkan adalah kawasan yang sangat mungkin untuk di kembangkan menjadi kawasan perkotaan. Luas kawasan yang termasuk dalam kriteria boleh adalah seluas 1096,07 Ha .

a) Untuk kriteria Diizinkan adalah kawasan yang sangat mungkin untuk di kembangkan menjadi kawasan perkotaan. Luas kawasan yang termasuk dalam kriteria boleh adalah seluas 1096,07 Ha

b) Untuk kriteria Diizinkan Bersyarat adalah kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan tetapi terdapat persyaratan dan pembatasan dalam pengembangannya karena dilihat dari karakteristik wilayahnya. Kawasan ini menyebar di seluruh wilayah perencanaan

dengan luas 123.655,85 Ha atau 13,79% dari luas wilayah perencanaan.

- c) Untuk Kriteria Tidak Diizinkan untuk di Bangun adalah kawasan yang sebaiknya merupakan kawasan lindung, karena karakteristik wilayah ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan terjal, rawan erosi dan merupakan wilayah resapan air. Kawasan ini tersebar di wilayah perencanaan dengan luas 772.101,54 Ha atau 86,09%.

- 8) Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c) Potensi ekspor;
- d) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi;
- e) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

3. Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata, jasa;

a. Pengembangan Agroindustri

Diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan, serta marine park.

1) Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) swasembada beras berkelanjutan;; (ii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat , terutama komoditas padi, kedelai, jagung, dan ubi kayu/singkong. Keempat komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut oleh kelompok tani dan/atau bekerjasama dengan swasta, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi serta berkualitas ekspor.

b) Pengembangan tanaman pangan skala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi petani kecil.

c) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.

d) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kalimantan Timur.

- e) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur, antara lain sektor pupuk dan benih serta peralatan pertanian.
- 2) Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditi Perkebunan
- Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustry untuk mengolah komoditas karet, kakao dan kelapa sawit. Penanaman modal dalam pengolahan komoditi karet diarahkan pada kegiatan industri bahan olahan karet seperti crepe, sheet, TSR, preserved latex dan keterkaitan dengan industri lainnya seperti vulkanisir, ban, sol sepatu, karet mesin dan lain-lain.
- Penanaman modal dalam pengolahan komoditi kakao diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan dari biji kakao dalam bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetika dari pasta, powder, konsentrat dan produk lainnya dari biji kakao. Penanaman modal dalam pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk turunan dari CPO, yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan).
- 3) Pengembangan Agroindustri Berbasis Perikanan
- Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil tangkapan, perikanan budi daya melalui kebijakan penyediaan 500 ribu keramba, dan pengolahan hasil laut seperti ikan, udang beku, rumput laut dan diversifikasi produk pengolahan ikan seperti fish fillet dan ikan beku. Selain itu dikembangkan komoditi unggulan di masing-masing wilayah seperti udang windu (Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan), rumput laut (Kutai Timur, Bontang), ikan nila (Kutai Kartanegara), ikan patin (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), ikan kerapu (Bontang, Berau dan Kutai Timur). Pengembangan komoditi spesifik seperti udang galah (Samarinda, Kutai Kartanegara), ikan betutu (Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur), ikan hias (Bontang, Kutai Timur dan Berau). Pengembangan komoditi strategis seperti produk olahan ikan asin di

kawasan Mahakam Tengah, serta pembangunan marine park di Penajam Paser Utara.

4) Pengembangan Agroindustri Berbasis Peternakan

Pengembangan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dengan cara mengembangkan kelompok usaha yang pendapatannya berasal dari usaha agroindustri peternakan. Diupayakan pula pengembangan integrasi sapi-sawit di kawasan milik perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan PTPN dengan target 2 juta ekor sapi pada tahun 2018 dengan rincian 200 ribu ekor melalui APBN/APBD Provinsi, 150 ribu ekor melalui APBD Kabupaten/Kota, 250 ribu ekor melalui Bankaltim, 150 ribu ekor melalui BRI, 250 ribu ekor melalui perusahaan tambang dan 1 juta ekor melalui perusahaan sawit.

b. Fokus Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/ kota di Kalimantan Timur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang di harapkan sebagai prime mover seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jalan kereta api, jalan strategis nasional, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.

- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
- 8) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).
- 9) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui intermoda supply chain system.
- 10) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemerataan pembangunan.

c. Fokus Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengolahan energi.
- 3) Penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

d. Fokus Pengembangan Pariwisata

Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi:

- 1) Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan yang terkait dengan pariwisata.
- 2) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau pulau kecil terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata, termasuk pembangunan KEK pariwisata di Pulau Derawan dan sekitarnya.
- 3) Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (eco-tourism).
- 4) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat

4. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (apprenticeship).
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Tenaga Kerja.
- c. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
- d. Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.
- e. Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.
- f. Peningkatan pendidikan akademik dan vokasi yang diarahkan pada penyalarsan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi disetiap kabupaten/kota.

5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)
Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:
 - a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
 - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
6. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu:
 - a. Strategi naik kelas, yaitu strategi yang mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b. Strategi aliansi strategi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (*kerjasama*) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (*memberikan manfaat*) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produk pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang paling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

- c. Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (economies of scale) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- d. Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
- e. Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.

7. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal

(keringanan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, dan pengadaan

infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan

ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, memperhitungkan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

b. Bentuk/jenis kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal.

Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/ atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat

pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

- d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal
Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota terhadap bidang - bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang - bidang usaha di daerah/ kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala

terhadap pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, evaluasi ini dilakukan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan SKPD dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/ atau insentif.

Kepala BPPMD menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan

penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif.

Disamping

itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

8. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kalimantan Timur

adalah sebagai berikut:

- a. penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih baik (targetted promotion), terarah dan inovatif.
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi maupun dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/ atau pemerintah kabupaten/kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.



BAB IV ANALISA POTENSI USAHA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1 Kajian Dasar Hukum Pelaksanaan Penanaman Modal

Kajian dasar hukum dalam pelaksanaan penanaman modal diambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Adapun penjelasan lebih lanjut dari kajian dasar hukum pelaksanaan penanaman modal adalah sebagai berikut.

4.1.1 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

A. Ketentuan Umum

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam

modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

B. Asas dan Tujuan

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud, Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

D. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia

F. Ketenagakerjaan

1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Bidang Usaha

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya

alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

H. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

I. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal

1. Setiap penanam modal berhak mendapat:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan
3. Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

A. Ketentuan Umum

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
2. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Penanam Modal Asing adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
5. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

B. Ruang Lingkup

1. Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mencakup:
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas non fiskal.
2. Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud mencakup:
 - a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
 - b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
 - c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan
 - d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK
 - e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia
 - f. pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu

- g. pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
3. Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri atas:
- a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas
 - b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
- C. Penerbit Perizinan Berusaha
1. Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
 - b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud mencakup:
- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
 - b. yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi

D. Fasilitas Penanaman Modal

1. Pelaku Usaha yang memiliki:
 - a. NIB
 - b. Sertifikat Standar
 - c. Izin, dapat memperoleh Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud mencakup fasilitas:
 - a. pembebasan bea masuk atas impor
 - b. pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu
 - c. pengurangan pajak penghasilan badan
 - d. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK
 - e. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia
 - f. penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu
 - g. pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
3. Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud diajukan melalui Sistem OSS.
4. Keputusan dan/atau pemberitahuan pemberian keputusan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud diterbitkan melalui Sistem OSS dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

4.2 Analisis Kebijakan

Adapun analisis kebijakan yang dilakukan pada kegiatan kajian pemetaan potensi dan peluang usaha di Provinsi Kalimantan Timur meliputi analisis terhadap beberapa kebijakan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut.

4.2.1 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan misi 2 dan misi 3.

Tabel IV. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan misi 2 dan misi 3 Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis
			2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan
			3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggukan kompetitif UKM
			4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (<i>Startup</i>) Industri Kreatif
			5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah
	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa 2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa 3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas 4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat 2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan 2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas 3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor
	Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering 2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>3) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani</p> <p>5). Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian</p>
	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	<p>1) Pembangunan Miniranch sapi</p> <p>2) Penyediaan Informasi Peternakan</p> <p>3) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak</p> <p>1) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB</p> <p>2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak</p>
	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	<p>1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan</p> <p>2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan</p> <p>3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir</p> <p>4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani</p> <p>5) Pengelolaan areal perkebunan yang dinilai konservasi tinggi</p> <p>6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan</p> <p>7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan</p>
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	<p>1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan</p> <p>2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan</p> <p>3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan 2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi 4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam

MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran
			2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			3) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat
	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan
	2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah		
			3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi
	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum
	Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh 2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

4.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan arah kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036 dapat diketahui terbagi menjadi 3 arahan kebijakan yang meliputi perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis provinsi, dimana tabel arahan kebijakan dari RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
1. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan;	1. Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer satu, jaringan jalan kolektor primer dua, jaringan jalan bebas hambatan, terminal penumpang tipe B, terminal barang, jaringan jalur kereta api, pelabuhan/dermaga danau, alur pelayaran untuk angkutan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan,	1. Pengendalian alih fungsi kawasan hutan lindung dan revitalisasi resapan air, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1. Pengembangan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari, pengendalian alih fungsi kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung, dan pemulihan kondisi hutan produksi dari deforestasi dan degradasi serta peningkatan fungsi ekologis kawasan hutan produksi	1. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
	pelabuhan laut, terminal khusus, dan bandar udara			
2. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pemerintahan kecamatan;	2. Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan distribusi tenaga listrik	2. Pengendalian perkembangan kawasan permukiman, pemertahanan, dan/atau rehabilitasi kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau	2. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan fungsi, dan pemertahanan kawasan hutan rakyat	2. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi strategis kepentingan pertumbuhan
3. Pengembangan dan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa skala	3. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap,	3. Pengembangan pengelolaan, pengendalian	3. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan	3. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan strategis

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;	jaringan bergerak terestrial, jaringan bergerak seluler, dan jaringan bergerak satelit	kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi, pemertahanan, dan/atau rehabilitasi dan pemantapan kawasan suaka alam, dan pelestarian alam meliputi suaka margasatwa, taman nasional laut, dan kawasan konservasi perairan daerah	kawasan tanaman pangan, serta pemertahanan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	kepentingan pertumbuhan fungsi dan aya dukung lingkungan
4. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi skala	4. Pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan,	4. Revitalisasi dan/atau pengendalian kawasan budi daya terbangun, pada kawasan keunikan	4. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hortikultura, perkebunan, dan	

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
<p>pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;</p>	<p>peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa bendung, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai</p>	<p>bentang alam, kawasan keunikan proses geologi, kawasan imbuhan air, dan sempadan mata air</p>	<p>peternakan yang ramah lingkungan</p>	
<p>5. Pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;</p>	<p>5. Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM regional, SPAL lintas kabupaten/kota, TPA regional</p>	<p>5. Revitalisasi dan/atau pengendalian kawasan budi daya terbangun, pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan</p>	<p>5. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan tangkap dengan memperhatikan potensi lestari serta kawasan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>	

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
		gelombang pasang dan abrasi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan banjir		
6. Pengembangan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perikanan;		6. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan cagar budaya	6. Pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan batuan, pertambangan mineral logam, dan pertambangan mineral bukan logam yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung	
7. Pengembangan pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;		7. Pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau	7. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan panas bumi dengan	

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
		kehidupan biota laut, dan pemertahanan fungsi kawasan ekosistem mangrove	memperhatikan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup	
8. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;			8. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pembangkitan listrik	
9. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya			9. Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	
10. pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan			10. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan sentra industri	

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Strategis Provinsi
			<p>kecil dan menengah pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta kerajinan</p>	
			<p>11. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata cagar budaya, dan kawasan pariwisata buatan</p>	
			<p>12. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan, serta pengendalian dampak negatif kegiatan industri</p>	

Arahan Struktur Ruang		Arahan Pola Ruang		
Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Jaringan Prasarana	Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Peruntukan Budaya	Kawasan Strategis Provinsi
			yang mengganggu fungsi lingkungan pada kawasan permukiman perkotaan	
			13. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan permukiman perdesaan	
			14. Pengembangan wilayah pertahanan dan pengendalian kawasan permukiman yang berpotensi mengganggu wilayah pertahanan	

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016 - 2036

4.2.3 Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan arah kebijakan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2025:

Tabel IV. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Panjang 2020 - 2025
Bidang Agroindustri (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan/kelautan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan bidang agroindustri seperti (industri pupuk, peralatan, benih, transportasi dan perdagangan) 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis bidang agroindustri 3. Peningkatan penggunaan teknologi bidang agroindustri yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial dalam bidang agroindustri 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk bidang agroindustri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 6. Pengembangan bidang agroindustri berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk agroindustri Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi
Industri Pengolahan Kakao (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan luas perkebunan kakao 2. Mendirikan pabrik kakao olahan 3. Peningkatan produksi biji kakao dan kakao olahan
Industri Pengolahan Karet (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan industri berbasis kompon karet

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Panjang 2020 - 2025
tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 275 1367 421">2. Menumbuhkan industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan <li data-bbox="810 421 1367 521">3. Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal
<p data-bbox="229 521 786 611">Industri Tenun (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 167/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 521 1367 611">1. Mewujudkan industri tenun terpadu di sentra industri tenun dan kerajinan <li data-bbox="810 611 1367 701">2. Mensosialisasikan sarung Samarinda yang memiliki merk dan mutu terjamin <li data-bbox="810 701 1367 869">3. Menanamkan rasa cinta akan produk lokal ke seluruh kalangan dengan cara promosi, sosialisasi, edukasi dan lain-lain <li data-bbox="810 869 1367 965">4. Mewujudkan sentra tenun yang menjadi daerah tujuan wisata
<p data-bbox="229 965 786 1211">Industri Pengolahan Rumput Laut (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 163/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Bontang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 965 1367 1111">1. Mewujudkan industri makanan dan minuman berbahan baku rumput laut yang berdaya saing <li data-bbox="810 1111 1367 1211">2. Pembangunan industri pengolahan rumput laut menjadi karagenan
<p data-bbox="229 1211 786 1245">Bidang Infrastruktur dan Energi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 1211 1367 1357">1. Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur dan energi seperti industri semen, industri mesin dan industri pipa) <li data-bbox="810 1357 1367 1603">2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru serta persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> <li data-bbox="810 1603 1367 1749">3. Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi) <li data-bbox="810 1749 1367 1850">4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial <li data-bbox="810 1850 1367 2004">5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan produk energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i>

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Panjang 2020 - 2025
	<p>yang berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas</p> <p>6. Pengembangan infrastruktur dan energi berskala besar pada wilayah sentra pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p>
Bidang Pariwisata	<p>1. Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara</p> <p>3. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya</p> <p>4. Terwujudnya organisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan</p> <p>5. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona</p> <p>6. Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya</p>

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2025

4.2.4 Konten Analisis

Berdasarkan tiga kebijakan yang telah ditinjau maka dilakukan perbandingan dengan menggunakan matriks konten analisis, dimana tujuan dari analisis ini guna menunjukkan tingkat kekuatan dan keselarasan antara kebijakan penanaman modal dengan kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut merupakan tabel matriks perbandingan kebijakan.

Tabel IV. 4 Matriks Keterikatan Kebijakan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program	RPJMD			RTRW		
		Kuat	Sedang	Lemah	Kuat	Sedang	Lemah
Bidang Agroindustri							
1.	Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan bidang agroindustri seperti (industri pupuk, peralatan, benih, transportasi dan perdagangan)	V					V
2.	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis bidang agroindustri	V			V		
3.	Peningkatan penggunaan teknologi bidang agroindustri yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir	V					V
4.	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial dalam bidang agroindustri	V			V		
5.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk bidang agroindustri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi	V			V		

No.	Program	RPJMD			RTRW		
		Kuat	Sedang	Lemah	Kuat	Sedang	Lemah
6.	Pengembangan bidang agroindustri berskala besar (food estate) pada wilayah sentrasentra pengembangan produk agroindustri Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi	V			V		
Bidang Infrastruktur dan Energi							
1.	Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur dan energi seperti industri semen, industri mesin dan industri pipa)		V		V		
2.	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru serta persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau renewable energy	V			V		
3.	Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi)			V			V

No.	Program	RPJMD			RTRW		
		Kuat	Sedang	Lemah	Kuat	Sedang	Lemah
4.	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial			V	V		
5.	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan produk energi baru dan terbarukan (EBT) atau renewable energy yang berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas		V		V		
6.	Pengembangan infrastruktur dan energi berskala besar pada wilayah sentra pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau renewable energy yang berbasis pengetahuan dan teknologi	V			V		
Bidang Pariwisata							
1.	Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat	V			V		

No.	Program	RPJMD			RTRW		
		Kuat	Sedang	Lemah	Kuat	Sedang	Lemah
2.	Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegar	V					V
3.	Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya			V			V
4.	Terwujudnya organisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan	V					V
5.	Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona	V					V
6.	Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara	V			V		

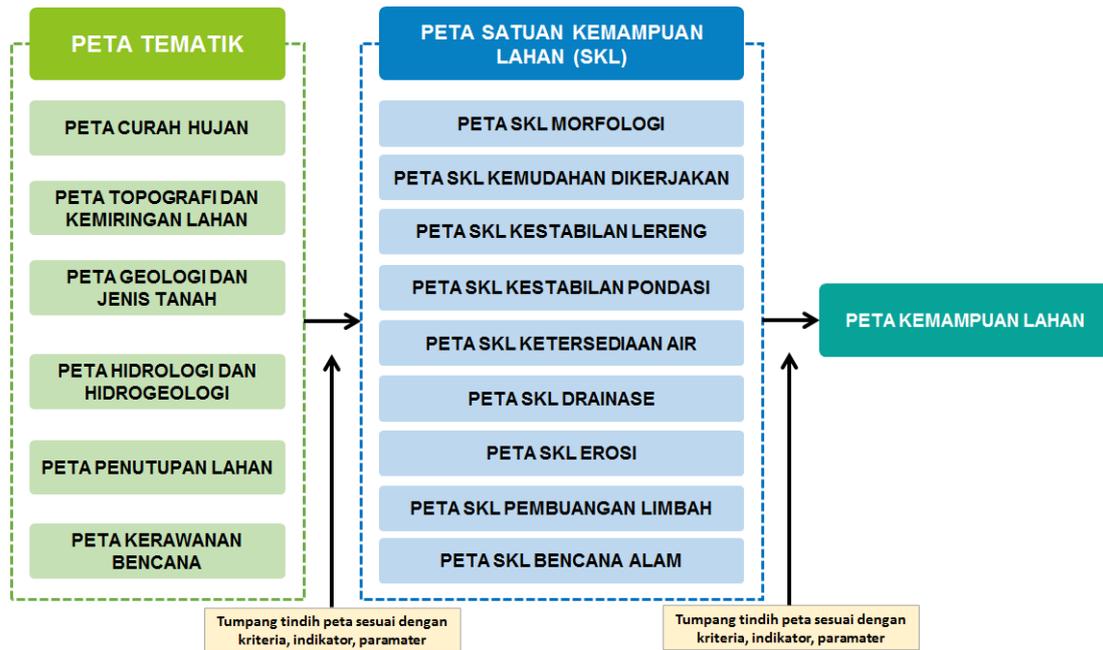
No.	Program	RPJMD			RTRW		
		Kuat	Sedang	Lemah	Kuat	Sedang	Lemah
	yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya						

Sumber : Hasil Analisis, 2021

4.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 menyebutkan analisis kemampuan lahan sebagai analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan. Sementara itu, Peraturan Menteri Negara (Permeneg) LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah menyebutkan kemampuan lahan sebagai karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Pengertian dari Permen PU No. 20 Tahun 2007 kurang tegas, sedangkan pengertian Permeneg LH No. 17 Tahun 2009 lebih jelas tentang kemampuan lahan karena menyebutkan karakteristik lahan. Metode analisis kemampuan lahan dari Permen PU No. 20 Tahun 2007 menggunakan berbagai peta tematik, sedangkan metode dari Permeneg LH No. 17 Tahun 2009 hanya menggunakan peta lereng, peta jenis tanah, peta erosi, dan peta drainase. Oleh karena itu, akan digunakan metode kemampuan lahan dari Permen PU No. 20 Tahun 2007.

Peta rekomendasi kemampuan lahan diperoleh dari beberapa analisis tumpang tindih peta untuk menghasilkan beberapa peta satuan kemampuan lahan (SKL). Peta tematik yang digunakan terdiri atas 1) peta curah hujan, 2) peta topografi dan kemiringan lahan, 3) peta geologi dan jenis tanah, 4) peta hidrologi dan hidrogeologi, 5) peta penutupan lahan, dan 6) peta kerawanan bencana. Peta tematik tersebut akan mempunyai kriteria, indikator, dan parameter sesuai dengan karakteristik setiap peta. Peta tematik akan dianalisis untuk menghasilkan 1) peta SKL morfologi, 2) peta SKL kemudahan dikerjakan, 3) peta SKL kestabilan lereng, 4) peta SKL kestabilan pondasi, 5) peta SKL ketersediaan air, 6) peta SKL drainase, 7) peta SKL erosi, 8) peta SKL pembuangan limbah, dan 9) peta SKL bencana alam.



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007

Gambar 4. 1 Proses Penyusunan Peta Kemampuan Lahan

4.3.1 SKL Morfologi

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi dilakukan untuk memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, dan peta bentuk lahan diperoleh Peta SKL Morfologi. Maka didapatkan 5 klasifikasi SKL Morfologi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Morfologi tinggi, cukup, sedang, kurang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

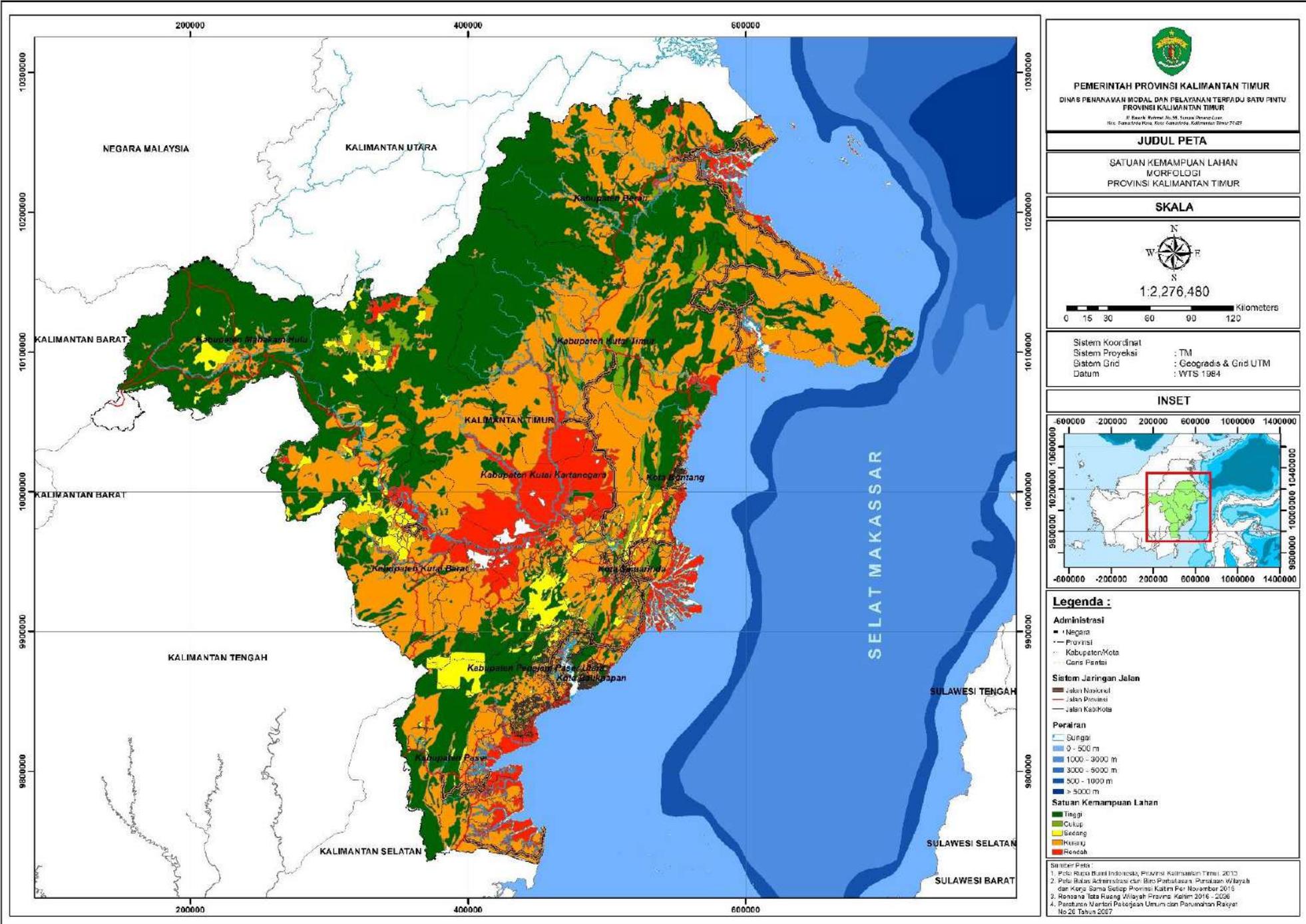
- a. SKL Morfologi Tinggi menjelaskan bahwa kemampuan lahan tinggi untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan bentang alam/morfologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 43%.
- b. SKL Morfologi Cukup menjelaskan bahwa kemampuan lahan cukup untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan bentang alam/morfologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2%.
- c. SKL Morfologi Sedang menjelaskan bahwa kemampuan lahan sedang untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan bentang alam/morfologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4%.

- d. SKL Morfologi Kurang menjelaskan bahwa kemampuan lahan kurang untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan bentang alam/morfologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 40%.
- e. SKL Morfologi Rendah menjelaskan bahwa kemampuan lahan rendah untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan bentang alam/morfologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11%.

Tabel IV. 5 Satuan Kemampuan Lahan Morfologi Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Morfologi	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	5,409,719	43%
2	Cukup	257,078	2%
3	Sedang	487,501	4%
4	Kurang	4,982,570	40%
5	Rendah	1,321,915	11%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.2 SKL Kemudahan Dikerjakan

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) kemudahan dikerjakan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan di Provinsi Kalimantan Timur untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan. Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, peta penutupan lahan, dan peta jenis tanah diperoleh Peta SKL Kemudahan Dikerjakan. SKL Kemudahan Dikerjakan merupakan SKL yang menggambarkan lahan-lahan yang mudah dikerjakan dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari kemudahan digali dan ketersediaan lahan kosong.

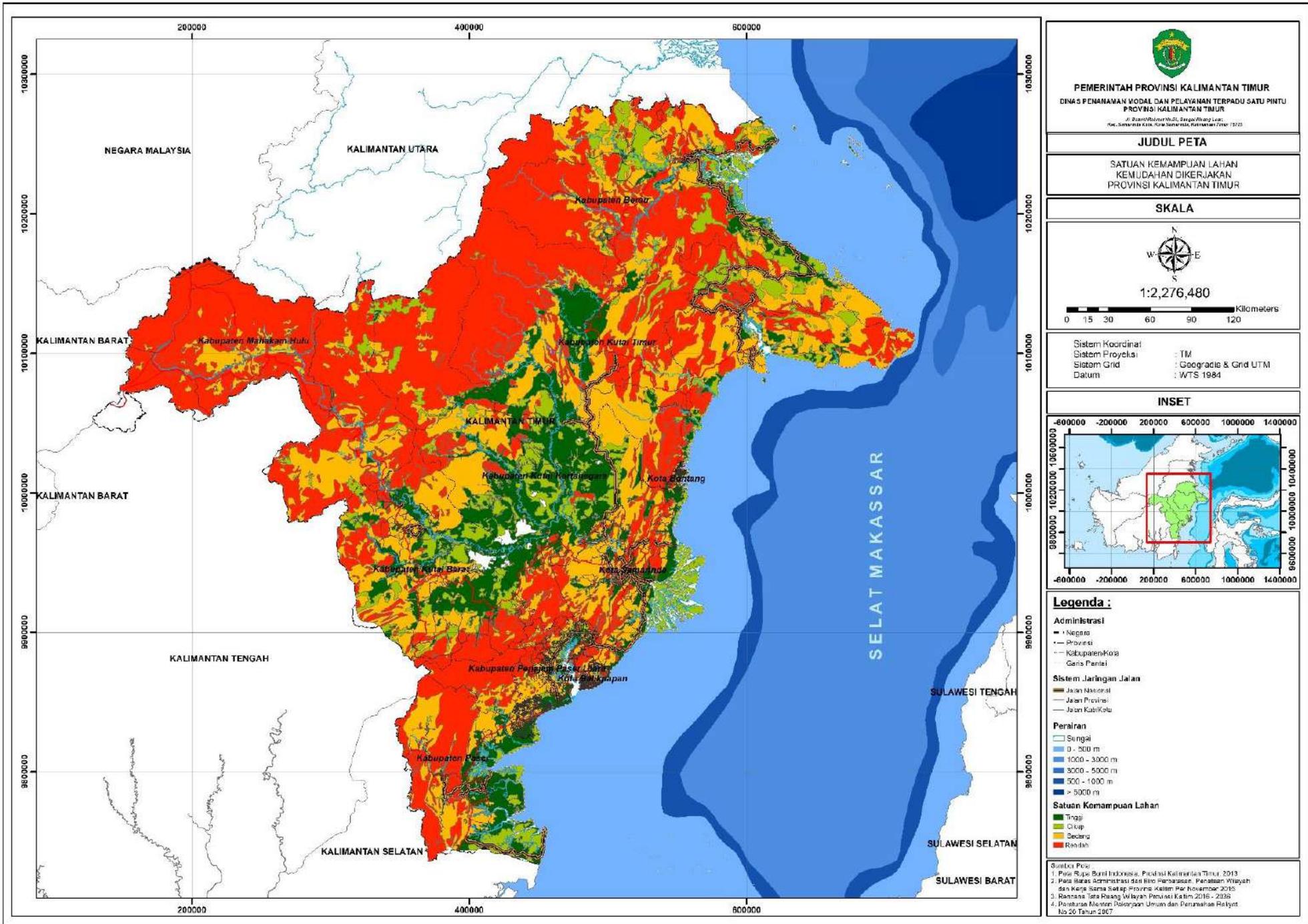
Didapatkan 4 klasifikasi SKL Kemudahan dikerjakan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Kemudahan dikerjakan tinggi, cukup, sedang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Kemudahan dikerjakan Tinggi menjelaskan bahwa kemudahan lahan tinggi untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14%.
- b. SKL Kemudahan dikerjakan Cukup menjelaskan bahwa kemudahan lahan cukup untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11%.
- c. SKL Kemudahan dikerjakan Sedang menjelaskan bahwa kemudahan lahan sedang untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 28%.
- d. SKL Kemudahan dikerjakan Rendah menjelaskan bahwa kemudahan lahan rendah untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 47%.

Tabel IV. 6 Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Kemudahan Dikerjakan	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	1,749,306	14%
2	Cukup	1,345,986	11%
3	Sedang	3,436,230	28%
4	Rendah	5,882,977	47%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



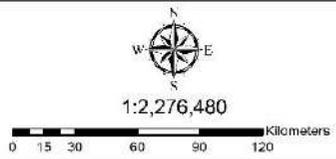


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. Buntar Ratu No. 21, Sanggau, Pangsar Laut,
 Tel. Sekretariat: 0531-3261910, Fax: 0531-3261911

JUDUL PETA

SATUAN KEMAMPUAN LAHAN
 KEMUDAHAN DIKERJAKAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKALA

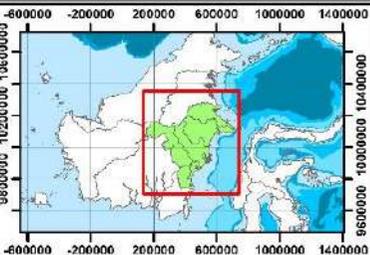


1:2,276,480

0 15 30 60 90 120 Kilometers

Sistem Koordinat : TM
 Sistem Proyeksi : Geographic & Grid UTM
 Sistem Grid : WTS 1984
 Datum : WTS 1984

INSET



Legenda :

Administrasi

- Negara
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
- Desa/Pantai

Sistem Jaringan Jalan

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kab/Kota

Peraliran

- Sungai
- 0 - 500 m
- 1000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- 5000 - 10000 m
- > 10000 m

Satuan Kemampuan Lahan

- Tinggi
- Cukup
- Sedang
- Rendah

Sumber Peta:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, 2013
 2. Peta Status Administrasi dan Biro Pemerintahan, Pantasan Wilayah dan Kerja Sama Setap Provinsi, Kalimantan Per November 2015
 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan 2016 - 2036
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Umum dan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2007

4.3.3 SKL Kestabilan Lereng

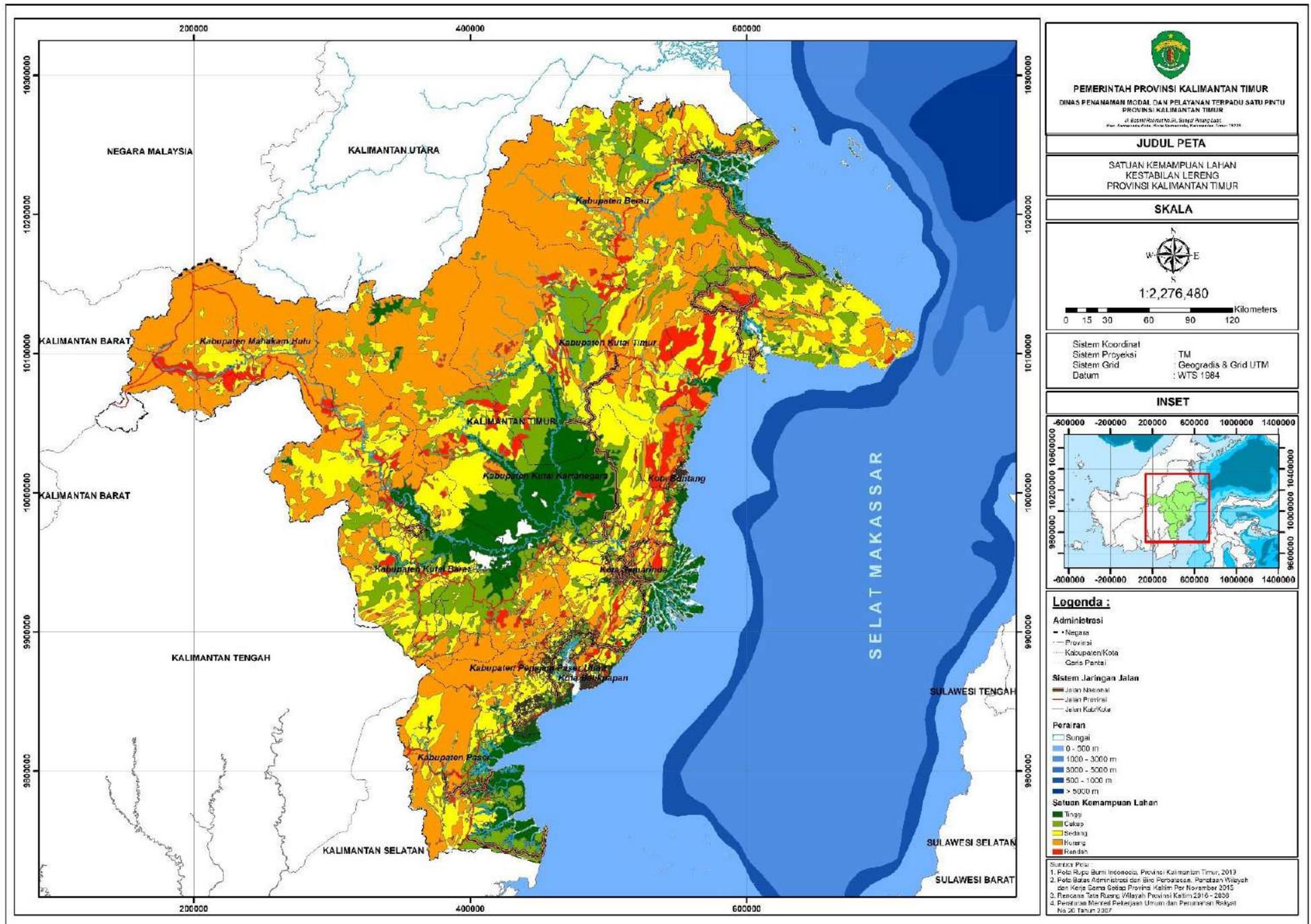
Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, dan peta bentuk lahan diperoleh Peta SKL Kestabilan Lereng. SKL Kestabilan Lereng merupakan SKL yang menggambarkan tingkat kemantapan lereng dalam menerima beban dalam pengembangan wilayah. Didapatkan 5 klasifikasi SKL Kestabilan lereng di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Kestabilan lereng tinggi, cukup, sedang, kurang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Kestabilan lereng Tinggi menjelaskan bahwa tingkat kemantapan lereng tinggi untuk pengembangan dalam menerima beban di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 17%.
- b. SKL Kestabilan lereng Cukup menjelaskan bahwa tingkat kemantapan lereng cukup untuk pengembangan dalam menerima beban di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 23%.
- c. SKL Kestabilan lereng Sedang menjelaskan bahwa tingkat kemantapan lereng sedang untuk pengembangan dalam menerima beban di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 44%.
- d. SKL Kestabilan lereng Kurang menjelaskan bahwa tingkat kemantapan lereng kurang untuk pengembangan dalam menerima beban di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8%.
- e. SKL Kestabilan lereng Rendah menjelaskan bahwa tingkat kemantapan lereng rendah untuk pengembangan dalam menerima beban di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8%.

Tabel IV. 7 SKL Kestabilan Lereng Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	1,295,738	17%
2	Cukup	1,799,555	23%
3	Sedang	3,436,230	44%
4	Kurang	646,867	8%
5	Rendah	646,867	8%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.4 SKL Kestabilan Pondasi

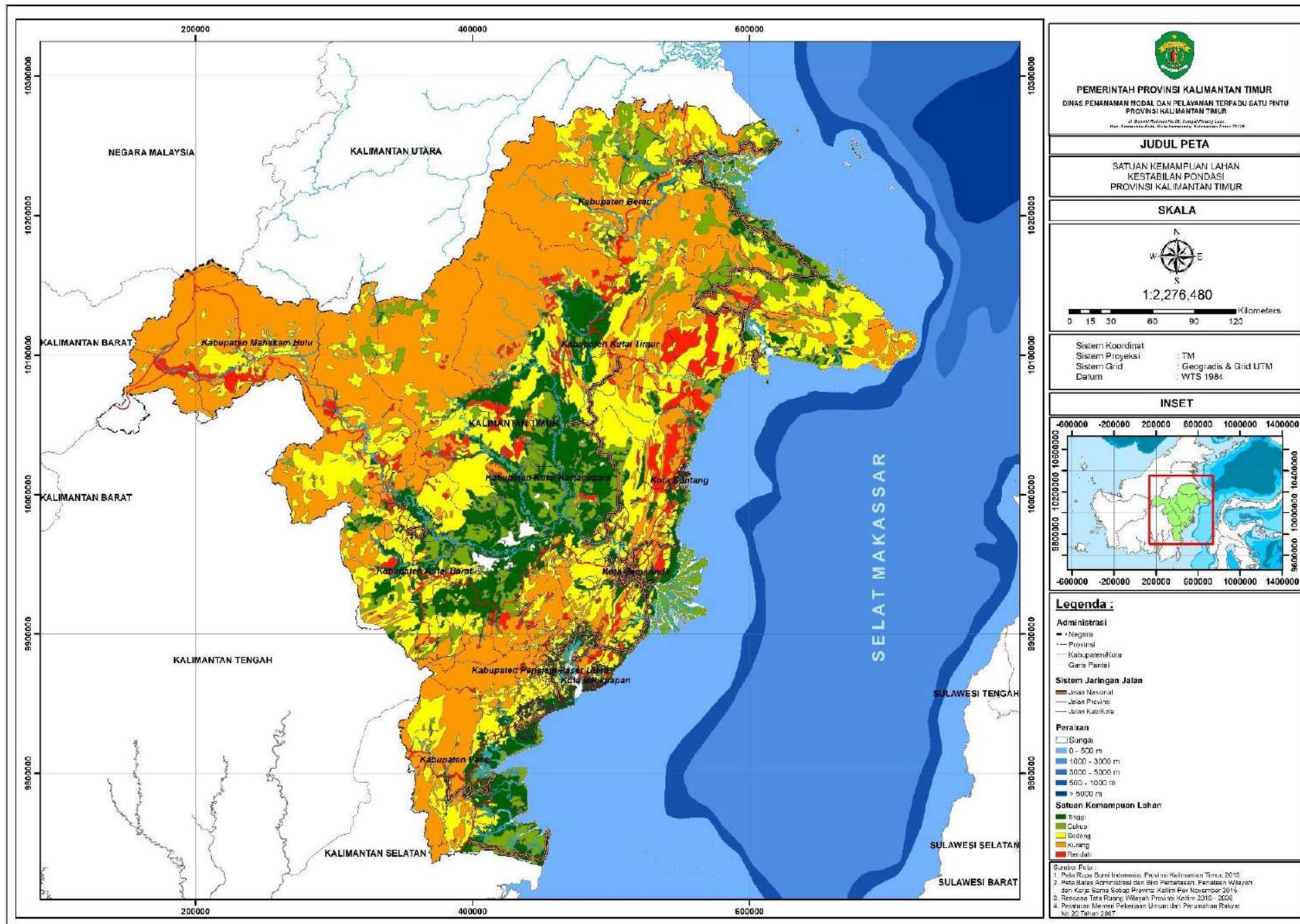
Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, dan peta jenis tanah diperoleh Peta SKL Kestabilan Pondasi. SKL Kestabilan Pondasi merupakan SKL yang menggambarkan tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat di pengembangan wilayah. Didapatkan 5 klasifikasi SKL Kestabilan pondasi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Kestabilan pondasi tinggi, cukup, sedang, kurang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Kestabilan pondasi Tinggi menjelaskan bahwa tingkat kemampuan lahan tinggi untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14%.
- b. SKL Kestabilan pondasi Cukup menjelaskan bahwa tingkat kemampuan lahan cukup untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11%.
- c. SKL Kestabilan pondasi Sedang menjelaskan bahwa tingkat kemampuan lahan sedang untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 28%.
- d. SKL Kestabilan pondasi Kurang menjelaskan bahwa tingkat kemampuan lahan sedang untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 42%.
- e. SKL Kestabilan pondasi Rendah menjelaskan bahwa tingkat kemampuan lahan sedang untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5%.

Tabel IV. 8 SKL Kestabilan Pondasi Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Kestabilan Pondasi	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	1,749,306	14%
2	Cukup	1,345,986	11%
3	Sedang	3,436,230	28%
4	Kurang	5,266,436	42%
5	Rendah	616,542	5%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.5 SKL Ketersediaan Air

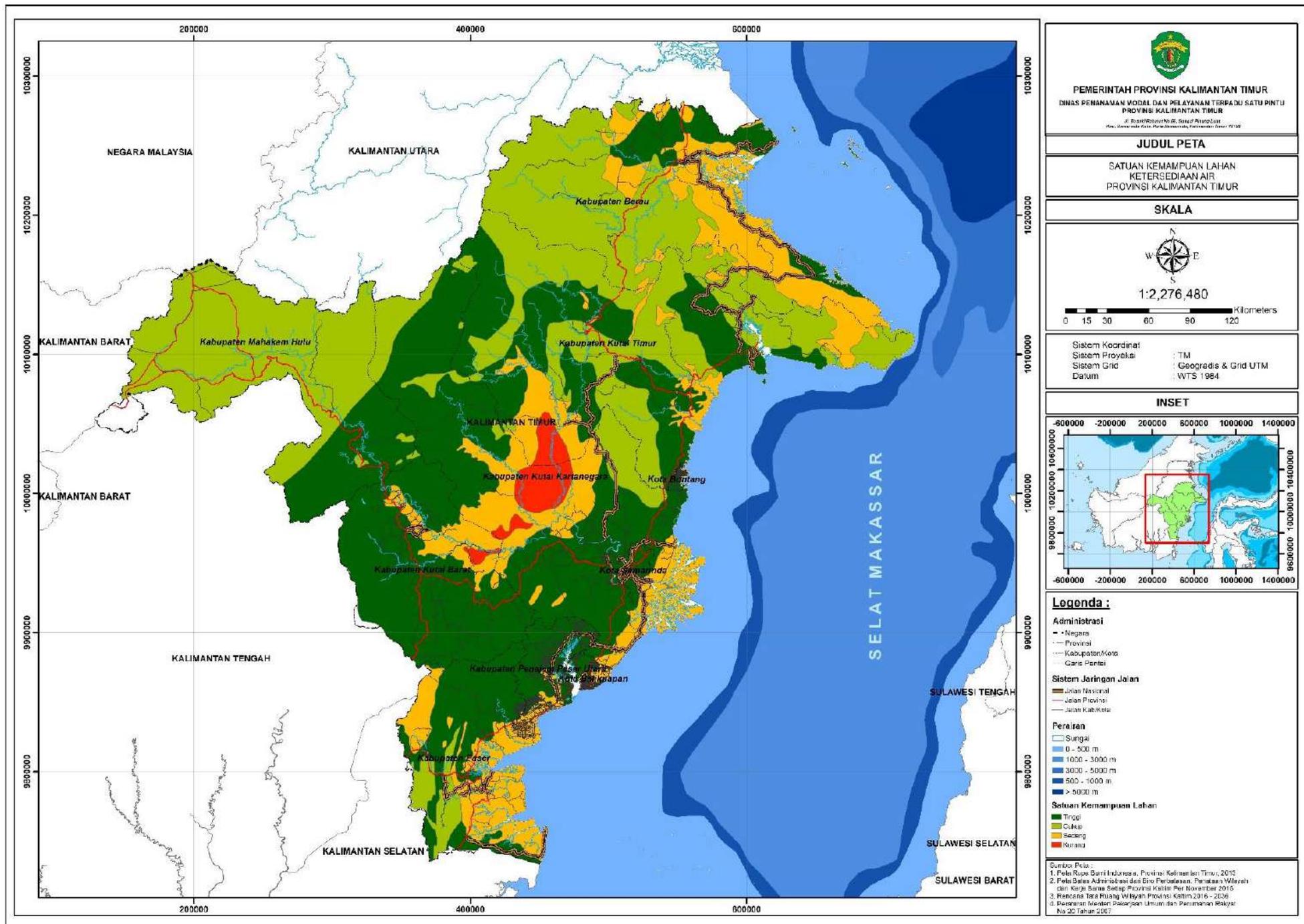
Dari tumpang tindih peta jenis tanah, peta hidrologi produktivitas akuifer, dan peta hidrologi litologi diperoleh Peta SKL Ketersediaan Air. SKL Ketersediaan Air merupakan SKL yang menggambarkan tingkat ketersediaan air untuk pengembangan wilayah dan kemampuan penyediaan air. Didapatkan 4 klasifikasi SKL Ketersediaan Air di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Ketersediaan Air tinggi, cukup, sedang dan kurang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Ketersediaan Air Tinggi menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada pada tingkatan tinggi, guna pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 44%.
- b. SKL Ketersediaan Air Cukup menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada pada tingkatan cukup, guna pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 36%.
- c. SKL Ketersediaan Air Sedang menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada pada tingkatan sedang, guna pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 19%.
- d. SKL Ketersediaan Air Kurang menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada pada tingkatan kurang, guna pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2%.

Tabel IV. 9 SKL Ketersediaan Air Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Ketersediaan Air	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	5,511,889	44%
2	Cukup	4,494,018	36%
3	Sedang	2,411,230	19%
4	Kurang	219,967	2%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.6 SKL Drainase

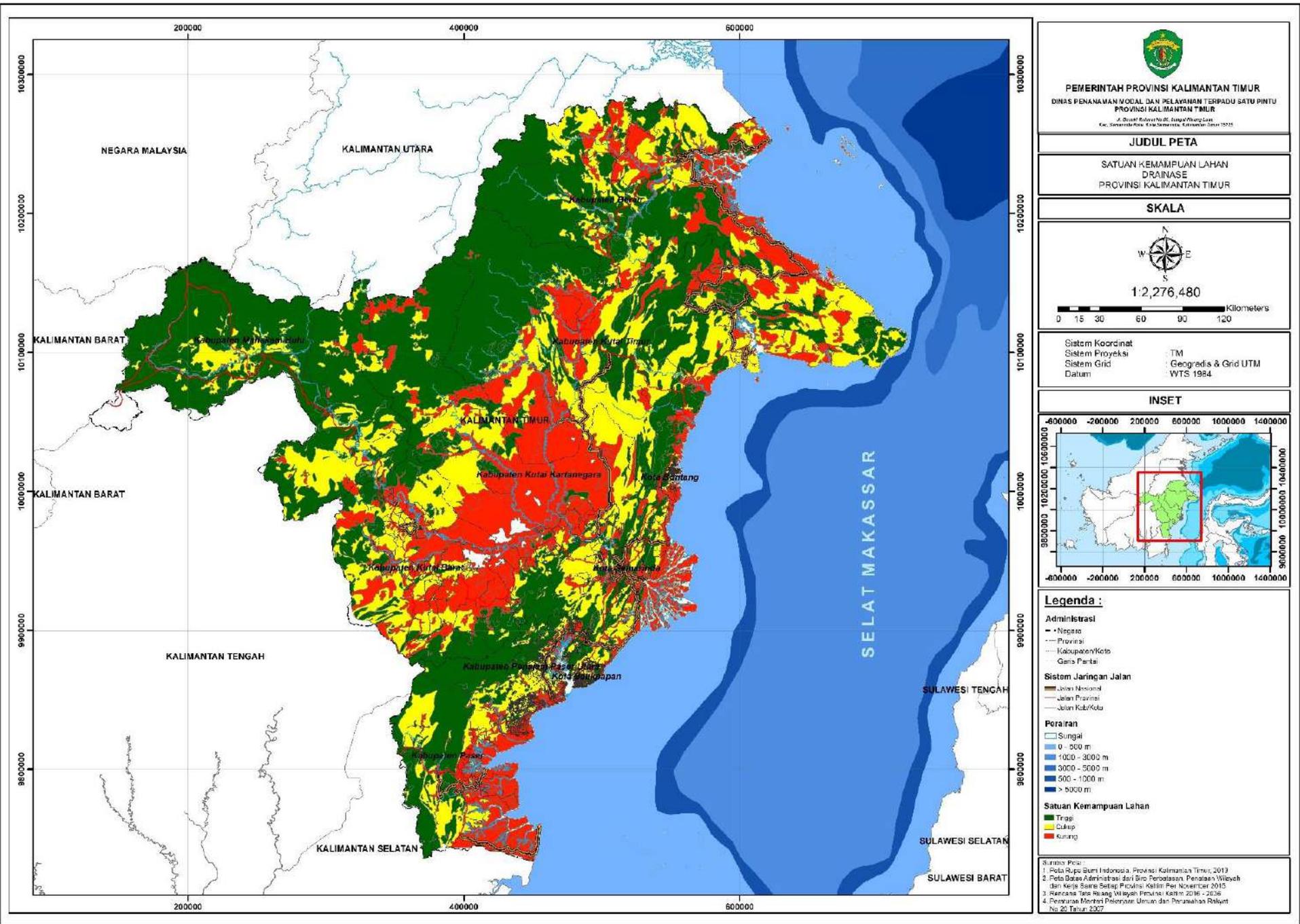
Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, dan peta jenis tanah diperoleh Peta SKL Drainase. SKL Drainase merupakan SKL yang menggambarkan tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga dapat dihindari kemungkinan genangan dalam pengembangan wilayah. Didapatkan 3 klasifikasi SKL Drainase di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Drainase, tinggi, cukup dan kurang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Drainase Tinggi menjelaskan tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami tinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 48%
- b. SKL Drainase Cukup menjelaskan tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami cukup di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 27%
- c. SKL Drainase Kurang menjelaskan tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami kurang di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 25%.

Tabel IV. 10 SKL Drainase Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Drainase	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	5,950,688	48%
2	Cukup	3,368,520	27%
3	Kurang	3,095,292	25%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.7 SKL Erosi

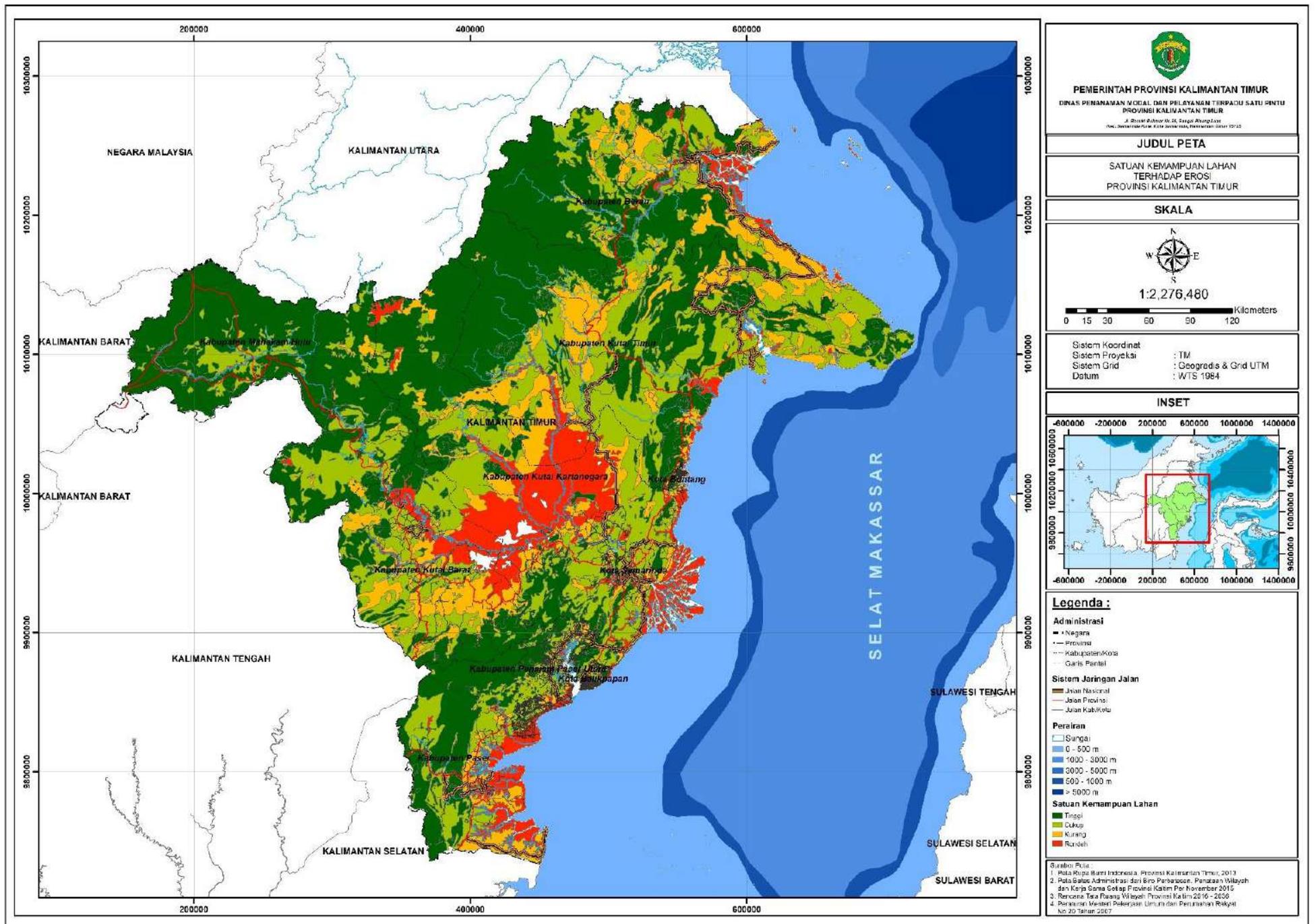
Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, peta jenis tanah, dan peta penutupan lahan diperoleh Peta SKL Erosi. SKL Erosi merupakan SKL yang menggambarkan tingkat keterkikisan tanah suatu wilayah. Didapatkan 4 klasifikasi SKL terhadap Erosi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL terhadap Erosi tinggi, cukup, kurang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL terhadap Erosi Tinggi menjelaskan tingkat kerentanan lahan tinggi terhadap erosi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 46%.
- b. SKL terhadap Erosi Cukup menjelaskan tingkat kerentanan lahan cukup terhadap erosi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 29%.
- c. SKL Kestabilan pondasi Kurang menjelaskan bahwa tingkat kerentanan lahan kurang terhadap erosi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14%.
- d. SKL Kestabilan pondasi Rendah menjelaskan bahwa tingkat kerentanan lahan rendah terhadap erosi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10%.

Tabel IV. 11 SKL Erosi Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Terhadap Erosi	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	5,744,492	46%
2	Cukup	3,574,716	29%
3	Kurang	1,799,555	14%
4	Rendah	1,295,738	10%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.8 SKL Pembuangan Limbah

Tujuan analisis SKL Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Sasaran dalam satuan kemampuan lahan pembuangan limbah ini ialah mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah padat atau sampah, mengetahui daerah yang mampu untuk ditempati lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah cair dan mempersiapkan daerah-daerah tersebut dan pengamanannya sebagai lokasi pembuangan akhir limbah. Dari tumpang tindih peta topografi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, peta jenis tanah, dan peta penutupan lahan diperoleh Peta SKL Pembuangan Limbah.

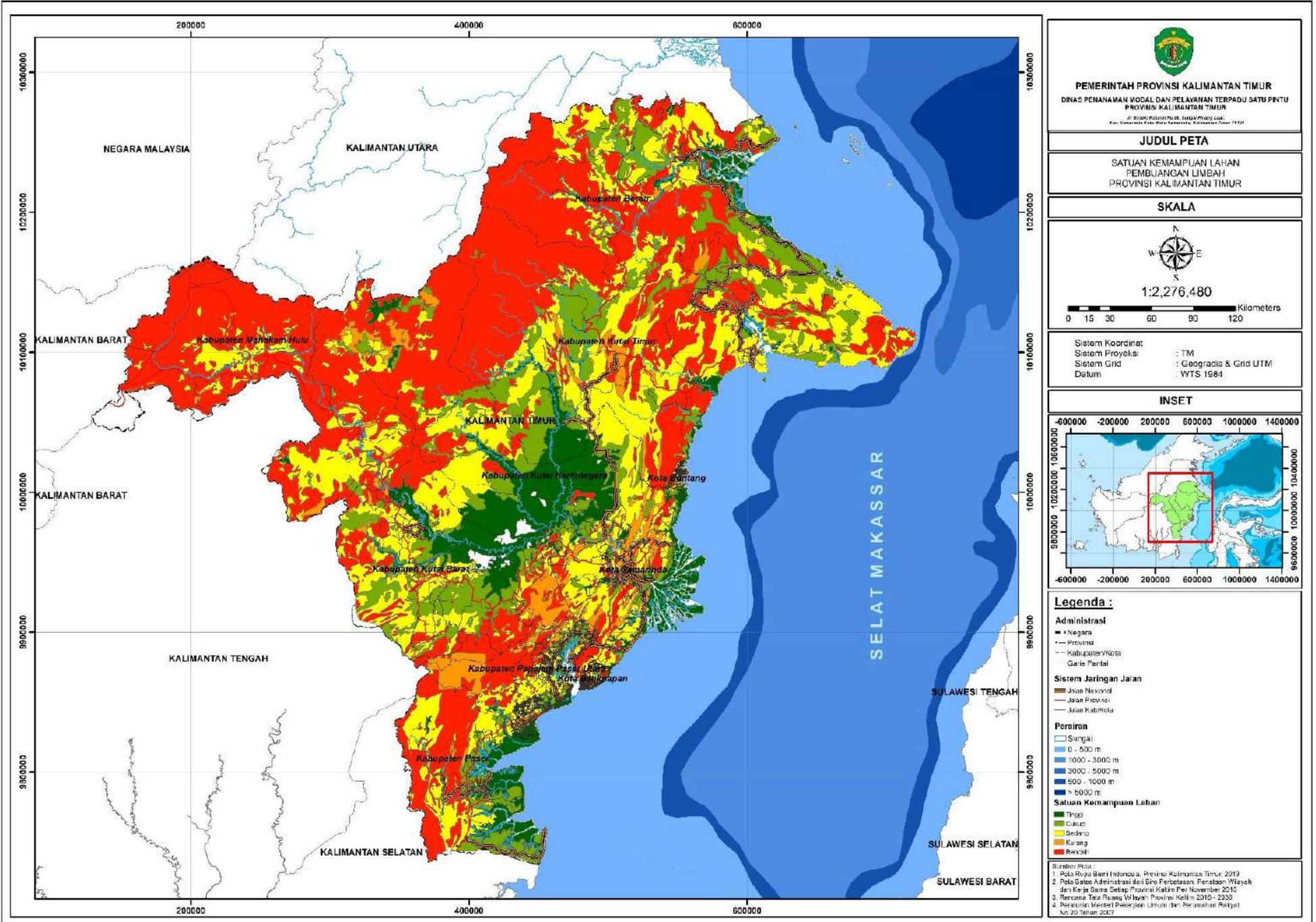
Didapatkan 5 klasifikasi SKL Pembuangan Limbah di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL Pembuangan limbah tinggi, cukup, sedang, kurang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Pembuangan Limbah Tinggi menjelaskan kemampuan tinggi daerah tersebut untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10%.
- b. SKL Pembuangan Limbah Cukup menjelaskan kemampuan cukup daerah tersebut untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14%.
- c. SKL Pembuangan Limbah Sedang menjelaskan kemampuan sedang daerah tersebut untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 27%
- d. SKL Pembuangan Limbah Kurang menjelaskan kemampuan kurang daerah tersebut untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4%.
- e. SKL Pembuangan Limbah Rendah menjelaskan kemampuan rendah daerah tersebut untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 44%.

Tabel IV. 12 SKL Pembuangan Limbah Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Pembuangan Limbah	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	1,295,738	10%
2	Cukup	1,799,555	14%
3	Sedang	3,368,520	27%
4	Kurang	546,188	4%
5	Rendah	5,404,501	44%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.3.9 SKL Potensi Bencana Alam

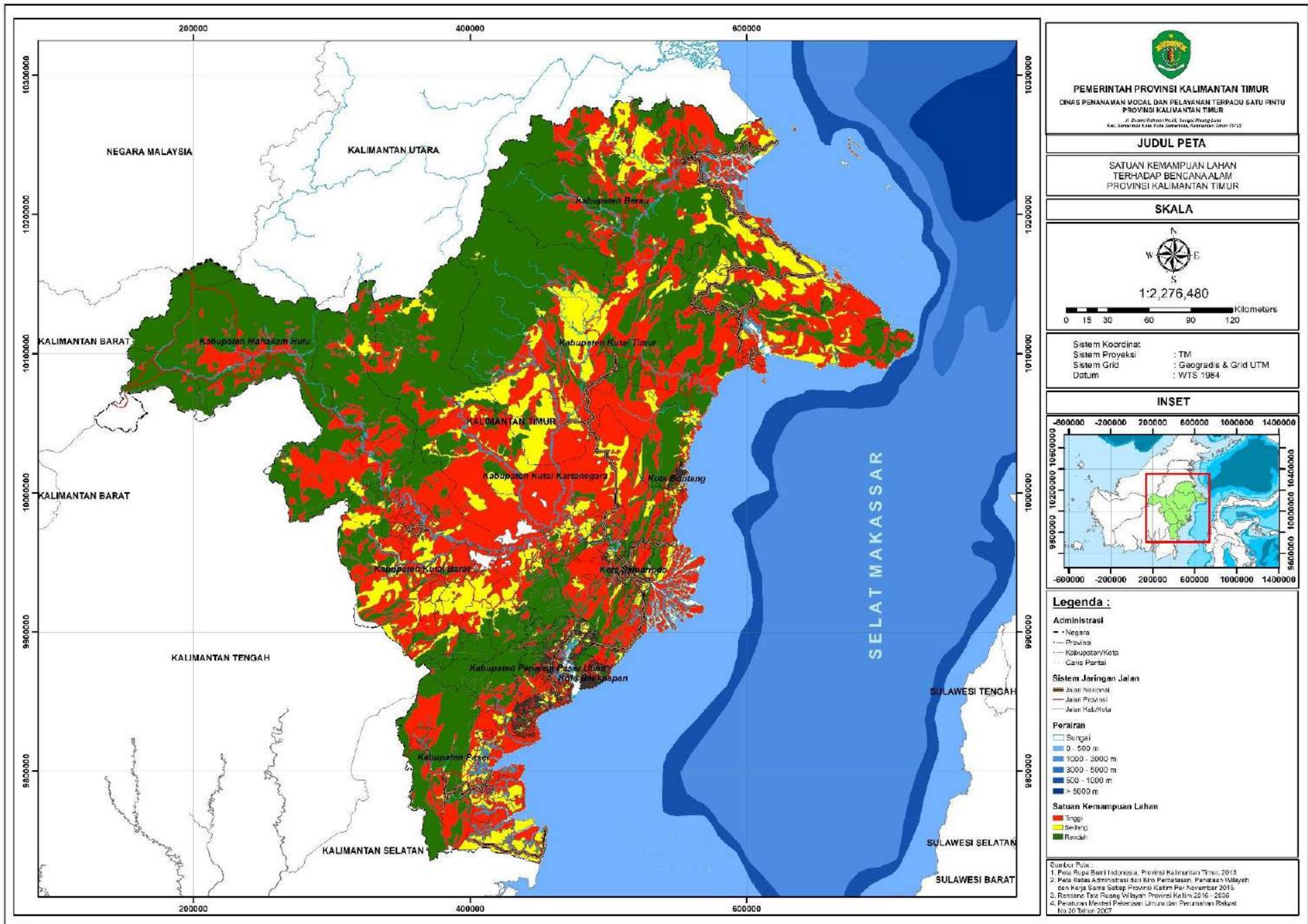
Peta SKL Potensi Bencana Alam diperoleh dari tumpang tindih seluruh peta kerawanan bencana. SKL Potensi Bencana Alam merupakan SKL yang menggambarkan tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam, khususnya dari aspek geologi, sehingga dapat mengurangi kerugian. Didapatkan 3 klasifikasi SKL Potensi Bencana Alam di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu SKL potensi bencana alam tinggi, cukup, sedang dan rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing luasan dan persentase per klasifikasi:

- a. SKL Potensi Bencana Alam Tinggi menjelaskan tingkat kemampuan lahan tinggi dalam menerima bencana alam, khususnya dari aspek geologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 38%.
- b. SKL Potensi Bencana Alam Sedang menjelaskan tingkat kemampuan lahan sedang dalam menerima bencana alam, khususnya dari aspek geologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14%.
- c. SKL Potensi Bencana Alam Rendah menjelaskan tingkat kemampuan lahan rendah dalam menerima bencana alam, khususnya dari aspek geologi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 48%.

Tabel IV. 13 SKL Potensi Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur

No.	SKL Terhadap Bencana Alam	Luas (Ha)	Persentase Luas
1	Tinggi	4,704,428	38%
2	Sedang	1,759,352	14%
3	Rendah	5,950,659	48%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



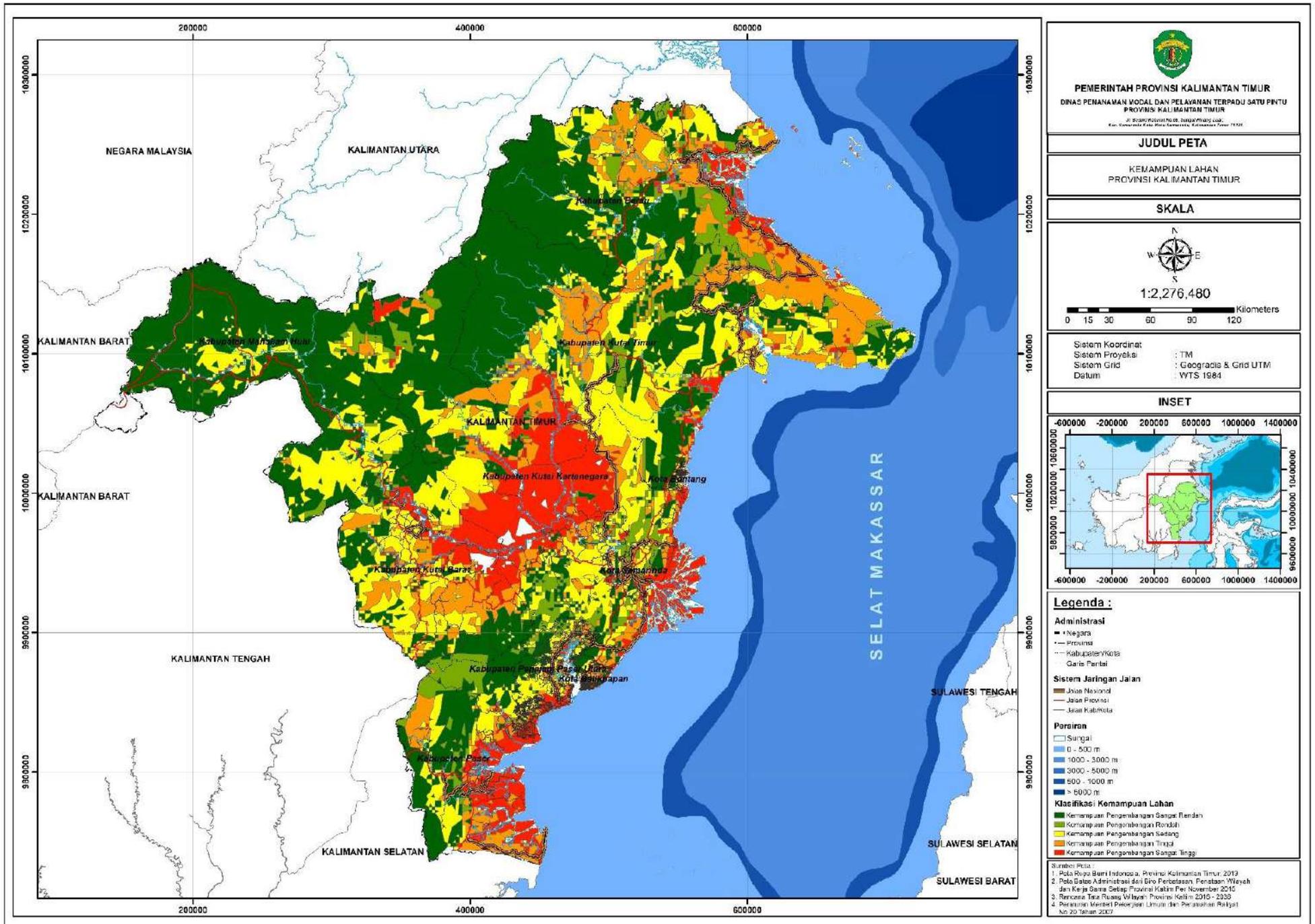
4.3.10 Kemampuan Lahan

Peta Kemampuan Lahan diperoleh dari tumpang tindih seluruh peta SKL di atas. Peta Kemampuan Lahan merupakan peta yang menggambarkan tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan.

Tabel IV. 14 Kemampuan Lahan Provinsi Kalimantan Timur

Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan	Luas (Ha)	Persentase Luas
53 – 67	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	5.112.400	41%
68 – 84	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Rendah	787.111	6%
85 – 102	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang	2.945.852	24%
103 – 117	Kelas D	Kemampuan Pengembangan Tinggi	1.958.244	16%
118 – 140	Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	1.630.236	13%

Sumber: Hasil Analisis, 2021



4.4 Analisis Potensi Unggulan

4.4.1 PDB Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pendapatan yang diterima masyarakat bukan hanya merujuk pada upah dan gaji, melainkan berupa pendapatan faktor produksi. Pendapatan faktor produksi merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran dalam wujud balas jasa tenaga kerja (seperti upah atau gaji) dan bukan tenaga kerja (seperti bunga, dividen, royalti, dan kompensasi atas kepemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup masyarakat. Apabila produk yang dihasilkan dalam perekonomian dikaitkan pola dan perilaku konsumsi masyarakat; maka pendapatan nasional dapat menjadi proksi atas ukuran kemakmuran.

PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori lapangan usaha dari tahun ke tahun.

Tabel IV. 15 PDB Nasional Tahun 2016-2020

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,210,955.5	1,258,375.7	1,307,253.0	1,354,399.1	1,378,131.3
B	Pertambangan dan Penggalian	774,593.1	779,678.4	796,505.0	806,206.2	790,475.2
C	Industri Pengolahan	2,016,876.9	2,103,466.1	2,193,368.4	2,276,667.8	2,209,920.3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,009.9	101,551.3	107,108.6	111,436.7	108,826.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,634.6	7,985.3	8,429.4	9,004.9	9,449.3
F	Konstruksi	925,040.3	987,924.9	1,048,082.8	1,108,425.0	1,072,334.8

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,255,706.8	1,311,746.5	1,376,878.7	1,440,263.0	1,386,695.4
H	Transportasi dan Pergudangan	374,843.4	406,679.4	435,336.5	463,157.5	393,481.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282,823.4	298,129.7	315,068.6	333,306.8	299,248.0
J	Informasi dan Komunikasi	459,208.1	503,420.7	538,762.7	589,536.1	651,930.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	378,279.4	398,971.4	415,620.6	443,093.1	457,482.0
L	Real Estat	279,500.5	289,568.5	299,648.2	316,901.1	324,259.4
M,N	Jasa Perusahaan	159,321.7	172,763.8	187,691.1	206,936.2	195,671.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319,965.0	326,514.3	349,277.6	365,533.8	365,440.9
P	Jasa Pendidikan	293,887.6	304,810.8	321,133.8	341,355.1	350,329.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102,490.2	109,497.5	117,322.2	127,522.1	142,309.7
R,S,T,U	Jasa lainnya	156,507.5	170,174.8	185,405.6	205,011.4	196,608.7
		9,097,643.9	9,531,259.1	10,002,892.8	10,498,755.9	10,332,595.1

Sumber: Pendapatan Nasional Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021

4.4.2 PDRB Kalimantan Timur

Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 607,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 44,84 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 652,16

triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh turunnya kinerja ekonomi di sebagian besar lapangan usaha. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 486,71 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 472,86 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2020 terjadi akibat turunnya produksi di lebih dari separuh lapangan usaha.

Tabel IV. 16 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,639.40	30,261.40	32,140.16	33,396.19	33,020.52
B	Pertambangan dan Penggalan	212,649.63	216,447.10	218,686.72	233,762.25	223,064.39
C	Industri Pengolahan	93,740.63	96,364.83	96,797.54	96,824.49	94,146.62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	223.40	238.53	261.83	284.53	317.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201.72	218.60	224.57	235.44	247.87
F	Konstruksi	29,510.46	31,211.25	33,754.00	35,683.00	35,228.58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,129.06	23,948.48	25,679.00	27,025.57	27,276.57
H	Transportasi dan Pergudangan	12,384.34	13,184.39	13,937.81	14,264.27	13,466.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,463.69	3,753.59	4,080.24	4,340.12	4,109.29
J	Informasi dan Komunikasi	6,483.81	6,989.14	7,295.36	7,795.54	8,338.48

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,572.95	6,525.58	6,751.78	6,966.07	7,137.99
L	Real Estat	3,901.89	4,032.55	4,227.27	4,316.69	4,351.11
M,N	Jasa Perusahaan	824.64	853.81	869.17	914.13	889.67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,837.74	7,565.60	7,941.46	8,252.79	7,925.15
P	Jasa Pendidikan	5,929.25	6,328.42	6,780.28	7,036.31	7,250.32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,325.82	2,492.46	2,691.43	2,864.49	3,428.05
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,185.41	2,326.15	2,548.79	2,750.36	2,665.79
	TOTAL	439,003.84	452,741.88	464,667.41	486,712.24	472,864.89

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Pertumbuhan ekonomi merupakan Kalimantan Timur salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi akibat turunnya produksi dan kinerja ekonomi di sebagian besar lapangan usaha karena mewabahnya pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 sebesar 472,86 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 486,71 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan atau kontraksi ekonomi sebesar 2,85 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, sembilan lapangan usaha mengalami kontraksi. Dua lapangan usaha di antaranya mengalami kontraksi mencapai lebih dari lima persen. Sementara itu, delapan lapangan usaha lainnya masih mampu

tumbuh secara positif, bahkan dua lapangan usahanya ada yang tumbuh lebih dari sepuluh persen. Dari sembilan lapangan usaha yang mengalami kontraksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,59 persen, lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,32 persen, dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,58 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya yang terdiri dari Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib terkontraksi sebesar 3,97 persen; Lapangan Usaha Jasa Lainnya terkontraksi sebesar 3,07 persen; lalu Lapangan Usaha Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 2,77 persen; Lapangan Usaha Jasa Perusahaan terkontraksi se besar 2,68 persen; Lapangan Usaha Konstruksi terkontraksi sebesar 1,27 persen; dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga terkontraksi sebesar 1,12 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,67 persen; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,59 persen; dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 5,28 persen; Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,04 persen; Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,47 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,52 persen dan Lapangan Usaha Real Estat sebesar 0,80 persen.

Tabel IV. 17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.46	5.66	6.21	3.91	-1.12
B	Pertambangan dan Penggalian	-3.52	179	1.03	6.89	-4.58
C	Industri Pengolahan	5.46	280	0.45	0.03	-2.77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.32	6.78	9.77	8.67	11.59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.57	8.37	3.73	4.84	5.28
F	Konstruksi	-3.86	5.76	8.15	5.71	-1.27

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.2	8.22	7.23	5.24	0.93
H	Transportasi dan Pergudangan	3.05	6.46	5.71	2.34	-5.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.79	8.37	8.7	6.37	-5.32
J	Informasi dan Komunikasi	7.45	7.79	4.38	6.86	6.96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.84	-0.72	3.47	3.17	2.47
L	Real Estat	-0.83	3.35	4.83	2.12	0.8
M,N	Jasa Perusahaan	-4.25	3.54	4.96	2	-2.68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.27	-3.47	4.97	3.92	-3.97
P	Jasa Pendidikan	7.06	6.73	7.14	3.78	3.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.31	7.16	7.98	6.43	19.67
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.81	6.44	9.57	7.91	-3.07
	Rata-rata	-0.38	3.13	2.64	4.74	-2.85

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Peranan lapangan usaha tersebut yaitu sebesar 41,43

persen (turun dari 43,19 persen di tahun 2016); selanjutnya Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,90 persen (turun dari 20,63 persen di tahun 2016); dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,53 persen (naik dari 8,28 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,77 persen (naik dari 8,22 persen di tahun 2016); dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, dan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,46 persen (naik dari 5,55 persen di tahun 2016). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Lapangan Usaha Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang mengalami peningkatan peranan terhadap struktur ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 dibanding tahun 2016. Sebaliknya, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan, peranannya menurun pada tahun 2020 dibanding tahun 2016. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masingmasing kurang dari 5 persen.

Tabel IV. 18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.22	7.98	7.89	7.91	8.77
B	Pertambangan dan Penggalian	43.19	46.6	46.69	45.6	41.43
C	Industri Pengolahan	20.63	18.93	18.14	17.82	18.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	8.28	7.92	8.42	8.97	9.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.55	5.41	5.54	5.86	6.46
H	Transportasi dan Pergudangan	3.71	3.59	3.62	3.71	3.66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.95	0.92	0.96	1.03	1.06
J	Informasi dan Komunikasi	1.3	1.25	1.26	1.34	1.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.72	1.53	1.53	1.57	1.73
L	Real Estat	0.96	0.88	0.88	0.88	0.96
M,N	Jasa Perusahaan	0.22	0.21	0.2	0.21	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.32	1.97	1.94	2.00	2.1

P	Jasa Pendidikan	1.61	1.53	1.59	1.69	1.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.63	0.59	0.61	0.66	0.88
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.62	0.6	0.63	0.68	0.72
	TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2021

4.4.3 Analisis Location Quotient (LQ).

Untuk mengetahui sektor basis dari Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan cara Analisis Location Quotient (LQ). Data yang digunakan dalam analisis Location Quotient (LQ) adalah data PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDB Indonesia dari tahun 2016-2020. Dalam menganalisis menggunakan data PDRB menurut harga konstan.

Tabel IV. 19 Analisis Location Quotient (LQ)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata	Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.49	0.51	0.53	0.53	0.52	0.52	non basis
B	Pertambangan dan Penggalian	5.69	5.84	5.91	6.25	6.17	5.97	basis
C	Industri Pengolahan	0.96	0.96	0.95	0.92	0.93	0.95	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.55	0.58	0.57	0.56	0.57	0.57	non basis
F	Konstruksi	0.66	0.67	0.69	0.69	0.72	0.69	non basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.37	0.38	0.40	0.40	0.43	0.40	non basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0.68	0.68	0.69	0.66	0.75	0.69	non basis

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata	Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.25	0.27	0.28	0.28	0.30	0.28	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	non basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.35	non basis
L	Real Estat	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	non basis
M,N	Jasa Perusahaan	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	non basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.51	0.49	0.49	0.49	0.47	0.49	non basis
P	Jasa Pendidikan	0.42	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.47	0.48	0.49	0.48	0.53	0.49	non basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.29	0.29	0.30	0.29	0.30	0.29	non basis

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data PDRB tahun 2016-2020 maka didapatkan sektor yang menjadi sektor basis dan sektor non basis. Penentuan sektor tersebut menjadi sektor basis dan sektor non basis adalah dari perhitungan LQ sebagai berikut:

- LQ > 1 adalah sektor basis

Sektor basis adalah sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari wilayah acuan. Dari perhitungan LQ didapat sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi sektor yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi wilayah.

- $LQ < 1$ adalah sektor non basis

Sektor non basis adalah sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada wilayah acuan. Dalam perhitungan ini didapatkan sektor non basis di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya. Sektor non basis adalah sektor yang mendukung keberlangsungan sektor basis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel IV. 20 Sektor Basis dan Non Basis Provinsi Kalimantan Timur

No.	Lapangan Usaha	Rata-rata	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.62	non basis
B	Pertambangan dan Penggalian	5.62	basis
C	Industri Pengolahan	0.87	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.56	non basis
F	Konstruksi	0.83	non basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.39	non basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0.88	non basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.32	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0.24	non basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.38	non basis
L	Real Estat	0.30	non basis
M, N	Jasa Perusahaan	0.11	non basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.59	non basis
P	Jasa Pendidikan	0.51	non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.56	non basis
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.35	non basis

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.4.4 Analisis Shift Share

Salah satu metode untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah/wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat. Berikut adalah perhitungan menggunakan analisis shift share.

Tabel IV. 21 PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan PDB Indonesia Tahun 2016 dan 2020

No.	Lapangan Usaha	PDRB Kalimantan Timur		PDB Indonesia	
		Tahun			
		2016	2020	2016	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,639.40	33,020.52	1,210,955.5	1,378,131.3
B	Pertambangan dan Penggalian	212,649.63	223,064.39	774,593.1	790,475.2
C	Industri Pengolahan	93,740.63	94,146.62	2,016,876.9	2,209,920.3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	223.40	317.50	100,009.9	108,826.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201.72	247.87	7,634.6	9,449.3
F	Konstruksi	29,510.46	35,228.58	925,040.3	1,072,334.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,129.06	27,276.57	1,255,706.8	1,386,695.4
H	Transportasi dan Pergudangan	12,384.34	13,466.99	374,843.4	393,481.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,463.69	4,109.29	282,823.4	299,248.0
J	Informasi dan Komunikasi	6,483.81	8,338.48	459,208.1	651,930.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,572.95	7,137.99	378,279.4	457,482.0
L	Real Estat	3,901.89	4,351.11	279,500.5	324,259.4
M,N	Jasa Perusahaan	824.64	889.67	159,321.7	195,671.1

No.	Lapangan Usaha	PDRB Kalimantan Timur		PDB Indonesia	
		Tahun			
		2016	2020	2016	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,837.74	7,925.15	319,965.0	365,440.9
P	Jasa Pendidikan	5,929.25	7,250.32	293,887.6	350,329.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,325.82	3,428.05	102,490.2	142,309.7
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,185.41	2,665.79	156,507.5	196,608.7
		439,003.84	472,864.89	9,097,643.90	10,332,595.10

Sumber: Kompilasi Data, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan analisis shift share terjadi peningkatan PDRB di semua sektor dalam kurun lima tahun. Meskipun tidak di semua sektor mengalami peningkatan yang pesat tetapi peningkatan yang sedikit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur meningkat. Proses selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi serta mengetahui sektor yang paling berpotensi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel IV. 22 Perhitungan Data Dasar untuk Analisis Kinerja Sektor Ekonomi / Analisis Shift Share Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan 2020

No.	Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.14	1.14	1.15
B	Pertambangan dan Penggalian	1.14	1.02	1.05
C	Industri Pengolahan	1.14	1.10	1.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.14	1.09	1.42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.14	1.24	1.23
F	Konstruksi	1.14	1.16	1.19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.14	1.10	1.23
H	Transportasi dan Pergudangan	1.14	1.05	1.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.14	1.06	1.19

No.	Lapangan Usaha	Ra	Ri	ri
J	Informasi dan Komunikasi	1.14	1.42	1.29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.14	1.21	1.09
L	Real Estat	1.14	1.16	1.12
M,N	Jasa Perusahaan	1.14	1.23	1.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.14	1.14	1.01
P	Jasa Pendidikan	1.14	1.19	1.22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.14	1.39	1.47
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.14	1.26	1.22

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Hasil perhitungan dari komponen KPN, KPP, KPPW dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) dapat terlihat perbedaan nilai antarsektor pada hasil analisis tersebut memiliki nilai positif dan nilai negatif. Dalam menganalisis Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja sektor-sektor tersebut cukup besar dan menandakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami kemajuan di bidang ekonomi yang baik. Sektor yang paling besar dalam pertumbuhan kinerjanya adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Indikator dari perhitungan KPP, KPPW dan PB adalah sebagai berikut:

1. Kriteria interpretasi nilai KPP

- KPP bernilai positif ($KPP > 0$) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh cepat.
- KPP bernilai negatif ($KPP < 0$) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh lambat.

2. Kriteria interpretasi nilai KPPW

- KPPW bernilai positif ($KPPW > 0$) pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di wilayah /daerah tsb atau sering disebut juga sebagai keuntungan lokasional.
- KPPW bernilai negatif ($KPPW < 0$) pada sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif / tidak dapat bersaing.

Tabel IV. 23 Hasil Perhitungan Masing-Masing Komponen KPN, KPP dan KPPW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	KPN	KPP	KPPW
		Ra-1 (%)	Ri-Ra	ri-Ri
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14%	0.23%	1%
B	Pertambangan dan Penggalian	14%	-11.52%	3%
C	Industri Pengolahan	14%	-4.00%	-9%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14%	-4.76%	33%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14%	10.20%	-1%
F	Konstruksi	14%	2.35%	3%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14%	-3.14%	13%
H	Transportasi dan Pergudangan	14%	-8.60%	4%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14%	-7.77%	13%
J	Informasi dan Komunikasi	14%	28.39%	-13%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14%	7.36%	-12%
L	Real Estat	14%	2.44%	-5%
M,N	Jasa Perusahaan	14%	9.24%	-15%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14%	0.64%	-13%
P	Jasa Pendidikan	14%	5.63%	3%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14%	25.28%	9%
R,S,T,U	Jasa lainnya	14%	12.05%	-4%

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Hasil dari interpretasi dari KPP adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, mengalami pertumbuhan kinerja yang lambat secara nasional. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan serta sektor keuangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya mengalami pertumbuhan kinerja yang cepat.

Tabel IV. 24 Hasil Interpretasi Nilai KPP per Sektor Provinsi Kalimantan Timur

No.	Lapangan Usaha	KPN	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.23%	Spesialisasi Dalam Sektor Yg Secara Nasional Tumbuh Cepat
B	Pertambangan dan Pengecilan	-11.52%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
C	Industri Pengolahan	-4.00%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4.76%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.20%	Spesialisasi Dalam Sektor Yg Secara Nasional Tumbuh Cepat
F	Konstruksi	2.35%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3.14%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
H	Transportasi dan Pergudangan	-8.60%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7.77%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Lambat
J	Informasi dan Komunikasi	28.39%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.36%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
L	Real Estat	2.44%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
M,N	Jasa Perusahaan	9.24%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.64%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
P	Jasa Pendidikan	5.63%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.28%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat
R,S,T,U	Jasa lainnya	12.05%	Spesialisasi Dalam Sektor yang Secara Nasional Tumbuh Cepat

Sumber: Hasil Analisis, 2021

KPPW dicari nilainya untuk mengetahui perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan lokal di wilayah tersebut. Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki daya saing.

Tabel IV. 25 Hasil Interpretasi Nilai KPPW Per Sektor

	Lapangan Usaha	KPPW	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1%	Mempunyai Daya Saing
B	Pertambangan dan Penggalian	3%	Mempunyai Daya Saing
C	Industri Pengolahan	-9%	Tidak Mempunyai Daya Saing
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33%	Mempunyai Daya Saing
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1%	Tidak Mempunyai Daya Saing
F	Konstruksi	3%	Mempunyai Daya Saing
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13%	Mempunyai Daya Saing
H	Transportasi dan Pergudangan	4%	Mempunyai Daya Saing
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13%	Mempunyai Daya Saing
J	Informasi dan Komunikasi	-13%	Tidak Mempunyai Daya Saing
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-12%	Tidak Mempunyai Daya Saing
L	Real Estat	-5%	Tidak Mempunyai Daya Saing
M,N	Jasa Perusahaan	-15%	Tidak Mempunyai Daya Saing
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-13%	Tidak Mempunyai Daya Saing
P	Jasa Pendidikan	3%	Mempunyai Daya Saing
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9%	Mempunyai Daya Saing
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4%	Tidak Mempunyai Daya Saing

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.4.5 Analisis Sektor Ekonomi Unggulan (Analisis LQ dan Analisis Shift Share)

Analisis sektor ekonomi unggulan adalah analisis yang menggabungkan antara hasil analisis LQ dan analisis shift share. Hasil analisis gabungan ini dianggap mampu meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Output dari analisis gabungan ini adalah

tipologi sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini adalah hasil penggabungan antara perhitungan LQ dan shift share.

Tabel IV. 26 Gabungan Hasil Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Provinsi Kalimantan Timur

No.	Lapangan Usaha	PB	LQ	PB	LQ	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.15	0.62	>0	<1	Berkembang
B	Pertambangan dan Penggalian	0.05	5.62	>0	>1	Unggulan
C	Industri Pengolahan	0.00	0.87	>0	<1	Berkembang
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.42	0.05	>0	<1	Berkembang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.23	0.56	>0	<1	Berkembang
F	Konstruksi	0.19	0.83	>0	<1	Berkembang
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.23	0.39	>0	<1	Berkembang
H	Transportasi dan Pergudangan	0.09	0.88	>0	<1	Berkembang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.19	0.32	>0	<1	Berkembang
J	Informasi dan Komunikasi	0.29	0.24	>0	<1	Berkembang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.09	0.38	>0	<1	Berkembang
L	Real Estat	0.12	0.30	>0	<1	Berkembang
M,N	Jasa Perusahaan	0.08	0.11	>0	<1	Berkembang
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.01	0.59	>0	<1	Berkembang
P	Jasa Pendidikan	0.22	0.51	>0	<1	Berkembang
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.47	0.56	>0	<1	Berkembang
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.22	0.35	>0	<1	Berkembang

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Setelah hasil analisis LQ dan shift share digabungkan maka didapatkan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor lainnya berada dalam kuadran sektor berkembang.

4.5 Identifikasi Faktor Pendukung dan Kendala Pengembangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur

SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) analisis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Kejelasan Grand Strategi Visi Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur
- b. Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan
- c. Situasi keamanan yang kondusif
- d. Superioritas Wilayah.
- e. Adanya kepastian hukum /regulasi yang pro penanaman modal
- f. Kesiapan kelembagaan (BPMD) yang memadai
- g. Kesiapan aparatur pemerintah yang berkompeten.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masing-masing OPD
- b. Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten)
- c. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online
- d. Data Peluang investasi belum up to date
- e. Keunggulan wilayah masih bersifat komparatif
- f. Infrastruktur belum merata dan optimal
- g. Ketidak merataan investasi
- h. Tingginya biaya hidup (inflasi)
- i. Terbatasnya tenaga terampil
- j. Standarisasi pelayanan di daerah (SOP).

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non Departemen/swasta
 - c. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - d. Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri.
 - e. Kesepakatan Pembangunan Kawasan
 - f. Regulasi Percepatan Pembangunan
 - g. Pembangunan yang Ramah Lingkungan
 - h. Pengembangan Energi Terbarukan
4. Tantangan (*Threat*)
- a. Pasar bebas;
 - b. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
 - c. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
 - d. Belum tergalinya potensi perizinan di Kota Samarinda
 - e. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan Usahanya.
 - f. Degradasi Lingkungan
 - g. Bencana alam (banjir)
 - h. Meningkatnya daya saing daerah dari luar

Gambar 4. 12 Matriks SWOT Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan Grand Strategi Visi Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur b. Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan c. Situasi keamanan yang kondusif d. Superioritas Wilayah. e. Adanya kepastian hukum /regulasi yang pro penanaman modal f. Kesiapan kelembagaan (BPMD) yang memadai g. Kesiapan aparatur pemerintah yang berkompeten. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masing-masing OPD b. Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten) c. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan Secara Online d. Data Peluang investasi belum up to date e. Keunggulan wilayah masih bersifat komparatif f. Infrastruktur belum merata dan optimal g. Ketidak merataan investasi h. Tingginya biaya hidup (inflasi) i. Terbatasnya tenaga terampil j. Standarisasi pelayanan di daerah (SOP).
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kebijakan Nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non Departemen/swasta c. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP d. Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri. e. Kesepakatan Pembangunan Kawasan f. Regulasi Percepatan Pembangunan g. Pembangunan yang Ramah Lingkungan h. Pengembangan Energi Terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar bebas; b. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi; c. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait d. Belum tergalinya potensi perizinan di Kota Samarinda e. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan Usahanya. f. Degradasi Lingkungan g. Bencana alam (banjir) h. Meningkatnya daya saing daerah dari luar

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 4. 13 Sasaran Strategis dan Tujuan Akhir Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	TUJUAN AKHIR
1	Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perijinan semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2	Mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah dengan penyediaan informasi potensi unggulan daerah menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi	Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
4	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang berorientasi produk ketahanan pangan	Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
5	Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN	Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Sumber: Hasil Analisis, 2021



BAB V PROFIL POTENSI DAN PELUANG USAHA DI KALIMANTAN TIMUR

5.1 Kabupaten Paser

5.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Paser

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ} 48' 29.44''$ - $2^{\circ} 37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0.77''$ - $118^{\circ} 1' 19.82''$ Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser. Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 km². Batas wilayah Kabupaten Paser meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
Batas Timur	: Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
Batas Barat	: Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
Batas Selatan	: Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)

Tabel V. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Batu Sopang	Batu Kajang	1.111,38
Muara Samu	Muser	855,25
Batu Engau	Kerang	1.507,26
Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05
Pasir Belengkong	Pasir Belengkong	990,11
Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58
Kuaro	Kuaro	747,30
Long Ikis	Long Ikis	1.204,22
Muara Komam	Muara Komam	1.753,40
Long Kali	Long Kali	2.385,39
Total		11.603,94

Sumber: BPS Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Paser memiliki ketinggian dan kontur yang bervariasi, Secara garis besar Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah:

- Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m di atas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi;
- Wilayah Barat merupakan daerah bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 422.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Secara keseluruhan ketinggian di Kabupaten Paser dibagi menjadi 5 (lima) bagian wilayah ketinggian sebagai berikut :

- Ketinggian 0-7 M dari permukaan laut (dpl), umumnya mempunyai ciri fisik yaitu sewaktu-waktu tergenang, air tanah payau, banyak tanaman bakau,

daerah pengendapan sungai, kelembaban udara dan suhu air tawar dan tidak terendam;

- Ketinggian 7-25 M dpl, umumnya, mempunyai ciri fisik yaitu tanah cukup dalam dan subur, dapat dialiri air cukup besar, tidak ada erosi dan bila ada sangat terbatas, permukaan tanah datar sampai berlereng sedikit, kadang-kadang tergenang dan mempunyai air tanah yang cukup baik dan mudah didapat;
- Ketinggian 25-100 M dpl, mempunyai ciri fisik yaitu erosi sudah mulai terjadi, daerah yang dapat dialiri sudah mulai berkurang, permukaan tanah mulai kasar, permukaan tanah berlereng datar sampai bergelombang;
- Ketinggian 100-150 M dpl, mempunyai ciri fisik yaitu permukaan tanah berlereng, bergelombang sampai bergunung, curah hujan tinggi, air tanah dalam dan susah didapat, erosi sering terjadi, lapisan tanah cukup dangkal, tumbuhan tropika mulai sukar tumbuh, perkampungan tersebar dan terpencil, wilayah peralihan iklim panas ke iklim pegunungan (sejuk);
- Ketinggian 1000 M atau lebih dpl, mempunyai ciri fisik yaitu wilayah berbukit-bukit sampai berlereng terjal dan memiliki udara sejuk.

Tabel V. 2 Kondisi Fisik Kabupaten Paser

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Curah hujan	174	mm
2	Rata-rata jumlah hari hujan	124	hari
3	Tinggi tempat dari permukaan laut	0-750	mdpl

Sumber: BPS Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

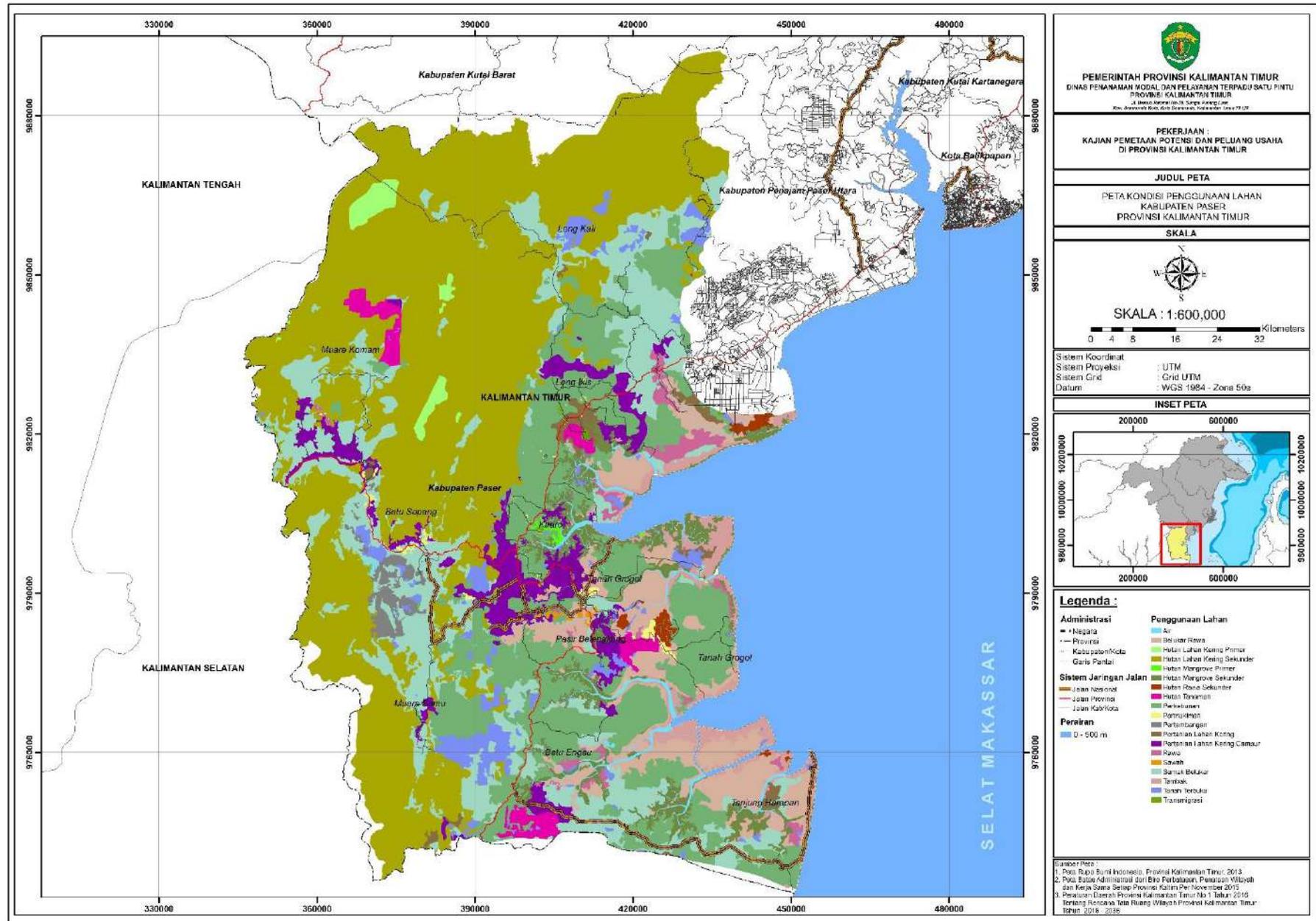
3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Paser terluas dimanfaatkan oleh Hutan Lahan Kering Sekunder sebanyak 41,55% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah lahan perkebunan yaitu seluas 17,48% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Paser. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Paser:

Tabel V. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Paser

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	8.764,38	0.82%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	443.738,98	41.55%
3	Tanah Terbuka	28.814,05	2.70%
4	Pertanian Lahan Kering Campur	46.770,71	4.38%
5	Semak Belukar	158,072,55	14,80%
6	Perkebunan	186,657,96	17,48%
7	Pertambangan	8,734,70	0,82%
8	Air	11,681,49	1,09%
9	Hutan Rawa Sekunder	4,110,99	0,38%
10	Pertanian Lahan Kering	8,779,19	0,82%
11	Hutan Tanaman	14,265,29	1,34%
12	Belukar Rawa	67,307,61	6,30%
13	Permukiman	3,932,71	0,37%
14	Tambak	25,228,33	2,36%
15	Hutan Mangrove Primer	847,98	0,08%
16	Hutan Mangrove Sekunder	37,121,96	3,48%
17	Sawah	961,71	0,09%
18	Rawa	11,705,56	1,10%
19	Transmigrasi	528,00	0,05%
	TOTAL	1,068,024,16	100%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 275.452 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,75% dibandingkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2010. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2020 adalah 108,98, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Tenaga kerja adalah modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Selama kurun waktu 2019-2020, angkatan kerja di Kabupaten Paser meningkat dari 137.737 orang menjadi 142.568 orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,94%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 49,69%. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 25 hingga 44 tahun memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan kelompok umur yang lain. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian suatu wilayah. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Untuk tahun 2020, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (38,08%) masih merupakan sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja

Tabel V. 4 Demografi di Kabupaten Paser

No,	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	275.450	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	2,29	%
3	Kepadatan Penduduk	23,74	jiwa/km ²

No,	Uraian	Besaran	Satuan
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	143.647	jiwa
	Ø Perempuan	131.805	jiwa
5	Jumlah Rumah Tangga	72.015	
6	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	136.131	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	6.437	jiwa

Sumber: BPS, Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Nilai PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Hasil perhitungan sangat sementara angka nominal PDRB Kabupaten Paser tahun 2020 sebesar Rp. 34.736.709.21. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami penurunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat tambang Batubara yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB. Jika dihitung tanpa subsektor pertambangan Batubara, angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2020 menjadi Rp. 25.247.228,78.

Tabel V. 5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2018-2020

No,	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.791.289,05	3.874.418,63	3.822.157,36
B	Pertambangan dan Penggalian	25.178.472,13	26.169.445,45	25.247.228,78
C	Industri Pengolahan	1.600.735,28	1.670.856,31	1.624.475,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.427,43	8.580,95	9.254,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.591,33	7.042,65	7.205,07
F	Konstruksi	785.318,15	867.897,48	833.273,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.259.173,33	1.315.689,62	1.330.884,67
H	Transportasi dan Pergudangan	153.886,62	160.020,13	159.893,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92.046,28	95.906,44	93.715,43
J	Informasi dan Komunikasi	263.770,84	280.722,76	306.212,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	120.000,73	124.409,95	126.761,35

No,	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
L	Real Estat	108.424,60	109.553,25	110.788,25
M,N	Jasa Perusahaan	15.659,10	15.943,01	15.290,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	356.386,10	371.265,19	348.730,53
P	Jasa Pendidikan	417.076,36	440.177,87	457.413,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.887,12	146.321,02	175.723,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	65.910,09	69.065,92	67.699,26
	TOTAL	34.362.054,54	35.727.316,63	34.736.709,21

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Struktur ekonomi merupakan indikator untuk melihat peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Besaran nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Paser adalah sebesar 72,68%. Sedangkan sektor lain yang juga memberikan nilai kontribusi cukup besar terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Paser adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 11,00%.

Tabel V. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2020

No,	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,03%	10,84%	11,00%
B	Pertambangan dan Penggalian	73,27%	73,25%	72,68%
C	Industri Pengolahan	4,66%	4,68%	4,68%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02%	0,02%	0,03%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%
F	Konstruksi	2,29%	2,43%	2,40%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,66%	3,68%	3,83%
H	Transportasi dan Pergudangan	0,45%	0,45%	0,46%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27%	0,27%	0,27%
J	Informasi dan Komunikasi	0,77%	0,79%	0,88%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,35%	0,35%	0,36%
L	Real Estat	0,32%	0,31%	0,32%
M,N	Jasa Perusahaan	0,05%	0,04%	0,04%

No,	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,04%	1,04%	1,00%
P	Jasa Pendidikan	1,21%	1,23%	1,32%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40%	0,41%	0,51%
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,19%	0,19%	0,19%
	TOTAL	100%	100%	100%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Paser memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Paser dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 7 Arah Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Paser

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Kerang (Bts, Prov, Kalimantan Selatan)- Bts, Kota Tana Paser	66,31
	Ruas Jalan Bts, Kota Tana Paser (Tanah Grogot) – Lolo	16,94
	Ruas Jalan Lolo – Kuario	6,35
	Ruas Jalan Kuario – Kademan (Paser)	54,87
	Ruas Jalan Kademan – Penajam (Paser)	59,06
Jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Noto Sunardi (Tana Paser)	2,03
	Ruas Jalan Sudirman (Tana Paser)	1,50
	Ruas Jalan Kusuma Bangsa (Tana Paser)	2,64
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Batulicin – Tana Paser (Kuario)	57,28
	Ruas Jalan Tana Paser (Kuario) – Penajam	55,80

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 8 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Paser

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts, Prov, Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts, Prov, Kalimantan Utara
Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts, Prov, Kalimantan Tengah (Muara Teweh) -Kab, Kutai Barat – Kab, Paser – Kab, Penajam Paser Utara – Balikpapan
Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab, Paser, Kab, Kutai Barat, Kab, Kutai Kartanegara, Kab, Kutai Timur, Kab, Berau, Kab, Penajam Paser Utara, Kab, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 9 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Paser

Jenis Sarana Listrik	Keterangan
Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Janju (Kabupaten Paser)
Status Prasarana Listrik	PLTU 2 x 7 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pembangunan PLTA Potensial	
Lokasi PLTA	Kendilo
Kabupaten/Kota	Paser
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
Jenis Energi	Energi Biomassa
Kabupaten	Paser – Penajam Paser Utara
Pengembangan Listrik Perdesaan	Kabupaten Paser
Gardu Induk (GI)	GI Kuaro / Tana Paser
	GI Senipah
	GI TanaPaser
	GI Komam / Batu Sopang
	GI Long Ikis

Jenis Sarana Listrik	Keterangan
Jaringan Listrik	Lokasi SUTT
	PLTG Senipah – New Industri
	Kuaro – Perbatasan
	PLTU Teluk Balikpapan – Incomer 2 phi (Karjo-Kuaro)
	Karang Joang – Kuaro
	Petung – Incomer 2 phi (Karjo-Kuaro)
	PLTG Senipah – Bukuan / Palaran
	Kuaro – Paser
	PLTU Kaltim 3 - Incomer 2 phi (Senipah-Palaran/Bukuan)

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 10 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi, Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Paser

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Seluang Paser Jaya	Kolam Retensi	Pengendali Banjir, Konservasi	Rencana
Sitiu	Bendung	Air Baku	Eksisting
Kerang	Bendung	Air Baku	Rencana
Lombok	Bendung	Air Baku	Eksisting
Suatang	Bendung	Air Baku	Rencana
Muara Komam	Bendung	Air Baku	Rencana
Seratai	Bendung	Air Baku	Rencana
Muru	Embung, Bendung Regulator	Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Mengkudu	Embung	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Suliliran Baru	Embung	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Lambakan	Bendungan	Air Baku, PLTA	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Kandilo	Bendungan	Air Baku, PLTA, Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Pias	Bendungan	Air Baku, PLTA	Rencana

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Lombok 1	Bendungan	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Lombok 2	Bendungan	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Toyu	Bendungan	Air Baku, Pengandali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Kerang	Bendungan	Air Baku, PLTA, Pengandali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Sitiu	Bendungan	PLTA	Rencana
Jaringan Pipa Lambakan	Pipa Transmisi & Pipa Distribusi	Air Baku	Rencana

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 11 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Paser

Jenis dan Informasi Sarana Transportasi	Keterangan
Stasiun Kereta Api	: Stasiun Kereta Api Kelas Besar
Nama Stasiun	: Tana Paser
Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	: Kuaro
Hirarki Peran Dan Fungsi	: AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	: Type A (AKAP)
Pelabuhan	
Nama Pelabuhan	: Pondong
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	: Pengumpul (PP)
Hirarki Peran Dan Fungsi (Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036)	: Pengumpul (PP)
Lokasi Dermaga	: Pondong
Nama Pelabuhan	: Teluk Adang
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	: Pengumpul (PP)
Hirarki Peran Dan Fungsi (Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036 Nasional)	: Pengumpul (PP)
Lokasi Dermaga	: Teluk Adang
Kebandarudaraan	
Nama Bandara Udara	: Paser

Jenis dan Informasi Sarana Transportasi	Keterangan
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	: Pengumpan
Hirarki Peran Dan Fungsi (Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036 Nasional)	: Pengumpan
Lokasi Bandar Udara	: Tana Paser

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.1.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Paser

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Paser ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Paser berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan perkotaan Tanah Grogot; Kawasan perkotaan Long Kali; Kawasan perkotaan Long Ikis; Kawasan perkotaan Kuaro; Kawasan perkotaan Batu Sopang; Kawasan perkotaan Muara Komam; Kawasan perkotaan Muara Samu; Kawasan perkotaan Pasir Belengkong; Kawasan perkotaan Batu Engau; Kawasan perkotaan Tanjung Harapan; dan Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Paser memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Pertanian. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Paser:

Tabel V. 12 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Paser

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Kawasan Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035	Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK)	Kawasan perkotaan Tanah Grogot;
		Kawasan perkotaan Long Kali;
		Kawasan perkotaan Long Ikis;
		Kawasan perkotaan Kuaro;
		Kawasan perkotaan Batu Sopang;
		Kawasan perkotaan Muara Komam;
		Kawasan perkotaan Muara Samu;
Kawasan perkotaan Pasir Belengkong;		

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Kawasan Rencana Pengembangan
		Kawasan perkotaan Batu Engau; Kawasan perkotaan Tanjung Harapan; dan Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP)	Kawasan Industri Pertanian

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (KSK)

Tabel V. 13 Profil Kawasan Perkotaan Tanah Grogot

Jenis Kegiatan	pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa, permukiman, simpul transportasi nasional dan antar wilayah, dan pelayanan lainnya dengan skala regional antar Kabupaten (Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035)
Lokasi	Kecamatan Tana Grogot
Kondisi Akses	Dilewati jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten Jarak dengan Rencana Bandara Paser: ± 100 m Jarak dengan Rencana Pelabuhan Pondong: ± 100 m
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih oleh PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik dari PLN
Potensi	Menjadi simpul transportasi nasional dan antar wilayah Pusat pelayanan skala regional antar Kabupaten
Peluang Usaha	Pengembangan sektor transportasi Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Cepat Tumbuh Kuaro - Tanah Grogot

Tabel V. 14 Profil Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot

Jenis Kegiatan	Perlintasan utama yang menghubungkan antar kabupaten dan antar provinsi
Lokasi	Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Tanah Grogot

Kondisi Akses	Dilewati jalan nasional, jalan provinsi (Jalan arteri primer) Jalur utama antar kabupaten dan provinsi Jarak dengan Rencana Bandara Paser: ± 30 km Jarak dengan Rencana Pelabuhan Pondong: ± 30 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih oleh PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik dari PLN
Potensi	Rencana pembangunan jalan provinsi Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Jalur utama antar kabupaten dan provinsi
Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa skala besar

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan Industri Pertanian (KSP)

Tabel V. 15 Profil Kawasan Industri Pertanian

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Komoditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Merah, Cabe Rawit, Pisang, Pepaya, Nanas, Durian, Jeruk Siam/Kepron, Salak) 2. Pertanian Tanam Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar) 3. Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Lada, Kopi, Aren, Kemiri, Kapok, Jambu Mete, Kayu Manis, Sagu) 4. Peternakan (Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik) 5. Perikanan (Perikanan Laut dan Perairan umum darat)
Kondisi Akses	Jarak dengan Rencana Bandara Paser: ± 2 km Jarak dengan Rencana Pelabuhan Pondong: ± 2 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih oleh PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik dari PLN
Ketersediaan Irigasi	Penyediaan jaringan irigasi di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Tanah Grogot, Paser Belengkong, Long Ikis, Batu Engau dan Long Kali
Potensi	Produksi padi sebanyak 44,909 Ton (2020) Luas panen padi seluas 11,596 Ha (2020) Hasil produksi perikanan laut sebanyak 110,209,13 kuintal (2020) Hasil produksi perairan umum darat sebanyak 695,19 kuintal (2020) Hasil produksi kelapa sawit sebanyak 23,961,43 kuintal (2020) Produksi terbanyak di komoditas pisang

	Produksi terbanyak di komoditas durian Produksi terbanyak di komoditas jeruk siam/ keprok Produksi terbanyak di komoditas kelapa sawit Produksi terbanyak di komoditas ayam buras Produksi terbanyak di komoditas ayam pedaging Pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036)
Peluang Usaha	Pengembangan komoditas padi Pengembangan komoditas pisang, durian, jeruk siam/keprok Pengembangan komoditas kelapa sawit Pengembangan industry pengolahan kelapa sawit Pengembangan peternakan ayam buras dan ayam pedaging

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.2.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Paser

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiapan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 16 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

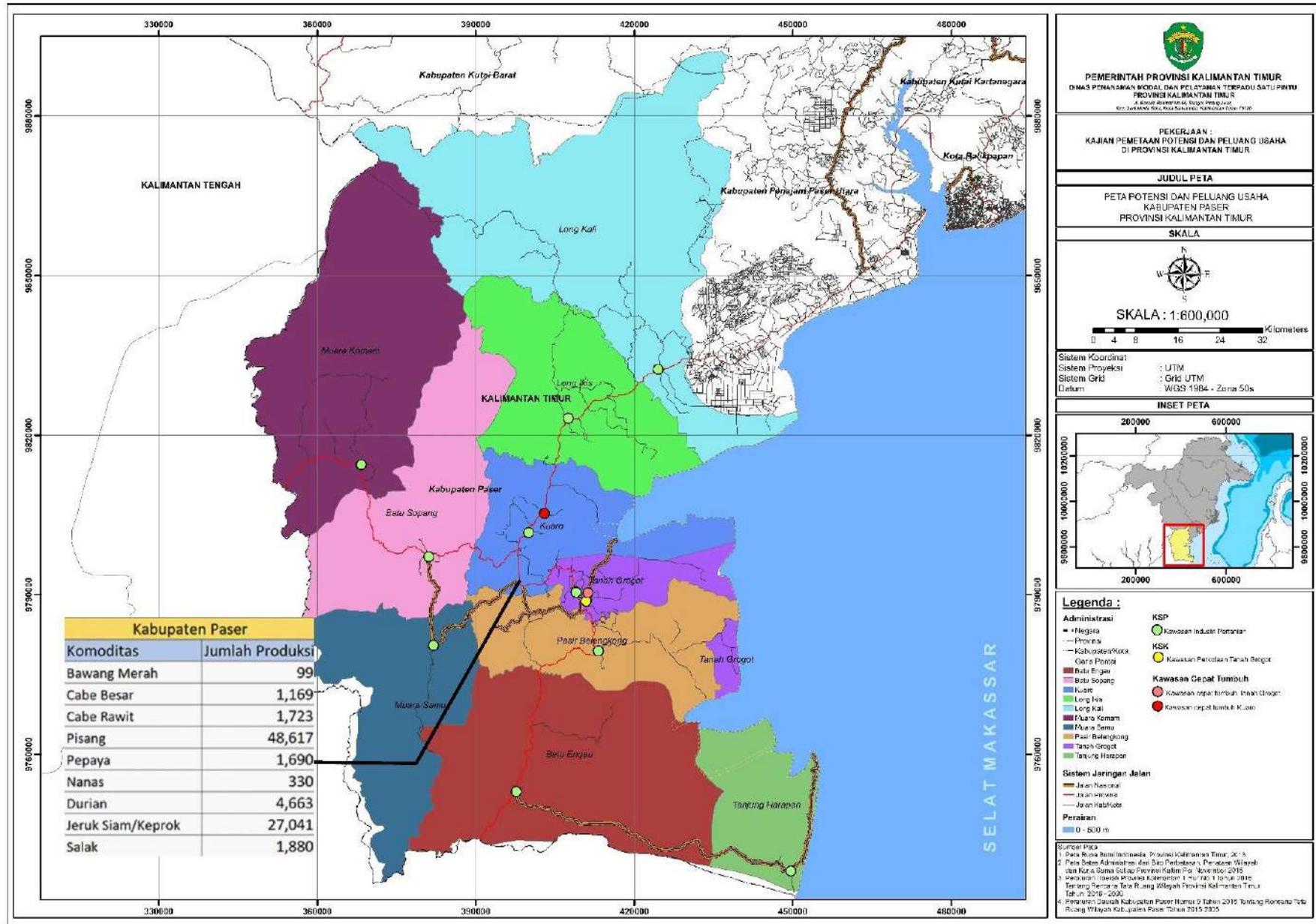
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 17 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Paser

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (KSK)	6	9	6	21	1
2	Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot	6	9	3	18	2
3	Kawasan Industri Pertanian (KSP)	9	6	3	18	2

Sumber: Hasil Analisis, 2021



5.2 Kabupaten Kutai Barat

5.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Barat

1. Wilayah Administrasi

Saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat adalah 16 Kecamatan dan terdapat 194 Desa / Kelurahan, Kabupaten Kutai Barat sendiri merupakan wilayah terluas ke-empat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau. Luas kabupaten Kutai Barat adalah 20.384,6 km². Wilayah terluas adalah kecamatan Bongan sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sekolaq Darat. Batas wilayah Kabupaten Kutai Barat meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Mahakam Ulu
Batas Timur	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Barat	: Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah)
Batas Selatan	: Kabupaten Paser

Tabel V. 18 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat

No,	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Bongan	Muara Kendang	2.305,3
2	Jempang	Tanjung Isuy	744,5
3	Penyinggahan	Penyinggahan Ilir	192,1
4	Muara Pahu	Tanjung Laor	1.110,6
5	Siluq Ngurai	Muhur	1.629,1
6	Muara Lawa	Muara Jawa	436,7
7	Bentian Besar	Dilang Puti	1.856,1
8	Damai	Damai Kota	2.027,5
9	Nyuatan	Dempar	1.343,3
10	Barong Tongkok	Barong Tongkok	405,9
11	Linggang Bingung	Linggang Bingung	2.299,1
12	Melak	Melak Ilir	179,2
13	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	49,3
14	M, Manaar Bulatn	Gunung Rampah	2.964,6
15	Long Iram	Long Iram Kota	2.499,5
16	Tering	Tering Lama	341,8
TOTAL			20.384,6

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan data topografi, Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayah mencapai 2.038.159,00 hektar (20.381.59 km²), didominasi oleh topografi datar sampai dengan bergelombang sedang yakni sebesar 64,48% atau 1.314.128,10 hektar, topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat.

Kondisi morfologi yang khas dari Kabupaten Kutai Barat secara tidak langsung akan menghambat perkembangan kegiatan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat alami berupa kemiringan lereng yang menyebabkan luasan lahan untuk menampung kegiatan perkotaan menjadi berkurang. Selain itu, kondisi fisik wilayah yang merupakan daerah pegunungan juga akan menyebabkan kesulitan dalam mengakses daerah tersebut.

Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung terbanyak yang berada di dataran yaitu 17 desa/kampung dari 21 kampung yang ada, sedangkan Kecamatan Siluq Ngurai merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kampung terbanyak yang berlokasi di lembah/DAS yaitu 16 desa/kampung. Beberapa kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di lembah/DAS adalah Penyinggahan, Muara Pahu, dan Siluq Ngurai. Sementara itu kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di dataran semua adalah Sekolaq Darat. Dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan danau dan kawasan sepanjang sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30 persen terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah untuk jenis komoditi yang diusahakan masyarakat. Di samping itu kondisi geografi dan topografi juga membuat Kutai Barat memiliki keterbatasan dalam pengembangan perkotaan, akibat kondisi kemiringan lereng.

Tabel V. 19 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Kutai Barat

No,	Uraian	Besaran	Satuan
1	Curah hujan	174	Mm
2	Jumlah hari hujan	247	hari

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Barat terluas dimanfaatkan oleh Hutan Lahan Kering Sekunder sebanyak 40,37% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah lahan semak belukar yaitu seluas 39,87% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Kutai Barat. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Barat:

Tabel V. 20 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Barat

No,	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	8,406,30	0,61%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	556,866,29	40,37%
3	Tanah Terbuka	45,447,24	3,29%
4	Pertambangan	11,351,09	0,82%
5	Perkebunan	67,986,91	4,93%
6	Pertanian Lahan Kering Campur	14,055,04	1,02%
7	Semak Belukar	549,861,16	39,87%
8	Hutan Tanaman	2,673,86	0,19%
9	Belukar Rawa	72,099,22	5,23%
10	Hutan Rawa Primer	2,149,17	0,16%
11	Hutan Rawa Sekunder	20,357,79	1,48%
12	Permukiman	1,359,79	0,10%
13	Rawa	3,529,43	0,26%
14	Air	23,143,09	1,68%
TOTAL		1,379,286,36	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2020 Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat adalah 165.938 penduduk. Dengan penduduk paling banyak ada di kecamatan Barong Tongkok dengan 31.746 yang berarti 19,13% penduduk di Kabupaten Kutai Barat berlokasi di Barong Tongkok. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Bentian Besar dengan 3.213 orang. Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 ada 2.644 orang yang mencari kerja. 1.920 diantaranya merupakan laki-laki dan hanya ada 724 perempuan yang mencari pekerjaan. Para pencari kerja ini paling banyak merupakan Lulusan SMA, yakni sebanyak 823 orang, kemudian disusul oleh lulusan SMK yakni sebanyak 805 orang.

Tabel V. 21 Demografi di Kabupaten Kutai Barat

No,	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	165.938	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	1,71	%
3	Kepadatan Penduduk	8,14	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	86.912	jiwa
	Ø Perempuan	79.026	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	68.868	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	3.684	jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Kutai Barat sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor konstruksi. Hal tersebut nampak dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun 2020, Sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha memiliki kontribusi sebesar 54,39%. Peran sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian Kutai Barat sangat dominan. Sektor kedua yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten

Kutai Barat ialah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor tersebut berkontribusi sebanyak 12,83%.

Tabel V. 22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.582.795,16	2.699.603,02	2.645.839,51
B	Pertambangan dan Penggalian	11.020.067,21	11.646.856,26	11.219.513,07
C	Industri Pengolahan	1.109.921,24	1.170.682,97	1.124.349,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.139,35	5.562,87	6.289,15
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	6.936,57	7.310,12	7.485,19
F	Konstruksi	1.946.562,91	2.051.425,36	1.943.891,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.396.668,62	1.490.565,15	1.505.875,67
H	Transportasi dan Pergudangan	310.619,25	334.370,85	316.431,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.380,14	63.577,01	59.665,52
J	Informasi dan Komunikasi	247.686,86	268.822,63	291.981,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.711,21	25.275,98	25.719,82
L	Real Estat	118.517,60	123.712,59	121.782,72
M.N	Jasa Perusahaan	11.063,74	11.514,38	11.078,97
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	793.303,58	835.778,21	791.404,81
P	Jasa Pendidikan	285.450,69	305.644,04	321.701,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.261,34	147.339,87	175.628,64
R.S.T.U	Jasa lainnya	55.776,22	60.713,05	59.544,34
	TOTAL	20.108.861,69	21.248.754,36	20.628.183,74

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 23 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,84%	12,70%	12,83%
B	Pertambangan dan Penggalian	54,80%	54,81%	54,39%
C	Industri Pengolahan	5,52%	5,51%	5,45%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03%	0,03%	0,03%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,03%	0,03%	0,04%
F	Konstruksi	9,68%	9,65%	9,42%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95%	7,01%	7,30%
H	Transportasi dan Pergudangan	1,54%	1,57%	1,53%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29%	0,30%	0,29%
J	Informasi dan Komunikasi	1,23%	1,27%	1,42%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12%	0,12%	0,12%
L	Real Estat	0,59%	0,58%	0,59%
M.N	Jasa Perusahaan	0,06%	0,05%	0,05%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%	3,93%	3,84%
P	Jasa Pendidikan	1,42%	1,44%	1,56%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68%	0,69%	0,85%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,28%	0,29%	0,29%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Kutai Barat memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kutai Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 24 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Barat

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Gusig – Sp. Blusuh	95,67
	Ruas Jalan Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalimantan Tengah	89,08
	Ruas Jalan Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalimantan Tengah	35,29
	Ruas Sp. 3 Damai – Barong Tongkok	28,55
	Ruas Jalan Barong Tongkok- Tering (Kutai Barat)	25,04
	Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab. Kutai Barat-Long Hubung – Laham-Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai	241,00
	Ruas Jalan Long Pahangai – Tiong Ohang – Bts. Kalbar	169,00
Jalan Kolektor Primer 1	Ruas Barong Tongkok – Mentiwan (Sendawar)	20,20
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Sp. Resak – Sp. Sotek	102,50
Jalan Kolektor Primer 3	Ruas Jalan Sp. Barong Tongkok – Sekolah Darat – Mentiwan	20,2
	Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat)	176,25
	Ruas Jalan Linggang Bigung – Batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kutai Barat)	45,92

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 25 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Barat

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh- Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara – Balikpapan
	Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung –Maloy

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas jalur Kereta
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 26 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Barat

Pengembangan Listrik Perdesaan	Kabupaten Kutai Barat
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Melak
Lokasi SUTT	PLTG Bangkanai – Melak
	Melak-GI Kota Bangun

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 27 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Barat

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Sungai Ohong	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Muara Asa	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Rapak Oros	Cek DAM	Air Baku	Rencana
Kem Baru	Embung	Air Baku	Rencana
Barong Tongkok	Embung	Air Baku	Rencana
Muara Lawa	Embung	Air Baku	Rencana

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 28 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Barat

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	: Melak
Hirarki Peran & Fungsi	: AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	: Type A (AKAP)
Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau	
Pelabuhan	: Melak
Hirarki Peran & Fungsi	Antar Kabupaten/Kota
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	
Nama Stasiun	: Melak
Kebandarudaraan	

Nama Bandar Udara	: Melak
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	: Pengumpan
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036 Nasional)	: Tetap
Lokasi Bandar Udara	: Barong Tongkok

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.2.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Barat

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Kutai Barat berada di beberapa kawasan, antara lain kawasan perkotaan Sendawar berupa Kecamatan Melak. Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Barong Tongkok sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya dan Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan yang memiliki kandungan tanah vulkanik sebagai sentra pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Barat memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Pertanian.

Kabupaten Kutai Barat termasuk Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Melak- Kersik Luway dan sekitarnya dan KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Barat:

Tabel V. 29 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Barat

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK)	kawasan perkotaan Sendawar berupa Kecamatan Melak. Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Barong Tongkok sebagai kawasan pusat

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031		pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
		Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan yang memiliki kandungan tanah vulkanik sebagai sentra pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP)	Kawasan Industri Pertanian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Long Bagun-Melak dan sekitarnya	KPPN Melak- Kersik Luway dan sekitarnya
		KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Perkotaan Sendawar

Tabel V. 30 Profil Kawasan Perkotaan Sendawar

Jenis Kegiatan	kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya pusat industri. perdagangan dan jasa dan pusat pendidikan dan kesehatan
Lokasi	Kecamatan Melak. Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Barong Tongkok
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi (Jalan arteri primer. kolektor primer 1 dan 2) serta jalan kabupaten Jarak dari Rencana Bandara Melak: ± 10 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Rencana pembangunan pelabuhan dan bandar udara Pusat pengolahan hasil tambang batubara Pengolahan hasil hutan (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036)
Peluang Usaha	Arahan pengembangan perdagangan dan jasa Arahan pengembangan sebagai pusat industry

	<p>Arahan pengembangan pusat Pendidikan dan kesehatan</p> <p>Arahan pengembanga pusat pengolahan hasil tambang batubara</p> <p>Arahan pengembangan kawasan pengolahan hasil hutan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Analisis Data, 2021

b. Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan

Tabel V. 31 Profil Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan

Jenis Kegiatan	sentra pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas
Lokasi	Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan
Kondisi Akses	<p>Dilewati jalan kabupaten</p> <p>Jarak dari Rencana Bandara Melak: ± 50 km</p>
Komoditas	<p>a. Pertanian Hortikultura : komoditas pisang dan durian</p> <p>b. Pertanian Tanam Pangan</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	<p>Kesuburan tanahnya karena mengandung tanah vulkanik cocok untuk pengembangan sektor pertanian</p> <p>Produksi terbanyak di komoditas pisang</p> <p>Produksi terbanyak di komoditas durian</p>
Peluang Usaha	Pengembangan sektor pertanian dengan komoditas utama pisang dan durian

Sumber: Analisis Data, 2021

c. Kawasan Industri Pertanian (KSP)

Tabel V. 32 Kawasan Industri Pertanian

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Komoditas	<p>a. Pertanian Hortikultura: cabe besar, cabe rawit, pisang, papaya, nanas. Durian, jeruk siam/keprok, salak</p> <p>b. Pertanian tanam pangan: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar</p> <p>c. Peternakan: Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik</p> <p>d. Perkebunan: Kelapa Sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada, kopi, aren, kemiri dan kapok</p>
Kondisi Akses	<p>Dilewati jalan provinsi</p> <p>Jarak dari Rencana Bandara Melak:</p> <p>Jarak dari Pelabuhan Melak:</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi oleh jaringan air bersih PDAM

Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi oleh jaringan listrik PLN
Ketersediaan Irigasi	Penyediaan sistem irigasi di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Barong Tongkok, Damai, Melak, Penyinggahan dan Tering
Potensi	<p>Dominasi penggunaan lahan berupa hutan lahan kering sekunder</p> <p>Produksi di komoditas jagung sebanyak 2.358 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas ubi kayu sebanyak 7.386 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas ubi jalar 1.531 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas cabe merah</p> <p>Produksi di komoditas pisang</p> <p>Produksi di komoditas papaya</p> <p>Produksi di komoditas durian</p> <p>Produksi di komoditas jeruk siam/keprok</p> <p>Produksi di komoditas sapi</p> <p>Produksi di komoditas kambing</p> <p>Produksi di komoditas babi</p> <p>Produksi di komoditas ayam buras</p> <p>Produksi di komoditas ayam petelur</p> <p>Produksi di komoditas ayam pedaging</p> <p>Produksi di komoditas itik</p> <p>Produksi di komoditas kelapa sawit</p> <p>Produksi di komoditas karet</p>
Peluang Usaha	<p>Pengembangan pertanian</p> <p>Industri pengolahan hasil pertanian</p> <p>Pengembangan peternakan</p> <p>Pengembangan perkebunan</p>

Sumber: Analisis Data, 2021

d. KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya

Tabel V. 33 KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Ekologi Hutan dan Sungai): Kersik Luway dan sekitarnya
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tradisional Datah Bilang 2. Desa Tradisional Mencimai (Kecamatan Barong Tongkok) 3. Desa Kerajinan (Kecamatan Barong Tongkok) 4. Cagar Alam Kersik Luway (Kecamatan Sekolaq Darat) 5. Air Terjun Jantur Gemuruh (Kecamatan Sekolaq Darat)
Kondisi Akses	<p>Dilewati jalan provinsi dan jalan kabupaten</p> <p>Jarak dari Rencana Bandara Melak: ± 12 km</p>

Kondisi Air Bersih	Terpenuhi oleh jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi oleh jaringan listrik PLN
Potensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tradisional Datah Bilang 2. Desa Tradisional Mencimai (Kecamatan Barong Tongkok) 3. Desa Kerajinan (Kecamatan Barong Tongkok) 4. Cagar Alam Kersik Luway (Kecamatan Sekolaq Darat) 5. Air Terjun Jantur Gemuruh (Kecamatan Sekolaq Darat)
Peluang Usaha	<p>Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata</p> <p>Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata</p> <p>Penyediaan transportasi menuju obyek wisata</p> <p>Penyediaan atraksi di obyek wisata</p>

Sumber: Analisis Data, 2021

e. KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Tabel V. 34 KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Ekologi Hutan dan Sungai): Kersik Luway dan sekitarnya
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Jempang (Kecamatan Jempang) 2. Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara dan Kecamatan Penyinggahan. Kutai Barat) 3. Bentang Alam Tanjung Isuy (Kecamatan Jempang)
Kondisi Akses	<p>Dilewati oleh jalan provinsi</p> <p>Jarak dari Rencana Bandara Melak:</p> <p>Jarak dari Pelabuhan Melak:</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi oleh jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi oleh jaringan listrik PLN
Potensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Jempang (Kecamatan Jempang) 2. Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis. Kutai Kartanegara dan Kecamatan Penyinggahan. Kutai Barat) 3. Bentang Alam Tanjung Isuy (Kecamatan Jempang)
Peluang Usaha	<p>Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata</p> <p>Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata</p> <p>Penyediaan transportasi menuju obyek wisata</p> <p>Penyediaan atraksi di obyek wisata</p>

Sumber: Analisis Data, 2021

5.2.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Barat

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 35 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesiediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

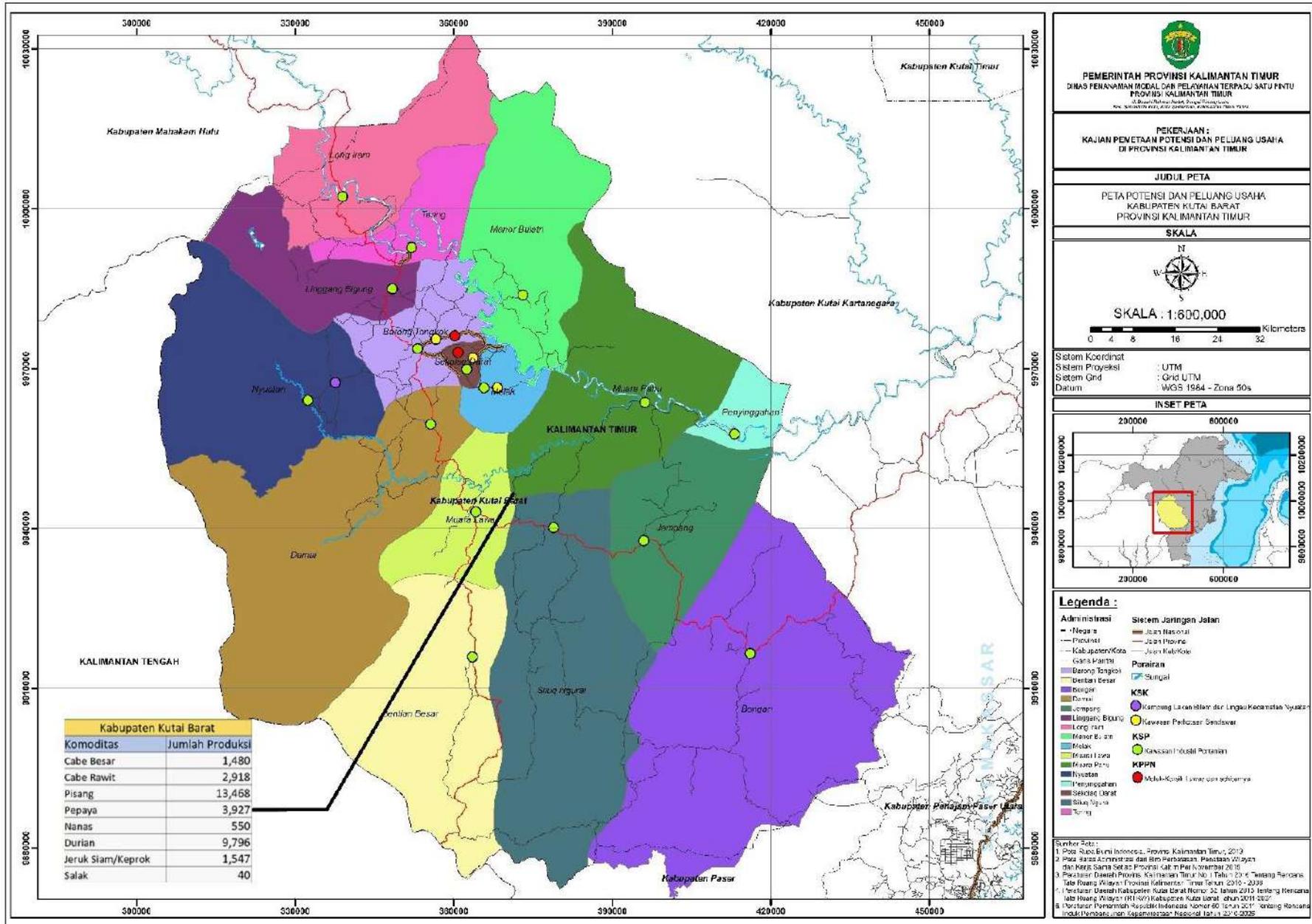
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 36 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Barat

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Perkotaan Sendawar	6	6	6	18	3
2	Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan	6	6	3	15	4
3	Kawasan Industri Pertanian (KSP)	9	6	6	21	2
4	KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya	9	9	6	24	1
5	KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya	9	9	6	24	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021



5.3 Kabupaten Kutai Kartanegara

5.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263.10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah. Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
Batas Timur	: Selat Makassar
Batas Barat	: Kabupaten Kutai Barat
Batas Selatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan

Tabel V. 37 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Samboja	Kampung Lama	1.045,9
2	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	754,5
3	Sanga-sanga	Sanga-sanga Dalam	233,4
4	Loa Janan	Loa Janan Ulu	644,2
5	Loa Kulu	Loh Sumber	1.405,7
6	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	928,6
7	Muara Wis	Muara Wis	1.108,16
8	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	1.143,74
9	Tenggarong	Melayu	398,1
10	Sebulu	Sebulu Ilir	859,5
11	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	437
12	Anggana	Sungai Meriam	1.798,8
13	Muara Badak	Muara Badak Ulu	939,09
14	Marangkayu	Sebuntal	1.165,71
15	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	3.410,1
16	Kenohan	Kahala	1.302,2
17	Kembang Janggut	Kembang Janggut	1.923,9
18	Tabang	Sidomulyo	7.764,5
TOTAL			27.263,1

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7 – 25 m dpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Berikut ini merupakan data ketinggian setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diukur dari permukaan laut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa menurut luas wilayahnya sebagian besar wilayah Kecamatan Sebulu termasuk ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m dan 25 – 100 m. Wilayah yang tergolong ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m memiliki sifat berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang. kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km.

Tabel V. 38 Kondisi Fisik Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Curah hujan	174	mm
2	Jumlah hari hujan	156	hari
3	Tinggi tempat dari permukaan laut	0-100	mdpl

Sumber: BPS. Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

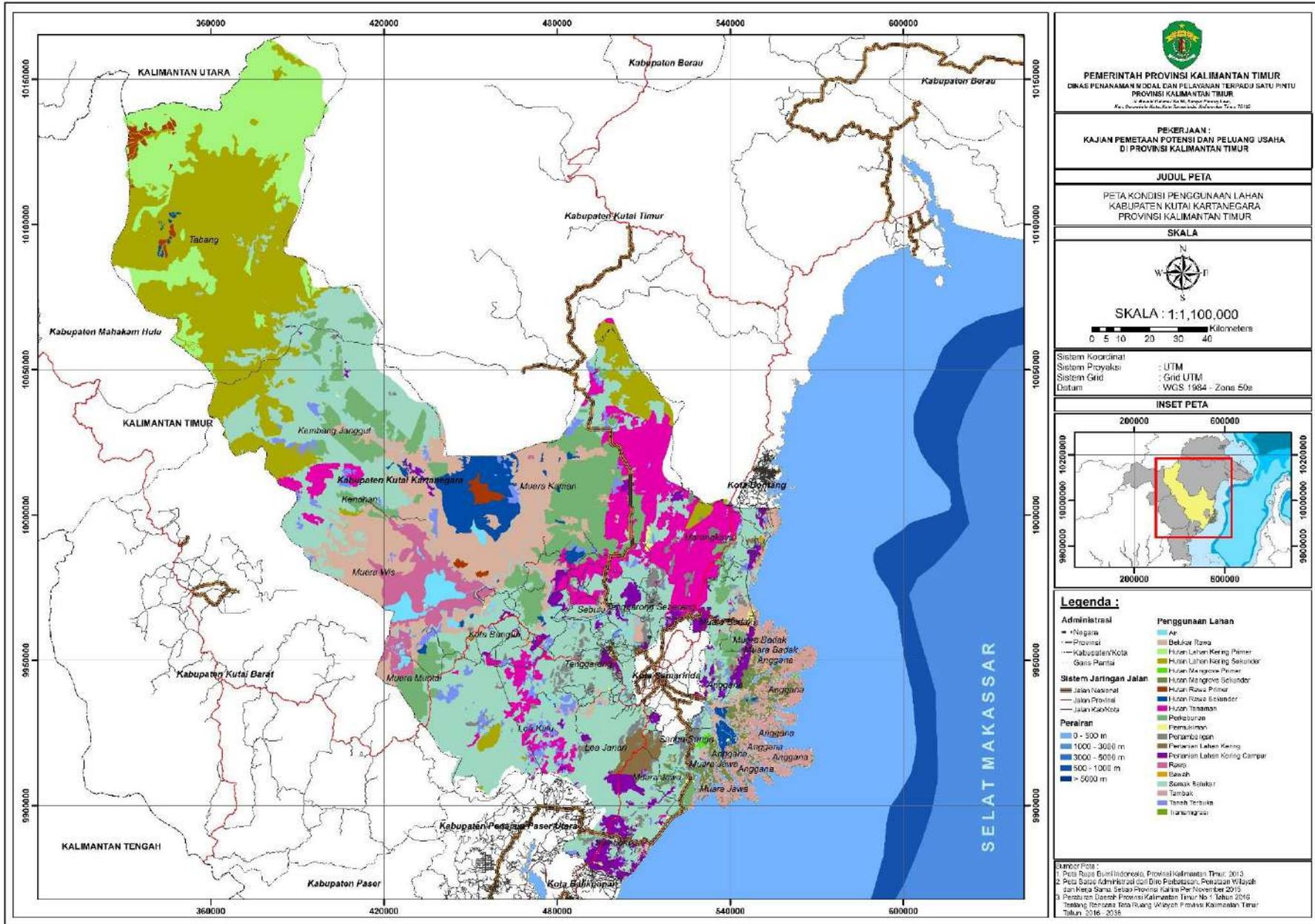
3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara terluas dimanfaatkan oleh Hutan Lahan semak belukar sebanyak 28.89% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Hutan Lahan Kering Sekunder yaitu seluas 16.73% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel V. 39 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Mangrove Sekunder	33.017,98	1,30%
2	Hutan Lahan Kering Primer	217.957,01	8,60%
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	424.199,99	16,73%
4	Hutan Rawa Sekunder	65.469,62	2,58%
5	Semak Belukar	732.360,47	2,89%
6	Hutan Tanaman	197.524,93	7,79%
7	Tanah Terbuka	52.090,57	2,05%
8	Pertambangan	45.994,06	1,81%
9	Belukar Rawa	267.374,36	10,55%
10	Perkebunan	205.708,26	8,11%
11	Permukiman	9.502,15	0,37%
12	Sawah	421,34	0,02%
13	Pertanian Lahan Kering Campur	70.418,98	2,78%
14	Air	44.458,74	1,75%
16	Tambak	71.421,86	2,82%
17	Hutan Rawa Primer	15.477,34	0,61%
18	Rawa	61.502,70	2,43%
19	Pertanian Lahan Kering	18.446,91	0,73%
20	Transmigrasi	197,54	0,01%
Total		2.535.244,44	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (14,60%). Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (9,31%) Kecamatan Loa Janan (9,25%) dan di Kecamatan Samboja (9,13%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,29%. Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 km² Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 106,480 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 267 jiwa/km². Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7.764,50 km²) dihuni oleh 11.457 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1 jiwa. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6.914 orang.

Tabel V. 40 Demografi di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	729.382	jiwa
2	Kepadatan Penduduk	26,75	jiwa/km ²
3	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	380.560	jiwa
	Ø Perempuan	348.822	jiwa
4	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	339.369	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	20.497	jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas di ekspor ke pasar global. Sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi

oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mengalami penurunan. Nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2020 mencapai Rp. 120.556.603,36.

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan (berperan 69,69% terhadap ekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (10,89%), sektor Konstruksi (6,08%) dan sektor Industri Pengolahan (3,48%).

Tabel V. 41 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020

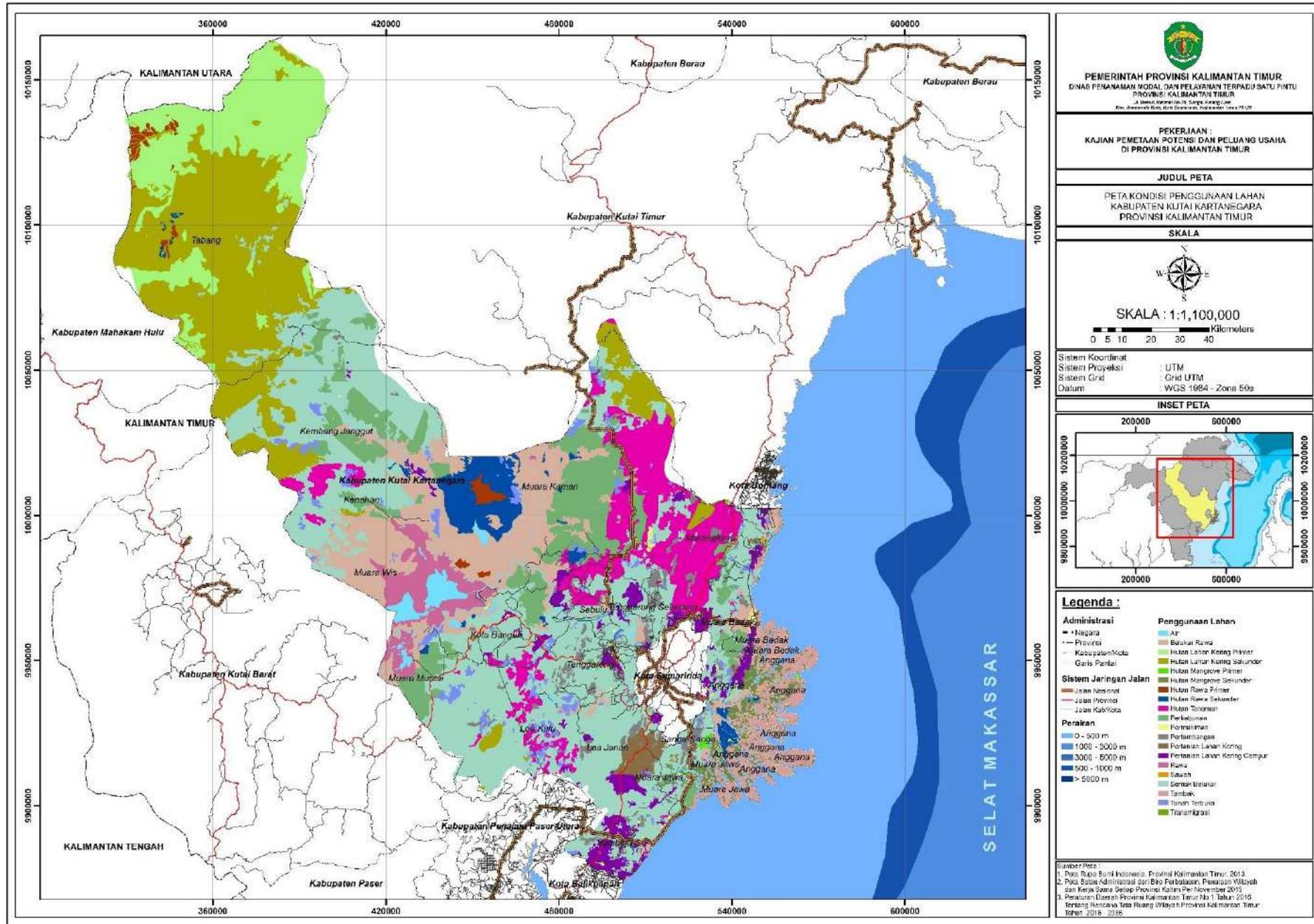
No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.421.272.32	13.095.560.54	13.123.168.21
B	Pertambangan dan Penggalian	86.632.223.34	89.443.189.11	84.017.236.26
C	Industri Pengolahan	4.181.708.21	4.358.489.09	4.199.641.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64.426.94	70.468.63	79.167.54
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	40.203.70	42.195.77	43.672.43
F	Konstruksi	7.279.639.07	7.637.637.87	7.331.426.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.913.540.01	4.125.678.34	4.190.835.75
H	Transportasi dan Pergudangan	1.097.941.65	1.161.362.10	1.158.635.77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.393.42	296.723.48	295.108.92
J	Informasi dan Komunikasi	957.586.19	1.033.139.74	1.122.421.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	337.503.35	357.573.47	364.897.85
L	Real Estat	562.242.29	576.592.58	579.967.09
M.N	Jasa Perusahaan	32.651.22	33.676.47	32.458.23
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.603.343.70	1.650.893.56	1.589.908.02
P	Jasa Pendidikan	1.131.837.41	1.214.687.91	1.225.101.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	739.558.64	807.819.90	952.316.16
R.S.T.U	Jasa lainnya	235.407.85	254.480.57	250.640.65
TOTAL		121.509.479.31	126.160.169.13	120.556.603.36

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 42 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.22%	10.38%	10.89%
B	Pertambangan dan Penggalian	71.30%	70.90%	69.69%
C	Industri Pengolahan	3.44%	3.45%	3.48%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05%	0.06%	0.07%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0.03%	0.03%	0.04%
F	Konstruksi	5.99%	6.05%	6.08%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.22%	3.27%	3.48%
H	Transportasi dan Pergudangan	0.90%	0.92%	0.96%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.23%	0.24%	0.24%
J	Informasi dan Komunikasi	0.79%	0.82%	0.93%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.28%	0.28%	0.30%
L	Real Estat	0.46%	0.46%	0.48%
M.N	Jasa Perusahaan	0.03%	0.03%	0.03%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.32%	1.31%	1.32%
P	Jasa Pendidikan	0.93%	0.96%	1.02%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61%	0.64%	0.79%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0.19%	0.20%	0.21%
TOTAL		100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020



6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal. Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi. Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 43 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Bts. Kota Balikpapan – Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja)	12,69
	Ruas Jalan Sp. Samboja Km. 38 BPN (Gereja) – Loa Janan	63,33
	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Samarinda	9,42
	Ruas Jalan Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Sp. 3 Sambera	21,9
	Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Santan	30,81
	Ruas Jalan Santan – Bontang	47,92
	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Tenggarong	26,47
	Ruas Jalan Bts. Kota Tenggarong – Sp. 3 Senoni	33,32
	Ruas Jalan Sp. 3 Senoni – Kota Bangun	45,09
	Ruas Jalan Kota Bangun – Gusig	86,34
Jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Gusig – Sp. Blusuh	95,67
	Jl Sudirman (Tenggarong)	0,41
	Jl Wolter Monginsidi (Tenggarong)	2,22
	Jl KH Akhmad Muksin (Tenggarong)	2,16
	Jl Diponegoro (Tenggarong)	0,74
	Jl. AM Sangaji (Tenggarong)	9,15
	Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Muara Badak	24,6
	Ruas Jalan Bts. Balikpapan – Sp. Samboja	36,42
	Ruas Jalan Sp. Samboja – Sp. Muara Jawa (Kab. Kutai Kartanegara)	40,99

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga (Kab. Kutai Kartanegara)	20,83
	Ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas)	20,29
	Ruas Jalan Km. 38 – Sp. Semboja	7,3
	Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu	69,09
	Bentuas – Noni – Sanga-sanga	11,00
Jalan Kolektor Primer 3	Ruas Jalan Samarinda – Anggana	21,32
	Ruas Jalan Batas Provinsi Kalimantan Utara – Tabang – Kembang Janggut – Kota Bangun – Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara)	291,32
	Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat)	176,25
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Samarinda – Kota Tenggarong	22,5

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 44 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Kartanegara

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)
	Tenggarong – Samarinda – Sanga-Sanga – Samboja
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Kartanegara – Samarinda
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 45 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Senipah (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Status Prasarana Listrik	PLTG 1 x 35 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Muara Jawa (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Status Prasarana Listrik	PLTU 2 x 100 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Kota Bangun (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Status Prasarana Listrik	PLTD 2 x 1 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	PLTU Kaltim 4. Kukar
Status Prasarana Listrik	1 x 100 MW
Pusat Pembangkit Listrik	PLTGU Senipah. Kukar
Status Prasarana Listrik	1 x 100 MW
PLTA Potensial	
Lokasi PLTA	Mahakam
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
Jenis Energi	Energi Biomassa
Kabupaten	Kutai Kartanegara – Kutai Barat
Pengembangan Listrik Perdesaan	
Kabupaten Kutai Kartanegara	
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Sambera (4 LB)
	GI Tenggarong / Bukit Biru
	GI Kota Bangun
	GI Sanga-Sanga
	GI Kembang Janggut
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	Sambera – Incomer Sambutan – Bontang
	Tenggarong – Tanjung Redeb – Talisayan – Kota Bangun
	New Samarinda – Sambera
	Melak - GI Kota Bangun
	Tenggarong/ Bukti Biru- Sepaku
	Samarinda - Sebulu - Muara Bengkal

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 46 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Samboja	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Separi II	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Manunggal Daya	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Amborawang	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Santan	Bendung	Air Baku. Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Marangkayu	Bendungan	Air Baku. PLTMH	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tabang	Bendungan	PLTA	Rencana
Muara Kaman	Embung	Air Baku	Rencana
Loa Kulu	Intake	Air Baku	Rencana
Benua Puhun	Intake	Air Baku	Rencana
Loa Janan	Intake	Air Baku	Rencana
Bekotok	Intake	Air Baku	Eksisting
Muara Jawa	Sumur Dalam	Air Baku	Eksisting
Muara Badak	Sumur Dalam	Air Baku	Eksisting
Jaringan Pipa Marangkayu	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Samboja	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 47 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Kartanegara

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Kota Bangun
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau	
Pelabuhan	Kota Bangun
Hirarki Peran & Fungsi	Antar Kabupaten/Kota
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	
Nama Stasiun	Tenggarong
Transportasi Laut	
Nama Pelabuhan	Tanjung Santan

Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Lokasi Dermaga	Marangkayu
Nama Pelabuhan	Kuala Samboja
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Lokasi Dermaga	Kuala Samboja
Transportasi Udara	
Nama Bandar Udara	Kota Bangun
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	Pengumpan
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Lokasi Bandara Udara	Kota Bangun
Nama Bandar Udara	Kembang Janggut
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	-
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Pengumpan
Lokasi Bandara Udara	Kembang Janggut
Nama Bandar Udara	Loa Kulu
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	-
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Pengumpan
Lokasi Bandara Udara	Loa Kulu

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.3.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan

Tabang dan Kawasan Tenggara dan Tenggara Seberang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat dan Kawasan Industri Pertanian.

Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya, KPPN Tenggara dan sekitarnya dan KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya serta KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel V. 48 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang
		Kawasan Tenggara dan Tenggara Seberang
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat
		Kawasan Industri Pertanian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Tenggara-Balikpapan dan sekitarnya	KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya
		KPPN Tenggara dan sekitarnya
		KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya
	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang

Tabel V. 49 Profil Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan. Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang

Nama Objek	Pusat pendukung kegiatan PKSN Long Pahangai
Jenis Kegiatan	Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet
Lokasi	Kecamatan Kenohan. Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang
Kondisi Akses	Dilewati dengan jalan provinsi Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun: ± 53 km Jarak dari rencana Pelabuhan Tanjung Santan: ± 140 km Jarak dari rencana Pelabuhan Kuala Samboja: ± 150 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM. kecuali Kecamatan Tabang di tahun 2018 belum terlayani PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Luas lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Kecamatan Kembang Janggut seluas 6.059 Ha (2020) Luas lahan perkebunan karet terluas di Kecamatan Tabang seluas 232 Ha (2020) Produksi komoditas kelapa sawit berada di Kecamatan Kembang Janggut 55.145.60 ton (2020) Produksi komoditas karet terbanyak berada di Kecamatan Tabang sebanyak 31.57 ton (2020)
Peluang Usaha	Arahan pengembangan sebagai pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang

Tabel V. 50 Profil Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang

Jenis Kegiatan	Pusat pelayanan perkotaan. pusat transportasi regional dan lokal. pusat pengembangan pertanian. pusat pelayanan pariwisata dan pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas
Lokasi	Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang
Kondisi Akses	Dilewati dengan jalan provinsi Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun: ± 55 km Jarak dari rencana Pelabuhan Tanjung Santan: ± 75 km Jarak dari rencana Pelabuhan Kuala Samboja: ± 70 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM

Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	<p>Pusat Pengolahan Migas</p> <p>Pusat Pengolahan Batubara</p> <p>Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional</p> <p>Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit</p> <p>Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata</p> <p>Pengembangan Industri Kreatif</p> <p>Pusat Olahraga Skala Nasional</p> <p>Perikanan Budidaya</p> <p>Pusat Pendidikan Tinggi</p> <p>Pusat Pengendalian Laut</p> <p>Pengolahan Hasil Hutan</p> <p>Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036)</p>
Peluang Usaha	<p>Pengembangan pusat Pengolahan Migas</p> <p>Pengembangan Pusat Pengolahan Batubara</p> <p>Pengembangan Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional</p> <p>Pengembangan Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan</p> <p>Pengembangan Pengolahan Hasil Sawit</p> <p>Pengembangan Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata</p> <p>Pengembangan Pengembangan Industri Kreatif</p> <p>Pengembangan Pusat Olahraga Skala Nasional</p> <p>Pengembangan Perikanan Budidaya</p> <p>Pengembangan Pusat Pendidikan Tinggi</p> <p>Pengembangan Pusat Pengendalian Laut</p> <p>Pengembangan Pengolahan Hasil Hutan</p> <p>Pengembangan Pusat Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat

Tabel V. 51 Profil Kawasam Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat

Jenis Kegiatan	Pengembangan industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat
Kondisi Akses	Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun Jarak dari rencana Bandara Kembang Janggut Jarak dari rencana Bandara Loa Kulu Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Tanjung Santan Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Kuala Samboja
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. Kawasan Industri Pertanian

Tabel V. 52 Profil Kawasan Industri Pertanian

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Kondisi Akses	Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun Jarak dari rencana Bandara Kembang Janggut Jarak dari rencana Bandara Loa Kulu Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Tanjung Santan Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Kuala Samboja
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Ketersediaan irigasi	Penyediaan daerah irigasi di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Loa Janan. Loa Kulu. Kembang Janggut. Kenohan. Kota Bangun. Marangkayu. Muara Muntai. Muara Jawa. Muara wis. Muara Kaman. Sebulu. Samboja. Tabang. Anggana. Tenggarong dan Tenggarong Seberang
Potensi	Luas lahan padi seluas 32.215 Ha (2020) Produksi di komoditas padi sebanyak 119.319 ton (2020) Produksi di komoditas jagung sebanyak 2.258 ton (2020) Produksi di komoditas ubi kayu sebanyak 22.244 ton (2020) Produksi di komoditas ubi jalar sebanyak 6.444 ton (2020) Produksi di komoditas bawang merah sebanyak 1.460 kuintal (2020) Produksi di komoditas cabe merah sebanyak 19.595 kuintal (2020) Produksi di komoditas cabe rawit sebanyak 39.255 kuintal (2020) Produksi di komoditas pisang sebanyak 471.281 kuintal (2020) Produksi di komoditas papaya sebanyak 79.199 kuintal (2020) Produksi di komoditas nanas sebanyak 203.993 kuintal (2020)

	<p>Produksi di komoditas durian sebanyak 43.435 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas jeruk siam/keprok sebanyak 21.034 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas salak sebanyak 31.403 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 34.394 kuintal (2020)</p> <p>Penyediaan ternak sapi sebanyak 30.030 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak kerbau sebanyak 2.728 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak kambing sebanyak 11.338 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak babi sebanyak 4.336 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam buras sebanyak 377.727 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam petelur sebanyak 393.970 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam pedaging sebanyak 14.251.820 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak itik sebanyak 59.835 ekor (2020)</p> <p>Produksi perikanan laut sebanyak 436.929 kuintal (2020)</p> <p>Produksi perairan umum daratan sebanyak 11.787 kuintal (2020)</p>
Peluang Usaha	<p>Pengembangan sektor pertanian</p> <p>Pengembangan industri pengolahan pertanian</p> <p>Pengembangan peternakan</p> <p>Pengembangan budidaya perikanan</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. KPPN & KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Tabel V. 53 Profil KPPN & KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Ekologi Hutan, Sungai dan Danau): Tanjung Isuy-Kota Bangun dan sekitarnya
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Muara Muntai (Kecamatan Muara Muntai) 2. Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis. Kutai Kartanegara dan Kecamatan Penyinggahan. Kutai Barat) 3. Danau Semayang (Kecamatan Kenohan)
Kondisi Akses	<p>Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun</p> <p>Jarak dari rencana Bandara Kembang Janggut</p> <p>Jarak dari rencana Bandara Loa Kulu</p> <p>Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Tanjung Santan</p> <p>Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Kuala Samboja</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Muara Muntai (Kecamatan Muara Muntai)

	2. Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis. Kutai Kartanegara dan Kecamatan Penyinggahan. Kutai Barat) 3. Danau Semayang (Kecamatan Kenohan)
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

f. KPPN Tenggarong dan sekitarnya

Tabel V. 54 Profil KPPN Tenggarong dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Budaya (Perkotaan. Peninggalan Sejarah. Etnik/Tradisi) Kota Tenggarong dan sekitarnya
Lokasi	1. Waduk Panii Sukarame (Kecamatan Tenggarong) 2. Museum Mulawarman (Kecamatan Tenggarong) 3. Pulau Kumala (Kecamatan Tenggarong) 4. Museum Kayu Tuah Himba (Kecamatan Tenggarong) 5. Planetarium Jagat Raya (Kecamatan Tenggarong)
Kondisi Akses	Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun Jarak dari rencana Bandara Kembang Janggut Jarak dari rencana Bandara Loa Kulu Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Tanjung Santan Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Kuala Samboja
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	1. Waduk Panii Sukarame (Kecamatan Tenggarong) 2. Museum Mulawarman (Kecamatan Tenggarong) 3. Pulau Kumala (Kecamatan Tenggarong) 4. Museum Kayu Tuah Himba (Kecamatan Tenggarong) 5. Planetarium Jagat Raya (Kecamatan Tenggarong)
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

g. KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya

Tabel V. 55 Profil KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Budaya (Perkotaan. Peninggalan Sejarah. Belanja): Balikpapan dan sekitarnya
Lokasi	Bukit Bengkirai (Kecamatan Samboja)
Kondisi Akses	Jarak dari rencana Bandara Kota Bangun Jarak dari rencana Bandara Kembang Janggut Jarak dari rencana Bandara Loa Kulu Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Tanjung Santan Jarak dari rencana Bandara Pelabuhan Kuala Samboja
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Bukit Bengkirai (Kecamatan Samboja)
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.3.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiapan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya

Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 56 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

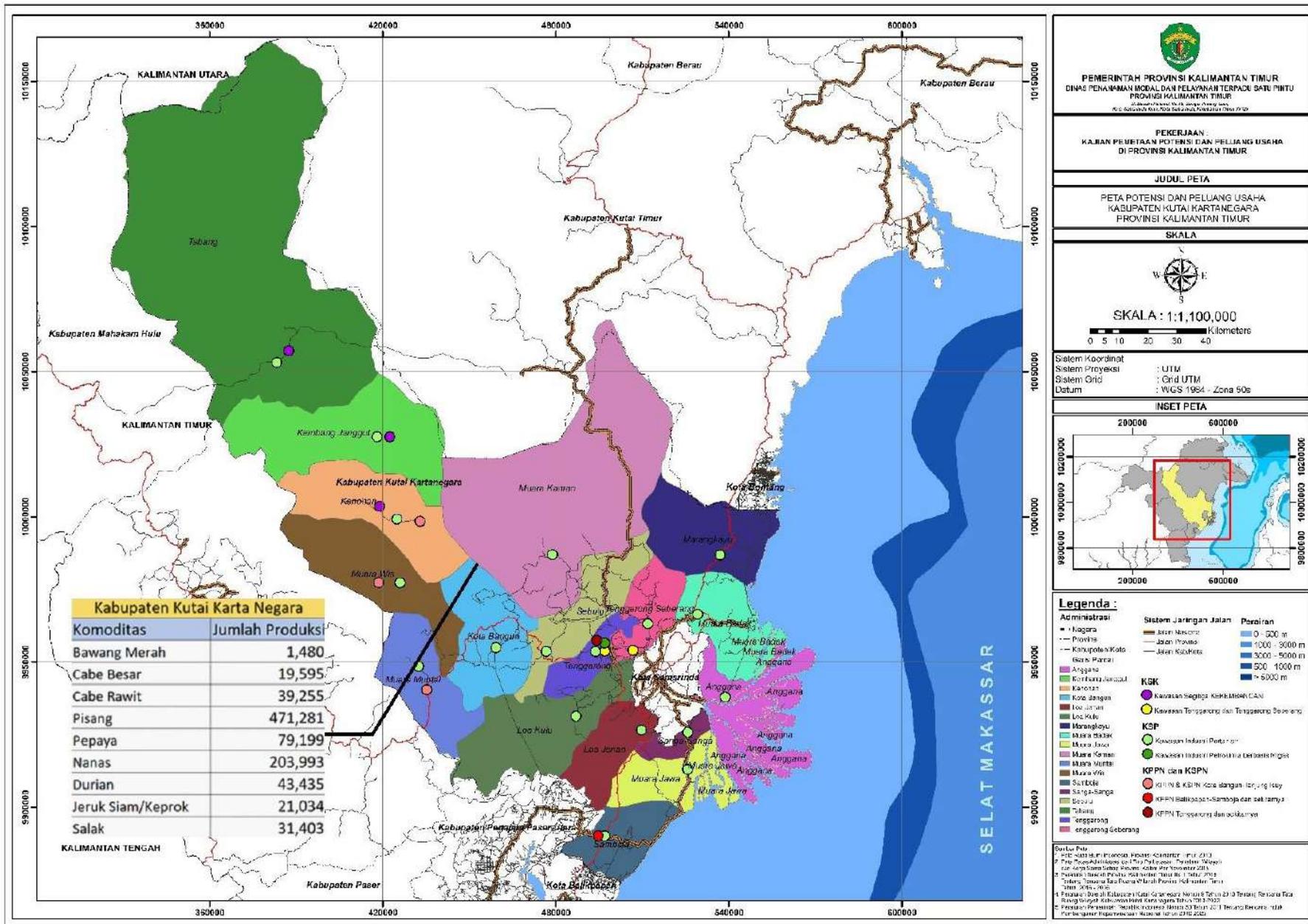
Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 57 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN Kecamatan Kenohan. Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang	6	6	6	18	3
2	Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang	6	9	6	21	2
3	Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat	6	9	6	21	2
4	Kawasan Industri Pertanian	6	9	6	21	2
5	KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya	9	9	6	24	1
6	KPPN Tenggarong dan sekitarnya	9	9	6	24	1

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
7	KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya	9	9	6	24	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021



5.4 Kabupaten Kutai Timur

5.4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten Terluas di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di bagian utara. tepatnya pada posisi 1° 52' 39'' Lintang Utara sampai 0° 2' 10'' Lintang Selatan dan 115° 56' 0.26'' - 118° 58' 19'' Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Sangatta Utara. Adapun luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747.50 Km². Wilayah ini terdiri dari 18 (Delapan Belas) kecamatan dengan 141 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Wahau dengan luas 5.724.32 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sangkulirang dengan luas 143.82 Km². Batas wilayah Kabupaten Kutai Timur meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara)
Batas Timur	: Kabupaten Kutai Timur
Batas Barat	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Selatan	: Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel V. 58 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Muara Ancalong	Kelinjau Ilir	2.739,3
2	Busang	Long Lees	3.721,62
3	Long Mesangat	Sumber Sari	526,98
4	Muara Wahau	Muara Wahau	5.724,32
5	Telen	Juk Ayak	3.129,61
6	Kongbeng	Miau Baru	581,27
7	Muara Bengkal	Muara Bengkal Ulu	1.522,8
8	Batu Ampar	Batu Timbau	204,5
9	Sangatta Utara	Sangatta Utara	1.262,59
10	Bengalon	Sepaso	3.196,24
11	Teluk Pandan	Teluk Pandan	831
12	Sangatta Utara	Sangatta Selatan	1.660,85
13	Rantau Pulung	Kebon Agung	143,82

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
14	Sangkulirang	Benua Baru Ilir	3.322,58
15	Kaliorang	Bangun Jaya	438,91
16	Sandaran	Manubar	3.419,3
17	Kaubun	Bumi Etam	257,45
18	Karangan	Karangan Hilir	3.064,36
TOTAL			35.747,5

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan aspek geografis, wilayah kabupaten dengan Ibukota Sangatta ini mempunyai posisi yang strategis baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun regional Kalimantan yang didasari pada beberapa hal yaitu :

- a. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) ke Kota Samarinda langsung ke Balikpapan serta ke Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat;
- b. Terletak pada poros pertumbuhan kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (SamarindaSamboja-Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang-Sangatta-Muara Wahau dan Sangkulirang;
- c. Terletak di sepanjang Selat Makassar yang merupakan alur pelayaran nasional, regional dan internasional. Posisi strategis ini juga didukung dengan berbagai faktor internal yang ada di Kabupaten Kutai Timur antara lain kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, meliputi sumberdaya alam batubara, minyak bumi dan sumberdaya mineral industri (granit, pasir kuarsa, lempung, batu gamping, dsb.) dan Kekayaan sumberdaya kehutanan dan keanekaragaman hayati.

Topografi Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa dataran landai, bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 - 7 m hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan diatas 15%, dengan total luas wilayah 2.516.233 Ha (76.37% dari total luas lahan).

Wilayah dengan kelerengan di atas 40% mempunyai areal yang cukup luas, tersebar diseluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dengan ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan karakteristik topografi seperti ini termasuk dalam kategori lahan kritis yang sangat potensial mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah. Wilayah dengan kelerengan dibawah 15% (< 2 s/d 15) merupakan Kawasan yang relatif datar dan landai, dengan luas 778.686 Ha (23,63%). Kawasan ini hanya terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Berau pada Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur. Wilayah dengan daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.9222,5 Ha.

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi, semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel V. 59 Kondisi Fisik Kabupaten Kutai Timur

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Curah hujan	173,96	mm
2	Jumlah hari hujan	124	hari

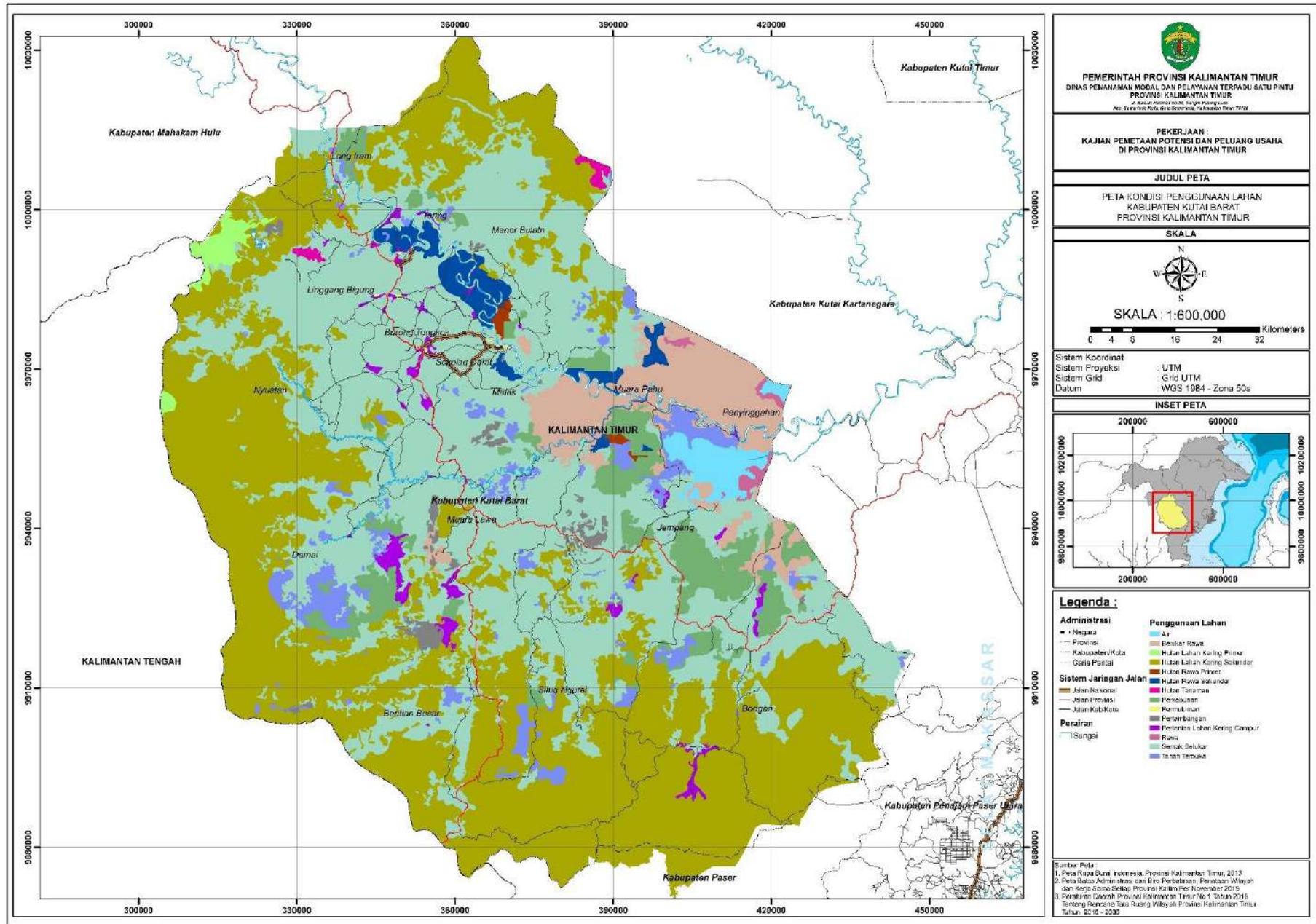
Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2021

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur terluas dimanfaatkan oleh Semak Belukar sebanyak 30.66% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Hutan Lahan Kering Sekunder yaitu seluas 26.47% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur:

Tabel V. 60 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Timur

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	474.528.84	14.64%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	857.721.37	26.47%
3	Tanah Terbuka	39.252.04	1.21%
4	Semak Belukar	993.417.16	30.66%
5	Perkebunan	480.440.60	14.83%
6	Pertanian Lahan Kering Campur	49.309.32	1.52%
7	Permukiman	10.033.95	0.31%
8	Pertambangan	30.717.34	0.95%
9	Air	11.595.56	0.36%
10	Hutan Tanaman	111.387.09	3.44%
11	Transmigrasi	1.018.94	0.03%
12	Pertanian Lahan Kering	6.582.18	0.20%
13	Sawah	216.73	0.01%
14	Bandara/Pelabuhan	67.62	0.00%
15	Hutan Mangrove Sekunder	10.623.14	0.33%
16	Hutan Mangrove Primer	14.317.63	0.44%
17	Belukar Rawa	124.995.75	3.86%
18	Hutan Rawa Primer	249.98	0.01%
19	Hutan Rawa Sekunder	14.204.64	0.44%
20	Rawa	6.690.19	0.21%
21	Tambak	2.918.31	0.09%
	TOTAL	3.240.288.38	100.00%



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur mencapai 390.991 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh penduduk usia muda.

Tenaga kerja adalah modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

Selama kurun waktu 2018-2019, angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 135.854 orang menjadi 137.737 orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2018, TPAK laki-laki sebesar 85,28 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 44,62 persen. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 25 hingga 44 tahun memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan kelompok umur yang lain. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian suatu wilayah. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Untuk tahun 2019, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (37,25%) masih merupakan sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel V. 61 Demografi di Kabupaten Kutai Timur

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	434.459	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	5,27	%
3	Kepadatan Penduduk	12,15	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	234.761	jiwa
	Ø Perempuan	199.698	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	182.916	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	10.536	jiwa

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Nilai PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Hasil perhitungan sangat sementara angka nominal PDRB Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020 sebesar Rp.76.689.460,90. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Kutai Timur terdapat tambang Batubara yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB. Jika dilihat dari kontribusinya, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,32% dari total PDRB pada PDRB ADHK 2020.

Tabel V. 62 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.848.200,30	6.104.458,40	6.007.110,60
B	Pertambangan dan Penggalian	73.319.408,70	79.709.048,90	76.689.460,90
C	Industri Pengolahan	2.503.562,30	2.677.800,00	2.553.809,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.393,20	11.394,70	13.054,60
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	11.756,50	12.301,20	12.620,30
F	Konstruksi	1.535.196,90	1.558.446,30	1.593.673,20

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.653.845,60	1.728.230,60	1.767.446,70
H	Transportasi dan Pergudangan	893.915,60	943.293,40	960.626,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	213.587,30	224.168,60	216.464,10
J	Informasi dan Komunikasi	275.403,70	285.814,00	301.621,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	146.562,80	152.231,10	154.660,20
L	Real Estat	320.673,20	332.696,80	340.041,50
M.N	Jasa Perusahaan	58.218,80	59.893,20	57.667,90
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	682.191,40	688.450,20	696.487,70
P	Jasa Pendidikan	842.175,00	888.898,70	912.958,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.269,60	133.530,10	159.816,80
R.S.T.U	Jasa lainnya	141.128,90	150.088,60	148.050,90
TOTAL		88.582.489,80	95.660.744,80	92.585.571,20

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 63 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.60%	6.38%	6.38%
B	Pertambangan dan Penggalian	82.77%	83.32%	83.32%
C	Industri Pengolahan	2.83%	2.80%	2.80%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01%	0.01%	0.01%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0.01%	0.01%	0.01%
F	Konstruksi	1.73%	1.63%	1.63%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.87%	1.81%	1.81%
H	Transportasi dan Pergudangan	1.01%	0.99%	0.99%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.24%	0.23%	0.23%
J	Informasi dan Komunikasi	0.31%	0.30%	0.30%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17%	0.16%	0.16%
L	Real Estat	0.36%	0.35%	0.35%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
M.N	Jasa Perusahaan	0.07%	0.06%	0.06%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77%	0.72%	0.72%
P	Jasa Pendidikan	0.95%	0.93%	0.93%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.14%	0.14%	0.14%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0.16%	0.16%	0.16%
TOTAL		100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 64 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Kutai Timur

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Bontang – Sangatta	54,84
	Ruas Jalan Sangatta – Sp. Perdau	32,02
	Ruas Jalan Sp. Perdau – Muara Lembak	13,05
	Ruas Jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang)	61,43
	Ruas Jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy (Maloy)	8,70
	Ruas Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar	94,41
	Ruas Jalan Sp. 3 Muara Wahau – Kelay (Km. 100 –Muara Wahau/PDC)	103,37
	Ruas Jalan Kelay – Labanan (Labanan – Km. 50)	67,38

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy	16,67
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Maloy – KIPi Maloy 2	6,93
Jalan Kolektor Primer 3	Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat)	176,25
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta	43,30
	Ruas Jalan Kota Sangatta – Maloy	130,00

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 65 Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten Kutai Timur

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Tabang (Kab. Kutai Kartanegara) – Lubuk Tutung – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur)
Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Kab. Kutai Barat – Muara Wahau (Kab. Kutai Timur) – Lubuk Tutung – Maloy
Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 66 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Kutai Timur

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur)
Status Prasarana Listrik	PLTD 2 x 100 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Mulut Tambang (Kabupaten Kutai Timur)

Status Prasarana Listrik	PLTU 1.400 MW
Arahan Pengembangan	Pembangunan
PLTA Potensial	
Lokasi PLTA	Baai
	Karangan
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
Jenis Energi	Energi Biomassa
Pengembangan Listrik Perdesaan	
Kabupaten Kutai Timur	
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Sangatta
	GI Maloy
	GI Sepaso
	GI Muara Wahau
	GI Muara Bengkal
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	Sangatta – Maloy
	Muara Wahau-Tanjung Redeb
	Muara Wahau- Sangatta
	Samarinda-Sebulu-Muara Bengkal

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 67 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Kutai Timur

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Long Mesangat	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Pesap	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tanah Abang	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Kaubun	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Cipta Graha	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Rantau Pulung	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Selangkau	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Santan	Bendung	Air Baku. Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Kabo Jaya	Bendung	Air Baku	Rencana
Jiwata	Bendung	PLTMH	Rencana
Sekerat	Bendung. Intake	Air Baku	Rencana
Telen	Bendungan	PLTA	Rencana
Sangatta	Bendungan	Air Baku. Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Kaliorang	Bendungan	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bengalon	Bendungan. Bendung Regulator	PLTA Air Baku. Pengendali Banjir	Rencana
Karangan	Bendungan. Bendung Regulator	Air Baku PLTA	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Pulai	Bendungan. Bendung Regulator	Air Baku PLTA	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Sukarahmat	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Muara Wahau	Embung	Air Baku	Rencana
Maloy	Sumur Dalam	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Sekerat	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Kaliorang	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Marangkayu	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Sukarahmat	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 68 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Kutai Timur

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Terminal Bersama (Simpang Tiga Bontang – Sangatta)
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Pembangunan Baru
Stasiun Kereta Api	
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	
Nama Stasiun	Sangatta
Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	
Nama Stasiun	Sangkulirang
	Muara Wahau
Pelabuhan	
Nama Pelabuhan	Sangkulirang
Hirarki Peran Dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpan Regional (PR)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran & Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Sangkulirang
Kebandarudaraan	
Nama Bandar Udara	Miau Baru
Hirarki Peran Dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	-
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran & Fungsi	Pengumpan

Lokasi Dermaga	Muara Wahau
----------------	-------------

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.4.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Timur

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Kutai Timur berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan ekonomi berbasis industri di Kecamatan Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang dan Kawasan food estate di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Telen dan Kecamatan Muara Wahau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Oleochemical Maloy dan Kawasan Agropolitan Regional.

Kabupaten Kutai Timur termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Timur:

Tabel V. 69 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Kutai Timur

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan ekonomi berbasis industri di Kecamatan Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang
		Kawasan food estate di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Telen dan Kecamatan Muara Wahau

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Oleochemical Maloy
		Kawasan Agropolitan Regional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Tenggara-Balikpapan dan sekitarnya	KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Ekonomi Berbasis Industry

Tabel V. 70 Profil Kawasan Ekonomi Berbasis Industry

Jenis Kegiatan	Pengembangan kawasan industri
Lokasi	Kecamatan Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi, jalan nasional Dilewati rencana pembangunan jalan bebas hambatan Jarak dari rencana Bandara Miau Baru Jarak dari rencana Pelabuhan Sangkulirang
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan Jaringan Air Bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Dominasi industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bengalon seluas 9.549,36 Ha (2020) Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 84.662,61 ton (2020) Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sangkulirang seluas 6.382,57 Ha (2020) Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 78.701,02 ton (2020) Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kaliorang seluas 2.091,14 Ha (2020) Produksi kelapa sawit sebanyak 21.401,37 ton (2020)
Peluang Usaha	Pengembangan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Food Estate

Tabel V. 71 Profil Kawasan Food Estate

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Lokasi	Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Telen dan Kecamatan Muara Wahau
Kondisi Akses	Jarak dari rencana Bandara Miau Baru Jarak dari rencana Pelabuhan Sangkulirang
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan Jaringan Air Bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Penyediaan irigasi di Kecamatan Long Mesangat dan Muara Ancalong
Jenis Kegiatan	Muara Ancalong Produksi di komoditas pisang sebanyak 1.394 kuintal Busang Produksi di komoditas pisang sebanyak 12.676 kuintal Long Mesangat Produksi di komoditas durian sebanyak 1.350 kuintal Produksi di komoditas jeruk siam/keprok sebanyak 1.264 kuintal Telen Produksi di komoditas pisang sebanyak 684 kuintal
Peluang Usaha	Pengembangan sektor pertanian Pengembangan sektor peternakan Pengembangan sektor perkebunan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan Industri Oleochemical Maloy

Tabel V. 72 Profil Kawasan Industri Oleochemical Maloy

Jenis Kegiatan	Industri Oleochemical
Lokasi	Pembangunan Pelabuhan Curah Cair Maloy Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Maloy Pembangunan Jalan Nasional Samarinda – Bontang – Sangatta – Maloy Tersedia infrastruktur dan fasilitas lainnya yang tersedia seperti menara telekomunikasi, 256isculi perkantoran, dan fasilitas ibadah. Posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi Jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

Kondisi Akses	Pasokan air kapasitas 200 L/detik (720 m ³ /jam) yang bersumber dari Sistem Sekerat
Kondisi Air Bersih	Pasokan listrik kapasitas 20 MW yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Kondisi Sumber Energi	Ditetapkan sebagai KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi
Potensi	<p>Industri Kelapa Sawit</p> <p>Produk turunan minyak kelapa sawit (CPO) dapat menghasilkan minyak goreng, margarin, shortening, vanaspati (vegetable ghee), ice creams, bakery fats, instans noodle, sabun dan detergent, cocoa butter extender, chocolate dan coatings, specialty fats, dry soap mixes, sugar confectionary, 257iscuit cream fats, filled milk, lubrication, textiles oils dan bio diesel.</p> <p>Produk Turunan Minyak Inti Sawit dapat menghasilkan shortening, cocoa butter substitute, specialty fats, ice cream, coffee whitener/cream, sugar confectionary, biscuit cream fats, filled mild, imitation cream, sabun dan detergent, shampoo dan kosmetik.</p> <p>Produk Turunan Oleochemicals kelapa sawit dapat menghasilkan methyl esters, plastic, textile processing, metal processing, lubricants, emulsifiers, detergent, glicerine, cosmetic, explosives, pharmaceutical products dan food protective coatings.</p> <p>Industri Pengolahan Kayu</p> <p>Pengolahan kayu menjadi mebel dan produk jadi kayu lainnya.</p> <p>Produk sampingan kayu seperti pengolahan serbuk kayu menjadi papan</p> <p>Zona Logistik</p> <p>Pergudangan, Trade Center, Open storage yard, Fuel Station, Instalasi Pengolahan Air Bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Public Transport Station, Zona Pendukung Pelabuhan Internasional Maloy</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. Kawasan Agropolitan Regional

Tabel V. 73 Profil Kawasan Agropolitan Regional

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Lokasi	Jarak dari rencana Bandara Miau Baru Jarak dari rencana Pelabuhan Sangkulirang
Kondisi Akses	Terpenuhi dengan jaringan PDAM
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan PLN

Kondisi Sumber Energi	Luas lahan padi seluas 4.839 Ha (2020)
	Produksi di komoditas padi sebanyak 16.698 ton (2020)
	Produksi di komoditas jagung sebanyak 5.756 ton (2020)
	Produksi di komoditas Ubi Kayu sebanyak 11.681 ton (2020)
	Produksi di komoditas Ubi jalar sebanyak 2.042 ton (2020)
	Produksi di komoditas cabe merah sebanyak 2.025 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas cabe rawit sebanyak 6.114 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas durian sebanyak 8.952 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas jeruk siam/keprok sebanyak 37.948 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas nanas sebanyak 3.413 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas papaya sebanyak 6.103 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas pisang sebanyak 360.875 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas salak sebanyak 2.004 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas perairan umum daratan sebanyak 617 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas perikanan laut sebanyak 49,769 kuintal (2020)
	Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 79,420.51 kuintal (2019)
	Penyediaan ternak Ayam Buras sebanyak 371.067 ekor
	Penyediaan ternak Ayam Pedagings sebanyak 2.944.750 ekor
	Penyediaan ternak Ayam Petelur sebanyak 84,602 ekor
	Penyediaan ternak Itik sebanyak 24,863 ekor
Penyediaan ternak Babi sebanyak 11,680 ekor	
Penyediaan ternak Itik Manila sebanyak 39,603 ekor	
Penyediaan ternak Kambing 9,363 ekor	
Penyediaan ternak Kelinci sebanyak 1,073 ekor	
Penyediaan ternak Merpati sebanyak 1,778 ekor	
Penyediaan ternak Puyuh sebanyak 63,110 ekor	
Penyediaan ternak Sapi sebanyak 19,775 ekor	
Potensi	Pengembangan sub sektor pertanian

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya

Tabel V. 74 KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Ekologi Hutan dan Karst)
Lokasi	Taman Nasional Kutai (Kecamatan Sangatta Selatan)
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Tanjung Bara: ± 15 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan PLN

Potensi	Kegiatan wisata di Taman Nasional Kutai (Kecamatan Sangatta Selatan)
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di obyek wisata Penyediaan jasa wisata di obyek wisata Penyediaan transportasi di obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.4.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Kutai Timur

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 75 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
	Daya Dukung Lingkungan	3

Aspek	Variabel	Skor
Daya Dukung Kawasan	Daya Tampung Kawasan	3

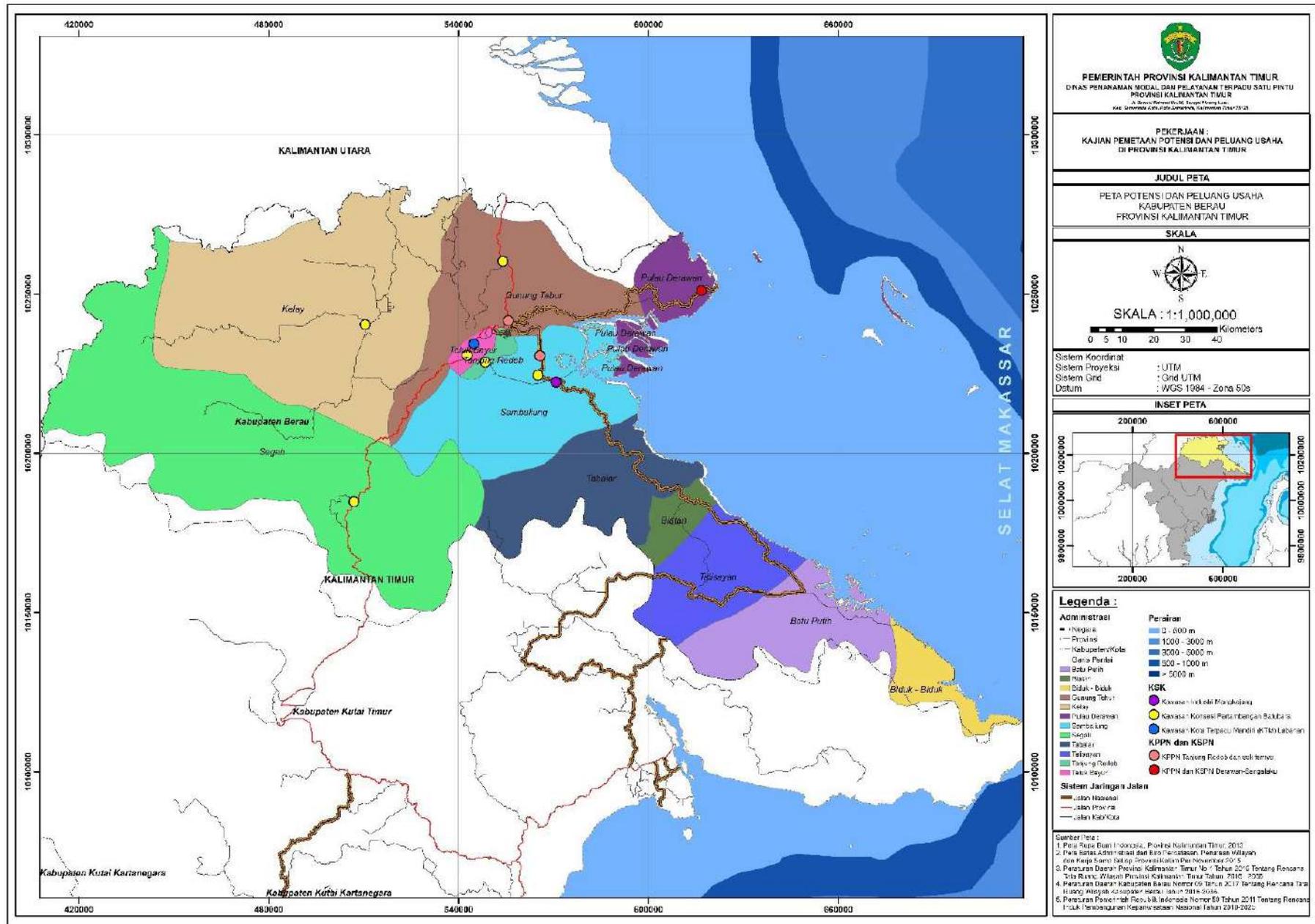
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 76 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Ekonomi Berbasis Industry	6	6	3	15	3
2	Kawasan Food Estate	6	6	3	15	3
3	Kawasan Industri Oleochemical Maloy	6	6	6	18	2
4	Kawasan Agropolitan Regional	6	6	6	18	2
5	KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya	9	6	6	21	1
6	KPPN Tenggarong dan sekitarnya	9	6	6	21	1

Sumber: Hasil Analisis, 2021



5.5 Kabupaten Berau

5.5.1 Gambaran Umum Kabupaten Berau

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam. Kabupaten Berau terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13.92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28.74%.

Batas Utara	: Kabupaten Bulungan
Batas Timur	: Selat Makasar
Batas Barat	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Selatan	: Kabupaten Kutai Kertanegara. Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau

Tabel V. 77 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kelay	Sido Bangen	6.556,54
2	Talisayan	Talisayan	1.621,57
3	Tabalar	Tubaan	1.837,34
4	Biduk-biduk	Biduk-biduk	2.429,97
5	Pulau Derawan	Tanjung Batu	4.423,99
6	Maratua	Maratua Teluk Harapan	5.616,26
7	Sambaliung	Sambaliung	2.163,37
8	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	24,42
9	Gunung Tabur	Gunung Tabur	1.963,32
10	Segah	Tepian Buah	5.241,29
11	Teluk Bayur	Teluk Bayur	316,98
12	Batu Putih	Batu Putih	3.575,3
13	Biatan	Batuan Lempake	1.192,03
TOTAL			36.962,38

Sumber: BPS, Kabupaten Berau Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 km². Sementara di daerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Biduk-Biduk. Talisayan. Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki.

Ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m.

Topografi dan Fisiografi. bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37.1%). kemudian 23.2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m. sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7.3%) dan 0-7 m (12.2%).

3. Penggunaan Lahan

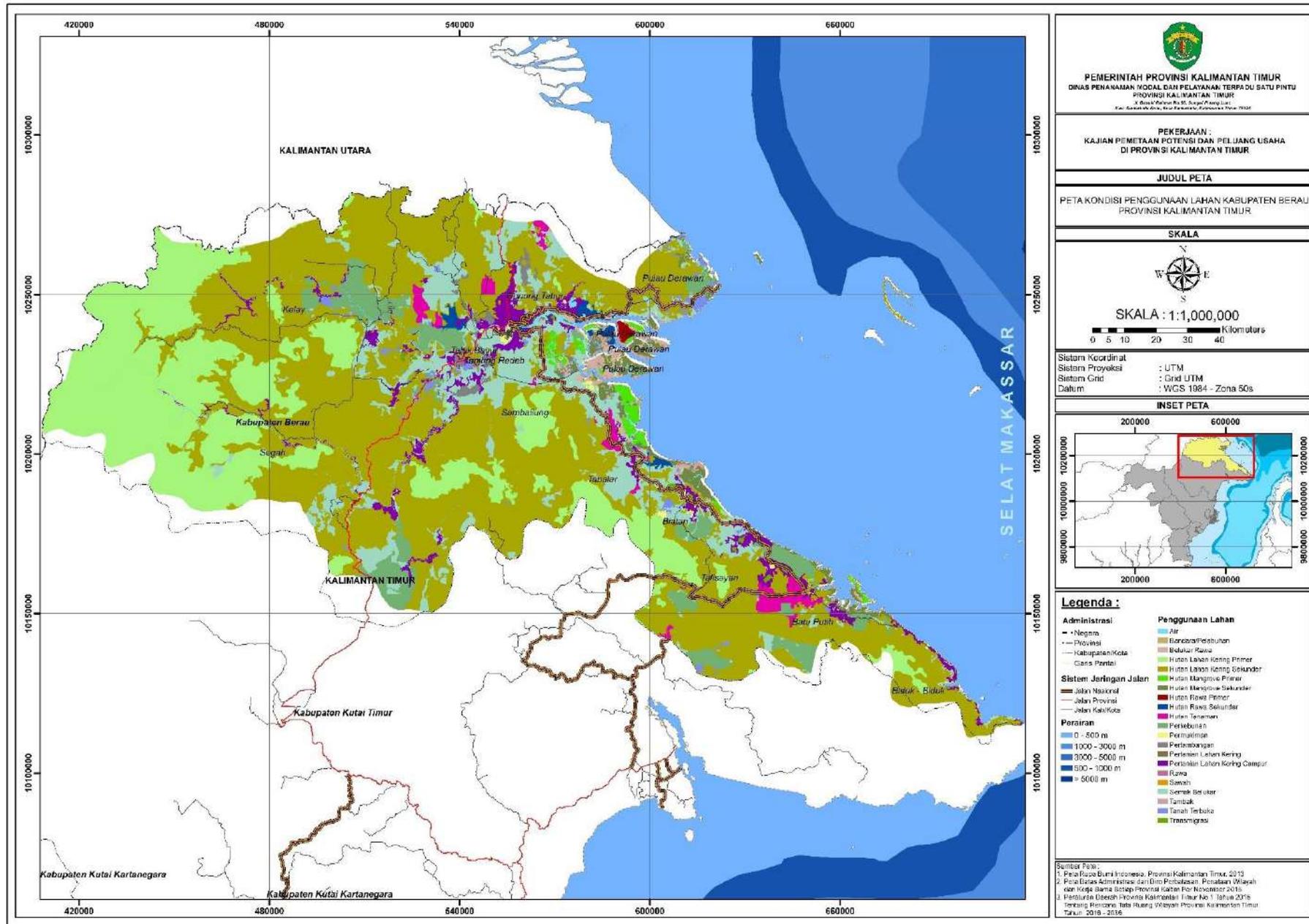
Penggunaan lahan di Kabupaten Berau terluas dimanfaatkan oleh Semak Belukar sebanyak 49,79% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Pertambangan yaitu seluas 23,52% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Berau. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Berau:

Tabel V. 78 Penggunaan Lahan di Kabupaten Berau

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Tanah Terbuka	15.976,99	0,79%
2	Hutan Mangrove Sekunder	32.519,84	1,62%
8	Pertambangan	10.865,29	23,52%
9	Belukar Rawa	12.524,82	49,79%

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
10	Pertanian Lahan Kering	732,81	3,55%
11	Transmigrasi	3.383,62	10,53%
12	Hutan Tanaman	26.366,66	5,02%
13	Hutan Rawa Sekunder	9.745,39	0,54%
14	Permukiman	5.753,98	0,62%
15	Hutan Mangrove Primer	14.110,21	0,04%
16	Tambak	5.800,49	0,17%
17	Hutan Rawa Primer	2.245,59	1,31%
18	Bandara/Pelabuhan	164,59	0,48%
19	Rawa	85,13	0,29%
20	Air	12.368,93	0,70%
TOTAL		2.011.359,34	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Data penduduk Kabupaten Berau hingga Desember 2020, sebanyak 248.035 jiwa. Sedangkan menurut sensus penduduk sebelumnya tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Berau hanya 179.079 jiwa. Berarti dalam jangka waktu 10 tahun, pertumbuhan penduduk Berau mencapai 68.956 jiwa. Dihitung rata-rata, setiap tahunnya naik 6.896 jiwa.

Tabel V. 79 Demografi di Kabupaten Berau

NO.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
1	Jumlah Penduduk	248.035	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	3,2	%
3	Kepadatan Penduduk	6,71	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)	116	
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	107.624	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	5.765	jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Terjadi peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Berau pada tahun 2020 yakni mencapai 27.324.377,30 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 28.272.803,50 juta rupiah dan hanya sebesar 26.771.418.4024.907.139,21 juta rupiah pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalan masih menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau, walaupun nilai tambah sektor ini sedikit mengalami penurunan. Andil sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB Kabupaten Berau merupakan yang terbesar dalam struktur perekonomian daerah yaitu mencapai 61.84%. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor pertanian yang mencapai 9.49% dan ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 6.50%.

Tabel V. 80 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.642.283.20	2.695.927.30	2.593.320.20
B	Pertambangan dan Penggalian	16.600.729.00	17.693.342.30	16.898.737.20
C	Industri Pengolahan	1.088.073.10	1.136.129.90	1.131.037.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.795.20	11.637.20	12.372.90
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	11.023.50	11.655.00	12.356.50
F	Konstruksi	1.048.998.90	1.152.058.90	1.046.407.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.680.293.10	1.748.815.50	1.776.743.60
H	Transportasi dan Pergudangan	1.380.034.80	1.413.070.50	1.361.955.20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	259.847.70	273.823.90	263.886.50
J	Informasi dan Komunikasi	293.324.00	311.581.10	334.128.60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	131.349.60	136.058.10	136.868.50
L	Real Estat	240.519.30	244.884.30	247.780.90
M.N	Jasa Perusahaan	25.161.20	25.882.20	24.421.00
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278.274.30	288.281.60	272.863.50
P	Jasa Pendidikan	656.271.20	679.425.60	712.578.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	249.760.60	266.468.30	318.873.30
R.S.T.U	Jasa lainnya	172.661.70	181.742.80	178.026.50
TOTAL		26.771.418.40	28.272.803.50	27.324.377.30

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 81 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.87%	9.54%	9.49%
B	Pertambangan dan Penggalian	62.01%	62.58%	61.84%
C	Industri Pengolahan	4.06%	4.02%	4.14%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04%	0.04%	0.05%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0.04%	0.04%	0.05%
F	Konstruksi	3.92%	4.07%	3.83%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.28%	6.19%	6.50%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	5.15%	5.00%	4.98%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.97%	0.97%	0.97%
J	Informasi dan Komunikasi	1.10%	1.10%	1.22%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.49%	0.48%	0.50%
L	Real Estat	0.90%	0.87%	0.91%
M.N	Jasa Perusahaan	0.09%	0.09%	0.09%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.04%	1.02%	1.00%
P	Jasa Pendidikan	2.45%	2.40%	2.61%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.93%	0.94%	1.17%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0.64%	0.64%	0.65%
TOTAL		100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Berau memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Berau dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 82 Arahan Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Berau

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Kelay – Labanan (Labanan – Km. 50)	67,38
	Ruas Jalan Labanan –Tanjung Redeb	22,49
	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Bts. Kab. Bulungan	54,71
Jalan Kolektor Primer 1	Ruas Jalan Batang Mian (Tj. Redeb)	1,79
	Ruas Jalan Bujangga (Tj. Redeb)	0,77

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
	Ruas Jalan Sambit (Tj. Redeb)	1.44
	Ruas Jalan Pemuda (Tj. Redeb)	1.18
	Ruas Jalan Maulana (Tj. Redeb)	0.58
	Ruas jalan Gunung Tabur – Usiran (Kabupaten Berau)	56.30
	Ruas jalan Jalan Usiran – Tanjung Batu (Kabupaten Berau)	52.68
	Ruas Jalan Tanjung Batu – Batas Provinsi Kalimantan Utara	38.40
	Pembangunan Jalan Poros Mantaritip (Akses pelabuhan Mantaritip)	37.90
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Tanjung Redeb – Talisayan	152.60
	Ruas Jalan Labanan – Tepian Buah	35.03
	Ring Road Tanjung Redeb – Teluk Bayur	18.00
	Ruas Jalan Sangkulirang – Talisayan (No. Ruas = 34.033)	241.00

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 83 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 84 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Berau

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Teluk Bayur (Kabupaten Berau)
Status Prasarana Listrik	PLTU 2 x 7 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Lati (Kabupaten Berau)

Status Prasarana Listrik	PLTU 3 x 7 MW dan 1 x 12 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Kelay (Kabupaten Berau)
Status Prasarana Listrik	PLTA 2 x 75 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
Pusat Pembangkit Listrik	Sambaliung (Kabupaten Berau)
Status Prasarana Listrik	PLTD 1 x 7 MW
Arahan Pengembangan	Pengembangan
PLTA Potensial	
Lokasi PLTA	Sungai Sembakung
	Kelai
Pengembangan Listrik Perdesaan	
Kabupaten Berau	
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Berau / Tanjung Redeb
	GI Talisayan
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	Tenggarong – Tanjung Redeb – Talisayan – Kota Bangun
	Tanjung Redeb - Talisayan

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 85 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Berau

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Semurut	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Buyung-buyung	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Labanan	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Muara Bangun	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tepian Buah	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Beriwit	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Merancang	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Teluk Bayur	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Teluk Sumbang	Bendung	PLTMH	Rencana
Kelay	Bendungan	Pengendali Banjir. Air Baku. PLTA	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 86 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Rinding
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arahan Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Stasiun Kereta Api	
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Tanjung Redeb
Pelabuhan	
Nama Pelabuhan	Tanjung Redeb
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran dan Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	RELOKASI KE MANTARITIP
Nama Pelabuhan	Talisayan
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpan Lokal (PL)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran dan Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Talisayan
Kebandarudaraan	
Nama Bandar Udara	Kalimarau
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	Pengumpul Skala Tersier
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran dan Fungsi	Pengumpul Skala Sekunder
Lokasi Bandara	Kalimarau
Nama Bandar Udara	Maratua
Hirarki Peran dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran dan Fungsi	Pengumpan
Lokasi Bandara	Maratua

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.5.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Berau

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Berau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan

Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Berau berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan, Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara, Kawasan Pusat Industri Perkebunan, Kawasan Industri Mangkajang.

Kabupaten Berau termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya, KPPN Derawan - Sangalaki dan sekitarnya dan KSPN Derawan - Sangalaki dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Berau:

Tabel V. 87 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Berau

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan
		Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara
		Kawasan Pusat Industri Perkebunan
		Kawasan Industri Mangkajang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Derawan-Kayan Mentarang dan sekitarnya	KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya
		KPPN Derawan - Sangalaki dan sekitarnya
	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	KSPN Derawan - Sangalaki dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan dan Kawasan Pusat Industri Perkebunan

Tabel V. 88 Profil Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan dan Kawasan Pusat Industri Perkebunan

Jenis Kegiatan	Pusat kilang CPO
Lokasi	Kecamatan Teluk Bayur
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Berau: ± 20 km Jarak dari Bandara Kalimantan: ± 20 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Produksi di komoditas Kelapa Sawit sebanyak 23.721.82 kuintal (2019)

	Kawasan ini memiliki akses transportasi darat dan air untuk pengangkutan hasil panen kelapa sawit dari perkebunan dan pendistribusian CPO ke luar daerah
Peluang Usaha	Ditetapkan sebagai pusat kilang CPO (RPJMB Kabupaten Berau Tahun 2016-2021) Pengembangan kegiatan industri hilir komoditas kelapa sawit

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara

Tabel V. 89 Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara

Jenis Kegiatan	Pertambangan Batubara
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Mantaritip Jarak dari Pelabuhan Talisayan Jarak dari Bandara Kalimantan Jarak dari Bandara Maratua
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Bahan tambang Batubara (cadangan volume batu bara 437 juta ton); Bahan Galian B (emas). dan Bahan Galian C (Tanah liat. Batu Kapur. dll)

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan Industri Mangkajang

Tabel V. 90 Profil Kawasan Industri Mangkajang

Jenis Kegiatan	Kawasan industri pengolahan
Lokasi	Kecamatan Sambaliung
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Berau: ± 45 km Jarak dari Bandara Mangkajang: ± 2 km
Potensi	Lokasinya yang strategis dan tidak terlalu jauh dari pusat kota di Tanjung Redeb Potensi industri pengolahan masih sangat besar untuk dikembangkan mengingat banyaknya komoditi bahan mentah yang dapat diolah
Peluang Usaha	Pengembangan agroindustry Pengembangan industri pengolahan lainnya

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya

Tabel V. 91 KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Budaya (Perkotaan. Peninggalan Sejarah. Etnik/ Tradisi)
Lokasi	1. Kraton Gunung Tabur (Kecamatan Gunung Tabur) 2. Kraton Sambaliung (Kecamatan Sambaliung)
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Berau: ± 2 km Jarak dari Bandara Kalimantan: ± 7 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Kraton Gunung Tabur (Kecamatan Gunung Tabur) Kraton Sambaliung (Kecamatan Sambaliung)
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. KPPN dan KSPN Derawan-Sangkalaku dan sekitarnya

Tabel V. 92 KPPN dan KSPN Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Bahari-Pulau Kecil)
Lokasi	1. Pulau Panjang 2. Pulau Derawan 3. Pulau Sangalaki 4. Pulau Maratua 5. Pulau Kakaban 6. Penangkaran Penyu
Kondisi Akses	Jarak dari Bandara Kalimantan: ± 7 km
Kondisi Air Bersih	Belum terpenuhi seluruhnya dengan jaringan air bersih
Kondisi Sumber Energi	Penyediaan jaringan listrik PLN Sebagian wilayah menggunakan PLTS
Potensi	1. Pulau Panjang 2. Pulau Derawan 3. Pulau Sangalaki 4. Pulau Maratua 5. Pulau Kakaban 6. Penangkaran Penyu
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di obyek wisata Penyediaan jasa wisata di obyek wisata Penyediaan transportasi di obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.5.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Berau

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 93 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesiediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

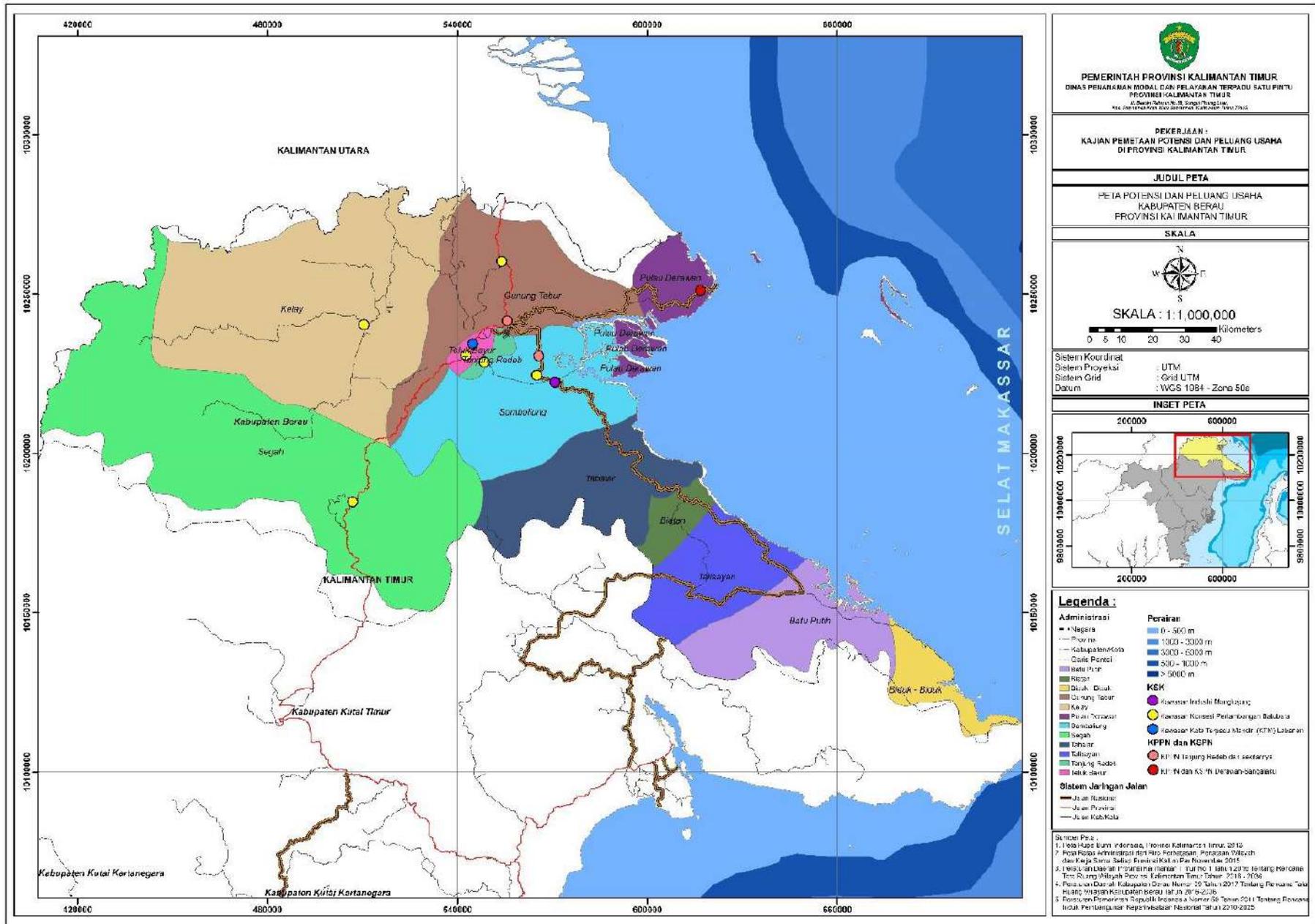
Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 94 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Berau

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan dan Kawasan Pusat Industri Perkebunan	6	6	3	15	3
2	Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara	6	6	3	15	3
3	Kawasan Industri Mangkajang	9	6	3	18	2
4	KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya	12	6	6	24	1
5	KPPN dan KSPN Derawan-Sangkalaku dan sekitarnya	12	6	6	24	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Gc



5.6 Kabupaten Penajam Paser Utara

5.6.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Wilayah Administrasi

Penajam Paser Utara adalah Kabupaten yang berada di Pulau Kalimantan. tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah sebesar 3 333.06 km². Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten/Kota Terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Secara astronomis, Penajam Paser Utara terletak antara 116°19'30" dan 116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 01°36'37" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Timur	: Kota Balikpapan dan Selat Makassar
Batas Barat	: Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat
Batas Selatan	: Kabupaten Paser dan Selat Makassar

Tabel V. 95 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Babulu	Desa Babulu Darat	399.45
2	Waru	Kel. Waru	553.88
3	Penajam	Kel. Penajam	1.207.37
4	Sepaku	Kel. Tengin Baru	1.172.36
Jumlah			3.333.06

Sumber: BPS, Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan, terutama di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara bagian barat.

3. Penggunaan Lahan

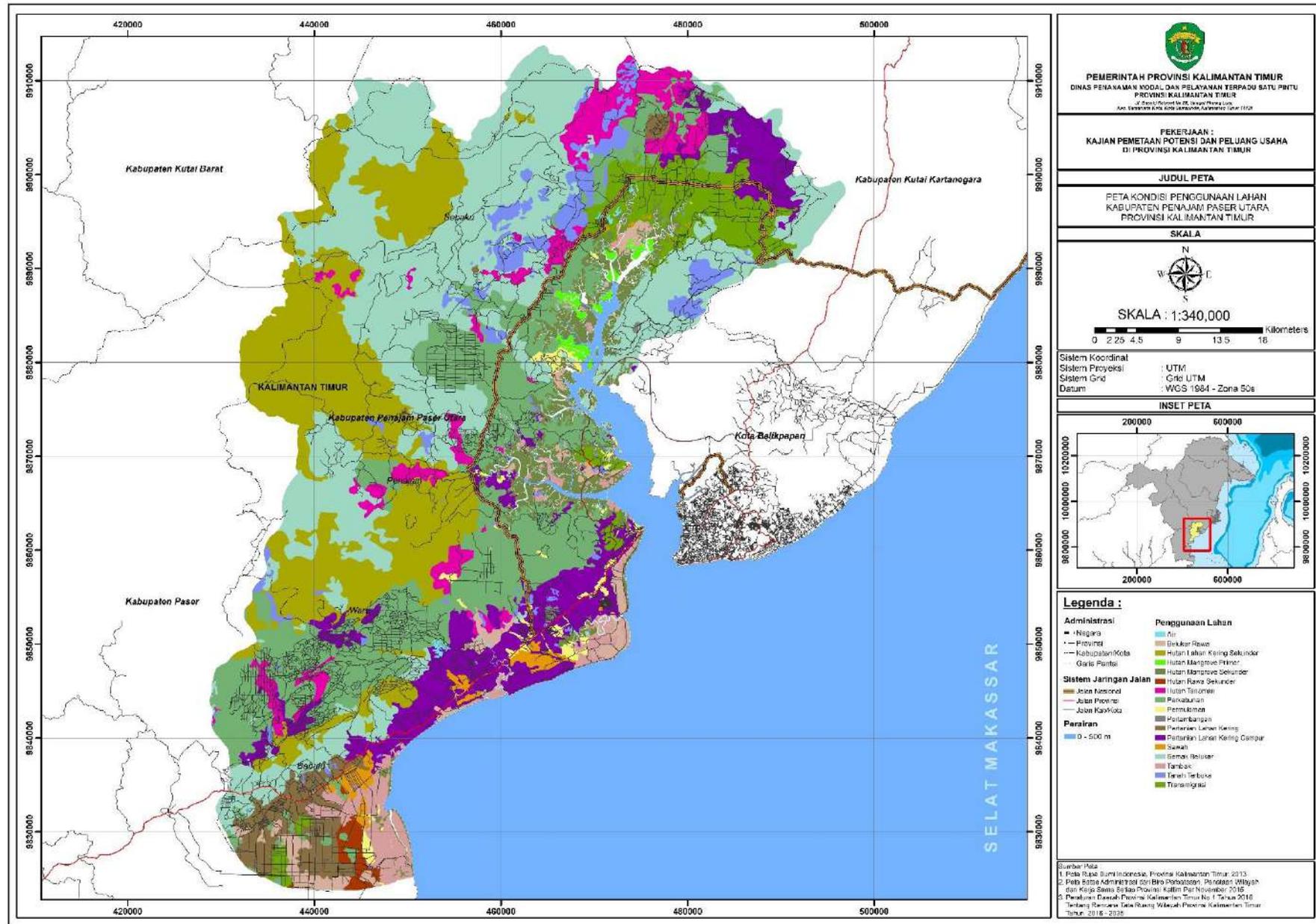
Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara bervariasi. Penggunaan lahan terbagi menjadi 12, yaitu permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, belukar, hutan produksi terbatas, perikanan, sawah, perkebunan, hutan produksi tetap, perindustrian, peternakan, dan pariwisata. Luasan pada masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 96 Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	58.134,18	18,31%
2	Semak Belukar	88.575,34	27,90%
3	Perkebunan	58.239,26	18,34%
4	Tanah Terbuka	10.948,58	3,45%
5	Hutan Tanaman	14.187,59	4,47%
6	Permukiman	3.352,38	1,06%
7	Pertanian Lahan Kering	8.442,54	2,66%
8	Pertanian Lahan Kering Campur	26.559,14	8,37%
9	Hutan Mangrove Primer	1.371,38	0,43%
10	Tambak	7.835,19	2,47%
11	Hutan Mangrove Sekunder	12.712,25	4,00%
12	Pertambangan	300,34	0,09%
TOTAL		317.483,45	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Gan



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Data penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara hingga Desember 2020, sebanyak 178.681 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 92.506 jiwa penduduk laki-laki dan 86.175 jiwa penduduk wanita. Pertambahan penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2,18%.

Tabel V. 97 Demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	178.681	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	2,18	%
3	Kepadatan Penduduk	6,71	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	92.506	jiwa
	Ø Perempuan	86.175	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	76.902	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	5.104	jiwa

Sumber: BPS, Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Terjadi penurunan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 hanya mencapai 6.604.194.00 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6.753.572.10 juta rupiah. Pada tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor andalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, walaupun nilai tambah sektor ini sedikit mengalami penurunan. Andil sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan yang terbesar dalam struktur perekonomian daerah yaitu mencapai 31.19%. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 20.48% dan ketiga adalah sektor Industri Pengolahan yang mencapai 14.91%.

Tabel V. 98 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.334.496,90	1.375.121,80	1.352.664,20
B	Pertambangan dan Penggalian	2.154.939,90	2.155.823,80	2.059.839,30
C	Industri Pengolahan	1.019.349,00	1.052.641,90	984.829,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.110,20	5.224,50	6.273,20
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	5.934,70	6.166,80	6.316,80
F	Konstruksi	609.449,10	651.985,10	671.244,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	579.204,70	589.910,50	606.059,30
H	Transportasi dan Pergudangan	107.427,00	111.712,10	110.246,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29.338,80	30.488,60	29.140,70
J	Informasi dan Komunikasi	97.137,40	105.961,30	116.625,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	45.927,10	48.816,50	51.574,00
L	Real Estat	86.911,40	90.053,70	92.006,70
M.N	Jasa Perusahaan	1.118,60	1.139,00	1.100,60
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	239.313,90	246.762,20	231.124,80
P	Jasa Pendidikan	217.236,70	221.794,20	226.849,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.742,80	1.805,50	2.153,10
R.S.T.U	Jasa lainnya	55.811,10	58.164,60	56.146,10
TOTAL		6.590.449,30	6.753.572,10	6.604.194,00

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 99 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,25%	20,36%	20,48%
B	Pertambangan dan Penggalian	32,70%	31,92%	31,19%
C	Industri Pengolahan	15,47%	15,59%	14,91%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08%	0,08%	0,09%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,09%	0,10%
F	Konstruksi	9,25%	9,65%	10,16%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,79%	8,73%	9,18%
H	Transportasi dan Pergudangan	1,63%	1,65%	1,67%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,45%	0,45%	0,44%
J	Informasi dan Komunikasi	1,47%	1,57%	1,77%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70%	0,72%	0,78%
L	Real Estat	1,32%	1,33%	1,39%
M.N	Jasa Perusahaan	0,02%	0,02%	0,02%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63%	3,65%	3,50%
P	Jasa Pendidikan	3,30%	3,28%	3,43%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03%	0,03%	0,03%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,85%	0,86%	0,85%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun

2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 100 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Penajam Paser Utara

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Km. 13 – Jembatan P. Balang	14,00
	Ruas Jalan Jembatan P. Balang – Penajam	26,00
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Km. 38 – Semoi Sepaku	41,11
	Ruas Jalan Semoi Sepaku – Petung/Penajam	76,00
	Ruas Jalan Sp. Resak – Sp. Sotek	102,50
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Tana Paser (Kuario) – Penajam	55,80

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 101 Arahan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api di Kabupaten

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuario – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara- Balikpapan
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 102 Arahan Pengembangan Prasarana Listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara

PLTA Potensial	
Lokasi PLTA	Riko
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
JENIS ENERGI	Energi Biomassa
KABUPATEN	Paser – Penajam Paser Utara
Pengembangan Listrik Perdesaan	
Kabupaten Penajam Paser Utara	
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Sei Kleidang / Harapan Baru
	GI Petung
	GI Semoi – Sepaku

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 103 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Waru	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Babulu Darat	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Sepaku Semoi	Bendungan	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tunan	Bendungan	Air Baku. Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Jaringan Pipa Lambakan	Pipa Transmisi & Pipa Distribusi	Air Baku	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 104 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Penajam Paser Utara

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal	Penajam
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arahan Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Pelabuhan dan Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan	
Pelabuhan	Penajam
Hirarki Peran & Fungsi	Antar Kab/Kota

Stasiun Kereta Api	
Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Penajam
Transportasi Laut	
Nama Pelabuhan	PENAJAM PASER
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	PENGUMPUL (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	TETAP
Lokasi Dermaga	Penajam

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.6.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Berau berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam, Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru, Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam, Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu, Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru, Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan, Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Central Terminal).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung serta Kawasan Industri Pertanian:

Tabel V. 105 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam
		Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru;
		Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
		Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu;
		Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru;
		Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan;
		Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe. Kecamatan Penajam. Central Terminal)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung
		Kawasan Industri Pertanian

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam

Tabel V. 106 Kawasan Perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam

Jenis Kegiatan	pusat perdagangan. pelayanan jasa sosial - ekonomi. pelayanan kesehatan. pendidikan. dan peribadatan skala kabupaten.
Lokasi	Kecamatan Penajam
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi dan jalan nasional Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi jaringan listrik PLN
Potensi	Kawasan perlintasan antar kabupaten dan provinsi
Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa

	Pengembangan sarana kesehatan dan pendidikan skala kabupaten
--	--------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru

Tabel V. 107 Kawasan Peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru

Jenis Kegiatan	Wisata
Lokasi	Kecamatan Waru
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi dan jalan nasional Jarak dari Pelabuhan Penajam

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam

Tabel V. 108 Kawasan Pariwisata Bahari berada di Kecamatan Penajam

Jenis Kegiatan	Wisata bahari
Lokasi	Kecamatan Penajam
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi. jalan nasional dan jalan kabupaten Jarak dari Pelabuhan Penajam
Potensi	Pantai Tanjung Jumlai Pantai Sipakario Pulau Gusung Meriam Jepang Pantai Nipah-nipah Pantai Saloloang Pantai Corong Pulau Gusung Dermaga Pariwisata Ekowisata Hutan Mangrove Kampung Baru Sesumpu Pantai Pejala Pantai Lango. Jenebora dan Sungai Riko
Peluang Usaha	Pengembangan obyek wisata Penyediaan akomodasi disekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata disekitar obyek wisata Penyediaan transportasi disekitar obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu

Tabel V. 109 Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu

Jenis Kegiatan	Kawasan Agropolitan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan
Lokasi	Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis Pertanian Tanaman Pangan berada di Desa Gunung Intan. Babulu Darat. Sebakung Jaya. dan Labangka. Kecamatan Babulu Pengembangan kawasan Agropolitan berbasis Perikanan (Minapolitan) berada di di Babulu Laut Kecamatan Babulu
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi. jalan nasional dan jalan kabupaten Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Kedekatan dengan sumber bahan baku Produksi di komoditas padi sebanyak 46.498 ton (2020) Produksi di komoditas Perikanan Laut sebanyak 189.888 kuintal (2020) Produksi di komoditas Perairan Umum Daratan sebanyak 14.601 kuintal (2020)
Peluang Usaha	Industri Beras (Rice Milling) Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan. yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya Subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness). seperti usaha penangkapan ikan. budidaya udang. rumput laut. dan ikan laut. dan budidaya ikan air tawar serta budidaya garam laut Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan. yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya Subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa. seperti perkreditan. asuransi. transportasi. pendidikan dan penyuluhan perikanan. penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru

Tabel V. 110 Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru

Jenis Kegiatan	Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan
Lokasi	Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi. jalan nasional dan jalan kabupaten Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Produksi di komoditas Perikanan Laut sebanyak 189.888 kuintal (2020) Produksi di komoditas Perairan Umum Daratan sebanyak 14.601 kuintal (2020)
Peluang Usaha	Pengembangan Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan. yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya Pengembangan Subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness). seperti usaha penangkapan ikan. budidaya udang. rumput laut. dan ikan laut. dan budidaya ikan air tawar serta budidaya garam laut Pengembangan Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan. yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya Pengembangan Subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa. seperti perkreditan. asuransi. transportasi. pendidikan dan penyuluhan perikanan. penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

f. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan

Tabel V. 111 Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan

Jenis Kegiatan	Transportasi dan perdagangan dan jasa
Lokasi	Kecamatan Penajam
Kondisi Akses	Dilewati jalan nasional
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Akses utama untuk kemudahan mobilitas antar kabupaten/kota dan antar provinsi

Peluang Usaha	Pengembangan prasarana transportasi
	Pengembangan perdagangan dan jasa

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

g. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe. Kecamatan Penajam. Central Terminal)

Tabel V. 112 Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe. Kecamatan Penajam. Central Terminal)

Jenis Kegiatan	Terminal Penampungan Minyak Mentah
Lokasi	Kecamatan Penajam
Kondisi Akses	Dilewati jalan nasional dan jalan provinsi Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan. yakni pengembangan kilang " <i>Refinery Development Master Plan</i> " (RDMP) Balikpapan dan kilang baru " <i>Grass Root Refinery</i> " (GRR) Bontang melalui pipanisasi Kawasan CCT Lawe-lawe berada pada lahan seluas 1.100 hektare milik Pertamina.
Peluang Usaha	Pengembangan terminal penampungan minyak mentah

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

h. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung

Tabel V. 113 Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung

Jenis Kegiatan	Kawasan industri
Lokasi	Kecamatan Buluminung
Kondisi Akses	Dilewati jalan nasional dan jalan provinsi Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	12 industri telah berinvestasi. bidang industry pengolahan hasil hutan (Pulp and paper). industry pengolahan hasil perkebunan (kelapa sawit dan karet). perdagangan dan jasa (batubara). Industri Transportasi dan Manufaktur. Industry pengolahan hasil hutan alokasi lahan seluas 1.118 Ha Perdagangan dan jasa alokasi lahan seluas 715 Ha Transportasi dan manufaktur alokasi lahan seluas 1.060 Ha

	<p>Industri pengolahan hasil tambang alokasi lahan seluas 861 Ha</p> <p>Industri pengolahan hasil pertanian alokasi lahan seluas 710 Ha</p> <p>Indutri pengolahan hasil migas alokasi luas lahan seluas 961 Ha</p>
Peluang Usaha	<p>Pengembangan industry pengolahan hasil hutan</p> <p>Pengembangan perdagangan dan jasa</p> <p>Pengembangan transportasi dan manufaktur</p> <p>Pengembangan industry pengolahan hasil tambang</p> <p>Pengembangan industry pengolahan hasil pertanian</p> <p>Pengembangan industry pengolahan hasil migas</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

i. Kawasan Industri Pertanian

Tabel V. 114 Kawasan Industri Pertanian

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Kondisi Akses	Jarak dari Pelabuhan Penajam
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	<p>Produksi di komoditas padi sebanyak 46.498 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas jagung sebanyak 1.898 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas ubi kayu sebanyak 2.79 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas ubi jalar sebanyak 3.991 ton (2020)</p> <p>Produksi di komoditas cabe besar sebanyak 3.212 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas cabe rawit sebanyak 6.461 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas pisang sebanyak 60.158 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas papaya sebanyak 4.623 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas jeruk siam/keprok sebanyak 18.575 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas salak sebanyak 2.527 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas pisang sebanyak 7.457 kuintal (2020)</p> <p>Penyediaan ternak sapi sebanyak 16.454 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak kambing sebanyak 5.010 kuintal (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam buras sebanyak 434.598 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam petelur sebanyak 67.071 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak ayam pedaging sebanyak 1.978.187 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak puyuh sebanyak 1.499 ekor (2020)</p> <p>Penyediaan ternak itik manila sebanyak 2.179 ekor (2020)</p> <p>Produksi di komoditas Perikanan Laut sebanyak 62.270 kuintal (2020)</p> <p>Produksi di komoditas Perairan Umum Daratan sebanyak 3.016 kuintal (2020)</p>

	Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 9.3344.01 kuintal (2019)
Peluang Usaha	Pengembangan produksi hasil pertanian Pengembangan produksi hasil perikanan Pengembangan produksi hasil peternakan Pengembangan produksi hasil perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.6.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiapan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 115 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesiapan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3

Aspek	Variabel	Skor
Daya Dukung	Daya Dukung Lingkungan	3
Kawasan	Daya Tampung Kawasan	3

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

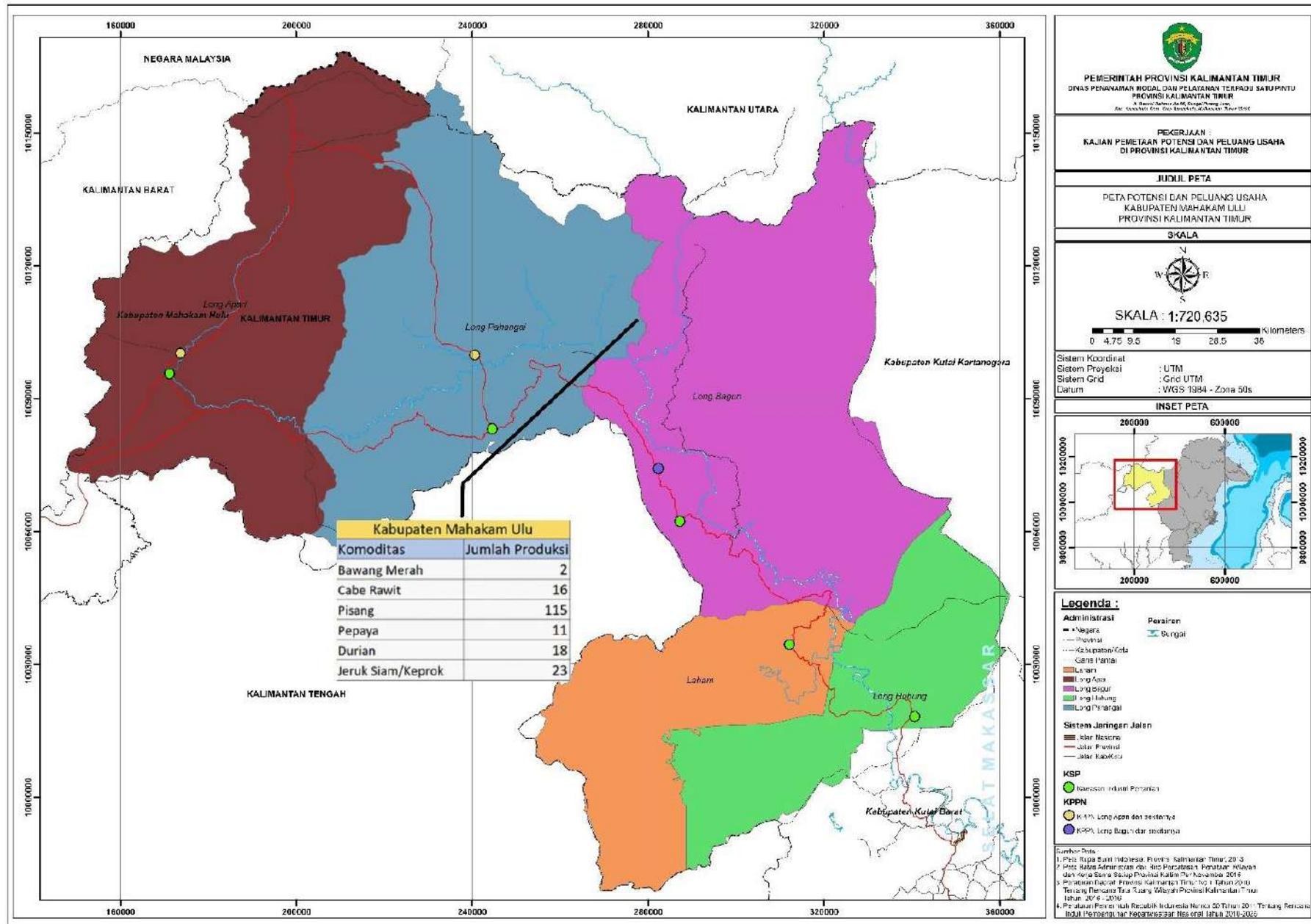
Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 116 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam	6	6	3	15	3
2	Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api-Api Kecamatan Waru	6	3	3	12	4
3	Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam	6	3	6	15	3
4	Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu	6	3	3	12	4
5	Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru	6	3	3	12	4
6	Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan	6	6	6	18	3
7	Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam. Central Terminal)	6	6	6	18	3

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
8	Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung	12	6	6	24	1
9	kawasan Industri Pertanian	9	6	6	21	2

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021



5.7 Kabupaten Mahakam Ulu

5.7.1 Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Ulu

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Mahakam Ulu adalah Kabupaten yang terletak di Kabupaten Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 50 Kampung. Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Long Hubung. Kecamatan Laham Kecamatan Long Bagun. Kecamatan Long Pahangai. Kecamatan Long Apari. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah darat seluas 15.315 km². Wilayah terluas adalah kecamatan Long Apari sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Laham. Berdasarkan kondisi geografisnya. lokasi kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah kecamatan Long Apari dengan jarak 335 km. Batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Malinau dan Negara Sarawak (Malaysia Timur)
Batas Timur	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Barat	: Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Batas Selatan	: Kabupaten Kutai Barat dan Kalimantan Tengah

Tabel V. 117 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Laham	Laham	901,8
2	Long Hubung	Long Hubung	530,9
3	Long Bangun	Ujoh Bilang	4.971,2
4	Long Pahangai	Long Pahangai	3.420,4
5	Long Apari	Tiong Ohang	5.490,7
TOTAL			15.315

Sumber: BPS, Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi Topografi bergelombang. dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 –60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang daerah aliran

sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30% terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Tabel V. 118 Kondisi Fisik Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Curah hujan	174,1	mm
2	Jumlah hari hujan	29	hari
3	Rata-rata suhu	28	C
4	Rata-rata Kelembaban	93,3	%

Sumber: BPS, Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2021

3. Penggunaan Lahan

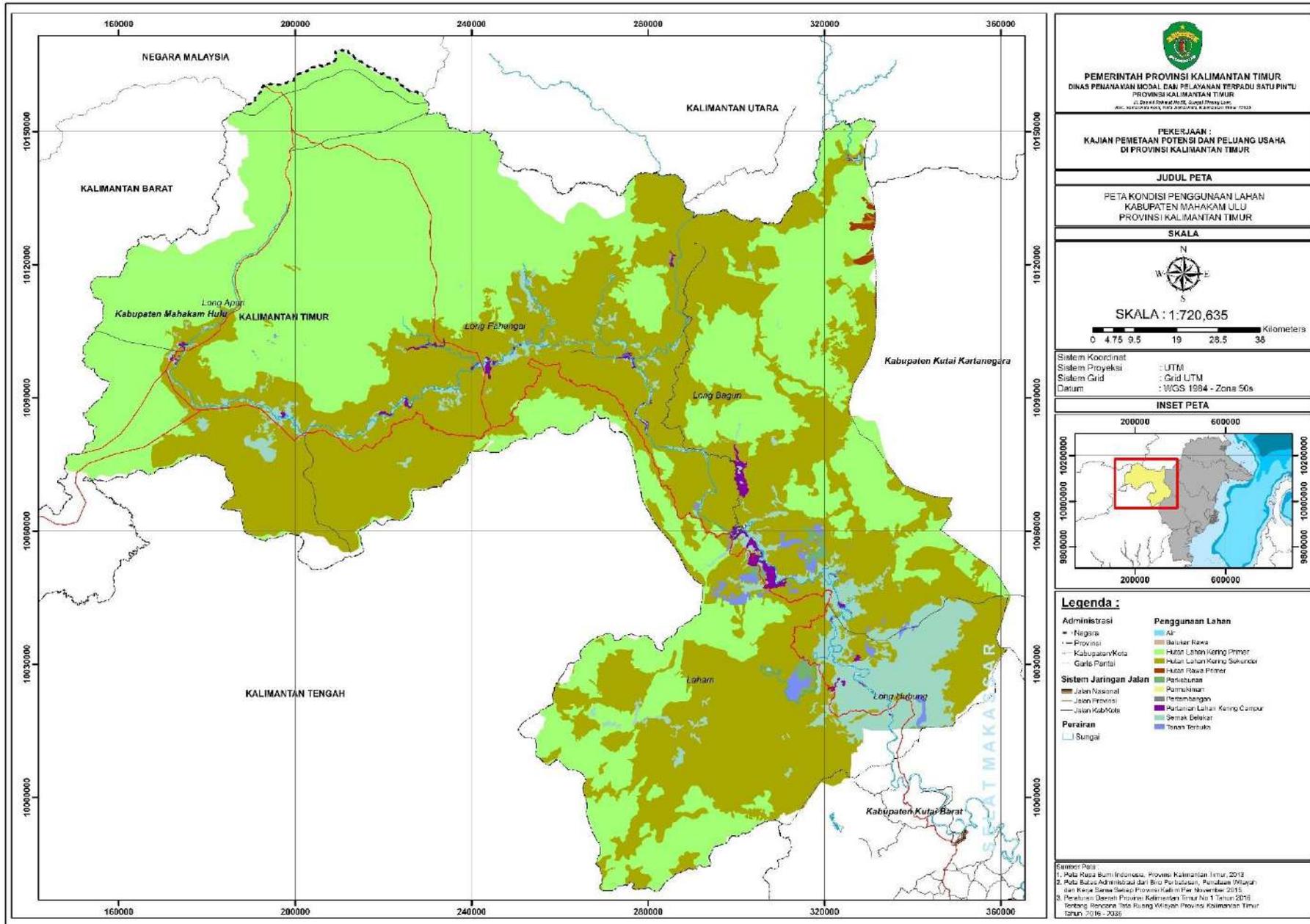
Penggunaan lahan di Kabupaten Mahakam Ulu terluas dimanfaatkan oleh Hutan Lahan Kering Primer sebanyak 49,79% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Tanah Terbuka yaitu seluas 16.50% dari total luas lahan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel V. 119 Penggunaan Lahan di Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	13.657,94	22,53%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.835,47	3,03%
3	Semak Belukar	1.666,35	2,75%
4	Tanah Terbuka	10.001,83	16,50%
5	Pertanian Lahan Kering Campur	3.763,39	6,21%
6	Permukiman	1.493,02	2,46%
7	Perkebunan	8.952,90	14,77%
10	Air	735,00	1,21%
11	Belukar Rawa	794,14	1,31%
TOTAL		60.630,44	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Gc



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah Penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 menurut data registrasi adalah 35010 jiwa. Sedangkan menurut data proyeksi dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Mahakam Ulu tahun 2020 adalah 32513 jiwa. Menurut data hasil registrasi, penduduk yang paling banyak berada pada kecamatan long bagun. Hal ini berhubungan positif karena mengingat kecamatan long bagun merupakan kecamatan ibukota kabupaten Mahakam ulu. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya setelah long bagun adalah kecamatan long hubung yang berjumlah 8604 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling kecil ada di kecamatan laham yaitu sebesar 2749 jiwa.

Jika kita tinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020, diketahui bahwa laju pertumbuhannya positif yaitu sebesar 15,5 %. Semua kecamatan mengalami peningkatan laju pertumbuhan. Meskipun long bagun merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak di kabupaten Mahakam ulu, belum tentu kecamatan long bagun menjadi wilayah yang memiliki kepadatan penduduk per km terbesar. Kepadatan penduduk per km bisa dicari dengan membandingkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Diketahui bahwa daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi ada di kecamatan long hubung yaitu sebesar 16,21. Yang artinya ada sekitar 16 hingga 17 orang per kilometernya. Kemudian dilanjutkan dengan kecamatan laham yang memiliki kepadatan penduduk yang terbanyak nomor dua yaitu sebesar 3,05. Sedangkan kecamatan long bagun berada pada posisi ketiga. Dan dari data yang ada diketahui bahwa tahun 2020 daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling kecil ada pada kecamatan long apari yaitu sebesar 0,77. Jika kita lihat berdasarkan rasio jenis kelamin, diketahui bahwa tahun 2020 rasio jenis kelamin kabupaten Mahakam ulu adalah 114,34 berdasarkan hasil registrasi dan 113,83 berdasarkan hasil proyeksi BPS. Hal ini berarti ada sebanyak 113 hingga 115 orang laki laki setiap 100 orang perempuan. Yang artinya jumlah lakilaki lebih banyak daripada jumlah perempuan.

Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas pada tahun 2020 di kabupaten Mahakam ulu berjumlah 19.712 orang. Angka ini terdiri dari 15024 orang yang merupakan angkatan kerja dan 4.688 orang yang merupakan bukan angkatan

kerja. Diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 14499 orang sedangkan jumlah penduduk yang menganggur berjumlah 525 orang. Hal ini berarti persentase bekerja terhadap angkatan kerja di kabupaten Mahakam ulu sebesar 96,5%. Angka 4688 orang yang merupakan bukan angkatan kerja masing masing terdiri dari 989 orang yang bersekolah, 3.008 orang yang mengurus rumah tangga, dan 691 orang kegiatan lainnya. Kita melihat pada status pekerjaan utama di kabupaten Mahakam ulu. Diketahui bahwa penduduk yang bekerja yang paling banyak merupakan status buruh/karyawan, dan status pekerjaan yang paling kecil adalah berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.

Tabel V. 120 Demografi di Kabupaten Mahakam Ulu

NO.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
1	Jumlah Penduduk	35.010	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	15.5	%
3	Kepadatan Penduduk	2.29	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)	114,34	
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	14.499	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	525	jiwa

Sumber: BPS, Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 adalah sebesar 1,76 Triliun. Menurut Lapangan usaha, Sektor yang paling besar PDRB nya adalah sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sektor kedua terbesar yaitu sebesar 116,224 miliar rupiah. Dibandingkan dengan 2019 yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49%, laju pertumbuhan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Diketahui bahwa mulai tahun 2016 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan. Dan di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Jika ditinjau dari struktur distribusi PDRB,

diketahui bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyumbangkan perannya pada PDRB, yaitu sebesar 76,94%. Hal ini tidak lah bagus dikarenakan Kabupaten Mahakam Ulu ulu masih sangat tergantung dengan hasil alamnya lebih dari setengahnya, bahkan hamper tiga perempat dari PDRB.

Tabel V. 121 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.280.466,30	1.343.079,20	1.356.196,20
B	Pertambangan dan Penggalian	129.040,10	132.421,10	116.224,50
C	Industri Pengolahan	10.227,60	10.667,50	10.662,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	418,20	458,50	513,80
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	600,80	636,70	677,70
F	Konstruksi	91.046,90	99.360,40	103.452,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	67.292,90	74.501,90	75.380,80
H	Transportasi dan Pergudangan	62.639,70	70.426,60	61.566,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.958,50	2.200,40	2.075,00
J	Informasi dan Komunikasi	4.117,00	4.681,10	5.253,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	988,20	1.082,80	1.167,10
L	Real Estat	3.090,30	3.313,40	3.401,80
M.N	Jasa Perusahaan	558,20	592,10	576,30
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17.924,70	18.576,00	19.730,60
P	Jasa Pendidikan	2.449,60	2.615,80	2.815,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.606,20	1.721,10	2.102,50
R.S.T. U	Jasa lainnya	833,30	907,70	894,70
TOTAL		1.675.258,50	1.767.242,30	1.762.691,60

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 122 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76,43%	76,00%	76,94%
B	Pertambangan dan Penggalian	7,70%	7,49%	6,59%
C	Industri Pengolahan	0,61%	0,60%	0,60%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02%	0,03%	0,03%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,04%	0,04%	0,04%
F	Konstruksi	5,43%	5,62%	5,87%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,02%	4,22%	4,28%
H	Transportasi dan Pergudangan	3,74%	3,99%	3,49%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12%	0,12%	0,12%
J	Informasi dan Komunikasi	0,25%	0,26%	0,30%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,06%	0,06%	0,07%
L	Real Estat	0,18%	0,19%	0,19%
M.N	Jasa Perusahaan	0,03%	0,03%	0,03%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07%	1,05%	1,12%
P	Jasa Pendidikan	0,15%	0,15%	0,16%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,10%	0,10%	0,12%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,05%	0,05%	0,05%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal. Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi. Berikut ini adalah rencana

pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 123 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kabupaten Mahakam Ulu

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab. Kutai Barat) – Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai	241,00
	Ruas Jalan Long Pahangai – Tiong Ohang – Bts. Kalbar	169,00
	Ruas jalan Tiong Ohang – Long Apari – Lasantuyan (perbatasan Malaysia)	97,45
	Ruas Jalan Long Pahangai – Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara)	78,00

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 124 Prasarana Listrik di Kabupaten

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Energi Biomassa
Pengembangan Listrik Perdesaan
Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 125 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kabupaten Mahakam Ulu

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Long Bagun	Embung	Air Baku	Rencana
Medang	Bendungan	PLTA	Rencana
Nyaan	Bendungan	PLTA	Rencana
Long Apari	Intake	Air Baku	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 126 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kabupaten Paser

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Ujoh Bilang
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Pembangunan Baru
Pelabuhan Dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai Dan Danau	
Pelabuhan	Batu Dinding (Ujoh Bilang)
Hirarki Peran Dan Fungsi	Antar Kab/Kota
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	
Nama Stasiun	Ujoh Bilang
Transportasi Udara	
Nama Bandar Udara	Datah Dawai
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Ke Bandaraan Nasional)	Pengumpan
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Tetap
Lokasi Bandar Udara	Long Pahangai
Nama Bandar Udara	Long Apari
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Ke Bandaraan Nasional)	
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Pengumpan
Lokasi Bandar Udara	Long Apari
Nama Bandar Udara	Long Bagun
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Ke Bandaraan Nasional)	
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Pengumpan
Lokasi Bandar Udara	Long Bagun

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.7.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Pertanian. Kabupaten Mahakam Ulu termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Long Apari dan sekitarnya serta KPPN Long Bagun dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel V. 127 Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Pertanian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Long Bagun–Melak dan sekitarnya	KPPN Long Apari dan sekitarnya
		KPPN Long Bagun dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Industri Pertanian

Tabel V. 128 Kawasan Industri Pertanian

Jenis Kegiatan	Pertanian skala besar
Potensi	Penyediaan ternak babi sebanyak 2.319 ekor (2020)
	Penyediaan ayam buras sebanyak 63.407 ekor (2020)
	Penyediaan ayam pedaging sebanyak 75.085 ekor (2020)
	Produksi di komoditas kelapa sawit sebanyak 1.270.10 kuintal (2020)
Peluang Usaha	Pengembangan produksi pertanian
	Pengembangan produksi peternakan
	Pengembangan produksi perkebunan
	Pengembangan industri pengolahan pertanian

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. KPPN Long Apari dan sekitarnya

Tabel V. 129 KPPN Long Apari dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata alam
Lokasi	Rumah Adat Dayak Kayan Rumah Adat Dayak Kenyah Bentang Alam Long Apari Bentang Alam Long Pahangai
Potensi	Rumah Adat Dayak Kayan Rumah Adat Dayak Kenyah Bentang Alam Long Apari Bentang Alam Long Pahangai
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. KPPN Long Bagun dan sekitarnya

Tabel V. 130 KPPN Long Bagun dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	1. Desa Tradisional Rukun Damai 2. Bentang Alam Long Bagun 3. Desa Tradisional Long Bangun Ilir
Potensi	Desa Tradisional Rukun Damai Bentang Alam Long Bagun Desa Tradisional Long Bangun Ilir
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.7.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kabupaten Mahakam Ulu

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 131 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

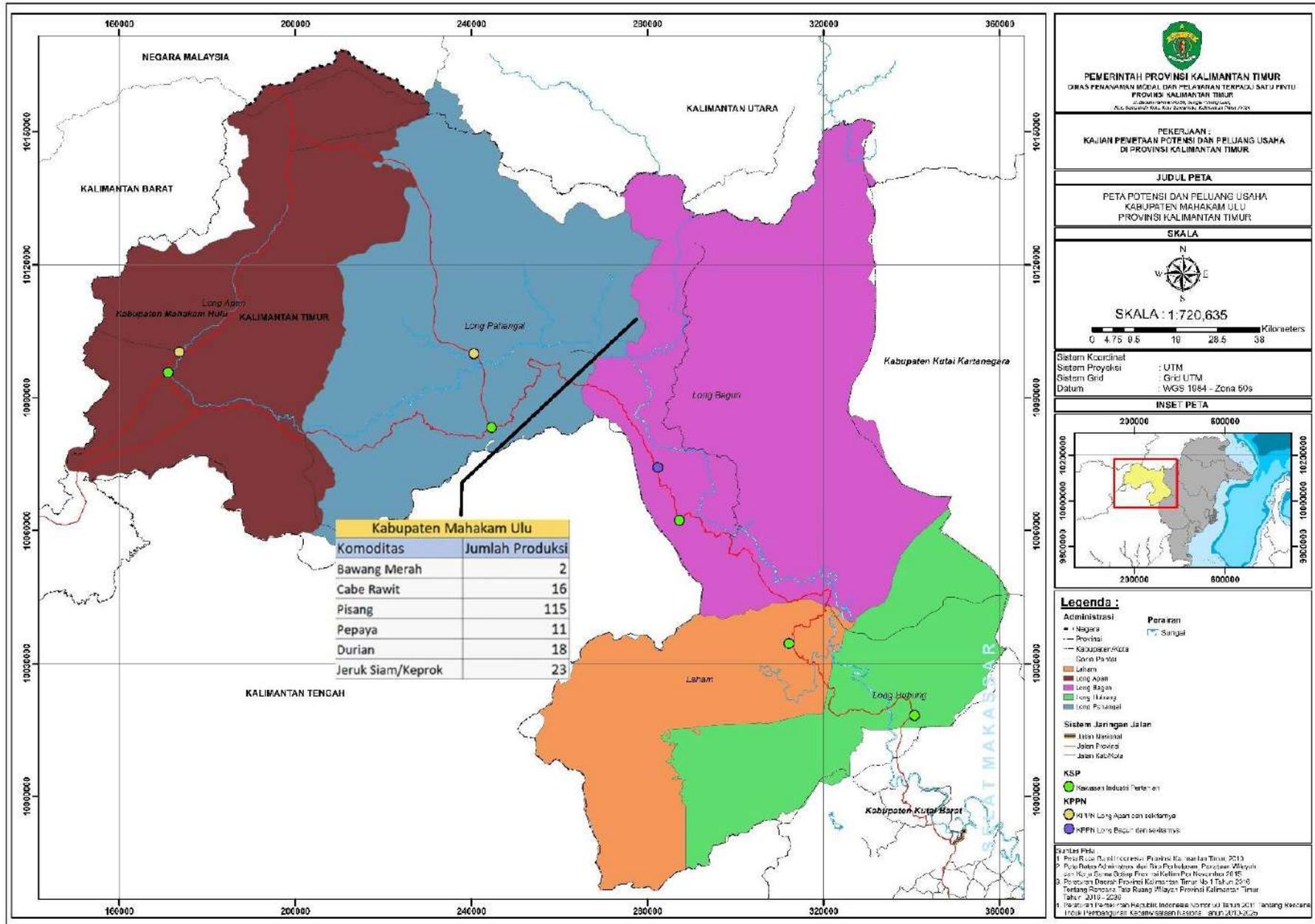
Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 132 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		

1	Kawasan Industri Pertanian	6	6	3	15	2
2	KPPN Long Apari dan sekitarnya	6	3	6	15	2
3	KPPN Long Bagun dan sekitarnya	9	6	6	21	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021



5.8 Kota Balikpapan

5.8.1 Gambaran Umum Kota Balikpapan

1. Wilayah Administrasi

Kota Balikpapan secara geografis adalah berbatasan langsung dengan Selat Makassar yakni tepatnya berada pada 116.5°-117° Bujur Timur dan 1.0°-1.5° Lintang Selatan. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan laut ini maka Kota Balikpapan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan. Batas wilayah Kota Balikpapan meliputi:

Batas Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara

Batas Timur : Selat Makassar

Batas Barat : Kabupaten Penajam Paser Utara

Batas Selatan : Selat Makassar

Tabel V. 133 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Balikpapan Selatan	375,9
2	Balikpapan Kota	107,4
3	Balikpapan Timur	1.306,9
4	Balikpapan Utara	1.328,7
5	Balikpapan Tengah	107,7
6	Balikpapan Barat	1.806,4
TOTAL		5033

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai > 100 meter di atas permukaan laut. Namun dari ketinggian tersebut, terbesar berada pada ketinggian 20-100 mdpl seluas 20.090.57 ha atau 51.66 % dari luas wilayah total Kota Balikpapan. ketinggian 10-20 mdpl seluas 17.260 ha (34.17%) dari luas wilayah sedangkan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dan pantai. Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar dari

21.7°C sampai 34.7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis. Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91%.

Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam menurut bulan. Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah yang tercatat pada stasiun meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 64.4 mm dan sebesar 338.0 mm.

Tabel V. 134 Kondisi Fisik Kota Balikpapan

NO.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
1	Curah hujan	64.4 - 338.0	mm
2	Jumlah hari hujan	10-27	hari
3	Suhu	21,7-34,7	C
4	Kelembaban	82-91	%
3	Tinggi tempat dari permukaan laut	0-100	mdpl
4	Jenis tanah	aluvial. marin. fluvio marin. vulkan. tektonik/ struktural	

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka 2021

3. Penggunaan Lahan

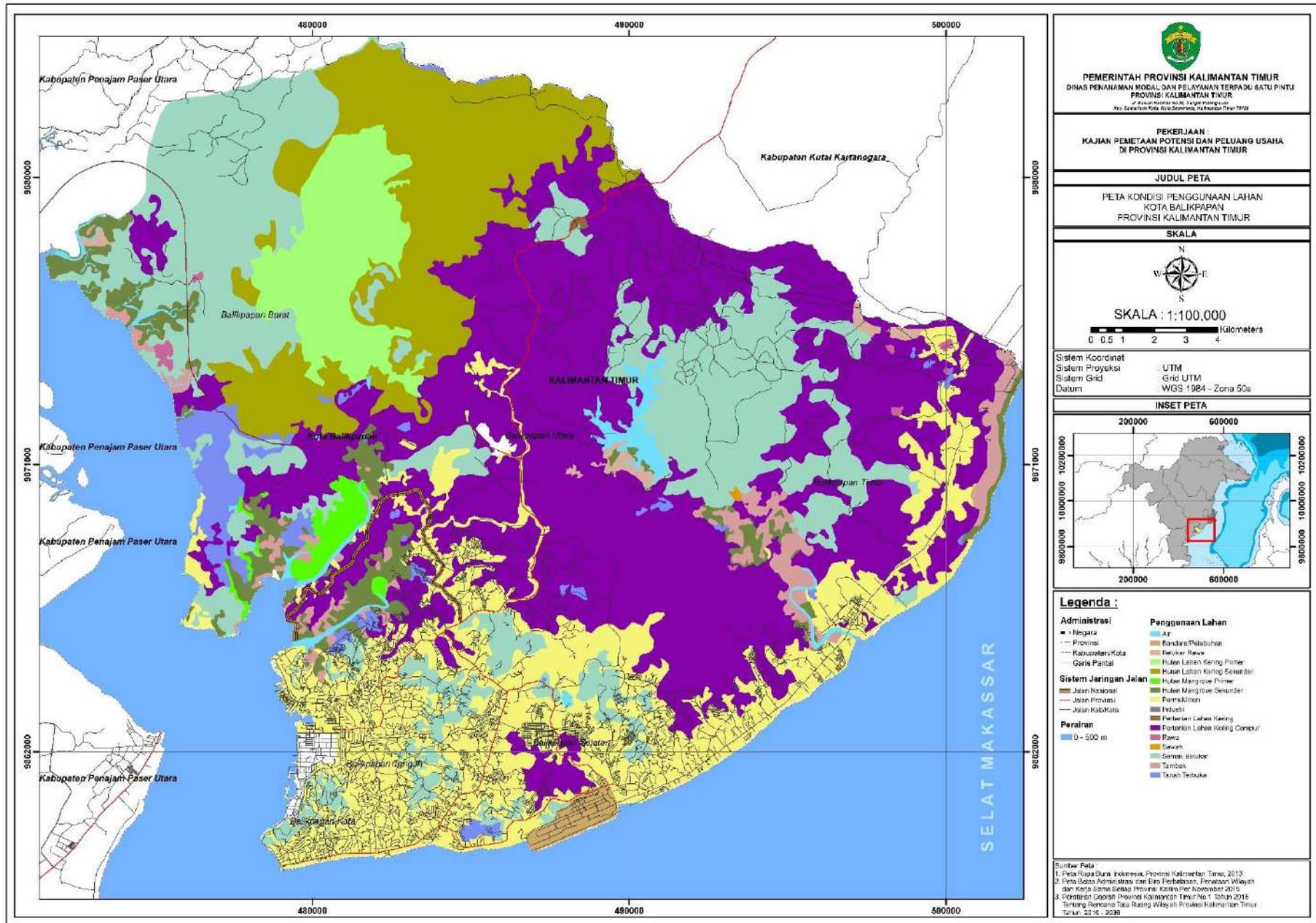
Penggunaan lahan di Kota Balikpapan terluas dimanfaatkan oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebanyak 34,04% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Semak Belukar yaitu seluas 20,50% dari total luas lahan wilayah Kota Balikpapan Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kota Balikpapan:

Tabel V. 135 Penggunaan Lahan di Kota Balikpapan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	2.332,17	4,83%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.356,11	11,10%
3	Semak Belukar	9.887,91	20,50%
4	Tanah Terbuka	1.012,15	2,10%
5	Hutan Mangrove Primer	403,01	0,84%
6	Hutan Mangrove Sekunder	1.533,85	3,18%
7	Tambak	1.056,97	2,19%
8	Air	593,36	1,23%
9	Pertanian Lahan Kering Campur	16.419,72	34,04%
10	Belukar Rawa	199,97	0,41%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
11	Permukiman	8.842,24	18,33%
12	Bandara/Pelabuhan	270,63	0,56%
13	Pertanian Lahan Kering	18,38	0,04%
14	Industri	223,51	0,46%
15	Sawah	10,68	0,02%
16	Rawa	79,93	0,17%
	TOTAL	48.240,58	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Kota Balikpapan merupakan kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 688.318 jiwa. Dari jumlah tersebut, 352.802 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 335.516 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebanyak 169.150 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 145.007 jiwa dan Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 106.121 jiwa. Selanjutnya Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur dengan masing-masing 94.123 jiwa dan 90.243 jiwa. Dan yang terakhir adalah Kecamatan Balikpapan Kota dengan jumlah penduduk sebesar 82.843 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2020 mencapai 1.368 jiwa per km². Kecamatan Balikpapan Tengah menjadi Kecamatan yang terpadat dihuni dengan kepadatan penduduk 9.931 jiwa per km². Cukup timpang apabila dibandingkan dengan Kecamatan Balikpapan Barat yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Kota Balikpapan, dengan kepadatan penduduk hanya 521 jiwa per km².

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2020 yang belum ditempatkan ada sebanyak 3.999 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, 2.217 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 1.872 orang yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini turun dari tahun 2019, dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tercatat sebanyak 5.141 orang, yang terdiri dari 3.049 orang laki-laki dan 2.092 orang perempuan. Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SLTA, sebanyak 49,96 %, atau sebanyak 1.998 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 28,58%, atau sebanyak 1.143 orang. Kedua kelompok ini mendominasi jumlah pencari kerja terdaftar dengan proporsi 78,54 %, atau lebih dari tiga perempat dari jumlah pencari kerja terdaftar.

Tabel V. 136 Demografi di Kota Balikpapan

NO.	URAIAN	BESARAN	SATUAN
1	Jumlah Penduduk	688.318	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	2,06	%
3	Kepadatan Penduduk	1.368	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	352.802	jiwa
	Ø Perempuan	335.516	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	287.258	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	27.911	jiwa

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 103.600,155 miliar, secara nominal menurun dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 47,28 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan tahun 2020. Di urutan kedua adalah kategori Konstruksi, yang memberikan kontribusi 16,53 persen. Kemudian di urutan ketiga adalah kategori Transportasi dan Pergudangan dengan 9,85 persen.

Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 83.097,89 miliar, menurun pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2019-2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,69 persen. Bila dirinci per kategori, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang 2019-2020 dengan capaian 24,45 persen.

Tabel V. 137 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	745.962,50	780.094,60	750.317,40
B	Pertambangan dan Penggalian	35.529,90	35.934,20	35.326,70
C	Industri Pengolahan	45.450.065,10	47.482.416,80	47.129.972,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69.496,30	76.027,20	81.902,20
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	55.725,60	58.994,40	62.796,20
F	Konstruksi	9.510.131,50	10.281.792,10	10.685.554,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.561.791,70	6.946.740,60	6.907.783,50
H	Transportasi dan Pergudangan	6.277.042,00	6.308.754,20	551.428,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.240.280,30	1.343.770,80	1.201.373,90
J	Informasi dan Komunikasi	2.780.444,90	2.974.061,30	3.199.783,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.517.790,50	2.612.608,20	2.670.178,50
L	Real Estat	1.382.661,70	1.410.669,50	1.398.220,20
M.N	Jasa Perusahaan	207.531,00	214.752,30	206.620,00
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	940.397,40	1.000.206,70	940.656,80
P	Jasa Pendidikan	1.087.881,80	1.137.638,80	1.195.361,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.277,60	431.695,60	537.249,80
R.S.T.U	Jasa lainnya	535.098,90	582.565,50	543.364,80
	TOTAL	79.807.108,70	83.678.722,80	78.097.890,50

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 138 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,93%	0,93%	0,96%
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04%	0,04%	0,05%
C	Industri Pengolahan	56,95%	56,74%	60,35%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	0,09%	0,10%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,07%	0,07%	0,08%
F	Konstruksi	11,92%	12,29%	13,68%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22%	8,30%	8,85%
H	Transportasi dan Pergudangan	7,87%	7,54%	0,71%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55%	1,61%	1,54%
J	Informasi dan Komunikasi	3,48%	3,55%	4,10%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15%	3,12%	3,42%
L	Real Estat	1,73%	1,69%	1,79%
M.N	Jasa Perusahaan	0,26%	0,26%	0,26%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18%	1,20%	1,20%
P	Jasa Pendidikan	1,36%	1,36%	1,53%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,51%	0,52%	0,69%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,67%	0,70%	0,70%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kota Balikpapan memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi. Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 139 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Balikpapan

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Soekarno - Hatta (Balikpapan)	25,09
	Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan)	8,07
	Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan)	4,06
	Ruas Jalan MT. Haryono / Ring Road (Balikpapan)	2,75

Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Bts. Balikpapan – Sp. Samboja	36,42
	Ruas Jalan Mulawarman (Balikpapan)	15,75
	Ruas KM 5.5 Balikpapan – Kariangau	18,00
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Kota Balikpapan – Kota Samarinda	99,02

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 140 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Balikpapan

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam-Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	Kutai Barat (Muara Teweh) – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Barat – Kab. Paser – Kab. Penajam Paser Utara – Balikpapan
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 141 Prasarana Listrik di Kota Balikpapan

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Kota Balikpapan
Status Prasarana Listrik	PLTD 2 x 25 MW
Arahan Pengembangan	Pemindahan Daya
Pusat Pembangkit Listrik	PLTMG Kaltimra. Kota Balikpapan
Status Prasarana Listrik	1 x 30 MW
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Karang Joang / Giri Rejo

	GI Karang Joang / Giri Rejo Ext LB
	GI Kariangau
	GI Industri / Gn. Malang
	GI New Industri
	GI Batakan / Manggarsari
	GI New Balikpapan
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	PLTU Teluk Balikpapan – Incomer 2 phi (Karjo-Kuaro)
	Karang Joang – Kuaro
	GI New Balikpapan – Incomer 2 phi (Manggarsari-Industri)
	GI New Balikpapan – GI Kariangau

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 142 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Balikpapan

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Telaga Sari	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Manggar	Bendungan	Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Teritip	Bendungan	Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Wain	Bendungan	Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bendali I	Bendali	Pengendali Banjir	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Bendali Ii	Bendali	Pengendali Banjir	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Bendali Iii	Bendali	Pengendali Banjir	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Bendali Iv	Bendali	Pengendali Banjir	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bendali V	Bendali	Pengendali Banjir	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bendali Vi	Bendali	Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bendali Vii	Bendali	Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Bendali Viii	Bendali	Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Aji Raden	Embung	Air Baku	Rencana

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Embung Wain	Embung	Konservasi. Air Baku	Eksisting
Embung Wain li	Embung	Konservasi	Eksisting
Embung Wain lli	Embung	Konservasi	Eksisting
Kariangau	Sumur Dalam	Air Baku	Eksisting
Kampung Baru	Sumur Dalam	Air Baku	Rencana
Teritip	Sumur Dalam	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Lambakan	Pipa Transmisi & Pipa Distribusi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Samboja	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Raden	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 143 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Balikpapan

Terminal Penumpang Nasional (Tipe A)	
Nama Terminal Penumpang	Batu Ampar
Hirarki Peran & Fungsi	AKAP
Pelabuhan dan Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan	
Nama Pelabuhan	Kariangau
Hirarki Peran & Fungsi	Antar Kab/Kota. Lintas Provinsi
Stasiun Kereta Api	
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Balikpapan
Transportasi Laut	
Pelabuhan	
Nama Pelabuhan	Semayang
Hirarki Peran dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Utama (PU)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran & Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Semayang
Nama Pelabuhan	Kampung Baru
Hirarki Peran dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran & Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Kampung Baru

Transportasi Udara	
Nama Bandar Udara	Sultan Aji M Sulaiman
Hirarki Peran dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul Skala Primer
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Tetap
Lokasi Bandar Udara	Sepinggan

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.8.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kota Balikpapan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kota Balikpapan berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan Kota Baru Karang Joang, Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru, Kawasan Reklamasi Pantai, Kawasan Kota Baru Teritip. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung.

Kota Balikpapan termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kota Balikpapan:

Tabel V. 144 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Kota Baru Karang Joang;
		Kawasan Industri Kariangau;
		Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032		Kawasan Reklamasi Pantai; Kawasan Kota Baru Teritip.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya	KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Kota Baru Karang Joang

Tabel V. 145 Kawasan Kota Baru Karang Joang

Jenis Kegiatan	Kawasan pusat kota kedua sebagai pusat pertumbuhan dengan kegiatan perdagangan, jasa dan pemerintahan di Bagian Utara Balikpapan
Lokasi	Kecamatan Balikpapan Utara
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi Jarak dari Bandara Sultan Aji M Sulaiman: ± 15 km Jarak Dari Pelabuhan Balikpapan: ± 20 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Kawasan menjadi pendukung bagi pengembangan Kawasan Industri Kariangau Menjadi penyeimbang bagi kepadatan perkotaan di Balikpapan bagian selatan
Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa Pengembangan kawasan permukiman baru

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Industri Kariangau (KSK) dan Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung

Tabel V. 146 Kawasan Industri Kariangau (KSK) dan Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung

Jenis Kegiatan	Industri
Lokasi	Kecamatan Balikpapan Barat
Kondisi Akses	32 km dari pusat Kota Balikpapan 14 km dari jalan tol Balikpapan-Samarinda 0,5 km dari Pelabuhan KKT Balikpapan

	33 km dari Pelabuhan Semayang 32 km dari Bandara SAMS
Kondisi Air Bersih	Air bersih di salurkan dari waduk Sungai wain ke reservior KIK
Kondisi Sumber Energi	Pasokan listrik dengan kapasitas 350 Megawatt dari PT. PLN dan PT Kariangau Power
Potensi	<p>Luas KPIK 3.565 Ha, dengan luas kawasan terbangun 2.721 Ha. Didalamnya terdapat lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 300 Ha dan lahan milik Pemerintah Kota Balikpapan 180,4 Ha.</p> <p>Memiliki pelabuhan internasional peti kemas yang di peruntungkan sebagai pelayanan peti kemas, general cargo, curah dan pengapalan batu bara</p> <p>Kawasan industri di KIK akan menempati lahan seluas 640,30 hektare yang terbagi dalam kawasan industri kecil, menengah dan besar</p> <p>Kawasan penunjang fasilitas umum dan sosial (perumahan, pendidikan, tempat ibadah, dll)</p> <p>Lahan Milik Pemkot Balikpapan (133,8 Ha) Status Tanah: Sertifikat Hak Pakai telah terbit 28 Juli 2020 seluas 103,9 Ha</p> <p>Lahan Milik Pemprov Kaltim (300 Ha) (Hasil pengembalian batas oleh BPN) Sudah dikerjasamakan Semen Gresik 2 Ha, PT.KKT 72,5 Ha, PLN: 58,2 Ha, Tersisa 167,3 Ha</p>
Peluang Usaha	<p>Jenis industri yang di rekomendasikan beroperasi di kawasan diutamakan untuk industri hilir seperti industry pengolahan karet, pengolahan sawit, pengolahan kakao dan kopi, pengolahan pakan ikan dan ayam, briket batu bara, pengolahan minyak dan gas, serta industri bahan makanan dan minuman.</p> <p>Pelabuhan Peti Kemas PT. KKT 72,5 Ha (baru dimanfaatkan 22,5 Ha)</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru

Tabel V. 147 Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru

Jenis Kegiatan	Perikanan
Lokasi	Kecamatan Balikpapan Timur
Kondisi Akses	<p>Dilewati jalan provinsi</p> <p>Dekat dengan akses jalan tol Balikpapan-Samarinda</p> <p>Jarak dari Bandara Sultan Aji M Sulaiman: ± 15 km</p> <p>Jarak Dari Pelabuhan Balikpapan: ± 20 km</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN

Potensi	<p>Pengembangan kawasan minapolitan dengan luas kurang lebih 190.56 ha di muara Sungai Manggar Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru</p> <p>Kawasan minapolitan memiliki konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah</p> <p>Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Manggar</p> <p>Dekat dengan pintu masuk Tol Manggar</p>
Peluang Usaha	<p>Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan tangkap</p> <p>Pengembangan Kawasan peruntukan perikanan budidaya</p> <p>Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. Kawasan Reklamasi Pantai

Tabel V. 148 Kawasan Reklamasi Pantai

Jenis Kegiatan	Kawasan perdagangan dan jasa
Lokasi	Kecamatan Balikpapan Selatan
Kondisi Akses	<p>Dilewati jalan kota</p> <p>Jarak dari Bandara Sultan Aji M Sulaiman</p> <p>Jarak dari Pelabuhan Kariangau</p> <p>Jarak Dari Pelabuhan Semayang</p> <p>Jarak Dari Pelabuhan Kampung Baru</p>
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	<p>akses publik ke pantai dan upaya penataan estetika kota</p> <p>Orientasi bangunan dan view kawasan di tepian ke arah laut</p>
Peluang Usaha	<p>Mengembangkan pulau – pulau buatan bertemakan water theme park dan delta sungai kelandasan besar sebagai Club House</p> <p>Penyediaan ruang dan kegiatan yang di manfaatkan potensi dan daya tarik lautan, seperti sea food center, dermaga kapal wisata</p> <p>Sebagai downtown, dimana kawasan ini dilengkapi dengan fungsi baru. yang mendukung seperti, shoothing mall, hotel, retail modern, apartement dan civic center.</p>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. Kawasan Kota Baru Teritip

Tabel V. 149 Kawasan Kota Baru Teritip

Jenis Kegiatan	Pusat perdagangan, jasa dan pendidikan
Lokasi	Kecamatan Balikpapan Timur
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari Bandara Sultan Aji M Sulaiman: ± 13 km Jarak Dari Pelabuhan Balikpapan: ± 23 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Pendukung bagi pengembangan Kawasan Wisata Manggar
Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa Pengembangan Pendidikan Pengembangan akomodasi dan transportasi untuk Kawasan Wisata Manggar

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

f. KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya

Tabel V. 150 KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Budaya (Perkotaan, Peninggalan Sejarah, Belanja)
Lokasi	1. Penangkaran Buaya 2. Kampung Atas Air 3. Jembatan Kayu Ulin 4. Pantai Manggar 5. Hutan Lindung S. Wain 6. Museum Peninggalan Belanda 7. Pantai Melawai
Kondisi Akses	Jarak dari Bandara Sultan Aji M Sulaiman: ± 13 km Jarak Dari Pelabuhan Balikpapan: ± 23 km
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	1. Penangkaran Buaya 2. Kampung Atas Air 3. Jembatan Kayu Ulin 4. Pantai Manggar 5. Hutan Lindung S. Wain 6. Museum Peninggalan Belanda 7. Pantai Melawai
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata

	Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata
	Penyediaan transportasi menuju obyek wisata
	Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.8.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Balikpapan

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah:

Tabel V. 151 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesiediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

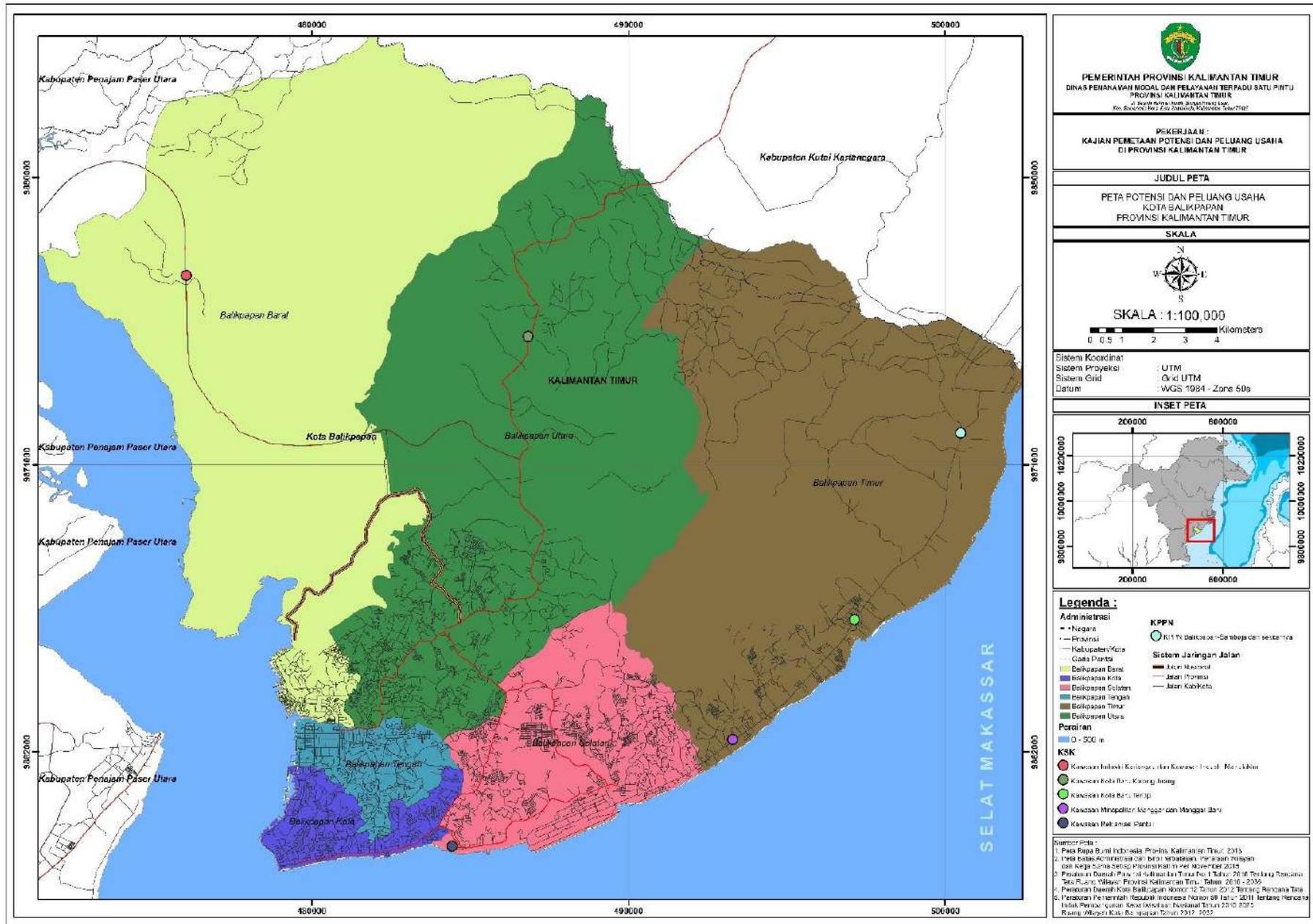
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 152 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Balikpapan

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Kota Baru Karang Joang	6	9	6	21	2
2	Kawasan Industri Kariangau (KSK) dan Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung	6	9	6	21	2
3	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru	6	3	3	12	4
4	Kawasan Reklamasi Pantai	6	3	3	12	4
5	Kawasan Kota Baru Teritip	6	6	6	18	3
6	KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya	9	6	9	24	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021



5.9 Kota Samarinda

5.9.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

1. Wilayah Administrasi

Secara astronomis. Kota Samarinda terletak antara 0021'81"-10/09'16" Lintang Selatan dan 116015'16"- 117024'16" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya. wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Luas wilayah terbesar di Kota Samarinda berada di kecamatan Samarinda Utara dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Samarinda Kota. Kota Samarinda memiliki jarak terjauh dengan Kabupaten Kutai Barat (Melak) dan memiliki jarak terdekat dengan Kutai Kartanegara (Tenggarong). Batas wilayah Kota Samarinda meliputi:

Batas Utara	: Kecamatan Muara Badak. Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Timur	: Kecamatan Anggana dan Kecamatan Sanga-Sanga. Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Barat	: Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Selatan	: Kecamatan Loa Janan. Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel V. 153 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Palaran	Rawa Makmur	221,29
2	Samarinda Ilir	Sidomulyo	17,18
3	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	11,12
4	Sambutan	Sambutan	100,95
5	Samarinda Seberang	Baqa	12,49
6	Loa Jalan Ilir	Simpang Tiga	26,13
7	Sungai Kunjang	Loa Bakung	43,04
8	Samarinda Ulu	Air Putih	22,12
9	Samarinda Utara	Lempake	229,52
10	Sungai Pinang	Sungai Pinang Dalam	34,16
TOTAL			718

Sumber: BPS, Kota Samarinda Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39 persen berada pada kemiringan kurang dari 2% dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15 persen. Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah. sebagian besar luas wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai lebih dari 90 cm yakni seluas 39.833 Ha atau 55,4%.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida. maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda. menurut Soil Taxonomy USDA tergolong ke dalam jenis tanah: Ultisol. Entisol, Histosol, Inceptiols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah Podsolik, Alluvial dan Organosol, Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57.57 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian. biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Samarinda terluas dimanfaatkan oleh Semak Belukar sebanyak 37,24% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Permukiman yaitu seluas 18.10% dari total luas lahan wilayah Kota Samarinda Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kota Samarinda:

Tabel V. 154 Penggunaan Lahan di Kota Samarinda

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	299,51	0,42%
2	Tanah Terbuka	123,22	0,17%
3	Hutan Tanaman	2.951,71	4,12%
4	Pertambangan	8.515,54	11,89%
5	Semak Belukar	26.673,79	37,24%

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
6	Permukiman	12.964,04	18,10%
7	Rawa	531,62	0,74%
8	Pertanian Lahan Kering Campur	13.779,79	19,24%
9	Pertanian Lahan Kering	1.120,53	1,56%
10	Sawah	1.957,32	2,73%
11	Transmigrasi	38,92	0,05%
12	Air	2.553,37	3,56%
13	Perkebunan	106,17	0,15%
14	Hutan Rawa Sekunder	4,95	0,01%
15	Bandara/Pelabuhan	12,51	0,02%
	TOTAL	71.632,99	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kota Samarinda berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 827.994 jiwa yang terdiri atas 422.624 penduduk laki-laki dan 405.370 penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104.26. Kepadatan penduduk di Kota Samarinda tahun 2019 mencapai 1.153 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 5.869 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Palaran sebesar 286 jiwa/km².

Tabel V. 155 Demografi di Kota Samarinda

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	827.994	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	1,12	%
3	Kepadatan Penduduk	1.153,19	jiwa/km ²
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	422.624	jiwa
	Ø Perempuan	405.370	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	393.670	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	35.423	jiwa

Sumber: BPS, Kota Samarinda Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Nilai PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Hasil perhitungan sangat sementara angka nominal PDRB Kota Samarinda Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020 sebesar Rp.45.000.473,50. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kota Samarinda terdapat Sektor Konstruksi yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB. Jika dilihat dari kontribusinya, sektor Konstruksi menyumbang 19.38% dari total PDRB pada PDRB ADHK 2020.

Tabel V. 156 Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	740.169,90	749.207,00	754.301,20
B	Pertambangan dan Penggalian	5.998.194,60	6.340.003,10	6.087.624,70
C	Industri Pengolahan	3.408.879,80	3.544.302,30	3.408.133,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	73.041,10	79.434,20	90.990,00
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	75.997,90	78.866,40	84.341,20
F	Konstruksi	8.709.671,10	9.121.170,50	8.720.975,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.259.647,10	7.649.078,80	7.789.886,60
H	Transportasi dan Pergudangan	2.890.442,00	3.063.192,40	3.035.663,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.678.023,20	1.806.577,20	1.735.749,10
J	Informasi dan Komunikasi	1.931.779,40	2.055.308,50	2.205.512,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.122.297,70	3.201.051,30	3.288.610,40
L	Real Estat	1.150.984,20	1.186.903,40	1.208.847,50
M.N	Jasa Perusahaan	345.492,70	352.352,90	339.104,50
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.575.989,80	2.688.220,20	2.574.519,10
P	Jasa Pendidikan	1.655.100,50	1.735.683,10	1.764.219,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	586.811,80	624.382,80	738.022,30
R.S.T.U	Jasa lainnya	1.121.045,90	1.210.004,30	1.173.972,00
	TOTAL	43.323.568,70	45.485.738,40	45.000.473,50

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 157 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,71%	1,65%	1,68%
B	Pertambangan dan Penggalian	13,85%	13,94%	13,53%
C	Industri Pengolahan	7,87%	7,79%	7,57%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17%	0,17%	0,20%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,18%	0,17%	0,19%
F	Konstruksi	20,10%	20,05%	19,38%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,76%	16,82%	17,31%

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67%	6,73%	6,75%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,87%	3,97%	3,86%
J	Informasi dan Komunikasi	4,46%	4,52%	4,90%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,21%	7,04%	7,31%
L	Real Estat	2,66%	2,61%	2,69%
M.N	Jasa Perusahaan	0,80%	0,77%	0,75%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95%	5,91%	5,72%
P	Jasa Pendidikan	3,82%	3,82%	3,92%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35%	1,37%	1,64%
R.S.T.U	Jasa lainnya	2,59%	2,66%	2,61%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kota Samarinda memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi, Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 158 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Samarinda

Hirarki Jalan	Ruas jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Loa Janan – Bts. Kota Samarinda	9,42
	Ruas Jalan Sp. 3 Lempake (Samarinda) – Sp. 3 Sambera	21,90
	Ruas Jalan Jembatan Mahakam (Samarinda)	0,60
	Ruas Jalan Slamet Riyadi (Samarinda)	2,61
	Ruas Jalan Antasari (Samarinda)	1,73
	Ruas Jalan Juanda (Samarinda)	2,31
	Ruas Jalan Syahrani – M. Nur (Samarinda)	6,48

Hirarki Jalan	Ruas jalan	Panjang (Km)
	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Lempake) (Samarinda)	2,48
	Ruas Jalan Batu Cermin (Samarinda) – L2 (Tenggarong Seberang)	12,00
Jalan Kolektor Primer 1	Ruas Jalan Untung Suropati (Samarinda)	1,44
	Ruas Jalan RE. Martadinata	0,98
	Ruas Jalan Gajah Mada (Samarinda)	1,41
	Ruas Jalan Yos Sudarso (Jl. ke Pelabuhan Samarinda) (Samarinda)	1,10
	Jl. KH. Mas Mansyur (Samarinda)	6,20
	Ruas Jalan Outer Ring Road – Sei Siring	55,37
Jalan Kolektor Primer 2	Ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga (Kab. Kutai Kartanegara)	20,83
	Ruas Jalan Bung Tomo (Samarinda)	2,20
	Ruas Jalan Suryanata (Samarinda)	9,20
	Ruas Jalan Harun Nafsi	4,80
	Ruas Jalan H.M. Rifaddin	7,35
	Ruas Jalan Moeis Hasan (Samarinda)	2,10
	Ruas Jalan Teuku Umar (Samarinda)	3,95
	Ruas Jalan MT. Haryono (Samarinda)	2,50
	Ruas Jalan R. Soeprpto (Samarinda)	1,10
	Ruas Jalan A. Yani (Samarinda)	2,00
	Ruas Jalan DI. Panjaitan (Sp. Wahab Sahrani – Ahmad Yani) (Samarinda)	1,00
	Ruas Jalan Sp. Batu Besaung – Berambai (Samarinda)	14,60
Jalan Kolektor Primer 3	Ruas Jalan Samarinda – Anggana	21,32
	Ruas Jalan Jakarta (Samarinda)	3,00
	Ruas Jalan Rapak Indah (Samarinda)	2,00
	Ruas Jalan APT. Pranoto (Samarinda)	1,95
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Kota Balikpapan – Kota Samarinda	99,02
	Ruas Jalan Kota Samarinda – Kota Bontang	94,00
	Ruas Jalan Samarinda – Kota Tenggarong	22,50

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 159 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Samarinda

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sanga-sanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara
	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Muara Kedang – Damai – Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Muara Teweh)
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api yang Menghubungkan	Tenggarong – Samarinda – Sanga-Sanga – Samboja

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Wilayah Sumber Daya Alam atau Kawasan Produksi dengan Pelabuhan	
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Antar Kota yang Menghubungkan dengan Potensi Batubara	Bts. Prov. Kalimantan Tengah (Muara Teweh) – Kab. Kutai Kartanegara – Samarinda
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 160 Prasarana Listrik di Kota Samarinda

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Kota Samarinda
Status Prasarana Listrik	Power House PLTU 1 x 60 MW
Arahan Pengembangan	Percepatan Pembangunan
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Bukuan / Palaran
	GI Tengawang
	GI Sambutan
	GI Sambutan Ext LB
	GI New Samarinda
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	Sambera – Incomer Sambutan – Bontang
	Bontang – Sambutan
	New Samarinda – Embalut
	PLTG Senipah – Bukuan / Palaran
	New Samarinda – Sambera
	PLTU Kaltim 3 - Incomer 2 phi (Senipah - Palaran/ Bukuan)
	Samarinda- Sebulu- Muara Bengkal

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 161 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Samarinda

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Sambutan	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Gunung Lingai	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Eksisting
Rapak Dalam	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Loa Hui	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Eksisting
Bengkuring	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Damanhuri	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Rapak Mahang	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Sempaja	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Pampang	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Loa Bakung	Kolam Retensi	Pengendali Banjir	Rencana
Benanga	Bendungan	Pengendali Banjir. Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Karang Asem Besar	Bendungan	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Sempaja	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Pampang	Bendali	Pengendali Banjir	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
HM Ardans	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Eksisting
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Muang	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	
Bayur	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tani Aman	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Lubang Putang	Bendali	Pengendali Banjir. Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Rencana
Tagur Tinggi	Embung	Air Baku	Rencana
	Cek DAM	Konservasi	Eksisting
Loa Buah	Embung	Pengendali Banjir	Rencana
Loa Janan	Intake	Air Baku	Rencana
Teluk Lerong	Intake	Air Baku	Eksisting
Kalhol I & II	Intake	Air Baku	Eksisting
Makroman	Intake	Air Baku	Rencana
Loa Buah	Intake	Air Baku	Rencana
Gajah Mada II	Intake	Air Baku	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016-2036

Tabel V. 162 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Samarinda

Terminal Penumpang Nasional (Tipe A)	
Nama Terminal Penumpang	Samarinda Seberang
Hirarki Peran & Fungsi	AKAP
Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Lempake
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016- 2036	Tetap
Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau	
Pelabuhan	Sei Kunjang
Hirarki Peran & Fungsi	Antar Kab/Kota
Arah Pengembangan RTRWP 2016- 2036	Tetap
Stasiun Kereta Api	
Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Samarinda
Transportasi Laut	
Nama Pelabuhan	Samarinda
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (Pp)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	Tetap
LOKASI DERMAGA	Relokasi Ke Palaran
Transportasi Udara	
Nama Bandar Udara	Samarinda Baru
Hirarki Peran Dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandar Udaraan Nasional)	Pengumpul Skala Sekunder
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Pengumpul Skala Sekunder
Lokasi Bandar Udara	Sei Siring

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.9.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Samarinda

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kota Samarinda ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kota Samarinda berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan industri di Kecamatan Palaran, Kawasan perdagangan Citra

Niaga di Kecamatan Samarinda Kota, dan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa.

Kota Samarinda termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kota Balikpapan:

Tabel V. 163 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Samarinda

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan industri di Kecamatan Palaran.
		Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota;
		Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya	KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan industri di Kecamatan Palaran

Tabel V. 164 Kawasan Industri di Kecamatan Palaran

Jenis Kegiatan	Industri
Lokasi	Kecamatan Palaran
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi dan jalan kota Jarak dari bandara samarinda baru (APT Pranoto) Jarak dari pelabuhan samarinda
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Sentra industri kayu lapis Ketersediaan Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran Pintu masuk Samarinda–Balikpapan Dekat dengan Jembatan Mahkota II
Peluang Usaha	Pengembangan industry manufaktur dan agroindustry

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota

Tabel V. 165 Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota

Jenis Kegiatan	Kawasan pariwisata buatan
Lokasi	Kecamatan Samarinda Kota
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari bandara samarinda baru (APT Pranoto) Jarak dari pelabuhan samarinda
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Wisata cinderamata
Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan

Tabel V. 166 Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan

Jenis Kegiatan	Perdagangan dan jasa
Lokasi	Kecamatan Sambutan
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari bandara samarinda baru (APT Pranoto) Jarak dari pelabuhan samarinda
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Pengembangan sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem Jaringan Angkutan Sungai. Danau dan Penyebrangan.

Peluang Usaha	Pengembangan perdagangan dan jasa
----------------------	-----------------------------------

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

d. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa

Tabel V. 167 Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa

Jenis Kegiatan	Industri perdagangan jasa
Kondisi Akses	Dilewati jalan provinsi dan jalan kota Jarak dari bandara samarinda baru (APT Pranoto) Jarak dari pelabuhan samarinda
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis. Kelurahan Sidodadi. Kelurahan Air Hitam. Kelurahan Air Putih. Kelurahan Karang Asam Iilir. dan Kelurahan Baqa.
Peluang Usaha	Pengembangan industry perdagangan dan jasa

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

e. KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya

Tabel V. 168 KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Budaya (Perkotaan. Peninggalan Sejarah. Belanja)
Lokasi	1. Kebun Raya Samarinda 2. Desa Pampang 3. Lembah Hijau 4. Kerajinan Tenun Samarinda 5. Masjid Raya Darussalam 6. Penangkaran Buaya
Kondisi Akses	Jarak dari bandara samarinda baru (APT Pranoto) Jarak dari pelabuhan samarinda
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	1. Kebun Raya Samarinda 2. Desa Pampang 3. Lembah Hijau 4. Kerajinan Tenun Samarinda

	5. Masjid Raya Darussalam
	6. Penangkaran Buaya
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.9.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Samarinda

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 169 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3

Aspek	Variabel	Skor
Daya Dukung	Daya Dukung Lingkungan	3
Kawasan	Daya Tampung Kawasan	3

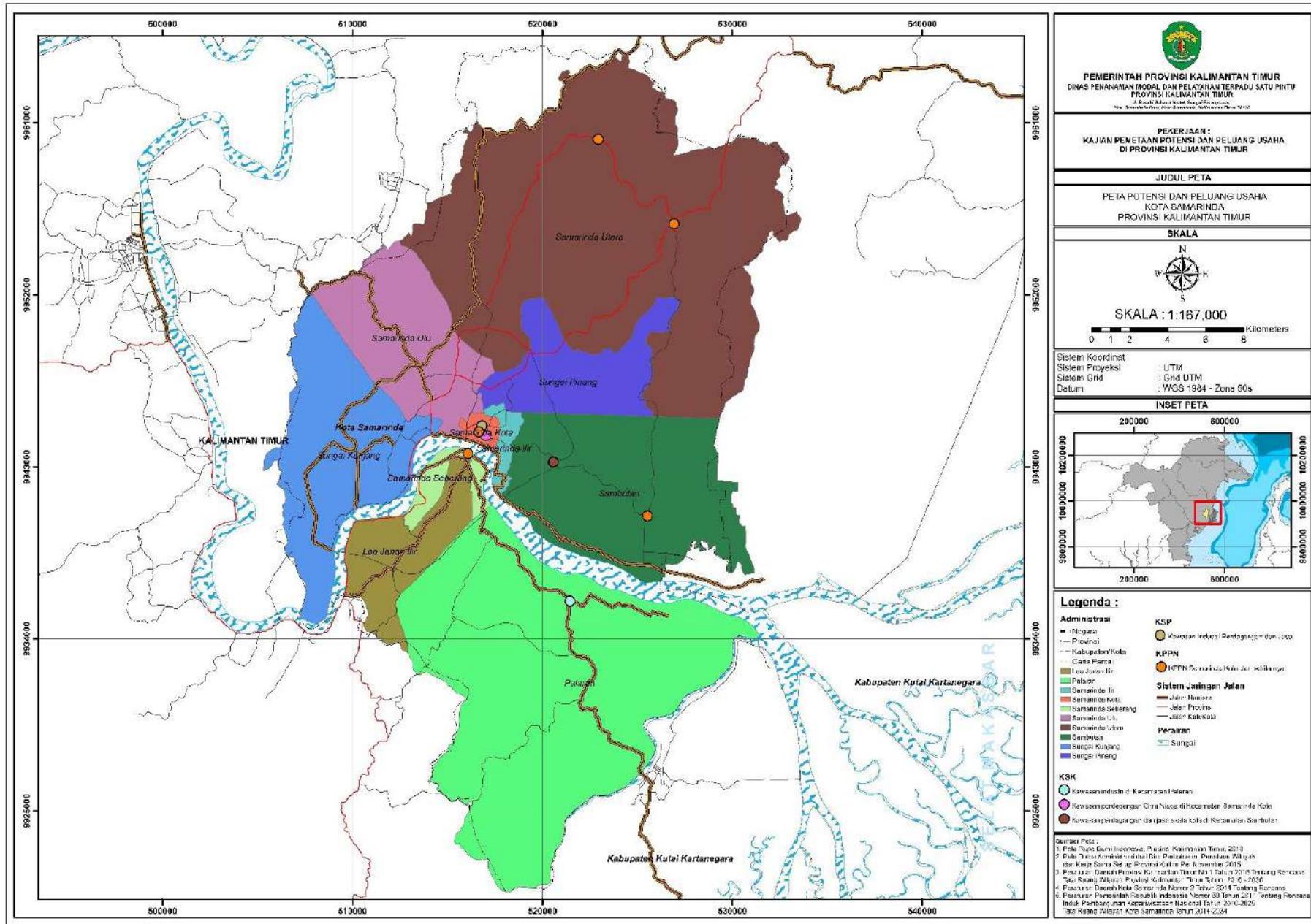
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 170 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Samarinda

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan industri di Kecamatan Palaran	6	9	3	18	3
2	Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota	9	6	3	18	3
3	Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan	9	6	3	18	3
4	Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa	6	9	6	21	2
5	KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya	12	9	6	27	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021



5.10 Kota Bontang

5.10.1 Gambaran Umum Kota Bontang

1. Wilayah Administrasi

Kota Bontang merupakan Kota Administratif bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Kota Bontang memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 161,88 km². Terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan. yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah yang terluas (110,91 km²), disusul Kecamatan Bontang Utara (33,03 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (17,94 km²). Batas wilayah administrasi Kota Bontang meliputi:

Batas Utara	: Kabupaten Kutai Timur
Batas Timur	: Selat Makassar
Batas Barat	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Batas Selatan	: Kabupaten Kutai Timur

Tabel V. 171 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bontang

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kecamatan Bontang Selatan	Tanjung Laut	110,91
2	Kecamatan Bontang Utara	Bontang Baru	33,03
3	Kecamatan Bontang Barat	Kanaan	17,94
	TOTAL		161,88

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka 2021

2. Kondisi Fisik Wilayah

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0-106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai

yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat.

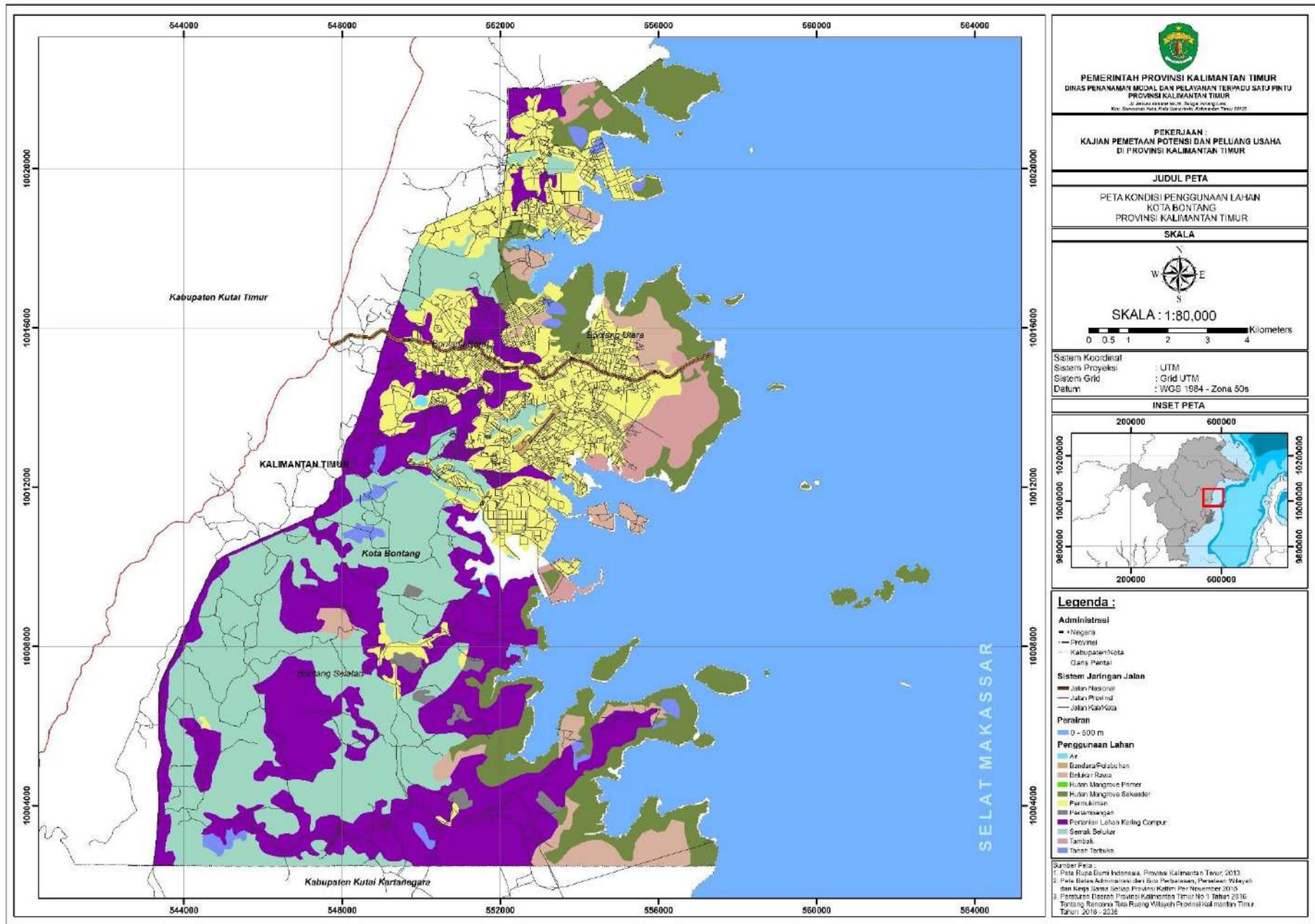
3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Bontang terluas dimanfaatkan oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebanyak 28,69% dari total luas lahan wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua ialah Semak Belukar yaitu seluas 27.69% dari total luas lahan wilayah Kota Bontang. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Kota Bontang:

Tabel V. 172 Penggunaan Lahan di Kota Bontang

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Semak Belukar	4.384,33	27,69%
2	Tanah Terbuka	221,91	1,40%
3	Pertanian Lahan Kering Campur	4.543,23	28,69%
4	Pertambangan	122,70	0,77%
5	Hutan Mangrove Sekunder	2.208,71	13,95%
6	Permukiman	2.978,95	18,81%
7	Belukar Rawa	778,46	4,92%
8	Bandara/Pelabuhan	25,63	0,16%
9	Air	38,27	0,24%
10	Tambak	534,27	3,37%
TOTAL		15.836.46	100,00%

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036



4. Penduduk dan Tenaga Kerja

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional yakni PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2020 adalah 178.917 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 67.142 jiwa (37,53%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 82.212 jiwa (45,90%) dan di Kecamatan Bontang Barat 29.654 jiwa (16,57%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2020 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 605 jiwa/km²; 2.486 jiwa/km², dan 1.653 jiwa/km². Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (92.936 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (85.981 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 108,09 yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2020 terdapat 108-109 orang penduduk laki-laki. Indikator kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penduduk yang datang sebanyak 4.200 orang, pindah 5.948 orang, kelahiran 2.641 orang, dan kematian 788 orang.

Ketenagakerjaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena menyangkut dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi dalam hal ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan penghargaan akan kemampuan seseorang. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah pantas jika setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK) dapat dibedakan menjadi Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja meliputi penduduk yang bekerja

dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 di Kota Bontang adalah 91.932 orang atau sekitar 69,24% dari jumlah penduduk usia kerja. Angka ini juga menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang berarti sekitar 69,24% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi (bekerja). Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (unemployed). Jadi pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja dan yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) tetapi masih berhasrat untuk bekerja. Angka pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Angka tersebut sering disebut juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2020 TPT Kota Bontang sebesar 9,46%.

Tabel V. 173 Demografi di Kota Samarinda

No.	Uraian	Besaran	Satuan
1	Jumlah Penduduk	16.188	jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	2,15	%
3	Kepadatan Penduduk	1.105,26	jiwa/km2
4	Sex Rasio (L/P) (jiwa)		
	Ø Laki-laki	92.936	jiwa
	Ø Perempuan	85.981	jiwa
5	Angkatan Kerja		
	Ø Bekerja	83.232	jiwa
	Ø Pengangguran terbuka	8.700	jiwa

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka 2021

5. Perekonomian Daerah

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 56,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 58,33 triliun rupiah. Sedangkan, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan, dari 40,42 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 39,31 triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya nilai PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi beberapa lapangan usaha, seperti pertambangan

penggalian dan industri pengolahan, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Lapangan Usaha Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang, dimana peranan lapangan usaha ini membentuk PDRB Kota Bontang sebesar 79,60 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan negatif sebesar -3,78 dimana Kota Bontang mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus yaitu sekitar -2,76 persen. Sehingga 16 lapangan usaha lainnya secara total belum mampu berbagi peran positif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bontang di tahun 2020, dimana selain Lapangan Industri pengolahan, Lapangan Usaha Pertambangan Penggalian juga tumbuh negatif. Meskipun secara total pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 bernilai negatif, laju pertumbuhan perekonomian tanpa migas di Kota Bontang masih tumbuh positif sebesar 2,38 persen.

Tabel V. 174 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	401.233,39	427.325,65	441.823,22
B	Pertambangan dan Penggalian	377.360,02	308.738,09	275.498,01
C	Industri Pengolahan	34.091.491,67	32.950.301,22	31.704.914,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.585,89	15.741,54	17.680,53
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	9.803,45	10.210,95	10.400,61
F	Konstruksi	2.170.819,16	2.295.667,36	2.296.681,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.139.026,98	1.189.121,30	1.233.489,84
H	Transportasi dan Pergudangan	594.769,61	609.958,12	626.340,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189.270,75	205.776,59	202.885,86
J	Informasi dan Komunikasi	379.648,67	391.085,80	412.998,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	305.648,67	306.960,63	317.553,07
L	Real Estat	196.109,06	204.572,70	212.919,34

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
M.N	Jasa Perusahaan	198.727,32	205.510,24	201.352,69
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469.529,11	485.417,22	469.871,93
P	Jasa Pendidikan	390.298,43	409.699,55	431.320,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257.944,43	269.499,73	317.073,32
R.S.T.U	Jasa lainnya	130.097,08	137.808,43	136.404,47
	TOTAL	41.316.363,69	40.423.395,12	39.309.208,48

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel V. 175 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen). 2018-2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,97%	1,06%	1,12%
B	Pertambangan dan Penggalian	0,91%	0,76%	0,70%
C	Industri Pengolahan	82,51%	81,51%	80,66%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,04%	0,04%
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,02%	0,03%	0,03%
F	Konstruksi	5,25%	5,68%	5,84%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,76%	2,94%	3,14%
H	Transportasi dan Pergudangan	1,44%	1,51%	1,59%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46%	0,51%	0,52%
J	Informasi dan Komunikasi	0,92%	0,97%	1,05%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74%	0,76%	0,81%
L	Real Estat	0,47%	0,51%	0,54%
M.N	Jasa Perusahaan	0,48%	0,51%	0,51%
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14%	1,20%	1,20%
P	Jasa Pendidikan	0,94%	1,01%	1,10%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62%	0,67%	0,81%
R.S.T.U	Jasa lainnya	0,31%	0,34%	0,35%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

6. Infrastruktur Wilayah

Kota Bontang memiliki beberapa rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian khususnya penanaman modal, Infrastruktur wilayah sebagai penunjang peningkatan penanaman modal meliputi jaringan jalan dan transportasi, listrik dan air bersih hingga irigasi. Berikut ini adalah rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kota Bontang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036:

Tabel V. 176 Jaringan Jalan berdasarkan Hirarki di Kota Bontang

Hirarki Jalan	Ruas Jalan	Panjang (Km)
Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Santan – Bontang	47,92
	Ruas Jalan Bontang – Sangatta	54,84
Jalan Kolektor Primer 1	Ruas Jalan S. Parman (Bontang)	2,33
	Ruas Jalan Bigjen Katamso (Jl. Bayangkara) (Bontang)	2,29
	Ruas Jalan MT. Haryono (Bontang)	1,18
	Ruas Jalan Letjen. Suprpto (Jl. Diponegoro) (Bontang)	0,43
	Ruas Jalan D.I. Panjaitan (Ahmad Dahlan) (Bontang)	0,93
	Ruas Jalan Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso) (Bontang)	1,87
Jalan Bebas Hambatan	Ruas Jalan Kota Samarinda – Kota Bontang	94
	Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta	43,3

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 177 Jaringan Jalur Kereta Api di Kota Bontang

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Lintas Utama Antar Kota dengan Prioritas Tinggi	Bts. Prov. Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan – Sangasanga – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan – Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Bts. Prov. Kalimantan Utara

Arahan Fungsi Jaringan Jalur Kereta Api	Ruas Jalur Kereta
Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perintis	Kab. Paser. Kab. Kutai Barat. Kab. Kutai Kartanegara. Kab. Kutai Timur. Kab. Berau. Kab. Penajam Paser Utara. Kab. Mahakam Ulu. Kota Balikpapan. Kota Samarinda. Kota Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 178 Prasarana Listrik di Kota Bontang

Pembangkit Listrik	
Pusat Pembangkit Listrik	Kota Bontang
Status Prasarana Listrik	PLTD 4 x 24 MW
Arahan Pengembangan	Perluasan Daya
Pusat Pembangkit Listrik	PLTU Kaltim (FTP2) Bontang
Status Prasarana Listrik	2 x 100 MW
Gardu Induk (GI)	
Nama GI	GI Bontang
	GI Bontang Ext LB
Jaringan Listrik	
Lokasi SUTT	Sambera – Incomer Sambutan – Bontang
	Bontang – Sambutan
	PLTU Kaltim 2 (FTP 2)- Bontang

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 179 Rincian Bangunan Penyedia Air Baku, Bangunan Pengendali Banjir, Bangunan Konservasi Dan PLTA/PLTMH di Kota Bontang

Nama	Keterangan	Peruntukan	Keterangan
Kanaan	Kolam Retensi	Air Baku, Pengendali Banjir	Rencana
Nyerakat	Bendungan	Air Baku	Rencana
Nyerakat	Intake	Air Baku	Rencana
Bontang	Sumur Dalam	Air Baku	Eksisting
Jaringan Pipa Marangkayu	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana
Jaringan Pipa Sukarahmat	Pipa Transmisi	Air Baku	Rencana

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Tabel V. 180 Sarana Transportasi Kereta Api, Air dan Udara di Kota Bontang

Terminal Penumpang Provinsi (Tipe B)	
Nama Terminal Penumpang	Bontang
Hirarki Peran & Fungsi	AKDP
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	Tetap
Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	
Nama Stasiun	Bontang
Transportasi Laut	
Pelabuhan	Tanjung Laut
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Tanjung Laut
Pelabuhan	Lhok Tuan
Hirarki Peran Dan Fungsi (Tatanan Kepelabuhanan Nasional)	Pengumpul (PP)
Arah Pengembangan RTRWP 2016-2036	
Hirarki Peran Dan Fungsi	Tetap
Lokasi Dermaga	Lhok Tuan
Transportasi Udara	
Nama Bandar Udara	Bontang
Hirarki Peran Dan Fungsi Eksisting (Tatanan Kebandarudaraan Nasional)	Pengumpul Skala Tersier

Sumber: Perda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

5.10.2 Profil Potensi dan Peluang Usaha di Kota Bontang

Kawasan yang berpotensi dan berpeluang untuk peningkatan investasi di Kota Bontang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 yaitu dalam ketentuan penetapan Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSK). Kawasan Strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi Kota Bontang berada di beberapa kawasan, antara lain Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 ditetapkan juga Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi (KSP) yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat.

Kota Bontang termasuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, kawasan tersebut meliputi KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya. Berikut ini adalah profil potensi dan peluang usaha di Kota Balikpapan:

Tabel V. 181 Potensi dan Peluang Usaha di Kota Bontang

Dasar Hukum	Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Destinasi Pariwisata Nasional Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya	KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021

a. Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari

Tabel V. 182 Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari

Jenis Kegiatan	Industri
Lokasi	Kecamatan Bontang Selatan
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari Bandara Bontang Jarak dari Pelabuhan Tanjung Laut Jarak Dari Pelabuhan Lhok Tuan
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN

Potensi	pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Bontang Lestari kegiatan/aktivitas pertambangan. industri oleokimia dan turunannya dan kegiatan/aktivitas industri. Kawasan Peruntukan Industri Area Reklamasi peruntukan industri Bontang Lestari seluas ± 45.05 Ha
Peluang Usaha	Pengembangan industri

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

b. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat

Tabel V. 183 Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat

Jenis Kegiatan	Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari Bandara Bontang Jarak dari Pelabuhan Tanjung Laut Jarak Dari Pelabuhan Lhok Tuan
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

c. KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya

Tabel V. 184 KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya

Jenis Kegiatan	Wisata Alam (Ekologi Hutan dan Karst)
Lokasi	1. Perumahan diatas Air 2. Pulau Beras Basah 3. Padang Golf
Kondisi Akses	Dilewati jalan kota Jarak dari Bandara Bontang Jarak dari Pelabuhan Tanjung Laut Jarak Dari Pelabuhan Lhok Tuan
Kondisi Air Bersih	Terpenuhi dengan jaringan air bersih PDAM
Kondisi Sumber Energi	Terpenuhi dengan jaringan listrik PLN
Potensi	1. Perumahan diatas Air 2. Pulau Beras Basah 3. Padang Golf
Peluang Usaha	Penyediaan akomodasi di sekitar obyek wisata Penyediaan jasa wisata di sekitar obyek wisata Penyediaan transportasi menuju obyek wisata Penyediaan atraksi di obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

5.10.3 Kelayakan Potensi dan Prioritas Pengembangan Kota Bontang

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitan itulah, salah satu instrumen utama yang harus disiapkan daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dalam mendorong penanaman modal adalah pembuatan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal. Beberapa aspek yang terkait dengan kelayakan potensi investasi dari dimensi hukum antara lain adalah: (a) Variabel Kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Pembangunan; (2) Kebijakan Tata Ruang; dan (3) Kebijakan Sektoral. (b) Variabel Kesiediaan Infrastruktur, terdiri atas (1) Sarana dan Prasarana Aksesibilitas; (2) Sarana dan Prasarana Sumber Energi; dan (3) Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih; dan (c) Variabel Daya Dukung Kawasan; terdiri atas (1) Daya Dukung Lingkungan; dan (2) Daya Tampung Kawasan. Analisa ini dilakukan dengan memberikan nilai skoring bagi variabel, yang antara lain adalah :

Tabel V. 185 Skoring Variabel Penentuan Prioritas Pengembangan Investasi

Aspek	Variabel	Skor
Kebijakan	Kebijakan Pembangunan	3
	Kebijakan Tata Ruang	3
	Kebijakan Sektoral	3
Kesiediaan Infrastruktur	Sarana dan Prasarana Aksesibilitas	3
	Sarana dan Prasarana Sumber Energi	3
	Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	3
Daya Dukung Kawasan	Daya Dukung Lingkungan	3
	Daya Tampung Kawasan	3

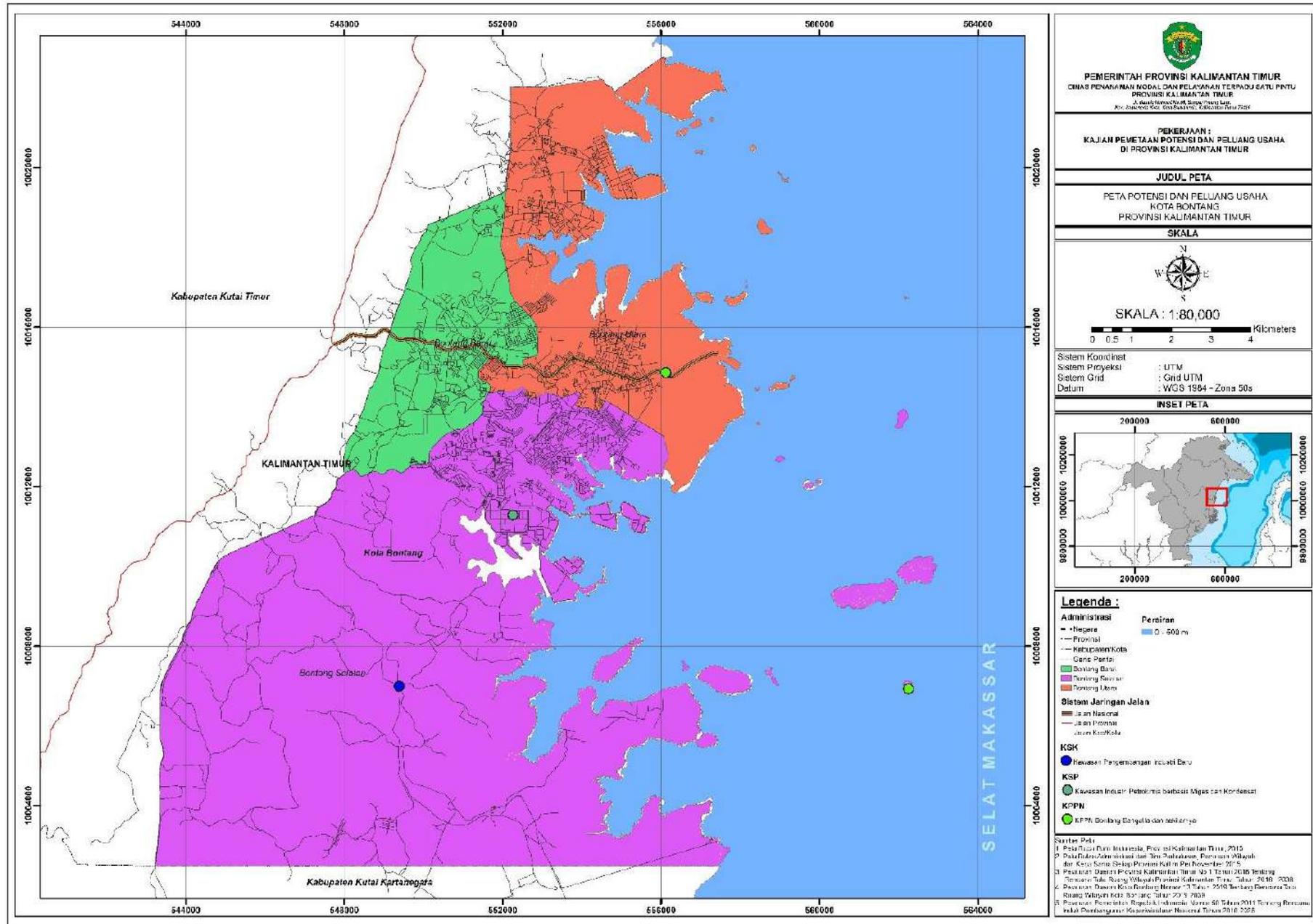
Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Adapun metode pengukuran tingkat Prioritas dengan memberi indeks pada setiap jumlah Bobot pada masing masing kawasan yang memiliki prioritas dan Peluang Investasi dan mengurutkannya berdasarkan kawasan yang memiliki nilai indeks tertinggi. Berikut ini adalah hasil dari penilaian untuk masing-masing kawasan strategis pengembangan ekonomi:

Tabel V. 186 Penilaian Kelayakan dan Prioritas Pengembangan Usaha di Kota Bontang

No	Potensi dan Peluang Investasi	Bobot Variabel			Indeks	Rangking Prioritas
		Kesesuaian Kebijakan	Kesediaan Infrastruktur	Daya Dukung Kawasan		
1	Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari	6	6	3	15	2
2	Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat	6	6	3	15	2
3	KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya	12	9	6	27	1

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021





BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Analisa konten yang dilakukan analisis ini guna menunjukkan tingkat kekuatan dan keselarasan antara kebijakan penanaman modal dengan kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Menyesuaikan dengan arah kebijakan terkait penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur kebijakan tersebut meliputi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025. Bidang Agroindustri memiliki keterikatan yang kuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur beberapa program pengembangan dalam bidang ini masih dinilai lemah. Bidang Infrastruktur dan energi untuk beberapa

programnya memiliki keterikatan kuat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memiliki keterikatan yang cukup kuat. Bidang Pariwisata memiliki keterikatan yang lemah dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan keterikatan yang kuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung Lahan, kemampuan lahan Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi kemampuan pengembangan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Persentase wilayah yang termasuk dalam kemampuan pengembangan sangat rendah sebanyak 41%, persentase wilayah yang termasuk dalam kemampuan pengembangan rendah sebanyak 6%, persentase wilayah yang termasuk dalam kemampuan pengembangan sedang sebanyak 24%, persentase wilayah yang termasuk dalam kemampuan pengembangan tinggi sebanyak 16% serta persentase wilayah yang termasuk dalam kemampuan pengembangan sebanyak 13%.
3. Dalam analisis potensi unggulan yang telah dilakukan menggunakan data PDB Nasional dan PDRB Kalimantan Timur tahun 2016-2020, didapatkan sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor unggulan dengan kontribusinya pada tahun 2020 sebanyak 41,43% dalam struktur PDRB Kalimantan Timur.
4. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Paser berada di Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (KSK), Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot dan Kawasan Industri Pertanian (KSP). Berdasarkan penilaian kelayakan dan prioritas, Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (KSK) menjadi prioritas pengembangan 1. Kawasan cepat tumbuh Kuaro - Tanah Grogot dan Kawasan Industri Pertanian (KSP) menjadi prioritas pengembangan kedua.
5. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Kutai Barat berada di Kawasan Perkotaan Sendawar, Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan, Kawasan Industri Pertanian (KSP), KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya dan KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya. Berdasarkan penilaian kelayakan dan prioritas, KPPN Melak-

Kersik Luway dan sekitarnya dan KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya termasuk dalam prioritas pengembangan pertama. Kawasan Industri Pertanian (KSP) prioritas pengembangan kedua, Kawasan Perkotaan Sendawar termasuk dalam urutan prioritas ketiga dan Kampung Lakan Bilem dan Lingau Kecamatan Nyuatan termasuk dalam urutan keempat.

6. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara, KPPN dan KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya, KPPN Tenggarong dan sekitarnya dan KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya menjadi urutan prioritas pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat serta Kawasan Industri Pertanian menjadi urutan prioritas kedua dan Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN Kecamatan Kenohan. Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang menjadi prioritas ketiga.
7. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Kutai Timur, KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya serta KPPN Tenggarong dan sekitarnya termasuk urutan pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Oleochemical Maloy dan Kawasan Agropolitan Regional termasuk urutan kedua, Kawasan Ekonomi Berbasis Industry dan Kawasan Food Estate menjadi urutan ketiga pengembangan pananaman modal.
8. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Berau, KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya dan KPPN dan KSPN Derawan-Sangalaku dan sekitarnya menjadi urutan pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Mangkajang menjadi urutan kedua dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labanan dan Kawasan Pusat Industri Perkebunan dan Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara menjadi urutan ketiga.
9. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung menjadi urutan pertama pengembangan penanaman modal. Kawasan Industri Pertanian menjadi urutan kedua. Kawasan pariwisata bahari

berada di Kecamatan Penajam, Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam-Balikpapan dan Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam. Central Terminal) menjadi urutan ketiga. Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api- Api Kecamatan Waru, Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu dan Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru memiliki urutan keempat.

10. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kabupaten Mahakam Ulu, KPPN Long Bagun dan sekitarnya termasuk dalam urutan pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Pertanian dan KPPN Long Apari dan sekitarnya termasuk dalam urutan kedua.
11. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kota Balikpapan, KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya menjadi urutan pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Kariangau (KSK) dan Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung serta Kawasan Kota Baru Karang Joang menjadi urutan kedua. Kawasan Kota Baru Teritip menjadi urutan ketiga. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru dan Kawasan Reklamasi Pantai termasuk dalam urutan keempat.
12. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kota Samarinda, KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya menjadi urutan pertama pengembangan prioritas penanaman modal. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa menjadi urutan kedua. Kawasan industri di Kecamatan Palaran, Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota dan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan menjadi urutan ketiga.
13. Kawasan potensial untuk pengembangan usaha di Kota Bontang, KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya menjadi urutan pertama. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat dan Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari menjadi urutan kedua pengembangan prioritas penanaman modal.

6.2 Rekomendasi

1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perijinan semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah dengan penyediaan informasi potensi unggulan daerah menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang berorientasi produk ketahanan pangan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
5. Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN bertujuan untuk mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.